

Belanja Rumah Tangga Jepang Kembali Turun Meski Upah Meningkat

Jumat, 9 Oktober 2026 07:40 WIB

Yoshiaki Nohar

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124068/belanja-rumah-tangga-jepang-kembali-turun-meski-upah-meningkat/2>

Bloomberg, Belanja rumah tangga Jepang turun selama sembilan bulan berturut-turut meskipun upah terus meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen masih berhati-hati di tengah inflasi yang terus-menerus menekan daya beli.

Pengeluaran rumah tangga yang disesuaikan dengan inflasi turun 3,1% pada Agustus dibandingkan setahun sebelumnya, menurut laporan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada Jumat.

Para ekonom sebelumnya memperkirakan penurunan sebesar 3,6%. Secara bulanan, pengeluaran naik 0,1% setelah disesuaikan secara musiman.

Data terbaru yang menunjukkan rapuhnya belanja konsumen memperumit komunikasi Bank of Japan (BOJ) ketika otoritas tetap berada di jalur untuk kembali menaikkan suku bunga.

Upah riil, yang disesuaikan dengan inflasi, telah meningkat setiap bulan sepanjang tahun ini, tetapi kenaikan tersebut belum mendorong permintaan konsumen yang lebih kuat.

Semakin banyak penduduk Jepang yang memasuki usia pensiun di tengah populasi yang menua, sehingga tidak menikmati manfaat dari kenaikan upah.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda berulang kali memperingatkan risiko inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Banyak pelaku pasar pun bertaruh bahwa BOJ akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebelum akhir tahun ini.

Data yang dirilis pada Jumat menunjukkan bahwa inflasi dan permintaan domestik tidak bergerak naik secara bersamaan. Kenaikan suku bunga yang terlalu cepat atau terlalu tinggi dapat membebani perekonomian.

Penurunan tajam pengeluaran untuk pendidikan dan hiburan, makanan, pemeliharaan rumah, serta sewa dan utilitas menyeret indeks belanja secara keseluruhan.

Satu-satunya komponen indeks yang tidak mengalami penurunan adalah transportasi dan komunikasi, seiring meningkatnya pengeluaran terkait kendaraan.

Penurunan pengeluaran untuk pendidikan dan merosotnya belanja utilitas sebesar 5,2% secara tahunan mencerminkan dampak subsidi serta berbagai kebijakan lain yang diluncurkan Perdana Menteri Sanae Takaichi sebagai bagian dari upayanya menekan biaya hidup.

Perdana menteri tersebut juga berencana memangkas pajak penjualan untuk makanan menjadi 1% dari tarif saat ini sebesar 8%, mulai April, guna lebih membantu rumah tangga menghadapi inflasi. Ia berjanji mengembalikan tarif pajak tersebut ke tingkat semula setelah dua tahun.

Klaim Pengangguran AS Turun ke Level Terendah, PHK Terkendali

Jumat, 9 Oktober 2026 05:40 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124061/klaim-pengangguran-as-turun-ke-level-terendah-phk-terkendali/2>

Bloomberg, Jumlah pengajuan tunjangan pengangguran di AS turun tipis pekan lalu ke level terendah sejak Juli. Data ini menunjukkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di pasar tenaga kerja masih terbatas.

Klaim awal turun 2.000 menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 3 Oktober, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis (8/10). Ini menandai pekan keempat berturut-turut jumlah pengajuan berada di bawah 200.000.

Klaim awal masih berada di dekat level terendah sejak 1960-an. Bersama dengan pertumbuhan lapangan kerja (payrolls) September yang lebih moderat, rendahnya jumlah pengajuan ini menggambarkan pasar tenaga kerja ketika perusahaan mempertahankan karyawan, tetapi tetap berhati-hati dalam menambah jumlah pegawai di tengah kenaikan biaya.

Rata-rata pergerakan empat pekan untuk pengajuan baru, ukuran yang membantu meredam fluktuasi, turun ke 198.000 pekan lalu, terendah sejak September 2022.

Sebelum disesuaikan dengan faktor musiman, klaim awal naik hampir 12.000 pekan lalu. Kenaikan itu terutama didorong oleh California, Illinois, dan New York.

Klaim lanjutan, indikator pendekatan untuk jumlah orang yang menerima tunjangan, naik ke 1,72 juta pada pekan sebelumnya.

Badan PBB Ini Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Melambat Tahun Ini

Jumat, 9 Oktober 2026 18:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/badan-pbb-ini-proyeksikan-pertumbuhan-ekonomi-dunia-melambat-tahun-ini>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pertumbuhan ekonomi global kemungkinan akan melambat menjadi 2,6% pada tahun 2026, turun dari 2,9% pada tahun lalu, karena guncangan energi akibat krisis di Timur Tengah memberikan tekanan pada ekonomi global. Proyeksi ini disampaikan Badan PBB untuk

Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada Jumat (9/10/2026). Perdagangan barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% (berdasarkan harga konstan) setelah perdagangan global mencapai rekor US\$ 35 triliun pada tahun 2025. "Namun peningkatan yang diproyeksikan ini didorong oleh harga energi yang lebih tinggi," ungkap UNCTAD dalam laporan perdagangan dan pembangunannya yang dikutip Reuters.

Menurut UNCTAD, perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) telah turun lebih dari 20% sejak tahun 2024. Sementara Asia Timur telah meningkatkan perdagangan dengan China maupun Amerika Utara.

"Pengendalian ekspor, penyaringan investasi, dan kondisi rantai pasok membuat sektor-sektor strategis lebih sulit diakses oleh pemain baru," tulis UNCTAD.

Asia diproyeksikan menyumbang 59% dari pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026, dengan India tumbuh sebesar 7,3%, China 4,5%, dan Indonesia 5,2%.

Meskipun produk terkait AI, seperti semikonduktor, menjadi pendorong utama perdagangan barang, pertumbuhan perdagangan yang terkait dengan AI tidak secara otomatis berarti adanya manfaat pembangunan yang luas, ujar UNCTAD.

Badan tersebut juga memperingatkan bahwa lonjakan AI membawa risiko stabilitas keuangan karena pasar menjadi lebih bergantung pada segelintir perusahaan saja. Badan tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan itu.

Pada bulan Juni, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global menjadi 2,5% akibat perang di Timur Tengah dan memperkirakan penurunan hingga 1,3% dalam skenario terburuknya.

Dana Moneter Internasional (IMF) sedikit lebih optimistis dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 3%, namun juga menyoroti perang Iran, fragmentasi perdagangan, dan koreksi terkait AI sebagai risiko.

Hampir 30 Tahun Usai Krisis 1997, Thailand Hadapi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 9 Oktober 2026 13:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/hampir-30-tahun-usai-krisis-1997-thailand-hadapi-tantangan-pertumbuhan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - Thailand menghadapi tantangan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi setelah hampir tiga dekade sejak krisis keuangan Asia 1997.

Pemerintah kini berupaya menarik investasi asing dan memperkuat sektor industri berteknologi tinggi untuk keluar dari periode pertumbuhan yang lesu.

Melansir Reuters Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan, lemahnya investasi menjadi salah satu faktor yang menahan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand saat ini hanya berkisar 22%–23%, turun dibandingkan periode setelah krisis keuangan.

“Setelah saya menjabat sebagai menteri keuangan, saya menempatkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berbasis investasi sebagai agenda utama,” ujar Ekniti dalam wawancaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang akan digelar di Bangkok pekan depan.

Pertemuan itu berlangsung di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari harga energi yang tinggi, utang publik yang membengkak, hingga risiko dari lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI).

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva sebelumnya memperingatkan bahwa berbagai risiko tersebut membayangi prospek ekonomi global.

Bagi Thailand, ruang kebijakan fiskal juga menjadi perhatian karena rasio utang pemerintah terhadap PDB mendekati batas resmi sebesar 70%.

Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, mencatat pertumbuhan rata-rata hanya 2,34% per tahun selama lima tahun terakhir. Kinerja ini tertinggal dari sejumlah negara di kawasan yang pulih lebih cepat setelah pandemi.

Untuk memperbaiki kinerja ekonomi, Ekniti bulan lalu memaparkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3% dalam tiga tahun.

Pemerintah berupaya menarik investasi asing ke sektor strategis, termasuk semikonduktor, pusat data, manufaktur maju, dan kendaraan listrik.

Pengembangan sektor-sektor tersebut juga membutuhkan pasokan energi besar. Karena itu, Thailand turut mendorong investasi energi terbarukan dan peningkatan infrastruktur jaringan listrik untuk mendukung kebutuhan industri.

Meski demikian, Bank Sentral Thailand memiliki pandangan lebih konservatif. Bank sentral memperkirakan tingkat pertumbuhan potensial ekonomi Thailand berada di kisaran 2,7%, yang diperkirakan membutuhkan setidaknya empat tahun untuk dicapai.

Perekonomian Thailand juga masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya utang rumah tangga, penurunan kedatangan wisatawan, serta belum tuntasnya kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai ekonomi Thailand menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Pada bulan lalu, Fitch mengubah prospek peringkat Thailand menjadi stabil dari sebelumnya negatif.

“Ekonomi Thailand bertahan lebih baik dari perkiraan di tengah guncangan energi global, tekanan deflasi mereda, dan kepastian kebijakan membaik setelah pemilihan umum pada Februari 2026,” kata Fitch Ratings.

Reformasi struktural jadi kunci

Pengalaman krisis keuangan Asia pada 1997 turut menjadi pengingat bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan politik terhadap reformasi.

Saat itu, Thailand menerima bantuan pinjaman IMF dan menjalankan serangkaian kebijakan pemulihan setelah pelemahan baht memicu krisis keuangan regional.

Anoop Singh, yang memimpin misi IMF untuk Thailand selama krisis tersebut, mengatakan dukungan politik terhadap reformasi merupakan faktor penting agar kebijakan pemulihan dapat berjalan.

Menurut Singh, IMF dapat membantu mengidentifikasi persoalan dan memberikan rekomendasi kebijakan, tetapi pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankannya.

Setelah mengalami pergantian perdana menteri akibat keputusan pengadilan maupun kudeta militer serta demonstrasi besar selama beberapa dekade, Thailand kini menikmati periode ketenangan politik relatif setelah Anutin Charnvirakul kembali terpilih pada Februari 2026.

Kondisi tersebut dinilai dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda ekonomi. Meski demikian, sejumlah analis masih mempertanyakan sejauh mana pemerintahan baru akan melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan.

Ekniti menegaskan, reformasi yang dibutuhkan mencakup peralihan menuju energi terbarukan, peningkatan infrastruktur kelistrikan, pengembangan industri semikonduktor dan pusat data, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk sektor teknologi tinggi.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik perdagangan, pemerintah Thailand juga berupaya memosisikan negara tersebut sebagai tujuan investasi yang netral dan aman.

“Kondisi ekonomi global menunjukkan dunia yang semakin terfragmentasi. Kita membutuhkan negara-negara yang dapat menghubungkan perekonomian yang terpecah, dan Thailand dapat menjadi penghubung yang tepercaya,” ujar Ekniti.

Mayoritas Mata Uang Asia Bergerak Terbatas Jumat (9/10), Rupiah Menguat Tipis

Jumat, 9 Oktober 2026 09:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mayoritas-mata-uang-asia-bergerak-terbatas-jumat-910-rupiah-menguat-tipis>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (9/10/2026).

Di tengah pergerakan tersebut, peso Filipina dan baht Thailand mencatatkan penguatan lebih tinggi dibandingkan mata uang regional lainnya.

Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.08 GMT, baht Thailand menguat 0,20% ke level 33,575 per dolar AS. Sementara itu, peso Filipina naik 0,16% menjadi 62,763 per dolar AS.

Dolar Singapura juga menguat 0,10% ke level 1,280 per dolar AS. Ringgit Malaysia naik 0,05% menjadi 4,086 per dolar AS, sedangkan yuan China menguat 0,06% ke posisi 6,699 per dolar AS.

Rupiah turut mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,03% ke level Rp 17.885 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp 17.890 per dolar AS.

Sementara itu, yen Jepang melemah 0,04% ke level 157,930 per dolar AS. Won Korea Selatan juga turun 0,04% menjadi 1.342,50 per dolar AS.

Adapun dolar Taiwan tercatat berada di level 31,875 per dolar AS. Sementara itu, rupee India stabil di posisi 96,780 per dolar AS.

Meski sejumlah mata uang Asia bergerak menguat pada perdagangan harian, mayoritas mata uang regional masih tertekan sepanjang 2026.

Sejak akhir 2025, rupiah tercatat melemah 6,79% terhadap dolar AS. Pelemahan tersebut lebih besar dibandingkan ringgit Malaysia yang turun 0,73% dan yen Jepang yang melemah 0,81%.

Peso Filipina juga telah terdepresiasi 6,31% sejak akhir tahun lalu, sedangkan baht Thailand melemah 6,33%.

Rupee India mencatatkan pelemahan terdalam di antara mata uang yang tercantum dalam data tersebut, yakni sebesar 7,14%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 7,30% sejak akhir 2025. Yuan China juga mencatatkan apresiasi sebesar 4,31%, sementara dolar Singapura menguat 0,47%.

Euro Menuju Pelemahan Mingguan Kelima Jumat (9/10), Tekanan Jual Mulai Mereda

Jumat, 9 Oktober 2026 08:28 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/euro-menuju-pelemahan-mingguan-kelima-jumat-910-tekanan-jual-mulai-mereda>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar euro menuju pelemahan mingguan kelima berturut-turut pada Jumat (9/10/2026).

Meski demikian, tekanan jual terhadap mata uang tunggal Eropa tersebut mulai mereda seiring stabilnya pasar obligasi Prancis dan penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang mengurangi momentum penguatan dolar AS.

Euro sempat menyentuh level terendah dalam 17 bulan di US\$ 1,1161 pada Senin (5/10/2026).

Pelemahan tersebut dipicu kekhawatiran pasar terhadap beban utang Prancis yang mencapai rekor tertinggi serta sulitnya proses politik untuk memangkas defisit anggaran negara tersebut.

Di sisi lain, dolar AS mendapat dukungan dari kondisi perekonomian AS yang dinilai relatif kuat.

Melansir Reuters pada perdagangan Jumat, euro kembali menguat ke US\$ 1,1211. Meski demikian, mata uang tersebut masih melemah sekitar 0,3% sepanjang pekan ini. Dalam lima pekan terakhir, euro telah terkoreksi lebih dari 3% terhadap dolar AS.

Terhadap pound sterling, euro juga melemah 0,3% sepanjang pekan ini ke sekitar 84,74 pence, mendekati level terendah dalam 16 bulan.

Sementara itu, nilai tukar euro terhadap franc Swiss stabil di sekitar 0,9324 franc per euro setelah mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 17 bulan pada pekan sebelumnya.

Analisis senior StoneX di Brisbane Matt Simpson menilai, pergerakan pasar mata uang belakangan ini sudah cukup ekstrem.

Menurut dia, momentum pelemahan euro mulai kehilangan tenaga sehingga investor perlu lebih berhati-hati dalam mengambil posisi jual pada level saat ini.

Dari Prancis, kandidat presiden dari kelompok sayap kanan Marine Le Pen memaparkan rencana untuk memangkas defisit anggaran pada pekan ini.

Rencana tersebut disambut relatif positif oleh pasar, terutama di tengah kekhawatiran terhadap usulan rivalnya dari sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, yang meminta bank sentral membatalkan utang pemerintah.

Namun, ketidakpastian politik dan tekanan sosial masih membayangi prospek fiskal Prancis. Pada Kamis (8/10/2026), para pelajar memblokir sejumlah sekolah menengah dan menggelar demonstrasi di berbagai kota untuk memprotes kondisi pendidikan.

Strategis Macquarie Thierry Wizman dan Gareth Berry menilai, aksi jual obligasi Prancis dan gejolak sosial kini saling memperkuat.

Mereka memperingatkan bahwa eskalasi demonstrasi dapat mendorong kenaikan selisih imbal hasil obligasi Prancis terhadap obligasi negara lain.

Di pasar valuta asing lainnya, penguatan dolar AS juga mulai melambat seiring penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Imbal hasil tersebut berada di jalur untuk mencatat penurunan mingguan terbesar dalam sekitar tiga bulan, setelah reli harga obligasi pada perdagangan sebelumnya.

Yen Jepang juga menuju pelemahan mingguan keempat berturut-turut, meskipun pergerakannya relatif terbatas dalam tiga pekan terakhir. Yen diperdagangkan di sekitar 158 per dolar AS.

Kepala strategi makro Asia-Pasifik Mizuho Securities di Singapura Vishnu Varathan menilai, posisi dolar AS saat ini cukup rentan meski masih diuntungkan oleh pelemahan euro dan yen.

Sementara itu, dolar Australia bergerak di sekitar US\$ 0,6960 dan pound sterling diperdagangkan pada US\$ 1,3233.

Dolar Selandia Baru menghadapi tekanan lebih besar dengan menuju penurunan mingguan ketujuh berturut-turut, yang menjadi rentetan pelemahan terpanjang dalam lebih dari empat tahun.

Mata uang tersebut diperdagangkan di sekitar US\$ 0,5601 dan mendekati level terendah pada 2025 sebesar US\$ 0,5485.

Tekanan terhadap dolar Selandia Baru antara lain dipengaruhi suku bunga acuan negara tersebut yang relatif rendah, yakni 2,75%, dibandingkan suku bunga The Fed yang berada pada kisaran 3,75% hingga 4%.

Restitusi Pajak Cuma Rp198 Triliun per September 2026, Turun 38%

Jumat, 9 Oktober 2026 16:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124152/restitusi-pajak-cuma-rp198-triliun-per-september-2026-turun-38/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak tercatat sebesar Rp198,71 triliun hingga September 2026.

Namun, nilai tersebut turun 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp320,91 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati dalam keterangannya menuturkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hingga September 2026 didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdiri dari PPh sebesar Rp59,08 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp137,79 triliun, dan jenis pajak lainnya sebesar Rp1,84 triliun," kata Inge kepada awak media, Jumat (9/10/2026).

Namun demikian, kata Inge, restitusi jenis pajak lainnya justru mengalami peningkatan dari Rp1,04 triliun pada September 2025 menjadi Rp1,84 triliun pada September 2026.

Sejalan dengan itu, pada konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk segera mencairkan restitusi pajak secepat mungkin.

Percepatan pengembalian ini utamanya didorong kepada sektor-sektor yang mendongkrak perekonomian.

"Saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin diproses hak dari para wajib pajak ini," jelasnya.

Adapun Dirjen Pajak Bimo mengatakan bahwa pihaknya masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp750 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir tahun ini meski realiasi penerimaan pajak sampai dengan 30 September 2026 tumbuh 24,1%.

Oleh karena itu, Bimo mengatakan, DJP akan mengoptimalkan pemanfaatan data untuk memperkuat pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta penggalan potensi pajak hingga Desember 2026.

Langkah tersebut kata dia telah dikoordinasikan bersama seluruh kantor wilayah Ditjen Pajak.

"Beberapa kebijakan juga akan menjadi trigger untuk kita memperkuat pemungutan pajak, penerimaan, dari mulai SPPTDLN, PPH untuk marketplace, dan kebijakan PMK 71 untuk pengurangan sanksi," jelas Bimo.

Sebagai catatan, target penerimaan pajak pada APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun, sementara hingga 30 September 2026, Kemenkeu mencatat kinerja penerimaan pajak sebesar Rp 1.607 triliun atau 68,2% dari target.

Menguat, Rupiah Tutup Pekan Ini di Bawah Rp17.900/US\$

Jumat, 9 Oktober 2026 15:46 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124147/menguat-rupiah-tutup-pekan-ini-di-bawah-rp17-900-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini, Jumat (9/10/2026), dengan penguatan terbatas 0,08% ke Rp17.883/US\$, menyusul tekanan eksternal yang mulai mereda.

Harga minyak terpankas 1,11% ke US\$103,11/barel, diikuti penurunan yield di pasar obligasi global serta indeks dolar Amerika Serikat (AS). Yield US Treasury tenor 10 tahun turun 4,8 bps jadi 5,23%, Inggris 5,7 bps jadi 5,42%, Prancis turun 8,3 bps jadi 4,8%.

Di pasar Asia, yield obligasi juga ikut terpankas. Seperti yield obligasi Jepang turun 7,6 bps jadi 3%, Singapura turun 5,1 bps jadi 2,41%.

Penurunan yield pada hampir semua obligasi Asia membawa mata uang kawasan bergerak menguat. Baht Thailand menguat paling tajam, diikuti yuan China, ringgit Malaysia, yuan offshore, dan peso Filipina. Sementara penguatan rupiah, dolar Singapura, dan rupee India lebih terbatas.

Penguatan mata uang Asia tertopang oleh sentimen meredanya ketegangan di Timur Tengah usai pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut tidak akan ada penyerangan lanjutan terhadap Iran sebelum pemilu paruh waktu. Pernyataan ini langsung direspons pelaku pasar yang memangkas sebagian besar kekhawatiran akan gangguan pasokan energi.

Di sisi lain, ekspektasi sikap hawkish bank sentral AS Federal Reserve juga kian terpankas usai rilisnya data ketenagakerjaan yang kurang menggembirakan.

Walaupun mata uang Asia menguat hari ini, selama sepekan justru melemah. Rupee India menjadi yang terlemah dengan depresiasi mingguan 0,46%. Disusul peso Filipina 0,43% dan yen Jepang 0,3%.

Sementara rupiah sepanjang pekan ini relatif stabil dengan pelemahan terbatas 0,04%.

Dari dalam negeri, data penjualan ritel sejatinya naik ikut menopang laju rupiah. Akan tetapi, daya beli yang tertahan juga memangkas sebagian penguatan rupiah hari ini.

Penjualan ritel tercatat tumbuh 1,3% secara tahunan. Pada saat yang sama proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%.

Adapun, porsi pendapatan yang ditabung turun dari 15,8% menjadi 15,4%. Kondisi ini bukan indikasi bahwa konsumsi meningkat, tetapi lebih tepat dibaca sebagai adanya tekanan harga yang membuat porsi pengeluaran jadi lebih besar.

Data ini sejalan dengan laju inflasi yang mulai meningkat pada September menjadi 3,28% yoy dari posisi Agustus 3,19% yoy. Kenaikan inflasi ini sepertinya sudah memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengatur alokasi pendapatannya.

Harga kebutuhan yang meningkat, membuat konsumen mengeluarkan porsi pendapatan yang lebih besar untuk sekadar mempertahankan tingkat konsumsi yang sama. Akibatnya, ruang menabung maupun membelanjakan uang pada kelompok barang diskresioner menjadi kian terbatas.

Itulah mengapa rupiah hanya menguat terbatas, lantaran sentimen pelemahan daya beli yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2026.

Sentimen ini membuat aksi beli di pasar obligasi domestik tidak terjadi secara merata. Hanya tenor pendek dan menengah yang mencatat aksi beli. Sisanya, pelaku pasar masih bersikap hati-hati. Terutama pada tenor menengah dan panjang.

Bahkan, yield tenor acuan 10 tahun masih menanjak ke 7,2%, kala US Treasury dan obligasi negara lainnya mulai terpangkas.

Pelaku pasar juga sepertinya mencermati data penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan kerap menjadi indikator penting untuk mengukur daya beli masyarakat, keyakinan konsumen, juga kecenderungan rumah tangga dalam membelanjakan barang tahan lama atau durable goods.

Mengacu data Gaikindo, penjualan mobil dari dealer ke konsumen pada Agustus masih tumbuh 7,7% secara bulanan. Namun, penjualan sepeda motor justru turun 6,22% secara bulanan, walaupun secara tahunan masih tumbuh 3,4%.

Turunnya angka penjualan sepeda motor dapat menjadi indikator yang relevan lantaran menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Perubahan dalam penjualan kendaraan roda dua ini bisa jadi salah satu indikator mengenai kondisi belanja rumah tangga yang sepertinya sudah mengalami pelemahan daya beli.

Kemenkeu Ungkap Alasan Pangkas Belanja K/L pada 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 14:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124137/kemenkeu-ungkap-alasan-pangkas-belanja-k-l-pada-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) merupakan upaya untuk mempertajam pengelolaan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.

Hal ini sekaligus menjawab perihal beredarnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026 tentang Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Direktur Jenderal Anggaran Sudarto mengatakan hal ini dilakukan agar fokus anggaran pemerintah lebih diutamakan pada pengeluaran yang hasilnya telah direncanakan oleh K/L sebelumnya.

"Jadi bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki triwulan IV-2026," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Oleh karena itu, melalui ketetapan Surat Menkeu Suahasil Nazara ini, ia kembali menekankan bahwa pencapaian target prioritas pembangunan memang menjadi fokus dan penajaman belanja. Hanya saja hal tersebut juga tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Fokusnya adalah kita mengajak seluruh kementerian lembaga untuk semakin fokus untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 diketahui bahwa Bendahara RI meminta K/L untuk menghemat anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026 sebagai bagian dari pengetatan belanja K/L pada kuartal IV 2026.

"Pemangkasan berlaku atas pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan atau belum diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga 8 Oktober 2026," tulis surat edaran tersebut dikutip Jumat (9/10/2026).

Selain perjalanan dinas, otoritas fiskal juga meminta penundaan belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026.

Belanja tersebut mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi dan rehabilitasi gedung atau kantor.

"Pagu hasil penundaan belanja pendukung aparatur di atas agar dilakukan pencantuman catatan dalam Halaman IV DIPA (blokir) dengan menggunakan kode 9 (automatic adjustment). Pengecualian atas penundaan tersebut sebagaimana tertuang pada Lampiran II angka 4.c. Surat Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 tanggal 18 Februari 2026," jelas isi surat edaran tersebut.

Kemenkeu menegaskan, langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan belanja kementerian dan lembaga agar tetap berfokus pada pencapaian keluaran utama program prioritas Presiden.

Di sisi lain, Kemenkeu juga memperketat revisi anggaran menjelang akhir tahun. Kemenkeu menetapkan batas akhir penyampaian usulan revisi anggaran tertentu kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran pada 16 Oktober 2026.

Sementara itu, batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran reguler tahun anggaran 2026 ditetapkan pada 23 Oktober 2026.

Penjualan Ritel Memang Tumbuh, Tapi Tekanan Daya Beli Terasa

Jumat, 9 Oktober 2026 13:32 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124113/penjualan-ritel-memang-tumbuh-tapi-tekanan-daya-beli-terasa/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Data penjualan ritel yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya pemulihan konsumsi rumah tangga secara agregat, setelah mengalami kontraksi pada kuartal II-2026. Walaupun perbaikan itu belum cukup kuat untuk menggambarkan bahwa daya beli masyarakat sudah sepenuhnya membaik secara merata.

Melansir data Survei Penjualan Eceran BI, Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 1,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus. Naik dari pertumbuhan Juli sebesar 1,1%. Sedangkan, secara bulanan indeks total juga naik 1,7 poin dari 224,9 jadi 226,5.

Bisa dikatakan, Agustus menandai kelanjutan pemulihan meski belum membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga sudah menguat secara luas. Sebab, di sebagian kelompok barang justru tercatat pelemahan tajam.

Pertumbuhan penjualan ritel ditopang oleh perbaikan pada kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, memang angkanya masih kontraksi 10,9%, tetapi lebih baik daripada kontraksi sebesar 20,6% pada Juli.

Di sisi lain, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau relatif stabil dengan pertumbuhan tahunan 2,6% yang lebih baik dari pertumbuhan Juli sebesar 2,4%. Meski begitu, pertumbuhan kelompok ini belum menunjukkan adanya akselerasi besar. Agaknya konsumen lebih mempertahankan permintaan pada kelompok pangan dan kebutuhan sehari-hari, ketimbang menunjukkan adanya pemulihan daya beli.

Lebih lanjut, sebagian besar kelompok barang masih mencatat kontraksi. Seperti Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terkontraksi 5,7%, diikuti Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya kontraksi 5,7%. Bahkan, kelompok Sandang terkontraksi paling dalam, sebesar 12,4% secara tahunan, dan merosot 15,2 poin secara bulanan.

Proyeksi September

BI memperkirakan penjualan ritel tumbuh 1,4% yoy pada September, sedikit meningkat dari posisi Agustus. Namun, secara bulanan, IPR diperkirakan turun 2,3%, terutama dipengaruhi penurunan penjualan makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,2%, serta barang budaya dan rekreasi 3%.

Berdasarkan kelompok barang, prospek September diperkirakan menunjukkan pemulihan, tetapi tidak merata. Pertumbuhan tahunan di kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan melambat jadi 1,5% dari 2,6%. Sementara, suku cadang dan aksesoris melambat dari 3,9% menjadi 3,7%.

Sebaliknya, penjualan peralatan informasi dan komunikasi diperkirakan masih terkontraksi 6,8%, tetapi membaik dari kontraksi 10,9% di bulan Agustus.

Adapun, perlengkapan rumah tangga lainnya diperkirakan berbalik tumbuh 1% setelah kontraksi 5,2%, sedangkan barang budaya dan rekreasi meningkat menjadi 1,8% dari minus 0,3%. Sedangkan, barang budaya dan rekreasi meningkat menjadi 1,8% dari minus 0,3%.

Perbaikan paling tajam diperkirakan akan terjadi pada kelompok barang lainnya, yang tumbuh dari kontraksi 7,8% menjadi positif 7,8%. Begitu juga dengan sandang tumbuh dari minus 12,4% menjadi positif 10,8%.

Keyakinan Konsumen Memudar

Tidak meratanya kinerja pertumbuhan penjualan ritel sejalan dengan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun menjadi 118,1. Indeks Keyakinan Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,4 menjadi 107,5.

IPR September yang diperkirakan BI tumbuh 1,4% secara tahunan bahkan tidak dibarengi dengan proyeksi pertumbuhan secara bulanan yang diprediksi akan berkontraksi 2,3%. Artinya, pertumbuhan tahunan memang masih positif, tetapi aktivitas belanja diperkirakan masih akan melemah dibandingkan Agustus.

Kondisi ini sejalan dengan penurunan IKE, yang menggambarkan ekspektasi konsumen yang membaik belum tentu dibarengi dengan peningkatan belanja aktual jika persepsi terhadap kondisi saat ini melemah.

Apalagi, proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sedangkan porsi pendapatan yang ditabung turun dari 15,8% menjadi 15,4%. Kondisi ini bukan indikasi bahwa konsumsi meningkat, tetapi lebih tepat dibaca sebagai adanya tekanan harga yang membuat porsi pengeluaran jadi lebih besar.

Untuk diketahui, inflasi mulai meninggi pada September menjadi 3,28% yoy dari posisi Agustus 3,19% yoy. Kenaikan inflasi ini sepertinya sudah memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengatur alokasi pendapatannya.

Harga kebutuhan yang meningkat, membuat konsumen mengeluarkan porsi pendapatan yang lebih besar untuk sekadar mempertahankan tingkat konsumsi yang sama. Akibatnya, ruang menabung maupun membelanjakan uang pada kelompok barang diskresioner menjadi kian terbatas.

Setoran Pajak September Rp1.6078 T, Naik 24%: Restitusi Diproses

Jumat, 9 Oktober 2026 12:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124102/setoran-pajak-september-rp1-6078-t-naik-24-restitusi-diproses/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.6078 triliun. Angka ini meningkat 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp1.295,3 triliun.

Namun, persinya baru 68,2% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan salah satu alasan penerimaan pajak tahun ini meningkat, karena pada periode sebelumnya pengumpulan pajak belum maksimal.

"Ini tentu kita harapkan bisa terus menguat ke depannya," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Meski adanya pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak atau restitusi kepada industri padat karya, Suahasil memastikan penerimaan pajak tetap akan berjalan dengan baik hingga akhir tahun.

Rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 17,6% menjadi Rp809,3 triliun atau mencapai 70,1% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 128,2% menjadi Rp43,6 triliun atau 79% dari sepanjang tahun ini.

PPN dan PPnBM juga naik menjadi Rp683,3 triliun atau 38,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

Secara total, pendapatan negara hingga akhir September 2026 juga mencapai Rp2.342,5 triliun. Angka tersebut naik 25,5% secara tahunan dan mencapai 74,2% dari target APBN yang dipatok Rp3.153,6 triliun.

Total tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.693,7 triliun atau naik 21,8%, serta mencapai 68,16% dari target. Kemudian, PNBPN juga naik 41,7% menjadi Rp459,2 triliun. Namun, penerimaan hibah tercatat turun 18,8% menjadi Rp219,2 triliun.

APBN September: Belanja Negara Tembus Rp2.660 T, Melonjak 19%

Jumat, 9 Oktober 2026 11:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124094/apbn-september-belanja-negara-tembus-rp2-660-t-melonjak-19/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi total belanja negara hingga September 2026 tercatat mencapai Rp2.660,5 triliun, tumbuh 19% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.621,3 triliun.

Namun, angka ini baru setara 69,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang mencapai Rp3.842 triliun.

Berdasarkan perinciannya, kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh membengkaknya realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik mencapai 33,5% yoy menjadi Rp1.069,4 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp800,9 triliun.

"Ada percepatan belanja. Kami tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan September, dan ini smooth mulai terjadi," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp1.639,2 triliun, yang juga naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih Rp1.541,4 triliun. Angkanya setara 60,5% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Berdasarkan perincian, belanja K/L atau pemerintah pusat utamanya dipengaruhi untuk program prioritas presiden sebesar Rp1.069,4 triliun atau 70.8% dari APBN untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sementara itu, untuk belanja non K/L lebih banyak didominasi untuk pembayaran pemanfaatan pensiun, subsidi, hingga kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebesar Rp991,9 triliun atau 60,5% dari total APBN.

APBN Defisit 1,2% September, Suahasil Pastikan 2026 Sentuh 2,8%

Jumat, 9 Oktober 2026 10:45 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124092/apbn-defisit-1-2-september-suahasil-pastikan-2026-sentuh-2-8/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai September 2026 mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Porsi defisit melonjak dibanding bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB. Kendati demikian, angka ini lebih rendah dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim kondisi defisit APBN ini sudah sesuai jalurnya. Dia bahkan memastikan bahwa kondisi defisit anggaran sampai akhir tahun akan menyentuh level 2,8% seperti target yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2026.

“Saat ini defisit 1,24%, kemudian nanti 2,68%, dan sampai akhir tahun akan mencapai 2,85%. Begitulah perjalanan defisit APBN seperti yang sudah kita laporkan dalam laporan semester ke Badan Anggaran DPR RI,” kata Suahasil.

Defisit terjadi akibat realisasi belanja negara lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan negara. Dalam hal ini, realisasi belanja negara sampai September 2026 tercatat Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari target sepanjang tahun ini. Nominal ini melonjak 19% dibanding belanja negara pada periode yang sama tahun lalu.

“Belanja negara sampai 3/4 tahun sudah digunakan 69,2%, ini on track,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN: Kinerja dan Fakta, Jumat (9/10/2026) malam.

Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun sampai September atau 74,2% dari total pagu 2026. Angka ini meningkat 25,5% dibanding pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu.

Kendati mengalami defisit, posisi keseimbangan primer APBN per September 2026 masih mencatatkan surplus Rp125,52 triliun sampai September 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding nominal surplus pada periode yang sama tahun lalu Rp18 triliun.

Dalam paparannya, Suahasil juga menegaskan bahwa keseimbangan primer APBN dirancang mengalami defisit Rp139,9 triliun dalam UU APBN 2026.

Menkeu Kebut 12 Lelang SBN & Pinjaman US\$1,8 M Jelang Akhir 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 15:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124143/menkeu-kebut-12-lelang-sbn-pinjaman-us-1-8-m-jelang-akhir-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, strategi pembiayaan utang pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan skenario defisit sebesar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai outlook laporan semester (Lapsem).

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal 4, beberapa SUN akan masih kita lakukan. Pertama adalah kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari Selasa. Jadi 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN di kuartal keempat," kata Suminto dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kemenkeu Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pemerintah, kata Suminto juga akan menerbitkan dua instrumen SBN ritel hingga akhir tahun, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri 015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri 017 untuk instrumen syariah.

Selain mengandalkan pasar domestik, Kemenkeu masih membuka peluang penerbitan SBN dalam valuta asing atau global bond.

Namun, realisasinya akan bergantung pada perkembangan kondisi pasar keuangan global yang saat ini dinilai sangat dinamis.

Di samping penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki potensi penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral sebesar US\$1,8 miliar yang siap dicairkan pada kuartal IV-2026.

"Selain itu kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US\$1,8 miliar siap untuk ditarik di kuartal keempat," tuturnya.

Tarik Utang Rp494,3 triliun

Sebagai catatan, pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, atau 59,4% dari APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Jelasnya, pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara netto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, dibandingkan target pembiayaan pinjaman netto sebesar Rp32,7 triliun.

Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.

Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp 153,19 Triliun hingga September 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 18:28 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-anggaran-mbg-tembus-rp-15319-triliun-hingga-september-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 153,19 triliun hingga 30 September 2026. Penyaluran anggaran tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengapresiasi berbagai perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan ketertiban operasional dan memastikan bantuan makanan bergizi diterima oleh sasaran yang tepat.

Menurut Suahasil, BGN telah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk menerapkan sertifikasi bagi SPPG. Pemerintah juga menutup SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dan membuka kembali unit yang telah memenuhi persyaratan.

"Ini penting karena tujuan kita adalah melayani seluruh masyarakat, anak-anak sekolah yang seyogianya kita berikan makan bergizi gratis," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Ia menambahkan, berbagai langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi MBG sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran manfaat program.

Suahasil memahami bahwa BGN masih terus melakukan evaluasi dan mencari langkah perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari sisi pendanaan, pemerintah akan menyesuaikan alokasi anggaran MBG dengan kebutuhan pelaksanaan program ke depan. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi seiring dengan perkembangan implementasi program.

"Anggarannya menyesuaikan. Berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan Rp 153,19 triliun sampai dengan 30 September," kata Suahasil.

Pemerintah pun membuka ruang untuk menyesuaikan anggaran MBG berdasarkan kebutuhan program. Di saat yang sama, pembenahan tata kelola dan peningkatan efektivitas distribusi makanan bergizi terus didorong agar manfaat program dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Menkeu Longgarkan Restitusi Pajak, Prioritas Industri Padat Karya dan UMKM

Jumat, 9 Oktober 2026 18:15 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-longgarkan-restitusi-pajak-prioritas-industri-padat-karya-dan-umkm>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku usaha, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan likuiditas untuk menjalankan kegiatan bisnis.

Menteri Keuangan Suahasil telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melonggarkan proses pencairan restitusi pajak agar hak wajib pajak dapat dipenuhi lebih cepat.

Ia menegaskan, restitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang perlu segera diproses, khususnya bagi sektor usaha yang membutuhkan arus kas atau cash flow untuk mendukung operasional perusahaan.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan cashflow, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Suahasil juga memastikan bahwa pelonggaran pengelolaan restitusi pajak telah mulai dijalankan oleh otoritas pajak.

"Kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan kita segera longgarkan dan teman-teman di DJP telah mulai melakukan pelonggaran ini," katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan produksi, membayar pekerja, dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Sebelumnya, DJP Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak mencapai Rp 198,71 triliun hingga September 2026.

Namun, penambahan restitusi dalam satu bulan terakhir terbilang terbatas. Nilainya hanya meningkat Rp 6,89 triliun dibandingkan posisi Agustus 2026 yang mencapai Rp 191,82 triliun.

Dengan demikian, restitusi pajak pada September 2026 tumbuh 3,59% secara bulanan. Pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, restitusi pajak pada Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 304,29 triliun. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp 323,92 triliun pada September 2025.

Artinya, sepanjang September 2025, restitusi pajak bertambah Rp 19,63 triliun atau sekitar 6,45% dibandingkan posisi bulan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini, tambahan restitusi pada September 2026 sebesar Rp 6,89 triliun hanya sekitar sepertiga dari penambahan pada September 2025.

Secara nominal, selisih tambahan restitusi antara kedua periode tersebut mencapai Rp 12,74 triliun.

Perlambatan penambahan restitusi tersebut menjadi salah satu latar belakang penting bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian arus kas. Karena itu, pelonggaran proses pencairan restitusi yang mulai

dilakukan DJP diharapkan dapat membantu wajib pajak memperoleh haknya lebih cepat, terutama bagi industri padat karya dan UMKM.

BI Prediksi Penjualan Eceran Terkontraksi 2,3% pada September 2026, Ini Pemicunya

Jumat, 9 Oktober 2026 14:17 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-prediksi-penjualan-eceran-terkontraksi-23-pada-september-2026-ini-pemicunya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,3% secara bulanan atau month to month (MtM). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, kinerja penjualan eceran diprediksi terkontraksi 2,3% MtM pada September 2026 berbalik dari kondisi Agustus 2026 yang masih tumbuh 0,8% MtM.

"Secara bulanan, penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan terkontraksi sebesar 2,3% (MtM), terutama dipengaruhi oleh penurunan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

BI mencatat, penurunan penjualan bulanan pada September 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang diperkirakan terkontraksi 3,2% MtM. Selain itu, kelompok barang budaya dan rekreasi juga diperkirakan turun 3% MtM.

Meski demikian, sejumlah kelompok barang masih diperkirakan mencatatkan pertumbuhan penjualan. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh 5,9% MtM, diikuti kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya sebesar 2,9% MtM serta kelompok suku cadang dan aksesoris sebesar 1,2% MtM.

Pertumbuhan pada sejumlah kelompok tersebut diperkirakan dapat menahan penurunan penjualan eceran yang lebih dalam pada September 2026.

Penjualan Eceran Masih Tumbuh Tahunan

Kendati mengalami kontraksi secara bulanan, penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan masih tumbuh secara tahunan.

BI memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 mencapai level 221,3 atau tumbuh 1,4% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Agustus 2026 sebesar 1,3% YoY.

Peningkatan penjualan secara tahunan terutama ditopang oleh kelompok barang lainnya yang diperkirakan tumbuh 7,8% YoY, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya sebesar 1% YoY, serta kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 1,8% YoY.

Di sisi lain, beberapa kelompok barang masih mengalami kontraksi. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi diperkirakan terkontraksi 6,8% YoY, sedangkan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor turun 3,6% YoY.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, penjualan eceran tumbuh 1,3% YoY, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2026 sebesar 1,1% YoY. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok suku cadang dan aksesoris.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Agustus 2026 juga mencatatkan pertumbuhan 0,8% MtM, berbalik dari kontraksi 0,1% MtM pada Juli 2026. Kondisi tersebut sejalan dengan terjaganya permintaan selama periode perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ekspektasi Harga Meningkat

Di tengah proyeksi kontraksi penjualan eceran secara bulanan, BI juga mencermati peningkatan ekspektasi harga pada periode mendatang.

Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 tercatat sebesar 149,9, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks periode sebelumnya sebesar 146,5.

Sementara itu, IEH Februari 2027 mencapai 177,9, meningkat dibandingkan dengan indeks periode sebelumnya sebesar 166,0.

Peningkatan indeks tersebut mengindikasikan ekspektasi kenaikan harga yang lebih tinggi pada periode mendatang. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam melihat prospek konsumsi masyarakat dan tekanan inflasi ke depan.

Subsidi dan Kompensasi Energi Naik 54,1% Tembus Rp 376,8 Triliun per September 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 13:43 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/subsidi-dan-kompensasi-energi-naik-541-tembus-rp-3768-triliun-per-september-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi energi mencapai Rp 376,8 triliun hingga akhir September 2026, melonjak 54,1% secara tahunan.

Realisasi tersebut setara dengan 84,3% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi tidak terlepas dari kebijakan pembayaran yang dilakukan setiap bulan sejak 2026.

Kebijakan ini membuat pembayaran kepada badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina dan PT PLN, menjadi lebih besar.

"Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp 244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp 376,8 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Secara terperinci, realisasi belanja subsidi mencapai Rp 222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 154,4 triliun.

Suahasil menjelaskan, pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut bertujuan memastikan badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah memiliki arus kas untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga yang telah ditetapkan.

Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan badan usaha pelaksana penugasan pemerintah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi tetap sejalan dengan kondisi fiskal negara.

Di sisi lain, peningkatan realisasi subsidi juga mencerminkan kenaikan penggunaan sejumlah barang bersubsidi oleh masyarakat.

Hingga akhir September 2026, realisasi penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 13,41 juta kiloliter (KL), meningkat 9,1% secara tahunan atau year on year (YoY).

Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai 5,76 juta kilogram, tumbuh 2,2% YoY. Subsidi listrik telah menjangkau 43,4 juta pelanggan, meningkat 2,1% YoY. Adapun realisasi subsidi pupuk mencapai 6,6 juta ton, naik 15,7% YoY.

Suahasil menilai, peningkatan penggunaan barang bersubsidi tersebut menunjukkan aktivitas masyarakat yang terus berjalan. Penggunaan BBM, LPG, listrik, hingga pupuk berkaitan dengan kegiatan konsumsi maupun produksi masyarakat.

Namun, peningkatan volume barang bersubsidi juga berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang lebih besar. Pasalnya, pemerintah harus menanggung sebagian biaya agar masyarakat dapat mengakses barang tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, dan KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi," kata Suahasil.

Lebih lanjut, realisasi subsidi dan kompensasi energi turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, hingga peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Selain itu, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi.

Pemerintah memiliki pengalaman menghadapi tekanan tersebut pada 2022, ketika konflik Rusia-Ukraina memicu gejolak harga energi global.

Sementara itu, untuk subsidi nonenergi, peningkatan realisasi terutama dipengaruhi oleh bertambahnya pembayaran subsidi pupuk.

Dengan realisasi yang telah mencapai 84,3% dari pagu hingga akhir September 2026, pemerintah perlu memperhitungkan perkembangan harga energi global, nilai tukar rupiah, serta tren konsumsi barang bersubsidi untuk menjaga kecukupan anggaran hingga akhir tahun.

Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.061,3 Triliun per September 2026, Baru Terserap 65,4%

Jumat, 9 Oktober 2026 13:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemerintah-pusat-rp-20613-triliun-per-september-2026-baru-terserap-654>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga September 2026 mencapai Rp 2.061,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 65,4% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, serta tumbuh 29,6% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hingga akhir September 2025, realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai sekitar 65,4% dari pagu APBN 2026.

"Ini juga bagus karena tiga perempat tahun sudah 65%. Akan ada sedikit peningkatan menuju November dan Desember. Namun, ini relatif sehat kalau mengingat angka tahun lalu, akhir September baru 61%, sekarang 65%," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L.

Realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.069,4 triliun atau 70,8% dari pagu APBN 2026. Angka ini tumbuh 33,5% YoY.

Belanja tersebut terutama digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, hingga layanan pendidikan.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 991,9 triliun atau 60,5% dari pagu, tumbuh 25,7% YoY.

Belanja ini antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Suahasil menjelaskan, dalam komponen belanja K/L, realisasi belanja pegawai mencapai Rp 287,7 triliun atau sekitar 80,3% dari pagu APBN 2026.

Belanja pegawai tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai lama maupun pegawai baru, serta tunjangan profesi guru non-PNS.

Selain itu, realisasi belanja barang K/L mencapai Rp 463,9 triliun atau 65,8% dari pagu. Adapun belanja modal terealisasi sebesar Rp 202 triliun atau 71,1% dari pagu APBN 2026.

Lebih lanjut, Suahasil menyoroti perbaikan mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru yang kini dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing guru melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan perkembangan positif karena sebelumnya penyaluran tunjangan profesi guru, terutama yang berstatus pegawai daerah, tidak seluruhnya dilakukan secara langsung seperti pembayaran gaji pegawai pemerintah pusat, TNI, dan Polri.

Pemerintah berharap mekanisme penyaluran langsung ke rekening penerima dapat diperluas, termasuk untuk program perlindungan sosial. Suahasil mengatakan, sebagian besar penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), telah menerima bantuan melalui rekening masing-masing. Namun, masih terdapat penerima yang harus mengambil bantuan melalui kantor pos.

"Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening dan masih harus mengambil ke kantor pos, idealnya kita bukakan rekening," ujarnya.

Menurut Suahasil, perluasan penyaluran langsung melalui rekening diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran belanja pemerintah sekaligus mempermudah masyarakat dalam menerima haknya.

Serapan gabah Bulog Jateng capai 108,43 persen dari target

Jumat, 9 Oktober 2026 20:02 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647900/serapan-gabah-bulog-jateng-capai-10843-persen-dari-target>

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah mencatat realisasi penyerapan gabah petani hingga Oktober 2026 yang mencapai 108,43 persen dari target tahun ini.

"Realisasi penyerapan gabah sudah mencapai 406.253 ton setara beras, melebihi target sebanyak 374.658 ton," kata Pimpinan Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati di Semarang, Jumat.

Sementara secara nasional, realisasi penyerapan gabah petani sudah mencapai 4,1 juta ton beras.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan upaya untuk memberikan kepastian pasar bagi petani, mendukung keberlangsungan usaha pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menuturkan, Bulog telah mengoptimalkan seluruh instrumen, mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana pengolahan dan pergudangan, hingga percepatan penyerapan pada momentum panen dalam melaksanakan pengadaan gabah.

Ia menambahkan, tingginya persediaan cadangan pangan tersebut juga memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional.

"Bulog menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan Pemerintah," katanya.

Melalui pengadaan yang kuat di tingkat hulu, kata dia, pemerintah memiliki fondasi stok yang semakin kokoh untuk mendukung berbagai program stabilisasi dan penyaluran pangan kepada masyarakat.

Ia memastikan Bulog akan terus menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan operasional dari hulu hingga hilir.

Inilah jumlah pencari kerja di Kabupaten Blora

Jumat, 9 Oktober 2026 06:34 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin/Gunawan, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647821/inilah-jumlah-pencari-kerja-di-kabupaten-blora>

Blora (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat jumlah pencari kerja selama Januari hingga April 2026 mencapai sebanyak 964 orang dan 99 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terdaftar menuju berbagai negara tujuan.

"Jumlah tersebut, meliputi 338 laki-laki dan 626 perempuan. Pendaftaran pencari kerja tertinggi terjadi pada April 2026 mencapai 548 orang," kata Kepala Dinperinaker Kabupaten Blora Endro Budi Darmawan di Blora, Kamis.

Ia menjelaskan pada Februari tercatat 160 pencari kerja, kemudian meningkat menjadi 256 orang pada Maret dan melonjak menjadi 548 orang pada April.

Dari 964 pencari kerja tersebut, sebanyak 526 orang telah mendapatkan penempatan kerja melalui skema Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Secara keseluruhan, penempatan itu terdiri atas 402 perempuan dan 124 laki-laki.

Penempatan melalui AKL mendominasi dengan jumlah 483 orang, terdiri atas 105 laki-laki dan 378 perempuan. Sementara penempatan melalui AKAN sebanyak 43 orang, terdiri atas 19 laki-laki dan 24 perempuan.

Terkait negara tujuan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blora, kata dia, antara lain ke Negara Taiwan berjumlah 58 orang, disusul Malaysia 13 orang, Turki 12 orang, Hong Kong delapan orang, Jepang tiga orang, Singapura dua orang, serta Arab Saudi, Bulgaria, dan Dominika masing-masing satu orang.

"Pasar kerja lokal masih menjadi tujuan utama penempatan tenaga kerja asal Kabupaten Blora, baik pada 2025 maupun hingga April 2026," ujarnya.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 Dinperinaker Kabupaten Blora mencatat sebanyak 4.841 pencari kerja terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.430 orang atau sekitar 70,8 persen berhasil ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan.

Dari total penempatan tersebut, sebanyak 3.228 orang atau sekitar 94,1 persen terserap melalui pasar kerja lokal atau AKL. Penempatan tersebut terdiri atas 1.846 perempuan dan 1.382 laki-laki.

Sementara melalui skema AKAN, sebanyak 202 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Blora ditempatkan di luar negeri sepanjang 2025. Jumlah tersebut terdiri atas 107 perempuan dan 95 laki-laki.

Menurut Endro peningkatan pendaftaran pencari kerja antara lain berkaitan dengan bertambahnya angkatan kerja baru, termasuk lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.

"Pasar kerja lokal masih menjadi tujuan utama penempatan tenaga kerja asal Kabupaten Blora," ujarnya.

Pemkot Semarang Kurasi 1.000 UMKM Semarang, Bidik Pasar Ritel hingga Ekspor ke Amerika Serikat

Jumat, 9 Oktober 2026 21:27 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/semarang/1269045/pemkot-semarang-kurasi-1000-umkm-semarang-bidik-pasar-ritel-hingga-ekspor-ke-amerika-serikat>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyiapkan strategi untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas melalui kurasi produk, pendampingan usaha, hingga perluasan akses pasar.

Melalui program Waras Ekonomi, Pemerintah Kota Semarang tengah menyelesaikan kurasi sekitar 1.000 UMKM agar pendampingan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing usaha.

Agustina mengatakan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah pelaku usaha.

Pemerintah juga perlu memastikan produk mereka memiliki kualitas, mampu menjangkau pasar yang lebih luas, dan berpotensi mengembangkan usaha.

Hal tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah 2026 di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (7/10/2026).

"Target kita bukan sekadar banyaknya UMKM, tetapi bagaimana usaha-usaha tersebut benar-benar berdaya, memiliki pasar, mampu berkembang, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya memberikan dampak bagi perekonomian Kota Semarang," ujar Agustina.

Menurutnya, kurasi menjadi salah satu tahapan penting untuk memetakan kebutuhan pelaku UMKM. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan bentuk pendampingan yang lebih tepat, mulai dari peningkatan kualitas produk hingga pengembangan jaringan pemasaran.

"Untuk UMKM Kota Semarang memiliki program namanya Waras Ekonomi, yang merupakan turunan dari program strategis nasional. Kemudian beberapa program dari provinsi kita jadikan satu dengan program Pemerintah Kota Semarang," katanya.

Berdasarkan data Waras Ekonomi per 5 Oktober 2026, terdapat 1.038 akun UMKM yang terdaftar. Sebanyak 609 akun atau 61,07 persen telah terverifikasi secara profil dan siap mendapatkan pendampingan program.

Selain itu, terdapat 149 pelaku usaha dengan 58 produk yang telah terverifikasi lengkap dalam platform Waras Ekonomi.

Perluas Pasar UMKM

Agustina mengatakan, hasil kurasi mulai diarahkan pada perluasan akses pemasaran melalui jaringan ritel modern dan sektor perhotelan.

Sebanyak 43 produk UMKM terkurasi telah masuk ke jaringan ritel modern dan perhotelan melalui kemitraan dengan sejumlah pelaku usaha, antara lain Alfamart, Kampoeng Semarang, Farmers Market, Hotel Pandanaran, Hotel Horison Nindya, dan AEON.

Melalui Program RISE Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 20 produk UMKM terkurasi juga telah masuk ke jaringan Pelangi, Gelael, OLSEM, Istana Buah, dan AEON.

Agustina juga menyiapkan inkubasi ekspor melalui Waras Ekonomi 2026 untuk membuka peluang produk UMKM Semarang menembus pasar Amerika Serikat.

Upaya tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada pemasaran konvensional, tetapi juga memiliki kesempatan memperluas jangkauan konsumen melalui jaringan distribusi dan pasar internasional.

"Harapannya, semakin banyak UMKM Semarang yang naik kelas. Bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, dan membawa produk Semarang semakin dikenal," ungkapnya.

Libatkan Berbagai Pihak

Agustina menambahkan, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha, dan lembaga inkubator.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan dukungan yang tersedia, baik berupa pengetahuan, pendampingan, pembiayaan, maupun akses pemasaran.

"Terima kasih karena ada event seperti ini sehingga kami mendapatkan jaminan support dari berbagai pihak, terutama dari kementerian, Bank Himbara, perguruan tinggi, dan para aktivis UMKM yang siap melakukan pendampingan terhadap UMKM kami," katanya.

Melalui Waras Ekonomi, Pemkot Semarang juga mulai menghubungkan pengembangan UMKM dengan sektor pertanian dan perikanan.

Pemetaan pelaku usaha, penguatan produksi, identifikasi calon pembeli atau offtaker, hingga business matching disiapkan untuk mempertemukan produk dengan kebutuhan pasar.

"Ini adalah kerja bersama. Pemerintah menyediakan ekosistem dan membuka akses, perguruan tinggi memberikan pengetahuan dan pendampingan, perbankan membuka akses pembiayaan, dunia usaha membuka pasar, sementara pelaku UMKM harus terus meningkatkan kualitas produknya," ujar Agustina.

Adapun Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah 2026 diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka terdiri atas sekitar 500 UMKM dan 760 mahasiswa calon pengusaha dari 17 perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kegiatan tersebut juga melibatkan 27 lembaga inkubator dengan sejumlah agenda, mulai dari talk show, inspirational talk, pitching startup, business matching, hingga akad Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Rad)

"Seperti Lebaran", Pedagang Keluhkan Harga Cabai Melonjak Drastis

Jumat, 9 Oktober 2026 16:27 WIB

Penulis: Idayatul Rohmah, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/semarang/1269012/seperti-lebaran-pedagang-keluhkan-harga-cabai-melonjak-drastis>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Harga cabai di Kota Semarang melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir.

Kenaikan harga tersebut dikeluhkan sejumlah pedagang di pasar tradisional, menyebut harga cabai saat ini hampir menyamai situasi menjelang Lebaran yang biasanya diwarnai peningkatan permintaan bahan pangan.

Pedagang di Pasar Peterongan Semarang, Heni (61) mengatakan, kenaikan harga cabai terutama terjadi pada rawit merah, yang kini mencapai Rp90.000/kilogram.

Tak hanya cabai rawit merah, cabai keriting merah juga melambung di kisaran Rp80.000/kilogram.

"Di hari biasa ini termahal. Naiknya seperti harga (masa) Lebaran."

"Harga cabai rawit merah sebelumnya Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Keriting merah juga naik, jadi Rp80.000/Kg," jelas Heni ditemui Tribun Jateng di lapaknya, Jumat (9/10/2026).

Menurut Heni, kenaikan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua pekan terakhir.

"Naiknya sudah dua mingguan," ujarnya.

"(Kenaikan terakhir) Rp5.000," lanjutnya.

Menurut Heni, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi cuaca kemarau yang berdampak pada berkurangnya pasokan dari petani.

Ia menyebut, berkurangnya pasokan membuat harga cabai di tingkat pedagang ikut meningkat.

Meski harga cabai melonjak, pembeli masih tetap datang ke pasar.

Namun, jumlah pembelian cenderung berkurang karena harga yang semakin mahal.

"Ya, sama tapi belinya sedikit," ujar Heni.

Ia mengatakan, pembeli yang sebelumnya bisa membeli cabai dalam jumlah lebih banyak kini memilih membeli setengah kilogram atau satu kilogram, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan belanja.

Dia menambahkan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai. Sejumlah komoditas sayuran lainnya juga mengalami peningkatan harga.

Tomat, misalnya, kini dijual Rp15.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000 per kilogram.

Harga buncis juga naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram.

Sementara itu, wortel dijual Rp18.000 per kilogram.

Heni menuturkan, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah jenis sayuran lain, seperti sawi dan kangkung.

Adapun harga bawang merah dan bawang putih relatif stabil, masing-masing berada di kisaran Rp40.000 dan Rp45.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Induk Johar, Semarang.

Pedagang Pasar Induk Johar, Sularno (53), mengatakan harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp72.000 per kilogram. Sementara itu, cabai keriting merah dijual Rp65.000 per kilogram.

Menurut Sularno, harga sejumlah jenis cabai lainnya bervariasi. Cabai keriting hijau dijual Rp35.000 per kilogram, teropong hijau Rp22.000 per kilogram, rawit putih Rp36.000 per kilogram, dan teropong merah Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit hijau dijual Rp60.000 per kilogram.

"Kalau saat ini naik," kata Sularno di kiosnya.

Ia menyebut, kenaikan harga cabai telah berlangsung sekitar dua pekan terakhir. Besaran kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram.

"Sudah 2 mingguan (naiknya), ujanya.

Baca juga: MPP Bergerak Hadir di Pasar Induk Wonosobo, Pedagang Manfaatkan Layanan NIB hingga Cek Kesehatan

Sularno menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipengaruhi masa panen yang hampir berakhir sehingga produksi cabai mulai berkurang.

"Masa panennya kan sudah hampir habis ini," katanya.

Berkurangnya produksi tersebut berdampak pada pasokan cabai yang masuk ke pasar. Khusus cabai rawit merah, Sularno menyebut pasokan berasal dari Temanggung dan daerah sekitarnya.

"Untuk sekarang rawit merah hanya dari Temanggung dan sekitarnya," imbuhnya. (idy)

Belanja Musim Liburan di China Menurun, Konsumsi Masih Lemah

Sabtu, 10 Oktober 2026 14:30 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/124189/belanja-musim-liburan-di-china-menurun-konsumsi-masih-lemah/2>

Bloomberg, Wisatawan China mengurangi pengeluaran selama libur panjang nasional pada bulan ini, menyoroti masih lemahnya permintaan domestik di tengah perekonomian yang sangat bergantung pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan.

Wisatawan melakukan lebih dari 820 juta perjalanan domestik selama libur Hari Nasional yang berlangsung selama sepekan, dengan total pengeluaran melampaui 738 miliar yuan (US\$110 miliar), menurut pernyataan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diterbitkan pada Jumat.

Angka tersebut menunjukkan pengeluaran rata-rata sekitar 894 yuan per perjalanan, lebih rendah dibandingkan 916 yuan pada 2024, ketika masa libur juga berlangsung selama tujuh hari, berdasarkan perhitungan Bloomberg menggunakan data resmi.

Tahun lalu, libur tersebut berlangsung selama delapan hari karena bertepatan dengan Festival Pertengahan Musim Gugur, dengan pengeluaran rata-rata per perjalanan sebesar 911 yuan.

Data tersebut memperkuat laporan sebelumnya mengenai stagnasi jumlah penumpang selama periode liburan serta penurunan pendapatan box office di tengah minimnya film-film blockbuster.

Seluruh kondisi ini semakin memperkuat gambaran stagnasi belanja konsumen di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Pelembahan pasar properti masih membebani keuangan rumah tangga, sementara tingkat pengangguran terus merangkak naik.

“Kesenjangan antara arus penumpang yang solid dan lemahnya pengeluaran per kapita masih berlanjut,” tulis ekonom Goldman Sachs Group Inc. yang dipimpin Yuting Yang dalam sebuah catatan.

Mereka memperkirakan pendapatan pariwisata domestik per wisatawan masih 4,5% di bawah level sebelum pandemi, “mengindikasikan berlanjutnya penurunan kualitas konsumsi.”

Meski berulang kali berjanji meningkatkan permintaan domestik, pemerintah belum menawarkan langkah-langkah baru berskala besar untuk mendorong belanja pada 2026.

Sementara itu, dampak program subsidi yang telah lama berjalan untuk mendorong pembelian barang-barang rumah tangga mulai memudar.

Investasi juga terus mengalami kontraksi, membuat perekonomian semakin bergantung pada ekspor. Pemerintah menempatkan investasi sebagai fokus utama dalam paket stimulus terbatas yang diumumkan pada akhir bulan lalu.

Otoritas juga mulai menawarkan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) kepada sejumlah rumah tangga sebagai upaya menstabilkan pasar properti.

“Komunikasi kebijakan terbaru menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih memprioritaskan industri teknologi tinggi dan investasi—khususnya proyek ‘Enam Jaringan’—dibandingkan konsumsi,” tulis para ekonom Goldman Sachs.

“Karena itu, kami mempertahankan pandangan bahwa setiap tambahan stimulus konsumsi kemungkinan akan memiliki skala yang terbatas.”

Citi: Bessent Mungkin Pangkas Ukuran Obligasi Jangka Panjang AS

Sabtu, 10 Oktober 2026 08:00 WIB

Greg Ritchie

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124176/citi-bessent-mungkin-pangkas-ukuran-obligasi-jangka-panjang-as/2>

Bloomberg, Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemungkinan akan mengurangi ukuran lelang obligasi pemerintah bertenor panjang, bahkan berpotensi menghentikan penerbitan obligasi bertenor 20 tahun sepenuhnya, menurut Citigroup Inc.

Skenario dasar bank tersebut adalah pengurangan sebesar US\$3 miliar untuk setiap lelang obligasi bertenor 20 tahun dan 30 tahun.

Pengurangan tersebut akan diimbangi dengan penerbitan tambahan surat utang negara (Treasury bills/T-bills), menurut Jason Williams, kepala strategi suku bunga AS di Citi.

Kebijakan itu akan diumumkan dalam pengumuman pengembalian utang kuartalan atau quarterly refunding Departemen Keuangan AS berikutnya pada 4 November.

Dalam catatan yang diterbitkan pada Jumat malam, Williams merekomendasikan agar klien mengambil posisi yang mengantisipasi kinerja obligasi bertenor 20 tahun yang lebih baik dibandingkan surat utang bertenor 10 tahun.

Strategi tersebut didasarkan pada kemungkinan adanya “pengurangan, atau bahkan penghentian penerbitan obligasi bertenor 20 tahun”.

Indikasi awal perubahan tersebut dapat muncul dari survei terhadap para dealer yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat depan.

Menurut Williams, kuesioner tersebut berpotensi menjadi “katalis positif” bagi strategi perdagangan itu jika Departemen Keuangan AS menanyakan kepada lembaga-lembaga keuangan besar apakah permintaan terhadap surat utang bertenor panjang mulai “tergerus sebagian” oleh penerbitan obligasi berkualitas tinggi dari perusahaan-perusahaan teknologi berskala besar berbasis komputasi awan (hyperscaler).

“Meski kami tidak berpikir bahwa pasokan obligasi korporasi berperingkat investment grade (IG) tersebut telah memengaruhi tingkat suku bunga secara keseluruhan, kami menilai dana pensiun mungkin mulai mengalokasikan lebih banyak dana ke obligasi IG bertenor panjang dibandingkan biasanya,” tulisnya.

Di kalangan pelaku pasar Wall Street, perdebatan mengenai langkah yang mungkin diambil Bessent untuk membantu menekan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang berada di dekat level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir semakin menguat.

Awal pekan ini, para ahli strategi di BNP Paribas SA menyatakan skeptisisme mereka terhadap efektivitas langkah tersebut dalam menurunkan biaya pinjaman pemerintah AS.

Wall Street Menguat Sepekan, Investor Menanti Kinerja Emiten dan Data Inflasi AS

Sabtu, 10 Oktober 2026 05:49 WIB

Reporter: Noverius Laoli, Editor: Noverius Laoli

<https://investasi.kontan.co.id/news/wall-street-menguat-sepekan-investor-menanti-kinerja-emiten-dan-data-inflasi-as>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada akhir perdagangan Jumat (9/10/2026), sekaligus mencatat kenaikan sepanjang pekan.

Namun, pergerakan pasar masih dibayangi ketidakpastian perang Iran dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Investor kini mengalihkan perhatian ke pekan depan, ketika musim laporan keuangan kuartal III-2026 mulai bergulir dan data inflasi AS dijadwalkan rilis.

Kedua faktor tersebut akan menjadi petunjuk penting untuk menilai prospek laba perusahaan dan arah kebijakan moneter The Fed.

Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,83% atau 423,31 poin ke level 51.654,95.

Indeks S&P 500 menguat 0,59% atau 46,15 poin ke 7.811,51, sedangkan Nasdaq Composite naik 0,64% atau 172,83 poin ke 27.366,17.

Ketiga indeks utama tersebut membukukan kenaikan mingguan. Namun, indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 justru berakhir di bawah posisi penutupan Jumat pekan sebelumnya.

Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird, menilai kenaikan pasar masih terbatas karena investor menghadapi ketidakpastian perkembangan konflik Iran. "Ini sebabnya reli pasar masih relatif terbatas," ujar Mayfield.

Sentimen pasar sempat membaik setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington tidak akan meluncurkan serangan terhadap Iran sebelum pemilihan paruh waktu.

Trump juga menyebut perundingan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang Iran berjalan produktif. Meski demikian, harga minyak mentah kembali menguat pada akhir perdagangan. Kontrak minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent masing-masing naik 0,4%.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury juga bergerak naik tipis, meski masih berada di bawah level tertinggi dalam 24 tahun yang tercatat pada Rabu.

Investor menanti laporan keuangan bank

Perhatian pasar pada pekan depan akan tertuju pada laporan keuangan kuartal III-2026, terutama dari sejumlah bank besar AS.

Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, dan Morgan Stanley dijadwalkan merilis kinerja keuangan mereka.

Data LSEG menunjukkan, analis memperkirakan laba perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500 secara agregat tumbuh 30,6% secara tahunan pada periode Juli-September 2026.

Sektor energi diperkirakan mencatat pertumbuhan laba terbesar, yakni 123%, disusul sektor teknologi sebesar 66,5%.

Meski prospek laba perusahaan relatif kuat, kondisi konsumen AS menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Data University of Michigan menunjukkan sentimen konsumen memburuk pada Oktober, dengan ekspektasi jangka pendek merosot ke level terendah sepanjang sejarah pengukuran.

Kondisi ini menjadi perhatian investor karena konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 70% aktivitas ekonomi AS. Pelemahan ekspektasi konsumen berpotensi memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, sektor jasa komunikasi menjadi satu-satunya sektor yang mencatat penurunan.

Saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) secara umum menguat. Roundhill Magnificent Seven ETF, yang melacak kelompok saham teknologi berkapitalisasi besar, naik 1%.

Michael Monaghan, manajer portofolio di Founder ETFs, menilai industri semikonduktor masih menjadi salah satu penggerak utama pasar saham tahun ini, seiring perkembangan teknologi yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang.

Di sisi lain, saham perusahaan telekomunikasi tertekan setelah SpaceX milik Elon Musk mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi portofolio spektrum frekuensi rendah yang mencakup seluruh wilayah AS.

Kesepakatan ini berpotensi meningkatkan persaingan di industri layanan nirkabel.

Saham T-Mobile US, AT&T, dan Verizon masing-masing turun antara 8,8% dan 13,3%.

Sementara itu, saham Humana melonjak 11,6% setelah data pemerintah AS menunjukkan bahwa 95% peserta program Medicare Advantage yang dikelolanya berada dalam paket dengan peringkat empat bintang atau lebih tinggi untuk 2027.

Sebaliknya, saham Apple turun 1,1%. Penurunan terjadi setelah laporan media menyebut perusahaan tersebut meminta sejumlah pemasok mengurangi produksi komponen untuk iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang baru diluncurkan.

Kenaikan biaya cip memori dan harga jual produk disebut menekan permintaan konsumen.

Secara keseluruhan, jumlah saham yang naik di Bursa Efek New York (NYSE) melampaui saham yang turun dengan rasio 1,65 banding 1. Di Nasdaq, saham yang menguat juga lebih banyak, dengan rasio 1,38 banding 1.

Meski indeks utama bergerak positif, jumlah saham yang mencetak level terendah baru dalam 52 pekan masih melampaui saham yang mencapai level tertinggi baru di Nasdaq.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan indeks belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan merata di seluruh saham.

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 14,37 miliar saham, di bawah rata-rata 20 hari perdagangan terakhir yang sebesar 17,76 miliar saham.

Putin Klaim Pasokan Solar Rusia ke AS Bisa Dongkrak Ekonomi Dunia

Sabtu, 10 Oktober 2026 09:51 WIB

Penulis: Rizky Pradita Ananda

<https://www.beritasatu.com/internasional/3032710/putin-klaim-pasokan-solar-rusia-ke-as-bisa-dongkrak-ekonomi-dunia>

Moskwa, Beritasatu.com – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasokan bahan bakar solar Rusia ke pasar Amerika Serikat (AS) dan global akan berdampak positif terhadap perekonomian dunia. Pernyataan itu disampaikan setelah Putin melakukan percakapan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Jumat (9/10/2026).

Dalam pernyataan yang dirilis Kremlin, Putin mengatakan dalam sambungan telepon tersebut ia dan Trump membahas sektor energi global, prospek penyelesaian perang Ukraina, situasi terkait Iran, serta hubungan bilateral kedua negara.

"Dalam membahas keadaan sektor energi global, pihak Rusia menegaskan kembali kesiapannya untuk memasok minyak dan produk minyak bumi ke pasar AS dan global. Saya yakin ini akan berdampak positif pada ekonomi global secara keseluruhan," kata Putin, dikutip dari Anadolu, Sabtu (10/10/2026).

Sebelumnya, melalui platform Truth Social resminya, Trump mengatakan pembicaraan dengan Putin menghasilkan kesepakatan bagi Rusia untuk segera memasok lebih dari 300.000 ton solar ke pasar AS dan global.

Trump menyebut, setelah itu Rusia juga akan segera memasok 500.000 ton bahan bakar solar tambahan pada November 2026 dan disusul 1 juta ton setelahnya.

Menurut Trump, 3 juta ton solar Rusia lainnya akan dikirimkan dalam waktu singkat. Namun, realisasi pengiriman tersebut bergantung pada kondisi kilang minyak Rusia yang sebelumnya menjadi sasaran serangan Ukraina.

Tak lama setelah pengumuman Trump, Departemen Keuangan AS secara resmi mengeluarkan izin sementara yang mengizinkan solar Rusia masuk ke pasar.

Kinerja APBN September: Penerimaan Rp2.341,5 T, Restitusi Dikebut

Sabtu, 10 Oktober 2026 15:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124192/kinerja-apbn-september-penerimaan-rp2-341-5-t-restitusi-dikebut/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2026 menunjukkan kenaikan penerimaan negara di tengah akselerasi belanja pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah mulai melonggarkan pengelolaan restitusi pajak untuk memenuhi hak wajib pajak.

Di sisi lain, pemerintah juga masih harus mengelola kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan dan biaya penerbitan surat utang negara.

Berikut sejumlah catatan utama dari realisasi APBN hingga September 2026.

1. Penerimaan Negara Tumbuh 25,5%, Pajak Jadi Penopang

Penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun hingga September 2026, tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara 74,2% dari target APBN 2026.

Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp1.847,7 triliun, tumbuh 21,8% secara tahunan. Angka ini terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp240,1 triliun.

Penerimaan pajak juga tumbuh 24,1% secara tahunan dan telah mencapai 68,2% dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 8,5% menjadi Rp240,1 triliun, setara 71,5% dari target.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut bahkan telah melampaui target PNBP dalam APBN 2026, yakni sebesar 107,2%.

Namun, defisit melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB. Kendati demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim defisit APBN ini sudah sesuai jalurnya. Dia bahkan memastikan defisit anggaran sampai akhir tahun akan menyentuh level 2,8% seperti target yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2026.

"Belanja negara sampai 3/4 tahun sudah digunakan 69,2%, ini on track," kata Suahasil.

Lebih lanjut, penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp809,3 triliun, tumbuh 17,6% secara tahunan. Sedangkan PPh migas meningkat lebih tinggi, yakni 128,2% menjadi Rp43,6 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi.

Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp683,3 triliun, meningkat 38,6% secara tahunan.

Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

2. Restitusi Pajak Dipercepat

Di tengah kenaikan penerimaan pajak, pemerintah mulai melonggarkan pengelolaan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang berhak.

Percepatan pengembalian ini utamanya didorong ke sektor-sektor yang mendongkrak perekonomian.

"Saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin diproses hak dari para wajib pajak ini," jelas Suahasil.

Sebagai gambaran, hingga September 2026, realisasi restitusi pajak mencapai Rp198,71 triliun turun sekitar 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp320,91 triliun.

Terdiri dari PPh sebesar Rp59,08 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp137,79 triliun, dan jenis pajak lainnya sebesar Rp1,84 triliun.

Sementara, restitusi jenis pajak lainnya justru mengalami peningkatan dari Rp1,04 triliun pada September 2025 menjadi Rp1,84 triliun pada September 2026.

3. Belanja Negara Tumbuh 19%, Subsidi dan Kompensasi Naik

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun hingga September 2026, setara 69,2% dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu, tumbuh 29,6% secara tahunan.

Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.069,4 triliun, setara 70,8% dari pagu dan tumbuh 33,5%. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp991,9 triliun, setara 60,5% dari pagu dan tumbuh 25,7%.

Adapun transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5% dari pagu. Namun, realisasi TKD tersebut masih turun 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Suahasil mengungkapkan pemerintah telah membayar Rp376,8 triliun hingga September 2026, meningkat dari Rp244,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pembayaran tersebut setara 84,3% dari alokasi subsidi dan kompensasi dalam APBN.

Berdasarkan paparan APBN Kita, realisasinya terdiri atas subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun.

Pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

4. Pembiayaan Utang Baru 59,4% dari Target, Biaya Bunga Sudah Rp444,5 Triliun

Di tengah defisit APBN, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang bersih tahun ini sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika pembiayaan utang mencapai Rp502,9 triliun.

Pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, berbanding terbalik dengan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.

Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.

Adapun Kemenkeu turut menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara di tengah defisit APBN hingga akhir 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan utang pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan skenario defisit sebesar 2,85% dari PDB, sesuai outlook laporan semester.

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV, beberapa SUN akan masih kita lakukan. Pertama, kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap Selasa. Jadi enam kali lelang SUN dan enam kali lelang SBSN di kuartal IV," kata Suminto.

Pemerintah, lanjut Suminto, juga akan menerbitkan dua instrumen SBN ritel hingga akhir tahun, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri 015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri 017 untuk instrumen syariah.

Selain mengandalkan pasar domestik, Kemenkeu masih membuka peluang penerbitan SBN dalam valuta asing atau global bond.

Namun, realisasinya akan bergantung pada perkembangan kondisi pasar keuangan global yang saat ini dinilai sangat dinamis.

Di samping penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki potensi penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral sebesar US\$1,8 miliar yang siap dicairkan pada kuartal IV-2026.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US\$1,8 miliar siap untuk ditarik di kuartal keempat," tuturnya.

Pembayaran Subsidi & Kompensasi Tembus Rp376 T per September 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 14:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124188/pembayaran-subsidi-kompensasi-tembus-rp376-t-per-september-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi sebesar Rp376,8 triliun hingga September 2026.

Besaran pembayaran itu setara dengan 84,3% dari alokasi subsidi dan kompensasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

Realisasi tersebut juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun.

Suahasil mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), kini dilakukan secara bulanan.

"Artinya badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menjalankan harga barang bersubsidi itu dapat cashflow-nya lebih besar dari APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita dikutip Sabtu (10/10/2026).

Realisasi pembayaran itu terdiri dari subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun, tumbuh 54,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp244,6 triliun. Dengan besaran subsidi Rp176 triliun dan kompensasi Rp68,6 triliun.

Di sisi lain, Suahasil menyoroti peningkatan penggunaan sejumlah barang dan layanan bersubsidi hingga September 2026.

Volume konsumsi BBM bersubsidi tercatat meningkat 9,1% secara tahunan menjadi 13.408,6 kiloliter dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan konsumsi LPG 3 kg naik 2,2% menjadi 5.761,6 juta kilogram.

Jumlah pelanggan listrik meningkat 2,1% menjadi 43,4 juta pelanggan sementara realisasi volume pupuk bersubsidi naik 15,7% menjadi 6,6 juta ton. Penyaluran KUR juga tumbuh 7,9% menjadi 3,7 juta debitur.

Suahasil menilai peningkatan tersebut menunjukkan masyarakat terus menggunakan barang dan layanan bersubsidi untuk mendukung kegiatan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi.

"Itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi," tegasnya.

In This Economy.. Siapa yang Menikmati 'Kue' Ekonomi Terbesar?

Sabtu, 10 Oktober 2026 07:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124175/in-this-economy-siapa-yang-menikmati-kue-ekonomi-terbesar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Keluhan warga RI tentang kondisi kelesuan ekonomi semakin jamak terekam di berbagai kanal media sosial dengan berbagai istilah kekinian seperti "In this economy..." atau yang terbaru tentang fenomena downgrade gaya hidup yang sempat viral belakangan. Keluhan itu seakan ironis di tengah laporan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mampu melampaui 5% selama sekian kuartal.

Bila memang perekonomian Indonesia masih tumbuh mengesankan di tengah berbagai tantangan seperti klaim pemerintah, mengapa mayoritas warga tak berhenti mengeluhkan kondisi sebaliknya? Mengapa nuansa vibecession justru semakin menguat --yakni ketika terdapat situasi yang seolah tidak nyambung antara persepsi publik dan data indikator utama makroekonomi.

Analisis terbaru dari ekonom menemukan, perekonomian Indonesia mungkin memang masih tumbuh walau pada kuartal terakhir yang dilaporkan yakni kuartal II-2026 terindikasi melambat dengan pertumbuhan 5,29% setelah pada kuartal sebelumnya mencapai 5,61%. Sepanjang 2025 bila melihat data statistik, lajunya juga masih di atas 5% terkecuali pada kuartal pertama tahun lalu.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang seolah baik baik saja itu, terungkap bahwa yang menikmati 'kue' pertumbuhan ekonomi bukanlah seluruh lapisan masyarakat. Terdapat kesenjangan yang semakin mencolok di mana kelompok dengan pengeluaran terbesar adalah yang paling menikmati pertumbuhan, sementara kelompok yang lain justru mengalami perlambatan bahkan penurunan.

Simak laporan lengkap dengan analisis mendalam di Bloomberg Businessweek Indonesia edisi terbaru Oktober 2026 yang bisa Anda baca gratis di link ini, cukup dengan registrasi diri.

Dalam Bloomberg Businessweek Indonesia Edisi Oktober 2026, pembaca juga disuguhi laporan utama tentang biaya mahal dampak dari anomali iklim El Nino yang sudah merembet ke banyak lini dan berisiko kian memberatkan perekonomian ke depan. Ada juga laporan dari ranah global tentang persaingan dua negara raksasa yakni China dan Amerika Serikat dalam membesarkan industri kecerdasan buatan (AI) yang sejauh ini ternyata dimenangkan oleh Tiongkok.

Harga Beras & Cabai Menguat Akhir Pekan Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 09:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124179/harga-beras-cabai-menguat-akhir-pekan-ini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan mengalami kenaikan secara harian, salah satunya beras dan cabai.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Sabtu (10/10/2026) pukul 08.20 WIB, harga beras kualitas bawah II naik 0,34% atau Rp50, menjadi Rp14.750 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I juga naik 0,3% atau Rp50, menjadi Rp16.650 per kilogram. Begitu juga beras kualitas super II naik 0,29% atau Rp50, menjadi Rp17.400 per kilogram.

Namun, harga beras kualitas bawah I tidak berubah atau tetap Rp14.900 per kilogram. Harga beras kualitas medium II dan kualitas super I juga tidak berubah atau tetap Rp16.400 per kilogram dan Rp17.950 per kilogram.

Di sisi lain, harga cabai merah besar naik 12,35% atau Rp7.800, menjadi Rp70.950/kg. Harga cabai merah keriting juga naik 12,85% atau Rp9.600, menjadi Rp84.300/kg. Harga cabai rawit hijau naik 9,32% atau Rp6.550 menjadi Rp76.850/kg.

Sementara harga cabai rawit merah naik 2,88% atau Rp2.900 menjadi Rp103.450/kg, sekaligus masih menjadi harga jenis cabai yang tertinggi.

Pada bagian lain, komoditas daging ayam ras segar kini turun 1,31% atau Rp550, menjadi Rp41.350/kg. Turut menyusul harga telur ayam ras segar juga turun 0,5% atau Rp150 menjadi Rp29.700/kg.

Tetapi, daging sapi kualitas I masih naik 0,07% atau Rp100, menjadi Rp152.650/kg. Begitu juga daging sapi kualitas II yang naik 0,42% atau Rp600, menjadi Rp144.000/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang juga turun 0,67% atau Rp250, menjadi Rp37.050/kg. Begitupun, bawang putih ukuran sedang yang turun 0,39% atau Rp150, menjadi Rp38.500/kg.

Harga minyak goreng turut turun 0,49% atau Rp100, menjadi Rp20.300/kg. Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,21% atau Rp50, menjadi Rp24.400/kg dan harga minyak goreng kemasan bermerek 2 juga naik 0,21% atau Rp50, menjadi Rp23.600/kg.

Terakhir, gula pasir kualitas premium naik 0,74% atau Rp150, menjadi Rp20.500/kg. Begitu juga gula pasir lokal naik 0,52% atau Rp100 menjadi Rp19.250/kg.

Investasi Rp 710 Miliar, Pabrik HSG di KEK Kendal Serap 400 Pekerja

Sabtu, 10 Oktober 2026 17:54 WIB

Penulis: Erfan Maruf, Editor: AD

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032790/investasi-rp-710-miliar-pabrik-hsg-di-kek-kendal-serap-400-pekerja>

Kendal, Beritasatu.com - PT HSG Material Indonesia merealisasikan investasi senilai Rp 710 miliar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah. Investasi tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 400 tenaga kerja serta memperkuat kapasitas industri manufaktur dan potensi ekspor material konstruksi Indonesia.

Pabrik yang diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Semarang itu memproduksi sejumlah material konstruksi, meliputi tiang pancang pipa prefabrikasi, tiang pancang persegi prefabrikasi, dan beton pracetak.

Berdasarkan perencanaan awal perusahaan, fasilitas produksi tersebut ditargetkan memiliki kapasitas penjualan tahunan mencapai 3 juta meter tiang pancang beton prefabrikasi dan 150.000 meter persegi beton siap pakai.

Airlangga mengatakan, pengembangan KEK Kendal dan masuknya investasi baru diharapkan memperkuat ekosistem industri di Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi manufaktur, serta perluasan pasar ekspor.

“Pengembangan KEK Kendal dan masuknya investasi baru diharapkan terus memperkuat ekosistem industri Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi kegiatan manufaktur, dan perluasan pasar,” ujar Airlangga dalam seremoni peresmian PT HSG Material Indonesia, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Airlangga, pengembangan kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menarik investasi, meningkatkan kapasitas industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses pasar ekspor.

Kehadiran PT HSG Material Indonesia, yang merupakan bagian dari Fujian Hongsheng Material Technology, juga menjadi momentum penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok.

Investasi tersebut sejalan dengan inisiatif Two Countries, Twin Parks (TCTP), yakni kerja sama pengembangan kawasan industri kembar antara Indonesia dan Tiongkok. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong realisasi proyek investasi, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok kedua negara.

Melalui kerja sama tersebut, pengembangan industri diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat keterhubungan antarpelaku usaha dan rantai pasok.

Dari sisi pasar, fasilitas produksi HSG berpotensi memenuhi kebutuhan material konstruksi dalam negeri sekaligus menjangkau pasar regional, khususnya Asia Tenggara.

Pasar material konstruksi di kawasan tersebut tercatat mencapai US\$ 682 juta pada 2025. Dengan dukungan kapasitas produksi, akses pasar, dan konektivitas industri, pengembangan manufaktur di KEK Kendal dinilai berpeluang meningkatkan daya saing produk Indonesia dan potensi devisa ekspor.

KEK Kendal merupakan pengembangan lanjutan dari Kawasan Industri Kendal (KIK), yang diresmikan pada 14 November 2016 sebagai bagian dari kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura.

Kawasan tersebut kemudian memperoleh status KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.

Sejak itu, KEK Kendal terus dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu yang menawarkan dukungan infrastruktur serta fasilitas dan kemudahan investasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kawasan ini juga diarahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Tengah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif agar komitmen investasi dapat direalisasikan menjadi kegiatan usaha produktif.

“Pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif agar komitmen investasi dapat diwujudkan menjadi kegiatan usaha produktif yang memperkuat struktur industri nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Haryo.

Peresmian PT HSG Material Indonesia turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan pengelola KEK Kendal, jajaran Jababeka, serta pimpinan PT HSG Material Indonesia.

Utang Pemerintah Rp 10.293 Triliun, Pembiayaan APBN Terkendali?

Sabtu, 10 Oktober 2026 17:38 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032786/utang-pemerintah-rp-10293-triliun-pembiayaan-apbn-terkendali>

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Jumlah tersebut setara dengan 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, angka tersebut merupakan akumulasi kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar. Utang tersebut mencakup penerbitan surat utang dan pinjaman pemerintah, bukan hanya penambahan utang sepanjang 2026.

Dari total tersebut, sebesar Rp 8.966,79 triliun atau sekitar 87,11% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 1.326,90 triliun atau 12,89%.

SBN merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah dan dibeli investor dari dalam maupun luar negeri. Adapun pinjaman pemerintah berasal dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk lembaga keuangan serta pemberi pinjaman bilateral dan multilateral.

Pada sisi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Kemenkeu melaporkan realisasi pembiayaan utang sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp 494,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Pembiayaan melalui penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat minus Rp 3,2 triliun secara neto. Angka negatif tersebut menunjukkan pembayaran pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman baru selama periode tersebut.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 masih sesuai dengan rencana pemerintah. Menurutnya, penerbitan surat utang harus mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN sekaligus perkembangan pasar keuangan.

“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar tetapi juga harus oportunistik,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Suahasil menjelaskan, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan surat utang dengan kondisi pasar. Ketika permintaan investor tinggi dan biaya penerbitan dinilai menguntungkan, pemerintah dapat menerbitkan SBN. Sebaliknya, penerbitan dapat disesuaikan ketika kondisi pasar kurang mendukung.

“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.

Pembiayaan utang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan APBN, termasuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. Hingga September 2026, APBN mengalami defisit Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Pada periode tersebut, pendapatan negara tercatat Rp 2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN meningkat menjadi sekitar 2,85% terhadap PDB pada akhir 2026. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, Kemenkeu masih menyiapkan 12 lelang SBN reguler dan dua penerbitan SBN ritel pada kuartal IV 2026.

Selain memenuhi kebutuhan anggaran, pemerintah juga berupaya menjaga biaya utang agar tidak semakin membebani APBN. Suahasil menyebut selisih imbal hasil SBN Indonesia tenor 10 tahun dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat berada di kisaran 188 basis poin, yang disebutnya sebagai level terendah dalam 20 tahun terakhir.

Menurut Suahasil, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas kebijakan fiskal dinilai berperan dalam menjaga biaya penerbitan surat utang agar tidak terlalu tinggi.

“Namun kita harus kerja keras sehingga yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya,” kata Suahasil.

Asumsi APBN 2026 Meleset karena Rupiah dan Harga Minyak

Sabtu, 10 Oktober 2026 16:52 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032777/asumsi-apbn-2026-meleset-karena-rupiah-dan-harga-minyak>

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah indikator ekonomi makro Indonesia bergerak di luar asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Nilai tukar rupiah yang melemah, inflasi yang meningkat, hingga harga minyak mentah yang melonjak menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan penerimaan dan belanja negara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp 17.449 per dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

“Nilai tukar rata-rata setahunnya adalah Rp 17.449 per dolar AS, dan ini memang year-to-date ini adalah angka rata-rata 1 tahun, rata-rata setiap hari. Kalau hari ini mungkin Rp 17.800 atau Rp 17.9000, tetapi rata-rata setahunnya Rp 17.449 per dolar AS. Memang ini lebih tinggi dari nilai tukar yang kita pakai di dalam APBN, karena itu harus kita mitigasi dampaknya,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Selain rupiah, inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan. Angka tersebut melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,5%.

Sementara itu, rata-rata imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sepanjang tahun berjalan berada di level 6,8%, sedikit di bawah asumsi APBN sebesar 6,9%. Perkembangan imbal hasil SBN turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan biaya penerbitan surat utang untuk membiayai anggaran negara.

Tekanan juga datang dari sektor energi. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada September 2026 mencapai US\$ 91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US\$ 70 per barel.

Suahasil mengingatkan, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi energi.

“Dan dengan harga minyak yang meningkat terus seperti hari-hari ini, maka angka ini (US\$ 91,9) besok-besok akan meningkat dia. Dan kalau dia meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,” ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menjelaskan, kenaikan harga minyak memiliki dua sisi terhadap APBN. Pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, pada saat yang sama, beban subsidi dan kompensasi energi dapat meningkat apabila harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap dipertahankan.

Risiko fiskal juga muncul dari produksi migas yang belum memenuhi target. Hingga September 2026, lifting minyak tercatat 573.900 barel per hari, lebih rendah dibandingkan asumsi APBN sebesar 610.000 barel per hari.

Adapun lifting gas mencapai 929.700 barel setara minyak per hari, di bawah target 984.000 barel setara minyak per hari.

Suahasil mengatakan, produksi migas yang lebih rendah daripada asumsi dapat memengaruhi penerimaan negara. Hal ini karena volume minyak dan gas yang diproduksi serta siap dijual menjadi salah satu dasar perhitungan penerimaan dari sektor tersebut.

“Kalau dia di bawah asumsi, berarti penerimaan negara juga tidak sesuai dengan target yang berasal dari lifting minyak dan gas bumi,” kata Suahasil.

Kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi potensi kenaikan belanja energi sekaligus risiko perubahan penerimaan dari sektor migas. Tambahan penerimaan akibat kenaikan harga minyak berpotensi tidak optimal apabila produksi berada di bawah target, sementara kebutuhan subsidi dan kompensasi meningkat.

Kementerian Keuangan menyatakan akan terus memantau perkembangan harga minyak, nilai tukar rupiah, konsumsi energi, serta kebutuhan subsidi dan kompensasi. Koordinasi dengan Bank Indonesia juga diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pelaksanaan APBN tetap terkendali di tengah ketidakpastian global.

Perbandingan Asumsi APBN 2026 dan Realisasi

Berikut sejumlah indikator ekonomi makro beserta asumsi APBN 2026 dan realisasinya berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan berita:

Pertumbuhan ekonomi

- Asumsi APBN 2026: 5,4%.
- Realisasi: 5,45% pada semester I 2026.

Inflasi

- Asumsi APBN 2026: 2,5%.
- Realisasi: 3,28% secara tahunan pada September 2026.

Nilai tukar rupiah

- Asumsi APBN 2026: Rp 16.500 per dolar AS.
- Realisasi: Rp 17.449 per dolar AS, rata-rata Januari-September 2026.

Imbal hasil SBN tenor 10 tahun

- Asumsi APBN 2026: 6,9%.
- Realisasi: 6,8%, rata-rata sepanjang tahun berjalan hingga September 2026.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

- Asumsi APBN 2026: US\$ 70 per barel.
- Realisasi: US\$ 91,9 per barel pada September 2026.

Lifting minyak bumi

- Asumsi APBN 2026: 610.000 barel per hari.
- Realisasi: 573.900 barel per hari hingga September 2026.

Lifting gas bumi

- Asumsi APBN 2026: 984.000 barel setara minyak per hari.
- Realisasi: 929.700 barel setara minyak per hari hingga September 2026.

Pemerintah Buka Peluang Terbitkan Utang Valas untuk Biayai APBN

Sabtu, 10 Oktober 2026 15:54 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi, Editor: HE

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032766/pemerintah-buka-peluang-terbitkan-utang-valas-untuk-biayai-apbn>

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyiapkan 12 lelang surat berharga negara (SBN) reguler dan dua penerbitan SBN ritel pada kuartal IV-2026 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga membuka peluang menerbitkan surat utang dalam valuta asing (valas), bergantung pada kondisi pasar keuangan global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, penerbitan SBN akan berlanjut selama tiga bulan terakhir 2026. Langkah ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, sejalan dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB).

“Yang pertama, kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari Selasa (ini 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN) di kuartal ke-4,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Suminto menjelaskan, 12 lelang tersebut terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Penerbitan ini menjadi salah satu cara pemerintah memperoleh dana dari investor untuk membiayai belanja negara dan menutup defisit APBN.

Selain lelang reguler, pemerintah menjadwalkan penerbitan dua SBN ritel yang dapat dibeli masyarakat, yakni Saving Bond Retail seri SBR015 dan Sukuk Tabungan seri ST017.

SBR merupakan surat utang negara yang ditawarkan kepada investor individu dengan imbal hasil berupa kupon. Sementara itu, ST merupakan surat berharga negara berbasis prinsip syariah yang memberikan imbalan kepada pemegangnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan SBN dalam mata uang asing untuk memperluas sumber pembiayaan. Namun, keputusan tersebut akan bergantung pada perkembangan pasar keuangan global yang saat ini dinamis.

“Untuk penerbitan SBN valas, kami open-minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu masih ada, subject to market condition,” ujar Suminto.

Menurut Suminto, Kemenkeu telah menyiapkan berbagai persyaratan untuk mengantisipasi kemungkinan penerbitan surat utang valas. Persiapan tersebut meliputi dokumen hukum dan administrasi transaksi sehingga pemerintah dapat bergerak ketika kondisi pasar dinilai mendukung.

Di luar penerbitan surat utang, pemerintah juga masih memiliki peluang menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral senilai US\$ 1,8 miliar pada kuartal IV 2026.

Pinjaman tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Penarikannya akan disesuaikan dengan strategi pembiayaan pemerintah dan kebutuhan anggaran hingga akhir tahun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi penerbitan SBN secara neto hingga September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun.

Suahasil menegaskan, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi pasar sebelum menerbitkan surat utang. Strategi penerbitan akan disesuaikan dengan perkembangan pasar agar biaya pembiayaan negara dapat dikelola secara optimal.

Defisit APBN 2026 Rp 319 Triliun Bukan Berarti Tekor

Sabtu, 10 Oktober 2026 14:49 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi, Editor: HE

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032758/defisit-apbn-2026-rp-319-triliun-bukan-berarti-tekor>

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.660,5 triliun. Selisih tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, defisit tersebut bukan berarti APBN tekor.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja APBN hingga September 2026 masih sesuai dengan rencana pemerintah. Pendapatan negara telah mencapai 74,2% dari target tahunan, sementara belanja negara terealisasi 69,2% dari pagu anggaran.

“Defisitnya saat ini 1,2% dari PDB. Jadi ini on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dari sisi pendapatan, realisasi sebesar Rp 2.341,5 triliun tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan pajak mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN 2026. Angka ini tumbuh 24,1% dibandingkan September 2025 yang tercatat sekitar Rp 1.295,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun atau 71,5% dari target, tumbuh 8,5% secara tahunan. Adapun PNBP mencapai Rp 492,3 triliun atau sekitar 107,2% dari target Rp 459,2 triliun, dengan pertumbuhan 41,7%.

Belanja Negara Tumbuh 19%

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN. Jumlah tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Suahasil menyebut penyerapan anggaran tahun ini lebih cepat dibandingkan September 2025, ketika realisasi belanja baru mencapai sekitar 61% dari pagu.

Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu. Sementara itu, transfer ke daerah terealisasi Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari perkiraan alokasi terbaru sebesar Rp 727 triliun.

Belanja pemerintah pusat mencakup belanja pegawai Rp 287,7 triliun, belanja barang Rp 463,9 triliun, belanja modal Rp 202 triliun, dan bantuan sosial Rp 115,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program bantuan bagi masyarakat.

Dengan belanja yang lebih besar daripada pendapatan, defisit APBN hingga September 2026 mencapai Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 0,9% terhadap PDB.

Suahasil memperkirakan defisit akan meningkat hingga akhir tahun seiring berlanjutnya realisasi belanja pemerintah. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 mencapai 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi daripada target awal sebesar 2,68%.

Meski demikian, Suahasil menegaskan defisit tersebut masih sejalan dengan desain kebijakan fiskal pemerintah. APBN memang dirancang mengalami defisit untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan kebutuhan belanja negara.

“Jadi ini on track ya. Bukan APBN saat ini seakan-akan tekor. Saya tahu media paling suka pakai kata 'tekor'. Ini bukan sekadar tekor, ini on track. Karena memang APBN kita desain defisit,” kata Suahasil.

Pada sisi lain, keseimbangan primer APBN hingga September 2026 masih mencatat surplus Rp 125,5 triliun. Artinya, pendapatan negara masih mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.

Pasar UMKM hadir di Setda Kabupaten Magelang

Sabtu, 10 Oktober 2026 11:38 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647949/pasar-umkm-hadir-di-setda-kabupaten-magelang>

Magelang (ANTARA) - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang mendapat akses pasar baru melalui Pasar UMKM di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang, tepatnya di depan halaman DPRD Kabupaten Magelang.

Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Pujianto di Magelang, Jumat, mengatakan Pasar UMKM dirancang sebagai wadah pemberdayaan sekaligus perluasan pemasaran produk lokal.

Tidak sekadar menyediakan tempat berjualan, program tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara langsung, mulai dari aparat sipil negara (ASN) hingga tamu yang berkunjung ke kompleks perkantoran tersebut.

Ia mengatakan kegiatan itu ditargetkan berlangsung sepanjang tahun pada hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WIB.

"Latar belakangnya, kita ingin memberdayakan UMKM dengan membuka akses pasar. Targetnya teman-teman PNS di lingkungan Setda dan tamu-tamu yang berkunjung ke Sekretariat Daerah," katanya.

Pada tahap awal, lanjutnya, tersedia lima tenda yang menampung berbagai kelompok usaha. Mulai dari klaster kopi Magelang, UMKM binaan Diskop UKM yang menyediakan makanan siap saji, pelaku usaha yang sebelumnya berjualan di sejumlah titik di lingkungan perkantoran, hingga produk binaan Disperinaker, Dispertan, dan Dispertikan.

Ia mengatakan produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan beras, juga mendapat ruang pemasaran melalui stan yang melibatkan petani, termasuk petani muda.

Untuk memperluas manfaatnya, pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut akan difasilitasi agar memiliki akun program Belonjo Warung Tonggo.

Dengan demikian, katanya, transaksi di pasar UMKM tersebut sekaligus diharapkan mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal yang digagas Bupati Magelang.

Jenis UMKM yang mengisi stan akan diganti secara berkala agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan berjualan, katanya menjelaskan.

Khusus klaster kopi, katanya, pergiliran dilakukan setiap hari untuk memberikan variasi pilihan kepada konsumen.

TKD Blora 2027 diproyeksikan jadi Rp1,49 triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 06:41 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/647926/tkd-blora-2027-diproyeksikan-jadi-rp149-triliun>

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diproyeksikan menerima Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,49 triliun pada 2027 atau naik sekitar Rp8 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan TKD pada 2026.

"Jumlah TKD tersebut sudah termuat dalam surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, bahwa tahun depan proyeksi TKD untuk Kabupaten Blora ada kenaikan sebesar Rp8 miliar menjadi Rp1,49 triliun dibandingkan tahun anggaran 2026," kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Ahmad Nafik Udin di Blora, Kamis.

Ia menjelaskan salah satu komponen yang belum masuk dalam proyeksi tersebut adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Oleh karena itu, masih terdapat peluang penerimaan TKD Blora pada 2027 bertambah.

"Potensi penambahan TKD bagi Pemkab Blora tahun depan masih ada," ujarnya.

Sebagai pembanding, TKD Kabupaten Blora pada 2026 tercatat sekitar Rp1,48 triliun. Nilai tersebut telah termasuk tambahan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27 miliar.

"Penambahan TKD dari DBH sudah dimasukkan pada APBD perubahan tahun ini," jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Blora masih menunggu kepastian mengenai rencana pengalihan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat pada 2027.

Nafik mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah pengalihan tersebut nantinya akan berdampak terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah.

"Untuk sementara kami belum mengetahui secara pasti. Jika memang ada penarikan ke pusat, apakah nantinya akan berdampak pada DAU juga masih menunggu informasi. Kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia kepastian mengenai skema tersebut penting karena berkaitan dengan ruang fiskal Pemkab Blora. Apabila pembayaran gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat tanpa mengurangi TKD yang diterima daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang anggaran lebih besar.

"Gaji dan tunjangan PPPK di Blora tahun ini Rp381,2 miliar. Seandainya gaji ditarik ke pemerintah pusat, daerah ada kelonggaran Rp381,2 miliar," ujarnya.

Pekalongan kembangkan wisata kuliner hidupkan pelaku UMKM

Sabtu, 10 Oktober 2026 06:38 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/647920/pekalongan-kembangkan-wisata-kuliner-hidupkan-pelaku-umkm>

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terus berupaya mengembangkan wisata kuliner bertema "Jaman Sayki" untuk menghidupkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di pusat kawasan UMKM Jalan Raya Madukaran, Kedungwuni Barat.

Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman di Pekalongan, Jumat mengatakan bahwa keberadaan sentra kuliner tersebut memiliki potensi untuk menjadi tempat berkumpul masyarakat terutama kalangan anak muda yang ingin menikmati aneka jajanan dengan harga terjangkau.

"Kami mengajak masyarakat datang dan menikmati beragam pilihan makanan di kawasan tersebut. Berbagai pilihan makanan tersedia mulai dari kuliner tradisional seperti sate kikil, kluban bothok, dan pindang tetel hingga sajian modern berupa kopi, dimsum, dan cake," katanya.

Menurut dia, keberadaan pusat usaha mikro, kecil, dan menengah tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas perdagangan pada akhir pekan.

Pemerintah daerah, kata dia, berencana memperbanyak agenda agar kawasan tersebut memiliki daya tarik pada hari-hari lainnya seperti penyelenggaraan bursa mobil bekas setiap hari Rabu untuk melengkapi aktivitas kuliner yang selama ini ramai pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

"Ada terobosan pameran mobil-mobil second, mobil-mobil yang masih layak jual. Ini tentu saja akan semakin menambah kesemarak di kawasan UMKM itu pada hari Rabu," ujarnya.

Selain mengembangkan sektor kuliner dan perdagangan, menurut dia, pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan sirkuit balap motor di kawasan tersebut melalui penyelenggaraan beragam acara.

Kerja sama dengan promotor, kata dia, tengah diupayakan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendatangkan lebih banyak pengunjung.

"Kita akan aktivasi sirkuit yang sudah kita bangun sehingga harus ada banyak kegiatan di sirkuit tersebut. Kita sedang melangkah untuk bekerja sama dengan para promotor agar kemudian bisa mengelola dengan baik sirkuit kita dan banyak event di sini," katanya.

Sukirman mengatakan pengembangan pusat kawasan UMKM ini perlu dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan keterlibatan para pelaku usaha.

Perbaikan akses jalan, penyediaan tempat parkir, serta pembenahan fasilitas mandi, cuci, kakus, kata dia, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung.

"Kepada para pelaku usaha UMKM bilamana mempunyai gagasan-gagasan ide untuk sama-sama kita memasarkan produk-produk silakan disampaikan," katanya.

HSG Material investasi Rp710 miliar di KEK Kendal, serap 400 pekerja

Sabtu, 10 Oktober 2026 15:38 WIB

Pewarta: Bayu Saputra, Editor: Ahmad Wijaya

<https://m.antaranews.com/amp/berita/5779921/hsg-material-investasi-rp710-miliar-di-kek-kendal-serap-400-pekerja>

Jakarta (ANTARA) - PT HSG Material Indonesia, salah satu perusahaan manufaktur material konstruksi, menyuntikan investasi senilai Rp710 miliar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Penanaman modal dengan membangun pabrik produksi itu diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja hingga 400 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan peresmian pabrik HSG Material Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas industri manufaktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Fasilitas produksi HSG Material Indonesia mencakup pembuatan tiang pancang pipa prefabrikasi, tiang pancang persegi prefabrikasi, dan beton pracetak.

Berdasarkan perencanaan awal perusahaan, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas penjualan tahunan sebesar tiga juta meter tiang pancang beton prefabrikasi dan 150 ribu meter persegi beton siap pakai.

Kapasitas produksi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan berbagai proyek konstruksi di dalam negeri, sekaligus membuka peluang perluasan pasar ekspor.

“Pengembangan KEK Kendal dan masuknya investasi baru diharapkan terus memperkuat ekosistem industri Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi kegiatan manufaktur, dan perluasan pasar,” ujar Airlangga.

Kehadiran perusahaan yang merupakan bagian dari Fujian Hongsheng Material Technology itu juga menjadi bagian dari penguatan kemitraan industri Indonesia dan China melalui inisiatif Two Countries, Twin Parks (TCTP).

Kerja sama pengembangan kawasan industri tersebut diarahkan untuk mendorong realisasi investasi, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok antara kedua negara.

Dari sisi pasar, fasilitas produksi material konstruksi di Indonesia berpotensi melayani kebutuhan domestik sekaligus menjangkau pasar regional, khususnya Asia Tenggara.

Pasar material konstruksi di kawasan tersebut tercatat mencapai 682 juta dolar AS pada 2025.

Pemerintah berharap masuknya investasi baru dapat memperkuat struktur industri nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif agar komitmen investasi dapat diwujudkan menjadi kegiatan usaha produktif yang memperkuat struktur industri nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Adapun KEK Kendal dikembangkan dari Kawasan Industri Kendal yang diresmikan pada 14 November 2016 sebagai bagian dari kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura. Kawasan tersebut kemudian memperoleh status KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019.

Pengembangan kawasan itu diarahkan untuk menarik investasi, memperluas kegiatan manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor melalui dukungan fasilitas serta kemudahan sesuai ketentuan KEK.

Dongkrak Ekonomi Warga, Baznas Jateng Kucurkan Modal Rp5,25 Miliar untuk 1.750 Mustahik: Didampingi Hingga Naik Kelas Jadi Muzaki!

Sabtu, 10 Oktober 2026 11:04 WIB

Haini Maftuhah

<https://www.inspiratifonline.com/jawa-tengah/2807579235/dongkrak-ekonomi-warga-baznas-jateng-kucurkan-modal-rp525-miliar-untuk-1750-mustahik-didampingi-hingga-naik-kelas-jadi-muzaki>

SEMARANG, inspiratifonline.com - Upaya mengikis angka kemiskinan dan mencetak kemandirian ekonomi masyarakat terus digencarkan.

Sebanyak 1.750 mustahik binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah menerima gelontoran bantuan modal usaha produktif dengan alokasi anggaran mencapai Rp5,25 miliar, di mana setiap pelaku usaha mengantongi modal segar senilai Rp3 juta.

Prosesi penyerahan bantuan secara simbolis dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Hotel Wujil, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (9/10/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan bahwa sokongan modal tak boleh berhenti pada tahap penyaluran belaka.

Ia menuntut adanya skema pengawalan intensif agar dana tersebut benar-benar efektif menggerakkan roda bisnis penerima manfaat.

Gus Yasin pun melemparkan apresiasi atas model pembinaan Baznas yang tak cuma royal mengucurkan dana, melainkan konsisten menyediakan pengawasan berkelanjutan.

Menurutnya, metode ini patut ditiru oleh jajaran pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pemberdayaan.

“Ini menjadi role model buat kita seharusnya. Jadi kalau memang ada yang dibantu itu harus ada yang mendampingi, menjadi pengawas, supaya bisa berkembang,” kata Taj Yasin.

Ia menambahkan, tolok ukur kesuksesan bantuan terletak pada pertumbuhan skala usaha penerima.

Bahkan, Wagub merasa bangga karena ada alumni penerima bantuan Baznas yang sukses mentransformasikan statusnya dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki).

Ketua Baznas Jateng, Ahmad Darodji, merinci bahwa total target bantuan modal produktif sepanjang tahun ini menasar 3.500 mustahik dengan total dana Rp10,5 miliar yang disalurkan dalam beberapa gelombang.

Guna menjamin ketepatan penggunaan dana, Baznas menggaet para penyuluh agama di tingkat kecamatan untuk bertindak sebagai pendamping lapangan.

Kedekatan emosional dan geografis para penyuluh diyakini mempermudah pemantauan perkembangan bisnis warga.

Sistem evaluasi berkala diterapkan setiap empat bulan melalui laporan perkembangan.

Melalui mekanisme ini, Baznas dapat mengukur eskalasi bisnis usaha mikro, seperti penambahan sarana produksi hingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Darodji membeberkan dinamika positif di lapangan, mulai dari unit usaha yang berhasil menambah kapasitas tempat duduk dari dua menjadi empat bangku, hingga penambahan karyawan dari tiga menjadi lima orang.

Bahkan, dalam sidak lapangan, ditemukan pengusaha kecil yang mampu mengantongi omzet bersih hingga Rp300 ribu saban hari.

“Kalau kita ingin membuat orang mandiri dan bebas dari kemiskinan, bagi kami ada dua cara, yaitu dibor punya keterampilan dan diberi modal. Kalau bantuan konsumtif, mungkin beberapa hari sudah habis. Tetapi, kalau produktif, kita beri kail agar mereka berkembang,” jelas Darodji.

Dampak nyata program ini diakui langsung oleh Slamet Rahardjo, perajin sol sepatu asal Kabupaten Batang yang telah menggeluti profesinya selama 15 tahun.

Meski kini bertumpu pada kursi roda pasca-kecelakaan, keterbatasan fisik tak memadamkan semangatnya untuk berkarya.

Dana Baznas bakal ia alokasikan untuk memutakhirkan alat kerja seperti benang, lem, serta pisau pemotong (cutter) agar kualitas garapannya makin prima.

“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari Baznas, saya bisa lebih mengembangkan usaha dengan membeli peralatan sol sepatu yang baru,” kata Slamet.

Senada dengan Slamet, Emyatun, pemilik warung Nasi Padang Ampora di Kota Semarang, memanfaatkan suntikan modal tersebut untuk meremajakan kompor serta peralatan penyajian masakan.

Mengelola warung bersama sang suami, omzet bisnisnya merangkak naik usai mengintegrasikan lapaknya dengan platform digital seperti ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood.

Ia menyimpan asa agar bisnis keluarganya makin tangguh hingga kelak bisa ganti memberi manfaat bagi sesama.

“Semoga tidak hanya menjadi mustahik, tetapi akhirnya bisa menjadi muzaki dan membantu yang lainnya,” ujarnya.

Bunga Utang IMF Sudah Naik 4 Kali Lipat dalam 1 Dekade

Minggu, 11 Oktober 2026 14:15 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032947/bunga-utang-imf-sudah-naik-4-kali-lipat-dalam-1-dekade>

Washington, Beritasatu.com – Pembayaran bunga utang negara-negara yang memenuhi syarat memperoleh pembiayaan lunak dari Dana Moneter Internasional (IMF) meningkat hingga empat kali lipat sejak 2013.

Pada saat yang sama, hampir separuh negara dalam kelompok tersebut menghadapi krisis utang atau berisiko tinggi mengalami kesulitan pembayaran.

Temuan tersebut diungkap Transparency International (TI) dalam laporan mengenai transparansi pinjaman negara menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026.

Laporan itu menyoroti tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Menurut TI, lonjakan pembayaran bunga utang mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Di sejumlah negara, kewajiban membayar bunga utang bersaing langsung dengan anggaran untuk layanan publik yang mendasar.

Laporan tersebut mencatat, sedikitnya 8% penerimaan pemerintah di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah digunakan untuk membayar kewajiban utang.

Sementara itu, di Afrika, sekitar 57% penduduk tinggal di negara-negara yang mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembayaran bunga utang dibandingkan gabungan belanja kesehatan, pendidikan, dan penanganan perubahan iklim.

TI menilai persoalan utang negara tidak hanya berkaitan dengan besarnya pinjaman, tetapi juga transparansi dalam proses pengajuan, negosiasi, dan penggunaan dana. Ketertutupan perjanjian pinjaman serta lemahnya pengawasan dinilai membuka peluang penyalahgunaan dan korupsi.

“Tanpa perlindungan yang kuat dan pengawasan yang efektif terhadap proses negosiasi serta pengelolaan pinjaman, utang negara dapat disalahgunakan dan dikorupsi untuk memperkaya pejabat publik beserta kelompok dekat mereka, dengan mengorbankan generasi mendatang,” demikian pernyataan dalam laporan TI, dikutip dari Dawn.

Penyalahgunaan pinjaman dapat membuat dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan justru menguntungkan pejabat dan kelompok tertentu. Sementara itu, pemerintah tetap harus menanggung kewajiban pembayaran utang sehingga masyarakat dan generasi mendatang berpotensi ikut menanggung dampaknya.

Karena itu, TI mendorong pemerintah dan lembaga pemberi pinjaman internasional memperkuat keterbukaan informasi mengenai utang negara, meningkatkan pengawasan untuk mencegah korupsi, serta memberi negara peminjam ruang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait kewajiban utang mereka.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu isu yang disoroti menjelang pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok. Pembahasan diharapkan mendorong tata kelola pinjaman yang lebih transparan agar pembiayaan pembangunan tidak justru memperberat beban fiskal dan mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

India Perketat Aturan Dolar AS untuk Tahan Pelemahan Rupe

Minggu, 11 Oktober 2026 07:59 WIB

Penulis: Alfi Dinilhaq

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032834/india-perketat-aturan-dolar-as-untuk-tahan-pelemahan-rupe>

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Sentral India (RBI) menerapkan serangkaian kebijakan baru untuk menahan pelemahan rupe yang mendekati rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut mencakup penyediaan dolar khusus bagi perusahaan minyak milik negara dan pengetatan aturan transaksi lindung nilai.

Langkah yang diumumkan pada Sabtu (10/10/2026) itu diambil ketika rupe menghadapi tekanan akibat kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi global. Sepanjang tahun ini, mata uang India tersebut telah melemah lebih dari 7%.

RBI akan menyediakan fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan dolar harian tiga perusahaan pemasaran minyak milik negara. Dengan mekanisme ini, kebutuhan dolar perusahaan tersebut dipenuhi langsung dari cadangan devisa bank sentral sehingga tekanan permintaan di pasar valuta asing dapat dikurangi.

RBI menyatakan Indian Oil, Hindustan Petroleum, dan Bharat Petroleum dapat menggunakan fasilitas tersebut mulai Senin.

“Memenuhi kebutuhan dolar perusahaan minyak menghilangkan salah satu sumber permintaan terbesar dari pasar valuta asing, yang seharusnya membantu mengurangi volatilitas tetapi akan terlihat dalam penipisan cadangan,” kata ahli strategi valuta asing di ANZ Bank, Mumbai Dhiraj Nim.

Setelah pengumuman kebijakan tersebut, rupe menguat sekitar 0,6% terhadap dolar di pasar kontrak berjangka tanpa penyerahan fisik. Namun, penguatan itu terjadi dalam kondisi volume perdagangan yang tipis.

Selain mengalihkan permintaan dolar perusahaan minyak dari pasar spot, RBI memperketat aturan transaksi derivatif untuk membatasi aktivitas spekulatif dan menekan permintaan perlindungan terhadap pelemahan rupe.

Dalam beberapa bulan terakhir, meningkatnya kebutuhan importir terhadap dolar telah menekan rupee karena permintaannya jauh melampaui pasokan dari eksportir.

Seseorang yang mengetahui pertimbangan bank sentral mengatakan RBI sedang berupaya untuk memoderasi permintaan derivatif yang berpotensi mengganggu stabilitas, meningkatkan integritas verifikasi eksposur yang mendasarinya, dan mencegah penghindaran melalui banyak transaksi atau pemesanan ulang berulang.

Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media.

RBI mewajibkan pelaku pasar valuta asing menyediakan cadangan risiko valuta asing sebesar 20% untuk kontrak derivatif yang digunakan membeli mata uang asing terhadap rupe guna melindungi transaksi berjalan. Ketentuan ini berlaku bagi transaksi dengan nilai nominal lebih dari US\$ 2 juta.

Dua bankir yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kewajiban cadangan tersebut akan meningkatkan biaya perlindungan terhadap pelemahan rupee. Kebijakan ini diharapkan dapat membatasi penggunaan instrumen lindung nilai secara berlebihan.

China sebelumnya juga menggunakan instrumen serupa untuk menekan spekulasi satu arah yang merugikan nilai tukar yuan.

RBI turut memangkas batas transaksi derivatif yang dapat dilakukan pengguna tanpa menunjukkan eksposur atau kebutuhan transaksi yang mendasarinya. Batas tersebut diturunkan menjadi US\$ 5 juta dari sebelumnya US\$ 100 juta.

Ketentuan baru itu berlaku untuk seluruh produk derivatif, termasuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.

Penerapan kebijakan tersebut menyusul masuknya dana lebih dari US\$ 140 miliar melalui sejumlah kebijakan khusus untuk mendorong simpanan valuta asing dari luar negeri, serta pinjaman luar negeri oleh perusahaan dan bank milik negara.

Meski demikian, aliran dana tersebut belum cukup menghilangkan tekanan terhadap rupee. Mata uang India itu masih tertekan meskipun bank sentral terus melakukan intervensi dan menaikkan suku bunga pada awal pekan ini.

Dhiraj Nim menilai kebijakan terbaru RBI dapat meredam tekanan, tetapi belum tentu menghilangkannya selama faktor-faktor mendasar masih berlangsung.

“Faktor-faktor pendorong yang mendasarinya, termasuk harga minyak dan aliran modal, tetap ada, dan ujian sebenarnya adalah bagaimana cadangan dan rupee akan berperilaku dalam minggu mendatang,” tambah Nim.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan India akan bergantung pada perkembangan harga minyak, arus modal, serta kemampuan bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan.

India Perketat Aturan Dolar AS untuk Tahan Pelemahan Rupe

Minggu, 11 Oktober 2026 07:59 WIB

Penulis: Alfi Dinilhaq

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032834/india-perketat-aturan-dolar-as-untuk-tahan-pelemahan-rupe>

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Sentral India (RBI) menerapkan serangkaian kebijakan baru untuk menahan pelemahan rupe yang mendekati rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut mencakup penyediaan dolar khusus bagi perusahaan minyak milik negara dan pengetatan aturan transaksi lindung nilai.

Langkah yang diumumkan pada Sabtu (10/10/2026) itu diambil ketika rupe menghadapi tekanan akibat kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi global. Sepanjang tahun ini, mata uang India tersebut telah melemah lebih dari 7%.

RBI akan menyediakan fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan dolar harian tiga perusahaan pemasaran minyak milik negara. Dengan mekanisme ini, kebutuhan dolar perusahaan tersebut dipenuhi langsung dari cadangan devisa bank sentral sehingga tekanan permintaan di pasar valuta asing dapat dikurangi.

RBI menyatakan Indian Oil, Hindustan Petroleum, dan Bharat Petroleum dapat menggunakan fasilitas tersebut mulai Senin.

“Memenuhi kebutuhan dolar perusahaan minyak menghilangkan salah satu sumber permintaan terbesar dari pasar valuta asing, yang seharusnya membantu mengurangi volatilitas tetapi akan terlihat dalam penipisan cadangan,” kata ahli strategi valuta asing di ANZ Bank, Mumbai Dhiraj Nim.

Setelah pengumuman kebijakan tersebut, rupee menguat sekitar 0,6% terhadap dolar di pasar kontrak berjangka tanpa penyerahan fisik. Namun, penguatan itu terjadi dalam kondisi volume perdagangan yang tipis.

Selain mengalihkan permintaan dolar perusahaan minyak dari pasar spot, RBI memperketat aturan transaksi derivatif untuk membatasi aktivitas spekulatif dan menekan permintaan perlindungan terhadap pelemahan rupee.

Dalam beberapa bulan terakhir, meningkatnya kebutuhan importir terhadap dolar telah menekan rupee karena permintaannya jauh melampaui pasokan dari eksportir.

Seseorang yang mengetahui pertimbangan bank sentral mengatakan RBI sedang berupaya untuk memoderasi permintaan derivatif yang berpotensi mengganggu stabilitas, meningkatkan integritas verifikasi eksposur yang mendasarinya, dan mencegah penghindaran melalui banyak transaksi atau pemesanan ulang berulang.

Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media.

RBI mewajibkan pelaku pasar valuta asing menyediakan cadangan risiko valuta asing sebesar 20% untuk kontrak derivatif yang digunakan membeli mata uang asing terhadap rupee guna melindungi transaksi berjalan. Ketentuan ini berlaku bagi transaksi dengan nilai nominal lebih dari US\$ 2 juta.

Dua bankir yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kewajiban cadangan tersebut akan meningkatkan biaya perlindungan terhadap pelemahan rupee. Kebijakan ini diharapkan dapat membatasi penggunaan instrumen lindung nilai secara berlebihan.

China sebelumnya juga menggunakan instrumen serupa untuk menekan spekulasi satu arah yang merugikan nilai tukar yuan.

RBI turut memangkas batas transaksi derivatif yang dapat dilakukan pengguna tanpa menunjukkan eksposur atau kebutuhan transaksi yang mendasarinya. Batas tersebut diturunkan menjadi US\$ 5 juta dari sebelumnya US\$ 100 juta.

Ketentuan baru itu berlaku untuk seluruh produk derivatif, termasuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.

Penerapan kebijakan tersebut menyusul masuknya dana lebih dari US\$ 140 miliar melalui sejumlah kebijakan khusus untuk mendorong simpanan valuta asing dari luar negeri, serta pinjaman luar negeri oleh perusahaan dan bank milik negara.

Meski demikian, aliran dana tersebut belum cukup menghilangkan tekanan terhadap rupee. Mata uang India itu masih tertekan meskipun bank sentral terus melakukan intervensi dan menaikkan suku bunga pada awal pekan ini.

Dhiraj Nim menilai kebijakan terbaru RBI dapat meredam tekanan, tetapi belum tentu menghilangkannya selama faktor-faktor mendasar masih berlangsung.

“Faktor-faktor pendorong yang mendasarinya, termasuk harga minyak dan aliran modal, tetap ada, dan ujian sebenarnya adalah bagaimana cadangan dan rupee akan berperilaku dalam minggu mendatang,” tambah Nim.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan India akan bergantung pada perkembangan harga minyak, arus modal, serta kemampuan bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan.

Bank Dunia Berdiskusi dengan Puluhan Negara Mengenai Bantuan Krisis

Minggu, 11 Oktober 2026 13:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-berdiskusi-dengan-puluhan-negara-mengenai-bantuan-krisis>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Bank Dunia sedang melakukan pembicaraan dengan 30 hingga 40 negara mengenai potensi bantuan krisis untuk membantu mereka mengatasi guncangan energi dan kenaikan harga yang dipicu oleh perang di Timur Tengah.

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, dalam sebuah wawancara dengan Reuters mengatakan bahwa ekonomi global terbukti cukup tangguh, sebagian berkat investasi besar di bidang kecerdasan buatan (AI) serta penyesuaian pasokan dan permintaan minyak.

Hal ini menyebabkan hanya sedikit negara yang mengajukan permohonan untuk dana krisis awal sebesar US\$25 miliar yang telah disediakan Bank Dunia saat perang pecah pada akhir Februari lalu.

Namun, lonjakan tajam harga solar dan pupuk serta faktor-faktor lain—termasuk ancaman fenomena cuaca super El Niño—kian menambah tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang, ujar Banga dalam wawancara menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pekan ini.

"Ada tekanan, jadi menurut saya mungkin dalam beberapa bulan mendatang, akan lebih banyak negara yang datang untuk mendapatkan bagian dari dana awal sebesar US\$50 hingga US\$60 miliar tersebut," kata Banga seperti dikutip Reuters, Minggu (11/10/2026).

Angka ini mencakup dana awal US\$ 25 miliar ditambah US\$ 35 miliar lainnya yang dapat diakses negara-negara dengan mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek Bank Dunia yang telah disetujui sebelumnya.

"Kita lihat saja nanti, tapi kami siap. Kami terlibat aktif. Kami sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara; ada sekitar 30 hingga 40 negara yang sedang berdialog dengan kami," ujarnya.

Banyak negara berkembang sangat terdampak oleh lonjakan harga energi dan suku bunga tinggi yang meningkatkan biaya pinjaman, di saat kas fiskal mereka masih terkuras akibat langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 dan lonjakan inflasi pasca-invasi Rusia ke Ukraina.

Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang memiliki utang kepada kreditur luar negeri sebesar sekitar US\$ 400 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2026, dengan pembayaran bunga saja mencakup sepertiga dari total jumlah tersebut.

Banga mengatakan bahwa lebih banyak negara menunjukkan minat untuk menyesuaikan kembali proyek-proyek yang sudah ada dibandingkan memanfaatkan fasilitas penanganan krisis jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan likuiditas mereka.

Jika situasi memburuk, Bank Dunia dapat menyediakan dana hingga US\$ 100 miliar, ujarnya, melampaui angka US\$ 70 miliar yang disalurkan selama pandemi.

Bulan lalu, Bank Dunia mengumumkan keberhasilannya menarik modal swasta dalam jumlah rekor sebesar US\$ 112 miliar pada tahun yang berakhir bulan Juni—naik dari US\$69 miliar pada tahun sebelumnya dan lebih dari tiga kali lipat total tahun 2022, sebelum Banga, mantan CEO Mastercard, menjabat sebagai presiden.

Angka tersebut merupakan tambahan dari investasi sebesar US\$123 miliar yang berasal dari sumber daya internal bank pada tahun yang sama, sehingga totalnya mencapai US\$ 235 miliar. Hal ini, menurut Banga, menegaskan pentingnya memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, terutama di saat negara-negara Barat memangkas bantuan pembangunan bilateral resmi secara tajam.

"Tidak ada satu jawaban tunggal yang pas ketika dunia menghadapi masalah-masalah seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan langkah dengan kemampuan yang ada," kata Banga.

Banga memperkirakan akan ada peningkatan lebih lanjut dalam arus modal swasta pada tahun-tahun mendatang, yang didukung oleh perluasan jaminan risiko politik dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) milik bank tersebut, pertumbuhan pembiayaan dalam mata uang lokal, serta upaya berkelanjutan dalam reformasi regulasi yang mempermudah akses bagi investor asing.

Lonjakan modal swasta terbesar terjadi pada proyek-proyek di negara-negara berpendapatan menengah ke atas seperti Argentina atau India, yang menyumbang US\$50 miliar dari total modal swasta tersebut, serta negara-negara berpendapatan menengah ke bawah termasuk Bangladesh dan Angola, yang menyumbang US\$37 miliar. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aliran modal swasta—yang saat ini bernilai sekitar US\$3 miliar—ke negara-negara berpenghasilan rendah.

"Di negara-negara yang lebih kecil, pertumbuhannya belum cukup signifikan dan masih terdapat berbagai tantangan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihak bank akan mengumumkan sejumlah inisiatif baru minggu ini yang bertujuan memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki akses terhadap modal swasta.

Banga menyebutkan bahwa pertumbuhan modal swasta juga tersebar secara regional; peningkatan terbesar tercatat di Amerika Latin dan Karibia yang menyumbang US\$36,3 miliar dari total nilai tahun lalu, diikuti oleh Eropa dan Asia Tengah (US\$ 21,3 miliar), Asia Selatan (US\$ 19,2 miliar), serta Afrika (US\$ 22 miliar).

Menurut pihak Bank, sepuluh negara penerima teratas adalah Brasil, India, Turki, Rumania, Nigeria, Argentina, Afrika Selatan, Bangladesh, Meksiko, dan Chili.

Banga mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF sedang bekerja sama untuk mengatasi masalah tingginya tingkat utang yang membebani banyak negara berkembang melalui serangkaian inisiatif, termasuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan domestik negara-negara tersebut.

Bank Dunia telah menyepakati skema pertukaran utang untuk pembangunan (debt-for-development swaps) bagi Angola dan Pantai Gading, serta jaminan berbasis portofolio untuk Argentina, dan saat ini sedang mengerjakan lebih dari dua belas proyek lainnya.

"Kami memiliki 14 atau 15 proyek dalam tahap persiapan, yang membantu mereka mengganti utang lama berbunga tinggi dengan utang baru yang memiliki tingkat bunga lebih rendah melalui jaminan kami," ujarnya, seraya menambahkan bahwa selisih biayanya kemudian dialokasikan untuk program-program di bidang pendidikan, kesehatan, air, atau pelestarian alam.

Bank of America Proyeksi Defisit APBN 2027 Lebih Lebar dari Target Pemerintah

Minggu, 11 Oktober 2026 18:13 WIB

Reporter: Lydia Tesaloni, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-of-america-proyeksi-defisit-apbn-2027-lebih-lebar-dari-target-pemerintah>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank of America (BofA) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencapai 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,4% PDB.

ASEAN and India Chief Economist BofA Securities Rahul Bajoria menjelaskan, pemerintah berpotensi masih perlu menanggung selisih biaya yang timbul dari kebijakan perusahaan energi negara, dalam hal ini Pertamina, untuk tak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Rahul bilang pada dasarnya beban yang ditanggung badan usaha milik negara (BUMN) perlu diperhitungkan dalam melihat keseluruhan kondisi fiskal pemerintah.

“Alasan kami tidak memperkirakan defisit fiskal turun sebesar yang diproyeksikan pemerintah adalah karena pemerintah kemungkinan masih harus menutup sebagian kekurangan pemulihan biaya yang ditanggung perusahaan minyak tahun depan,” ujar Rahul, dikutip Minggu (11/10/2026).

Secara keseluruhan BofA memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 mencapai 2,9% PDB, sebelum menyempit menjadi 2,7% PDB pada 2027.

Rahul menilai, perbedaan proyeksi defisit dengan pemerintah perlu dilihat dalam konteks pengelolaan fiskal Indonesia secara lebih panjang. Ia menegaskan, pelebaran defisit tak serta-merta menjadi persoalan selama kualitas belanja pemerintah tetap terjaga dan mampu menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di luar itu, menurutnya rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 41%-42% terhadap PDB belum menjadi persoalan utama bagi perekonomian. Namun, efektivitas belanja dan dampak pengganda atau multiplier effect dari pengeluaran pemerintah perlu menjadi perhatian.

BofA menilai kebijakan fiskal Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Rahul memperkirakan konsumsi dan investasi akan membaik, seiring meningkatnya efektivitas sejumlah program pemerintah.

BofA memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% pada 2026 dan meningkat menjadi 5,5% pada 2027. Meski demikian, proyeksi tersebut masih di bawah estimasi pertumbuhan potensial Indonesia sebesar 5,8%-6,2% yang pernah disampaikan Bank Indonesia.

Dari sisi inflasi, BofA memperkirakan inflasi rata-rata mencapai 3,3% pada 2026, sebelum turun menjadi 3% pada 2027. Meredanya tekanan harga energi dan dampak El Niño diperkirakan turut mendukung penurunan inflasi.

Di sisi lain, tekanan eksternal masih menjadi tantangan bagi pengelolaan fiskal dan pembiayaan Indonesia. BofA menyoroti tingginya suku bunga global serta harga minyak yang masih bergejolak sebagai faktor yang dapat memengaruhi biaya pendanaan dan kebutuhan pembiayaan kembali pemerintah.

BofA memperkirakan Federal Reserve masih berpeluang menaikkan suku bunga pada sisa 2026. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan tekanan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah, termasuk surat utang Indonesia.

RI - Mesir Sepakati Empat Kerja Sama Bilateral, Cek Daftarnya!

Minggu, 11 Oktober 2026 17:56 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/ri-mesir-sepakati-empat-kerja-sama-bilateral-cek-daftarnya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia dan Republik Arab Mesir menyepakati empat kerja sama bilateral dalam kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Empat kesepakatan tersebut mencakup bidang diplomasi, pembebasan visa, statistik, serta kelautan dan perikanan. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat kemitraan strategis.

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, berikut daftar empat kerja sama yang disepakati Indonesia dan Mesir:

1. Rencana aksi kemitraan strategis, melalui nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir.
2. Pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus.
3. Kerja sama statistik, melalui nota kesepahaman antara Indonesia dan Mesir.
4. Kerja sama kelautan dan perikanan, melalui nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir.

Dalam pernyataan pers bersama, Prabowo mengatakan kunjungan El-Sisi juga membahas sejumlah bidang kerja sama lain, termasuk investasi, industri pertahanan, perdagangan, dan ekonomi.

“Kunjungan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral. Kerja sama kelautan perikanan, kerja sama statistik, kerja sama investasi, kerja sama industri pertahanan, kerja sama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis,” ujar Prabowo.

Penguatan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas hubungan Indonesia dan Mesir di berbagai sektor.

Meski demikian, keterangan yang disampaikan belum merinci nilai investasi, target perdagangan, maupun proyek konkret dari kerja sama tersebut.

Bentuk Economic Partnership Agreement, RI-Mesir Bidik Perdagangan US\$ 5 Miliar

Minggu, 11 Oktober 2026 15:28 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bentuk-economic-partnership-agreement-ri-mesir-bidik-perdagangan-us-5-miliar>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi sepakat memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia-Mesir, termasuk mendorong peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga US\$ 5 miliar pada 2030.

Target tersebut disampaikan El-Sisi dalam pernyataan bersama atau joint press statement dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Prabowo mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Salah satunya melalui dorongan pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) antara Indonesia dan Mesir.

Menurut Prabowo, perjanjian tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi akses pasar, investasi, serta keterlibatan pelaku usaha dari kedua negara.

“Saya menyambut baik inisiatif pembentukan joint investment fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” ujar Prabowo.

Selain perdagangan dan investasi, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama di sektor kelautan dan perikanan serta industri pertahanan. Kerja sama pertahanan akan diarahkan pada pengembangan industri, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan bersama, serta pertukaran kunjungan pimpinan dan pakar.

Prabowo mengatakan, penguatan hubungan kedua negara juga perlu ditopang oleh kerja sama antarmasyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Indonesia ingin memperluas pertukaran mahasiswa, kemitraan antaruniversitas, riset bersama, serta membuka peluang bagi tenaga pendidik Mesir untuk berkiprah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi tawaran tambahan beasiswa dari Mesir, khususnya untuk bidang kedokteran, teknik, dan sains.

Sementara itu, El-Sisi mengatakan, kedua negara sepakat memberikan perhatian khusus terhadap kerja sama ekonomi dan bisnis dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masing-masing negara. Selain meningkatkan nilai perdagangan, kedua pemerintah akan melanjutkan upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan perdagangan.

“Kami berdua juga membahas kesempatan untuk proyek-proyek investasi di dalam prioritas,” ujar El-Sisi melalui penerjemah.

El-Sisi menambahkan, kedua negara membuka peluang bagi perusahaan Mesir untuk berinvestasi di Indonesia dan perusahaan Indonesia untuk mengembangkan bisnis di Mesir. Menurut dia, Mesir juga dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan Indonesia untuk menjangkau pasar Arab, Afrika, dan kawasan sekitarnya.

Penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan peningkatan hubungan diplomatik Indonesia-Mesir ke tingkat kemitraan strategis pada April 2025. El-Sisi menyebut hubungan kedua negara memiliki akar

sejarah panjang, termasuk peran Mesir sebagai salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas sejumlah isu regional dan global, termasuk situasi Palestina dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mewujudkan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Pemerintah Akan Tarik Pinjaman LN US\$ 1,8 M dan Pertimbangkan Penerbitan Global Bond

Minggu, 11 Oktober 2026 16:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-tarik-pinjaman-ln-us-18-m-dan-pertimbangkan-penerbitan-global-bond>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penarikan pinjaman luar negeri sebesar US\$ 1,8 miliar pada kuartal IV-2026 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga membuka peluang penerbitan obligasi global atau global bond dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan internasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan, penarikan pinjaman tersebut berasal dari program bilateral dan multilateral pada kuartal IV-2026.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US\$ 1,8 miliar, siap untuk ditarik pada kuartal IV," ujar Suminto, Jumat (9/10/2026).

Lebih lanjut Suminto menyebut, pemerintah masih mempertimbangkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing (valas) atau global bond. Namun, keputusan penerbitan surat utang tersebut akan bergantung pada perkembangan pasar keuangan global yang saat ini masih dinamis.

"Kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu (SBN Valas/Global bond) masih ada, subject to market condition," kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Meski begitu, dari sisi persiapan, Suminto mengaku pihaknya telah menyiapkan dokumentasi hukum dan dokumen transaksi yang diperlukan untuk mendukung penerbitan tersebut.

Adapun strategi pembiayaan utang pemerintah pada kuartal IV-2026 disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan mengacu pada proyeksi defisit dalam Laporan Semester (Lapsem) sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain penarikan pinjaman luar negeri dan opsi penerbitan SBN valas, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik.

Kemenkeu menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler pada kuartal IV-2026, yang terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah juga menjadwalkan dua kali penerbitan SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri ST017 untuk instrumen syariah.

Melalui kombinasi berbagai instrumen tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN hingga akhir tahun dengan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan global dan biaya penerbitan utang.

Pemerintah Telah Tarik Utang Baru Rp 497,5 Triliun Sampai September 2026

Minggu, 11 Oktober 2026 15:35 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-telah-tarik-utang-baru-rp-4975-triliun-sampai-september-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 497,5 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut setara 62,2% dari target penerbitan SBN dalam APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman tercatat negatif Rp 3,2 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan utang neto mencapai Rp 494,3 triliun, atau 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan APBN hingga September 2026 masih berjalan sesuai rencana atau on track.

Ia menyebut pemerintah melakukan penarikan utang melalui penerbitan SBN secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan perekonomian global. Pasalnya, dinamika ekonomi dunia turut memengaruhi pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah, termasuk SBN bertenor 10 tahun.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Pembayaran Bunga Utang Pemerintah Capai Rp 444,5 Triliun hingga September 2026

Minggu, 11 Oktober 2026 15:59 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/pembayaran-bunga-utang-pemerintah-capai-rp-4445-triliun-hingga-september-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 444,5 triliun hingga September 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto merinci, realisasi pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp 413 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 31,5 triliun.

"Realisasi belanja bunga utang hingga September 2026 sebesar Rp 444,5 triliun," ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Suminto menjelaskan, sebagian besar belanja bunga utang dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri yang didominasi denominasi rupiah, yang turut menambah likuiditas yang beredar di masyarakat sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi domestik.

"Sebagian besar belanja bunga utang adalah untuk utang dalam negeri yang menambah likuiditas yang beredar di masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi domestik," katanya.

Di sisi lain, kinerja APBN 2026 sampai September mencatatkan defisit sebesar Rp 319 triliun atau setara 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 125,5 triliun.

Adapun dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan utang neto hingga September 2026 mencapai Rp 494,3 triliun atau 59,4% dari target APBN 2026.

Realisasi tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 497,5 triliun, sedangkan pembiayaan melalui pinjaman neto tercatat negatif Rp 3,2 triliun.

Kemenkeu menegaskan pengelolaan pembiayaan APBN hingga September 2026 masih berjalan sesuai rencana (on track), dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan kebutuhan pendanaan APBN.

Suku Bunga di Pasar Global Masih Tinggi, Pemerintah Hati-Hati Terbitkan Surat Utang

Minggu, 11 Oktober 2026 17:43 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/suku-bunga-di-pasar-global-masih-tinggi-pemerintah-hati-hati-terbitkan-surat-utang>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sangat hati-hati dalam menerbitkan surat utang atau surat berharga negara (SBN) di tengah suku bunga global yang masih tinggi.

Hal ini dilakukan dengan mencermati kondisi pasar dan ekonomi global dengan melihat momentum yang tepat untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien sekaligus menjaga risiko utang.

"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN, dan juga kondisi ekonomi global di dunia, karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyampaikan, strategi pembiayaan utang pemerintah pada 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan biaya dana (cost of fund) yang efisien dan risiko yang terkendali.

"Serta mengelola portofolio (stock) utang secara optimal dari sisi biaya dan risiko (cost and risk trade of)," ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Lebih lanjut Suminto menyebut, minat investor terhadap SBN masih terjaga. Hal ini terlihat dari rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan (bid to cover ratio) yang mencapai 1,87 kali untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 2,52 kali untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Partisipasi investor asing dalam lelang SBN juga cukup kuat. Rasio bid to cover investor asing mencapai 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN.

Tak hanya di pasar primer, investor asing turut menopang aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar SBN melalui transaksi di pasar sekunder. Hingga 7 Oktober 2026, aliran modal masuk ke pasar SBN tercatat mencapai Rp 36,7 triliun secara tahun berjalan (year to date/YTD).

Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan SBN ritel senilai Rp 124,32 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari dua seri SUN senilai Rp 54,44 triliun dan tiga seri SBSN sebesar Rp 69,88 triliun.

Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam valuta asing melalui enam transaksi dengan menggunakan empat mata uang, yakni dolar AS, euro, yen Jepang, dan renminbi China. Total penerbitannya setara US\$ 14,76 miliar, dengan rasio bid to cover sebesar 2,4 kali.

Dukungan pembiayaan juga datang dari investor domestik. Hingga September 2026, investor sektor asuransi dan dana pensiun mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp 137,4 triliun, tumbuh 10,6%. Adapun pembelian bersih oleh lembaga domestik lainnya mencapai Rp 100,6 triliun, meningkat 15,5%.

Di tengah gejolak geopolitik dan dinamika kebijakan moneter negara-negara maju, Suminto menyebut imbal hasil atau yield SBN masih terjaga.

"Yield SUN seri acuan (benchmark) tenor 10 tahun pada 7 Oktober 2026 berada di level 7,17%, memiliki spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun sebesar 188 bps, lebih rendah dibandingkan emerging markets lainnya," ujar Suminto

Lebih rinci, sebagai perbandingan, spread India mencapai 196 basis poin, Filipina 240 basis poin, Afrika Selatan 379 basis poin, Meksiko 409 basis poin, dan Brasil 765 basis poin.

Selain mengandalkan penerbitan SBN, Kemenkeu juga memanfaatkan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral untuk mendukung pembiayaan APBN.

"Hingga September juga telah dilakukan penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral mencapai sebesar atau setara US\$ 2,87 miliar," ujar Suminto

Utang Pemerintah Tembus Rp 10.293 Triliun per Juni 2026

Dari sisi pengelolaan portofolio, posisi utang pemerintah per Juni 2026 tercatat mencapai Rp 10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut terdiri dari SBN sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,90 triliun.

Meski nilai utang mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun, Suminto menyebut sejumlah indikator risiko portofolio utang masih terjaga. Hal ini dilihat dari komposisi utang, dimana utang dalam rupiah mendominasi sebesar 70,2% dari total portofolio, sedangkan utang dalam valuta asing mencapai 29,8%.

Adapun rata-rata jatuh tempo utang atau Average Time to Maturity (ATM) tercatat 8,3 tahun. Jangka waktu tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola risiko pembiayaan kembali (refinancing risk).

"Average Time to Maturity (ATM) tercatat 8,3 tahun. Ini cukup panjang, sehingga risiko pembiayaan kembali tetap terjaga," ujar Suminto

Dari sisi risiko suku bunga, porsi utang dengan suku bunga mengambang (variable rate) tercatat hanya 11,4%, di luar SBN yang diterbitkan melalui skema burden sharing dengan Bank Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19. Utang dengan suku bunga mengambang tersebut terutama berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.

"Sehingga risiko perubahan suku bunga tetap terjaga," ujarnya.

Kemenkeu Mencatat Realisasi PNBP Capai Rp 492,3 Triliun Hingga September 2026

Minggu, 11 Oktober 2026 10:41 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-mencatat-realisisi-pnbp-capai-rp-4923-triliun-hingga-september-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut meningkat 41,7% year on year (yoy) bila dibandingkan periode sama tahun lalu, atau mencapai 84,4% terhadap target 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, peningkatan realisasi tersebut berasal dari penerimaan Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) yang menyetorkan Rp 38,65 triliun kepada PNBP/denda periode 2025-2026.

“Kemarin di depan Bapak Presiden kami Kementerian keuangan mencatatkan Rp 13,2 triliun dari Satgas PKH, namun pada 2025-2026 telah memberikan setoran Rp 57,1 triliun, kepada pajak Rp 18,45 triliun dan kepada PNBP Rp 38,85 triliun,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Di sisi lain, peningkatan PNBP periode tersebut juga didorong oleh kenaikan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP), yang mendorong penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas (migas) dengan realisasi mencapai Rp 90,9 triliun.

Selanjutnya, didorong juga oleh kenaikan harga batubara dan mineral serta kebijakan perubahan formula perhitungan harga patokan mineral (HPM), yang meningkatkan penerimaan SDA non migas sebanyak 30,1% yoy atau mencapai Rp 132,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil mencatat, penerimaan PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai Rp 58 triliun, pendapatan PNBP lainnya Rp 117,3 triliun, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 93,9 triliun.

Kementrans Salurkan 16 Perahu untuk Kembangkan Ekonomi Warga Rempang

Minggu, 11 Oktober 2026 14:18 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/kementrans-salurkan-16-perahu-untuk-kembangkan-ekonomi-warga-rempang>

KONTAN.CO.ID - BATAM. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyalurkan bantuan 16 perahu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Tanjung Banon, Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bantuan ini diarahkan untuk menunjang aktivitas perikanan sekaligus membuka peluang usaha wisata bahari bagi warga setempat.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, bantuan perahu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat selama masa transisi. Pemerintah juga berencana mengembangkan desa nelayan beserta dermaga untuk menunjang aktivitas warga.

“Kita sudah memberikan juga bantuan misalkan perahu. Ada 16 perahu yang kita berikan. Itu bisa langsung nanti kita kembangkan untuk ada desa nelayan, ya ada dermaganya untuk aktivitas sosial,” ujar Iftitah saat ditemui di sela Festival Transmigrasi di Tanjung Banon, Rempang, Sabtu (10/10/2026).

Selain mendukung kegiatan perikanan, bantuan perahu tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan wisata bahari. Iftitah menyebut sebagian masyarakat setempat telah membuka pasar ikan, sehingga aktivitas ekonomi berbasis perikanan mulai berkembang di kawasan tersebut.

“Sudah juga masyarakat banyak yang membuka pasar ikan. Kemudian yang kedua juga untuk pariwisata baharinya,” kata Iftitah.

Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Tanjung Banon juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Batam bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa program tersebut telah diresmikan dan disertai pemberian berbagai bibit kepada masyarakat. Dukungan ini melengkapi upaya pengembangan kegiatan ekonomi warga di kawasan Tanjung Banon.

Ke depan, pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan wisata bahari diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat Rempang. Dengan begitu, warga memiliki alternatif sumber penghasilan yang dapat dikembangkan sesuai potensi kawasan.

Rupiah Sepekan Menguat Tipis 0,1 Persen

Minggu, 11 Oktober 2026 12:41 WIB

Penulis: Natasha Khairunisa Amani, Editor: MBK

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032934/rupiah-sepekan-menguat-tipis-01-persen>

Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang perdagangan 5–9 Oktober 2026. Rupiah naik 18 poin atau 0,1% ke level Rp 17.899 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (9/10/2026), dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya di Rp 17.917 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selama sepekan berlangsung fluktuatif. Mata uang domestik sempat melemah pada awal pekan sebelum berbalik menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026) dan Rabu (7/10/2026). Tekanan kembali muncul menjelang akhir pekan, tetapi rupiah mampu menutup perdagangan dengan penguatan.

Pada Senin (5/10/2026), rupiah dibuka melemah 21 poin atau 0,12% ke level Rp 17.903 per dolar AS. Tekanan berlanjut hingga penutupan perdagangan, ketika rupiah turun 35 poin atau 0,2% ke posisi Rp 17.917 per dolar AS.

Rupiah kemudian berbalik menguat pada Selasa (6/10/2026). Mata uang domestik naik 3 poin atau 0,02% ke level Rp 17.914 per dolar AS pada pembukaan, lalu menguat 18 poin ke posisi Rp 17.899 per dolar AS saat penutupan.

Penguatan berlanjut pada Rabu (7/10/2026). Rupiah dibuka naik 33 poin atau 0,18% ke level Rp 17.866 per dolar AS. Namun, pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menguat 12 poin atau 0,07% ke posisi Rp 17.886 per dolar AS.

Pada Kamis (8/10/2026), rupiah kembali dibuka menguat 20 poin atau 0,11% ke level Rp 17.867 per dolar AS. Akan tetapi, mata uang domestik kemudian melemah 28 poin atau 0,16% ke posisi Rp 17.915 per dolar AS pada penutupan perdagangan.

Rupiah kembali menguat pada Jumat (9/10/2026). Mata uang domestik dibuka naik 11 poin atau 0,06% ke level Rp 17.904 per dolar AS, kemudian melanjutkan penguatan sebesar 16 poin atau 0,09% hingga ditutup di posisi Rp 17.899 per dolar AS.

Ekonom Beber Penyebab Cadev RI Turun 6,5% sejak Akhir 2025

Minggu, 11 Oktober 2026 18:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124231/ekonom-beber-penyebab-cadev-ri-turun-6-5-sejak-akhir-2025/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Posisi cadangan devisa pada akhir September 2026, tercatat sebesar US\$146,3 miliar, turun tipis US\$0,2 miliar dari Agustus sebesar US\$146,5 miliar. Meski demikian, apabila dibandingkan akhir 2025 yang mencapai US\$156,47 miliar, cadangan devisa sudah berkurang sekitar US\$10,2 miliar atau 6,5%.

“Penurunan ini mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap sektor eksternal, terutama akibat pelemahan rupiah, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebutuhan stabilisasi nilai tukar,” kata Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede kepada Bloomberg Technoz baru-baru ini.

Josua menggarisbawahi, bahwa di sepanjang September, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih sekitar US\$0,83 miliar, terutama dari pasar saham sebesar US\$0,57 miliar dan SRBI sebesar US\$0,24 miliar.

Kondisi tersebut mengurangi pasokan valuta asing di pasar domestik dan meningkatkan kebutuhan stabilisasi rupiah.

“Meski demikian, penurunan cadangan devisa tidak dapat disamakan langsung dengan besarnya intervensi BI karena terdapat penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa yang turut menopang cadangan devisa,” sebutnya.

Selain itu, BI semakin mengombinasikan intervensi pasar tunai dengan transaksi berjangka, sehingga tekanan rupiah tidak seluruhnya diterjemahkan menjadi pengurangan cadangan devisa secara langsung.

“Ke depan, kami memperkirakan cadangan devisa masih menghadapi tekanan hingga akhir 2026, dengan kisaran sekitar US\$143–147 miliar,” ramal Josua.

Tekanan terutama berasal dari tingginya imbal hasil surat utang Amerika Serikat, kemungkinan pengetatan kebijakan suku bunga bank sentral AS lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, serta harga minyak yang masih tinggi.

Dari dalam negeri, kebutuhan impor yang meningkat dan potensi perlambatan ekspor dapat memperlebar defisit transaksi berjalan. Sehingga Ia memperkirakan defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 2,49% PDB pada 2026, dibandingkan hanya 0,09% pada 2025.

Kondisi ini menurutnya akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan dari luar negeri, sementara arus modal asing masih rentan terhadap perubahan sentimen global.

Meskipun demikian, posisi cadangan devisa sebesar US\$146,3 miliar masih relatif memadai karena setara 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Jadi, risiko utamanya saat ini bukan kekurangan cadangan devisa secara mendadak, melainkan kemungkinan penurunan yang berlangsung terus-menerus apabila tekanan rupiah, arus keluar modal, dan defisit transaksi berjalan terjadi secara bersamaan,” katanya.

Strategi Perkuat Devisa

Josua menjelaskan, untuk memperkuat cadangan devisa, strategi pemerintah dan BI perlu diarahkan pada peningkatan pasokan devisa yang berkelanjutan, bukan sekadar menambah cadangan melalui pinjaman luar negeri.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengoptimalkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat insentif konversi devisa ke rupiah, serta memperluas transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal untuk mengurangi kebutuhan dolar AS.

“Namun, perlu dipahami bahwa penempatan devisa ekspor di perbankan domestik tidak otomatis menambah cadangan devisa BI; peningkatan cadangan baru terjadi apabila terdapat transaksi yang menambah aset cadangan BI,” kata Josua.

Karena itu, menurutnya kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan pasar valuta asing dan pembelian devisa oleh BI secara terukur ketika kondisi pasar memungkinkan.

Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan investor melalui kepastian kebijakan, disiplin fiskal, dan percepatan realisasi investasi langsung asing, karena investasi produktif cenderung lebih stabil dibandingkan investasi portofolio jangka pendek.

Sementara itu, penggunaan cadangan devisa untuk intervensi harus tetap terukur, dengan tujuan meredam gejolak nilai tukar yang berlebihan, bukan mempertahankan rupiah pada tingkat tertentu dengan mengorbankan cadangan devisa secara terus-menerus.

Dalam jangka menengah dan panjang, penguatan cadangan devisa harus bertumpu pada kemampuan perekonomian menghasilkan devisa secara mandiri.

Pemerintah perlu memperbesar ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi, memperdalam hilirisasi yang benar-benar meningkatkan nilai ekspor bersih, memperkuat penerimaan jasa dan pariwisata, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi alternatif.

“Yang perlu diperhatikan, hilirisasi tidak otomatis memperkuat devisa apabila kegiatan produksinya masih membutuhkan impor mesin, bahan baku, dan pembayaran kewajiban luar negeri dalam jumlah besar,” kata Josua.

Karena itu, menurut Josua keberhasilan dari upaya tersebut perlu dinilai berdasarkan tambahan penerimaan devisa bersih, bukan hanya nilai ekspor bruto.

“Pada akhirnya, ketahanan cadangan devisa yang sehat bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya saldo yang dimiliki BI, tetapi oleh kemampuan Indonesia menghasilkan penerimaan devisa yang cukup untuk membiayai impor, memenuhi kewajiban luar negeri, dan menjaga stabilitas rupiah tanpa terus bergantung pada tambahan utang maupun intervensi yang besar,” tutupnya.

Deretan Kebijakan Pajak yang Baru Bergulir di Era Suahasil

Minggu, 11 Oktober 2026 16:00 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/124229/deretan-kebijakan-pajak-yang-baru-bergulir-di-era-suahasil/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah kebijakan perpajakan mulai diterapkan dan disiapkan pemerintah pada era Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mulai dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online melalui marketplace hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang ditargetkan mulai berlaku pada semester II-2027.

Kebijakan tersebut menyasar berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan elektronik, konsumsi, hingga pemanfaatan barang dan jasa digital lintas negara.

Meski begitu, Kementerian Keuangan menyebut sejumlah mekanisme pemungutan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan bagian dari upaya memperluas cakupan pemungutan pajak dan menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

Pajak Pedagang Online

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai 1 Oktober 2026.

Pemungutan pajak pedagang online tersebut dilakukan oleh empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.

Empat marketplace tersebut adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang online melalui toko perantara digital atau marketplace.

Dalam agenda Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026), dia mengatakan, pemerintah masih perlu melihat kondisi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Karena itu, penerapan pajak marketplace ditunda selama dua bulan atau hingga November 2026.

"Sementara ditunda dua bulan dulu November, tapi nanti kita evaluasi dulu kondisi masyarakat seperti apa," kata Purbaya dikutip Sabtu (15/8/2026).

Jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi masyarakat memungkinkan, maka kebijakan tersebut akan dilakukan. Namun, apabila kondisi dinilai masih belum cukup kuat, penerapannya juga berpotensi dapat kembali ditunda.

"Kalau memungkinkan kita jalankan, tapi kalau masih dalam analisa kita belum cukup kuat kita tunda lagi, kira-kira begitu," kata dia.

Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dimulai pada semester II-2027.

Sejalan dengan target tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan saat ini pihaknya masih melengkapi aturan pelaksanaan serta membahas besaran tarif cukai yang akan dikenakan.

"Mungkin ini untuk pemberlakuannya kita sedang melengkapi aturan-aturannya dan mudah-mudahan bisa diterapkan di semester kedua tahun 2027," kata Djaka dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran tarif cukai MBDK. Djaka mengatakan, pembahasan tarif persen kandungan gula yang akan dipungut masih berlangsung bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu.

"Tetapi besaran targetnya seperti tadi saya sebutkan ada sekitar Rp1,7 triliun," tuturnya.

Padahal sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum akan menerapkan cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan apabila pertumbuhan ekonomi belum berada di level 6%.

PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Pemerintah memberlakukan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 25 September 2026. Sistem ini diterapkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia.

Pemberlakuan sistem tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

“Transaksi digital lintas negara terus berkembang dan semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia. SPP-TDLN menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemungutan PPN dapat mengikuti perkembangan transaksi dan sistem pembayaran dalam ekonomi digital,” kata Bimo.

Ditjen Pajak menyebut bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN, melainkan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang belum dikenai PPN melalui skema PMSE.

Sistem ini memanfaatkan informasi pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria, sehingga menghindari pemungutan pajak ganda.

Sebelum diterapkan penuh, SPP-TDLN telah melalui pengujian sandboxing dan periode stabilisasi untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak terkait.

Ekonom: Penerimaan Pajak Jadi Kunci Jaga Defisit APBN

Minggu, 11 Oktober 2026 14:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124227/ekonom-penerimaan-pajak-jadi-kunci-jaga-defisit-apbn/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai September 2026 mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut melonjak tajam ketimbang realisasi Agustus 2026 yang tercatat sebesar 0,9%. Meski demikian Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa target akhir tahun tetap berada di level 2,85%.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa pencapaian tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan penerimaan dan belanja hingga akhir tahun.

Ia juga mewanti-wanti bahwa angka tersebut sudah melebar dari target awal APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Pemerintah saat ini sedang menjaga target yang telah dilonggarkan, bukan target awal.

“Risiko terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang baru mencapai 68,6% dari target, dengan potensi kekurangan sekitar Rp46,9 triliun. Untuk menutup selisih tersebut, penerimaan bulanan pada kuartal IV harus meningkat sekitar sepertiga dibandingkan rata-rata sembilan bulan pertama,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Minggu (11/10/2026).

Ia menilai bahwa target ini cukup berat jika melihat kinerja penerimaan tahun sebelumnya.

Tekanan lain menurut Yusuf datang dari subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah telah menambah kebutuhan anggaran sekitar Rp132 triliun. Jika harga minyak kembali meningkat, ruang fiskal akan semakin sempit.

Sementara itu, penurunan anggaran Badan Gizi Nasional sekitar Rp38 triliun memang membantu menahan defisit. Namun, penghematan itu lebih banyak terjadi akibat kendala penyerapan, penyesuaian penerima, dan persyaratan sanitasi dapur.

Kondisi ini menurutnya mencerminkan persoalan tata kelola program, bukan efisiensi yang dirancang sejak awal. Apabila anggarannya dialihkan ke program lain, pengaruhnya terhadap defisit juga akan hilang.

Sementara itu, pemangkasan perjalanan dinas diperkirakan hanya menghasilkan penghematan satu digit triliun rupiah atau kurang dari 0,05% PDB.

“Dampaknya terhadap defisit sangat terbatas, tetapi sektor hotel, restoran, dan transportasi di daerah dapat langsung merasakan tekanannya,” kata Yusuf.

Menurutnya, defisit 2,85% masih mungkin dipertahankan apabila penerimaan tidak meleset lebih jauh, harga minyak terkendali, dan anggaran MBG tetap tidak terserap.

Sebaliknya, jika penerimaan pajak melemah dan beban subsidi meningkat, defisit dapat mendekati batas 3%.

“Kalaupun target tercapai, pencapaian tersebut lebih banyak ditopang oleh rendahnya penyerapan belanja daripada perbaikan struktural dalam pengelolaan fiskal,” katanya.

Ia mewanti-wanti masalah serupa berpotensi berulang pada 2027 selama rasio pajak tidak meningkat dan program prioritas belum dievaluasi berdasarkan hasil.

Tanpa perbaikan tersebut, menurutnya pemerintah akan terus mengandalkan pengereman belanja menjelang akhir tahun untuk menjaga defisit.

DPKUKM Banyumas menyiapkan langkah antisipasi lonjakan harga cabai

Minggu, 11 Oktober 2026 15:30 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/648050/dpkukm-banyumas-menyiapkan-langkah-antisipasi-lonjakan-harga-cabai>

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus memantau perkembangan harga dan pasokan cabai serta menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut yang masih bertahan tinggi.

Kepala DPKUKM Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Minggu, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pasokan cabai dari daerah sentra produksi tetap masuk ke pasar-pasar di Banyumas dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Kita melakukan pemantauan harga, kemudian memastikan juga suplai pasokan ke pasar-pasar itu tersedia. Melalui pedagang-pedagang besar, kita pantau apakah suplainya cukup atau bagaimana," katanya.

Menurut dia, tingginya harga cabai tidak hanya terjadi di Banyumas, juga di sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut perlu dicermati karena daerah penghasil cabai juga harus memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.

Ia mencontohkan Banjarnegara yang merupakan salah satu daerah penghasil cabai.

Meskipun memiliki sentra produksi, dia mengatakan daerah tersebut juga menghadapi kebutuhan pasokan untuk konsumsi internal sehingga ketersediaan komoditas tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah produksi.

Pihaknya juga mencermati arahan Gubernur Jawa Tengah agar sentra-sentra produksi pertanian di wilayah tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di Jawa Tengah sebelum memasok ke daerah lain.

“Selain pemantauan harga dan ketersediaan barang, kami juga berupaya mengoptimalkan kerja sama antardaerah (KAD) untuk memperlancar distribusi cabai,” katanya.

Melalui mekanisme tersebut, kata dia, pedagang besar di Banyumas diharapkan dapat menjalin kerja sama langsung dengan petani di daerah penghasil.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga membuka kemungkinan intervensi melalui subsidi apabila kenaikan harga terus berlanjut dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Akan tetapi, lanjut dia, pelaksanaan subsidi perlu dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang karena komoditas pertanian memiliki mekanisme penanganan berbeda dengan barang hasil industri.

"Kalau kondisinya semakin naik terus dan berakibat pada daya beli masyarakat, nanti kita upayakan melalui mekanisme subsidi. Namun, untuk komoditas pertanian, kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait," katanya.

Gatot menegaskan untuk saat ini langkah yang diutamakan adalah memantau perkembangan harga sekaligus memastikan pasokan dari sentra-sentra produksi tetap mengalir ke Banyumas sesuai kebutuhan pasar.

Dalam kesempatan terpisah, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Manis Purwokerto, Anjar mengatakan terbatasnya pasokan cabai dari petani menyebabkan harga jual di pasar masih tinggi.

Ia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena tanaman cabai dari masa tanam sebelumnya memasuki akhir produksi, sedangkan tanaman baru belum menghasilkan panen secara optimal, sehingga jumlah cabai yang dipasok petani ke pasar menjadi terbatas.

Oleh karena itu, cabai merah besar hingga Minggu (11/10) masih dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp75.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau masih bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi karena mencapai Rp90.000 per kilogram.

“Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga aneka cabai di Pasar Manis Purwokerto bertahan tinggi selama sepekan terakhir,” kata Anjar.

Transaksi UMKM Tembus Rp2 Miliar, DPRD Kabupaten Semarang Usul Optimalisasi Anggaran Festival Budaya

Minggu, 11 Oktober 2026 18:16 WIB

Penulis: Eka Yulianti Fajlin, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1269160/transaksi-umkm-tembus-rp2-miliar-dprd-kabupaten-semarang-usul-optimalisasi-anggaran-festival-budaya>

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - DPRD Kabupaten Semarang mengusulkan adanya optimalisasi anggaran pada kegiatan festival budaya yang selama ini sudah berjalan.

Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Muzayinul Arif mengatakan, festival budaya merupakan kegiatan yang memiliki nilai strategis bagi Kabupaten Semarang.

Selain menjaga keberlangsungan seni dan tradisi, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat luas.

Dia menilai, potensi tersebut perlu mendapat dukungan yang lebih serius melalui perencanaan anggaran yang tepat.

Apalagi, transaksi UMKM dalam kegiatan festival budaya mencapai Rp 2 miliar pada 2026.

Angka itu meningkat dibandingkan 2025 yang mencatat transaksi UMKM sekitar Rp 1 miliar.

Dampak ekonomi tersebut mendorong dirinya mengusulkan optimalisasi anggaran kegiatan pentas kebudayaan.

"Ini keren. Pada 2025, UMKM ada transaksi sekitar Rp 1 miliar, sedangkan pada 2026 mencapai Rp 2 miliar. Itu kan keren," ujar Yayin, sapaannya, Minggu (11/10/2026).

Dia berharap, pemerintah daerah dapat melihat festival budaya bukan sekadar agenda pertunjukan, melainkan juga kegiatan yang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Semarang.

Menurutnya, dukungan anggaran perlu diarahkan agar kegiatan kebudayaan dapat berlangsung secara optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

Dia menyoroti anggaran Rp 500 juta pada subkegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata pada Rancangan KUA PPAS 2027.

Anggaran tersebut untuk kegiatan atraksi wisata di 100 titik dengan masing-masing titik mendapatkan Rp 5 juta.

Dia meminta anggaran tersebut dialokasikan ke pentas kebudayaan yang selama ini memang sudah benar-benar berjalan.

"Mbok yo pentas-pentas 100 titik digeser optimisasi khusus ke pentas-pentas kebudayaan. Optimisasi khusus pentas-pentas kebudayaan yang benar-benar itu ada," ujarnya. (eyf)

Gubernur Cup Jateng Hard Enduro #1, Homestay dan UMKM di Kendal Laris Manis

Minggu, 11 Oktober 2026 07:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11780

KENDAL – Gelaran Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro #1 tidak hanya menjadi ajang uji nyali bagi para rider, acara yang diselenggarakan di Argon Enduro Park, Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal pada Minggu, 11 Oktober 2026 itu juga turut menggerakkan roda ekonomi warga.

Sebab, sektor pariwisata, penginapan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di Kabupaten Kendal ikut merasakan berkah dari ramainya kunjungan wisatawan dan penonton.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, ajang ini tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Inilah bentuk solidaritas kebersamaan antara masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi jajaran Pemerintah Provinsi Jateng, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk berkumpul dan berinteraksi langsung dengan para warga.

Dalam rangkaian kegiatan itu, juga diberikan santunan untuk anak yatim dan dilakukan kegiatan penanaman pohon. Keduanya menjadi bagian dari kepedulian sosial dan lingkungan yang menyertai penyelenggaraan kompetisi otomotif tersebut.

Ketua Pelaksana, Arif Yulianto, mengatakan, kegiatan tersebut dirancang tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mendukung pengembangan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga di Jawa Tengah.

Menurutnya, karakter alam Kendal dengan lintasan yang menantang memiliki daya tarik bagi komunitas otomotif. Kehadiran peserta beserta keluarga dan penonton juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata, penginapan, kuliner, hingga perdagangan masyarakat.

“Alhamdulillah, homestay-homestay di sini pada laris semuanya,” ucapnya.

Ia menyebut, sejumlah pedagang makanan di sekitar lokasi juga ikut merasakan ramainya kegiatan tersebut. Panitia secara khusus melibatkan pelaku UMKM dengan menyediakan ruang berjualan selama kompetisi berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan event ini juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Arif berharap, kompetisi tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda olahraga berkelanjutan. Selain menjadi wadah pembinaan atlet enduro, kegiatan ini diharapkan semakin memperkenalkan potensi wisata Jawa Tengah kepada masyarakat luas.

Hingga Minggu pagi (11/9/2026), sebanyak 135 peserta sementara tercatat mengikuti kompetisi tersebut. Jumlah itu masih berpotensi bertambah.

Salah seorang peserta, Fido, mengaku sudah sering mengikuti berbagai ajang hard enduro. Ia menilai, lintasan yang disiapkan dalam kompetisi kali ini cukup seru dan menantang.

“Saya sudah sering ikut hard enduro seperti ini. Trek kali ini seru dan menantang banget. Harapannya, ke depan semakin banyak acara seperti ini dan hadiahnya juga lebih besar,” ujarnya.

Tumbuh Positif, Heri Pudyatmoko Optimistis Investasi di Jateng Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Minggu, 11 Oktober 2026 18:47 WIB

Editor: Ning Suparningsih

<https://suarabaru.id/2026/10/11/tumbuh-positif-heri-pudyatmoko-optimistis-investasi-di-jateng-jadi-motor-penggerak-ekonomi>

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Capaian investasi Jawa Tengah sebesar Rp48,54 triliun pada semester I tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi daerah.

Realisasi tersebut juga diikuti penyerapan 213.217 tenaga kerja, membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, realisasi investasi yang terus bergerak menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Tengah masih terjaga.

“Capaian investasi ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Tengah masih sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Heri, baru-baru ini.

Berdasarkan data realisasi semester I tahun 2026, investasi Jawa Tengah mencapai Rp48,54 triliun atau sekitar 48,99 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas investasi pada triwulan I sebesar Rp23,02 triliun dan triwulan II sebesar Rp25,53 triliun. Secara keseluruhan, investasi itu mencakup 55.989 proyek.

Dari sisi sumber modal, penanaman modal asing (PMA) menyumbang Rp25,92 triliun atau 53,40 persen. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp22,62 triliun atau 46,60 persen.

Heri menilai, capaian investasi tersebut perlu terus didorong agar manfaatnya semakin luas, terutama melalui terbukanya kesempatan kerja dan keterlibatan tenaga kerja lokal.

“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal. Dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh daerah tempat investasi itu berkembang,” katanya.

Menurutnya, keberlanjutan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Karena itu, lanjut Heri, iklim usaha yang kondusif perlu dipertahankan agar peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja dapat terus berkembang.

Heri juga berharap perkembangan investasi dapat memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka realisasi modal, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kami optimis investasi di Jawa Tengah akan terus menjadi motor penggerak ekonomi. Yang penting, momentum positif ini terus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” pungkask Heri.

Inflasi India Sentuh Level Tertinggi dalam Dua Tahun

Senin, 12 Oktober 2026 21:00 WIB

Asmi Bhatia dan Anup Roy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124339/inflasi-india-sentuh-level-tertinggi-dalam-dua-tahun/2>

Bloomberg, Inflasi India meningkat ke level tertinggi dalam hampir dua tahun pada September, mendekati batas atas kisaran toleransi bank sentral sebesar 2%–6%. Kenaikan ini memperkuat alasan di balik keputusan bank sentral menaikkan suku bunga pekan lalu untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun.

Indeks harga konsumen naik 5,54% pada bulan lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi level tertinggi sejak akhir 2024. Angka tersebut meningkat dari 4,83% pada Agustus setelah revisi, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Statistik dan Implementasi Program pada Senin. Hasil ini secara umum sejalan dengan estimasi median 5,58% dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom.

Obligasi pemerintah India masih mencatatkan penurunan setelah data tersebut dirilis. Imbal hasil obligasi acuan bertenor 10 tahun diperdagangkan sekitar 10 basis poin lebih tinggi, di level 7,40%.

Data ini dirilis hanya beberapa hari setelah komite kebijakan moneter Reserve Bank of India (RBI) secara bulat memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dan mengubah arah kebijakannya menjadi “pengetatan yang terukur”.

“Jelas bahwa inflasi dan prospeknya tidak serendah risiko seperti tahun lalu,” kata Gubernur RBI Sanjay Malhotra pekan lalu setelah kenaikan suku bunga tersebut.

RBI memperkirakan inflasi rata-rata mencapai 6% dalam tiga bulan hingga Desember dan menaikkan proyeksi inflasi setahun penuh menjadi 5,2%. Perkiraan tersebut memperkuat pesan Malhotra yang lebih hawkish atau cenderung mendukung kebijakan moneter ketat.

Kenaikan inflasi pada September terutama didorong oleh harga pangan, yang meningkat menjadi 7,74% dari 5,97% pada Agustus. Komponen pangan mencakup lebih dari sepertiga keranjang penghitungan inflasi ritel. Curah hujan yang kurang dari normal diperkirakan akan menambah tekanan harga dalam beberapa bulan mendatang.

Harga minyak global yang tinggi juga masih menjadi kekhawatiran. Pemerintah sebagian besar melindungi konsumen dari kenaikan harga bahan bakar di SPBU, dengan hanya menaikkan harga bahan bakar ritel secara terbatas pada Mei meskipun harga minyak mentah kembali menembus US\$100 per barel.

Meski demikian, dunia usaha tetap merasakan tekanan. Kenaikan biaya pangan dan energi meningkatkan pengeluaran serta menggerus margin keuntungan. Sejauh ini, produsen menyerap sebagian besar kenaikan biaya tersebut alih-alih meneruskannya kepada konsumen.

“Guncangan harga pangan yang meluas cenderung bertahan lebih lama dan berisiko lebih besar memengaruhi ekspektasi inflasi rumah tangga dibandingkan kenaikan harga sayuran yang bersifat sementara,” kata Kunal Kundu, ekonom Societe Generale, dalam sebuah catatan.

Yuan Bertahan Dekati Level Tertinggi 3,5 Tahun Senin (12/10), Dolar AS Masih Perkasa

Senin, 12 Oktober 2026 11:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-bertahan-dekati-level-tertinggi-35-tahun-senin-1210-dolar-as-masih-perkasa>

KONTAN.CO.ID - Yuan China bertahan di dekat level tertinggi dalam tiga setengah tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/10/2026).

Penguatan yuan ditopang berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Oktober, meski ketegangan perdagangan dan penguatan dolar AS masih membayangi pergerakannya.

Mengutip Reuters, yuan di pasar domestik China atau onshore yuan menguat tipis ke level 6,6920 per dolar AS pada perdagangan menjelang siang.

Sebelum pasar dibuka, Bank Sentral China menetapkan kurs tengah yuan di level 6,7313 per dolar AS, posisi terkuat sejak 2 Februari 2023.

Mata uang China tersebut telah menguat sekitar 4% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Sejak akhir 2024, yuan juga mencatat apresiasi sekitar 9% dalam tren penguatan selama tujuh kuartal berturut-turut.

Namun, prospek penguatan yuan masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks dolar AS bertahan di dekat level tertinggi dalam 18 bulan terakhir setelah data ekonomi terbaru mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan The Fed pada bulan ini.

Di sisi lain, pelebaran selisih imbal hasil obligasi antara AS dan China turut membatasi ruang penguatan yuan.

Penguatan dolar AS terhadap euro di tengah kekhawatiran mengenai persoalan utang di Eropa juga menambah tekanan terhadap mata uang China tersebut.

“Jika dolar AS tetap kuat, yuan akan berada di bawah tekanan,” ujar Cai Shaoli, analis Huatai Futures, seperti dikutip Reuters.

Dari sisi fundamental, yuan memperoleh dukungan dari ekspor China yang relatif tangguh.

Fan Yongjia, analis COFCO Futures mengatakan, sejumlah bank Barat juga menilai yuan masih berada di bawah nilai wajarnya sehingga membuka ruang penguatan lebih lanjut.

Meski demikian, Fan mengingatkan bahwa meningkatnya proteksionisme perdagangan dapat menghambat tren apresiasi yuan.

Perubahan permintaan eksternal terhadap produk manufaktur China menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan.

Risiko tersebut terlihat dari kesepakatan China dan Uni Eropa (UE) yang berpotensi memangkas ekspor mobil hibrida China ke kawasan tersebut lebih dari separuh.

Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic menyampaikan hal itu pada Jumat setelah perundingan di Beijing yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan UE dengan China.

Selain risiko perdagangan, China Merchants Futures menilai selisih imbal hasil antara AS dan China yang semakin lebar juga dapat membatasi penguatan yuan.

Dengan indeks dolar AS bertahan di atas level 102, perusahaan pialang tersebut menilai fondasi penguatan yuan secara satu arah belum cukup kuat.

China Merchants Futures memperkirakan yuan akan bergerak fluktuatif dalam kisaran 6,65 hingga 6,75 per dolar AS.

Dengan demikian, meski yuan masih ditopang ekspor yang kuat dan perubahan ekspektasi kebijakan moneter AS, arah pergerakannya ke depan akan turut ditentukan oleh kekuatan dolar AS, perkembangan hubungan dagang China dengan mitra utamanya, serta selisih imbal hasil kedua negara.

Suku Bunga RBI Naik, Aksi Jual Obligasi di India Diperkirakan Berlanjut

Senin, 12 Oktober 2026 11:49 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/suku-bunga-rbi-naik-aksi-jual-obligasi-di-india-diperkirakan-berlanjut>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Reksadana India diperkirakan akan kembali menjual obligasi pemerintah setelah melepas kepemilikan senilai US\$ 4,5 miliar sejak Juli, menurut keterangan empat manajer investasi.

Langkah ini diambil karena perubahan kebijakan bank sentral memicu ekspektasi akan siklus pengetatan suku bunga yang lebih lama dan lebih tajam.

Mengutip Reuters, Senin (12/10/2026), Reserve Bank of India (RBI) menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun dan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut seiring dengan meningkatnya inflasi.

Mansi Sajeja, manajer investasi pendapatan tetap di SBI Mutual Fund mengatakan, reksadana telah mengurangi eksposur mereka terhadap obligasi pemerintah berjangka waktu lebih panjang seiring perubahan ekspektasi suku bunga.

Manajer investasi mencatatkan penjualan bersih obligasi pemerintah senilai 51 miliar rupee (US\$ 527,08 juta) dalam tiga sesi perdagangan setelah kenaikan suku bunga, menambah total penjualan sebesar 378 miliar rupee pada periode Juli-September.

"Nada kebijakan tersebut lebih menekankan pada kehati-hatian terkait meluasnya tekanan inflasi dibandingkan prospek pertumbuhan ekonomi, sehingga mencerminkan sikap hawkish," ujar Amit Somani, Wakil Kepala Pendapatan Tetap di Tata Asset Management.

Somani memperkirakan imbal hasil (yield) obligasi jangka panjang akan naik ke kisaran 7,20%-7,40%.

Imbal hasil obligasi tenor lima tahun sempat melampaui 7,05%—naik hampir 70 basis poin dalam dua bulan—sementara imbal hasil obligasi tenor 10 tahun mendekati level 7,35%, angka tertinggi dalam hampir tiga tahun terakhir.

"Berbagai faktor—termasuk kenaikan suku bunga global, imbal hasil obligasi global yang mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade, ekspektasi siklus kenaikan suku bunga domestik yang lebih cepat dari perkiraan, serta ketidakpastian yang terus berlanjut di pasar energi—mendorong reksa dana untuk mengurangi risiko durasi dengan memangkas eksposur obligasi pemerintah," kata Vikas Garg, Kepala Pendapatan Tetap di Invesco Mutual Fund.

Penjualan obligasi dalam jumlah besar di pasar terbuka oleh RBI serta risiko terulangnya operasi serupa juga telah mengubah dinamika penawaran dan permintaan, menurut para manajer investasi.

RBI menjual obligasi senilai 1 triliun rupee bulan lalu, mencatatkan angka penjualan bersih tertinggi dalam satu tahun fiskal selama lebih dari satu dekade.

Peralihan ke Aset Jangka Pendek

Di tengah penjualan obligasi pemerintah berdurasi panjang, perusahaan reksadana beralih ke aset berdurasi sangat pendek (ultra-pendek), baik dalam bentuk surat utang pemerintah maupun korporasi.

Axis Mutual Fund kini lebih memilih obligasi korporasi berkualitas tinggi dengan tenor satu hingga tiga tahun; perusahaan tersebut menyatakan dalam sebuah catatan bahwa imbal hasil carry yang menguntungkan, likuiditas yang melimpah, serta terbatasnya penerbitan sertifikat deposito bank menciptakan peluang yang menarik.

Mereka mungkin akan menambah durasi investasi secara taktis hanya ketika siklus kenaikan suku bunga terus berlanjut dan tingkat imbal hasil menjadi lebih menarik.

Aditya Birla Sun Life AMC meminati surat utang berjangka sangat pendek, sementara Bandhan Asset Management telah memangkas durasi rata-rata tertimbang portofolio obligasinya menjadi kurang dari satu tahun—turun dari sekitar 12 tahun—demikian disampaikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan Reuters.

(US\$1 = 95,9500 rupee India)

IMF: Investasi AI Jaga Pertumbuhan Global di Kisaran 3%, Asia Dapat Manfaat Besar

Senin, 12 Oktober 2026 11:18 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-investasi-ai-jaga-pertumbuhan-global-di-kisaran-3-asia-dapat-manfaat-besar>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengungkapkan, investasi yang kuat dalam infrastruktur kecerdasan buatan (AI) menjaga pertumbuhan global tetap di kisaran 3% dan memberikan manfaat besar bagi banyak negara ekonomi Asia yang memasok perangkat kerasnya.

"Lonjakan investasi AI merupakan kejutan permintaan, kejutan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di kawasan ini sebesar setengah hingga satu poin persentase penuh, serta ekonomi negara berkembang di Asia sebesar 0,2 hingga 0,8 poin persentase," ujarnya seperti dilansir Reuters, Senin (12/10/2026).

"Jadi, peningkatan laju pertumbuhan itulah yang menjaga ekonomi dunia tetap tumbuh di kisaran 3%, meskipun kita sedang terbebani oleh kejutan pasokan energi," kata Georgieva dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok.

Won Korea Selatan Tembus Level Tertinggi 2 Tahun Senin (12/10), Rupiah Menguat Tipis

Senin, 12 Oktober 2026 09:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-tembus-level-tertinggi-2-tahun-senin-1210-rupiah-menguat-tipis>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (12/10/2026).

Di tengah pergerakan yang cenderung datar, won Korea Selatan mencatat penguatan dan berada di level tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.08 GMT, won Korea Selatan menguat 0,31% ke level 1.336,16 per dolar AS, dari posisi sebelumnya 1.340,25 per dolar AS.

Penguatan juga terjadi pada yen Jepang yang naik 0,11% ke level 158,14 per dolar AS. Dolar Singapura menguat 0,09% ke level 1,279 per dolar Singapura, sedangkan ringgit Malaysia naik 0,12% ke posisi 4,078 per dolar AS.

Baht Thailand bergerak tipis menguat 0,01% ke level 33,495 per dolar AS. Sementara itu, rupee India stagnan di level 96,73 per dolar AS.

Sebaliknya, dolar Taiwan melemah 0,29% ke posisi 31,967 per dolar AS. Peso Filipina juga turun 0,03% ke level 62,71 per dolar AS. Adapun yuan China relatif stabil di kisaran 6,693 per dolar AS.

Di kawasan Asia Tenggara, rupiah menguat tipis 0,03% ke level Rp 17.870 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp 17.875 per dolar AS.

Meski demikian, secara kumulatif sejak akhir 2025, rupiah masih melemah 6,72% terhadap dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah lebih besar dibandingkan ringgit Malaysia yang melemah 0,54% dan yen Jepang yang turun 0,94% sepanjang periode tersebut.

Sebaliknya, won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar di antara mata uang yang tercantum dalam data, yakni 7,81% sejak akhir 2025. Yuan China juga menguat 4,41%, sedangkan dolar Singapura naik 0,48%.

Pergerakan tersebut memperlihatkan kinerja mata uang Asia yang beragam sepanjang tahun ini, dengan won Korea Selatan dan yuan China menguat terhadap dolar AS, sementara sejumlah mata uang lain, termasuk rupiah, masih berada dalam tren pelemahan.

Dolar AS Bertahan Dekati Level Tertinggi 18 Bulan Senin (12/10), Menanti Inflasi AS

Senin, 12 Oktober 2026 09:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-bertahan-dekati-level-tertinggi-18-bulan-senin-1210-menanti-inflasi-as>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan di dekat level tertinggi dalam 18 bulan pada perdagangan Senin (12/10/2026).

Ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah mendorong investor mencari aset aman, sementara pelaku pasar menanti data inflasi AS yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Mengutip Reuters, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia tercatat turun tipis ke 102,14 pada perdagangan awal Asia.

Meski demikian, indeks tersebut masih berada tidak jauh dari level tertinggi dalam 18 bulan yang dicapai pekan lalu.

Aktivitas perdagangan relatif terbatas karena pasar Jepang tutup untuk libur nasional, sehingga likuiditas di kawasan Asia menipis.

Sentimen pasar masih dipengaruhi eskalasi konflik di Timur Tengah. Harga minyak bergerak fluktuatif setelah kelompok Houthi yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi, sementara dua kapal tanker juga menjadi sasaran serangan selama akhir pekan.

Di sisi lain, harga minyak turut dipengaruhi pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Minggu mengenai gencatan senjata energi antara Rusia dan Ukraina. Harga minyak mentah Brent turun sekitar 1% menjadi US\$ 103,55 per barel pada perdagangan Asia.

Analisis Commonwealth Bank of Australia memperkirakan, kelompok Houthi akan melanjutkan serangan terhadap aset energi Arab Saudi. Kondisi tersebut berpotensi menopang harga minyak sekaligus memperkuat dolar AS.

Mereka juga menilai belum akan ada terobosan dalam upaya perdamaian Iran dan AS dalam waktu dekat, meskipun Iran telah mengonfirmasi menerima proposal perdamaian AS melalui perantara.

Terhadap yen Jepang, dolar AS melemah 0,14% menjadi 158,16 yen. Sementara itu, dolar Australia dan dolar Selandia Baru masing-masing relatif stabil di US\$ 0,6988 dan US\$ 0,5614.

Data inflasi AS jadi penentu arah dolar

Selain perkembangan geopolitik, perhatian investor pekan ini tertuju pada data indeks harga konsumen (CPI) AS yang dijadwalkan rilis Rabu (14/10/2026).

Data tersebut menjadi salah satu indikator ekonomi penting terakhir sebelum rapat kebijakan suku bunga The Fed pada akhir Oktober.

Pekan lalu, data menunjukkan sentimen konsumen AS kembali memburuk pada awal Oktober. Kenaikan biaya hidup akibat konflik di Timur Tengah membuat rumah tangga semakin pesimistis terhadap kondisi perekonomian.

The Fed menaikkan suku bunga pada September untuk pertama kalinya sejak 2023 dalam upaya mengendalikan inflasi. Kini, investor memantau data ekonomi untuk memperkirakan apakah bank sentral AS akan kembali mengubah kebijakan moneternya.

Berdasarkan perangkat CME FedWatch, pelaku pasar memperkirakan peluang The Fed mempertahankan suku bunga pada Oktober mencapai 81%, meningkat dari 51% sebulan sebelumnya.

Meski dolar masih ditopang permintaan aset aman, analis Barclays menilai penguatannya berpotensi tertahan dalam waktu dekat, bahkan membuka peluang koreksi.

Menurut mereka, gejolak tajam di pasar obligasi telah memperketat kondisi keuangan global. Situasi tersebut dapat mendorong pejabat The Fed memberikan sinyal kebijakan yang lebih menenangkan menjelang rapat Oktober, terutama jika data inflasi menunjukkan hasil lebih rendah daripada perkiraan.

Dalam beberapa pekan terakhir, aksi jual di pasar obligasi membuat biaya pinjaman global meningkat ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Kekhawatiran terhadap inflasi, harga energi, dan membengkaknya utang pemerintah menjadi faktor utama di balik tekanan tersebut.

Di pasar valuta asing lainnya, euro menguat hampir 0,1% menjadi US\$ 1,121 setelah mencatatkan pelemahan selama lima pekan berturut-turut.

Mata uang tunggal Eropa tersebut masih dibayangi kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Prancis dan ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden pada 2027.

Strategis valuta asing OCBC menilai masih terlalu dini untuk memastikan apakah kenaikan biaya pinjaman akan cukup mendorong pemerintah Prancis memperketat disiplin fiskalnya.

Mereka memperkirakan pasangan euro-dolar AS akan bergerak konsolidatif karena intensitas pemberitaan mengenai persoalan fiskal dan politik Prancis kemungkinan mereda. Namun, potensi penguatan euro dinilai tetap terbatas oleh persoalan struktural ekonomi Eropa.

Sementara itu, pound sterling bergerak stabil di US\$ 1,3245. Dolar AS terhadap yuan China di pasar offshore juga relatif tidak berubah di 6,6927 yuan.

Di pasar aset kripto, Bitcoin naik 0,2% menjadi US\$ 83.788,50, sedangkan Ether menguat 0,15% menjadi US\$ 2.540,08.

Suahasil Ubah Beleid Bayar Utang Pajak: Pokok Dilunasi Dahulu

Senin, 12 Oktober 2026 19:20 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124336/suahasil-ubah-beleid-bayar-utang-pajak-pokok-dilunasi-dahulu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengubah mekanisme penyelesaian kewajiban perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026).

Kebijakan anyar yang ditandatangani Menkeu Suahasil Nazara dan berlaku sejak 2 Oktober 2026 ini mengubah skema alokasi pembayaran utang pajak, di mana dana yang disetorkan wajib pajak kini diprioritaskan penuh untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu sebelum memperhitungkan sanksi administratif.

Langkah strategis ini menandai pergeseran substansial dari aturan terdahulu, yakni PMK Nomor 118 Tahun 2024, yang mewajibkan pembayaran utang pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok dan denda.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa restrukturisasi skema pembayaran ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi para wajib pajak yang berniat menyelesaikan tunggakannya.

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).

Perubahan skema ini memberikan ruang gerak finansial yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna menjaga ketahanan arus kas (cash flow resilience) di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi.

Selain mengubah skema pelunasan pokok, PMK-71/2026 juga menyempurnakan aspek administratif operasional, meliputi perpanjangan dan penyesuaian jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan serta perincian kriteria pengurangan atau penghapusan sanksi.

Namun, regulator memberikan batasan tegas bahwa sanksi administratif yang timbul akibat sengketa hukum di tingkat keberatan, banding, hingga peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui skema PMK ini.

Bukan Pemutihan

Otoritas pajak menggarisbawahi bahwa penyesuaian regulasi ini murni merupakan penyempurnaan tata cara administrasi dan bukan bentuk pengampunan pajak (tax amnesty) maupun pemutihan utang. Pemerintah tetap mengharuskan setiap wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh kewajiban utang pokoknya secara utuh demi menjaga keadilan bagi para wajib pajak yang selama ini patuh.

"Penyempurnaan ketentuan ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak. Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetap diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku," tegas Bimo.

Dari kacamata fiskal, penyempurnaan PMK-71/2026 diproyeksikan bakal mengakselerasi pencairan piutang pajak negara yang tertunda, sekaligus mendorong tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Langkah mengurai kemacetan tunggakan pajak ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menekan likuiditas pelaku usaha secara berlebihan.

"Kami berharap penyempurnaan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang semakin adil dan efektif," tutup Bimo.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Beleid ini sekaligus mengubah PMK 118 tahun 2024.

Dalam beleid ini disebutkan bahwa pemerintah bisa melakukan pengurangan bahkan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

“Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan,” sebut pasal 27A aturan tersebut dikutip Rabu (7/10/2026).

Pengurangan ini ditetapkan berdasarkan surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 23.

“Permohonan yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini,” sebut beleid tersebut.

Dalam Pasal 21, aturan ini merinci mengenai sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) yang terkait maupun tidak terkait dengan penerbitan SKP.

Selain itu aturan ini juga mengatur mengenai pengurangan atau penghapusan serta denda administratif PBB dalam SKP PBB maupun STP PBB, dengan sejumlah pengecualian sebagaimana diatur dalam beleid.

Sementara itu, pada Pasal 23 disebutkan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ini baru bisa dijalankan dengan sejumlah syarat, di antaranya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau SKP PBB tidak diajukan keberatan, keberatan telah dicabut dan disetujui DJP, atau keberatan tidak dipertimbangkan.

Selain itu, tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar maupun pembatalan SKP hasil pemeriksaan, atau permohonan tersebut telah dicabut, tidak dipertimbangkan, atau ditolak.

Untuk PBB, wajib pajak juga belum mengajukan permohonan pengurangan PBB, atau permohonan tersebut telah dicabut maupun dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan.

Suahasil Genjot PNBP untuk Tambal Subsidi dan Kompensasi

Senin, 12 Oktober 2026 18:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124333/suahasil-genjot-pnbp-untuk-tambal-subsidi-dan-kompensasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah akan terus menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir tahun meskipun saat ini sudah mencapai target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“PNBP juga memiliki upside yang kita patut syukuri. Rp492,3 triliun telah dikumpulkan. Ini sudah melebihi target APBN, namun kita akan terus berusaha supaya ada penerimaan PNBP tambahan,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita beberapa waktu lalu.

Dengan realisasi tersebut maka PNBP juga sudah mencatatkan pertumbuhan 41,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp347,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut setara 107,2% terhadap target APBN 2026 di angka 459,2 triliun dan 85,6% dari outlook PNBP 2026 sebesar Rp575,1 triliun yang disetujui pertengahan tahun lalu.

Menurut Suahasil, pendapatan dari PNBP ini harus digenjot karena belanja negara yang terus meningkat imbas ketidakpastian yang ditimbulkan dari harga minyak.

Imbasnya, pemerintah harus membayar beban subsidi yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa hingga September pembayaran subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari anggaran 2026.

“Ini menjadi cara kita mengelola APBN yang harus kita lakukan balancing terus-menerus,” sebutnya.

Dalam pemaparannya Suahasil juga mengatakan bahwa kontribusi PNBP juga berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp58 triliun dan juga satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan).

“Kemarin di depan Bapak Presiden kami Kementerian Keuangan mencatatkan 13,2 triliun dari Satgas PKH, namun saya ingin menyampaikan bahwa Satgas PKH antara 2025 sampai 2026 telah memberikan setoran 57,1 triliun,” katanya.

Ia mengatakan bahwa uang yang berasal dari satgas PKH tersebut tercatat dalam berbagai pos pendapatan. Sementara itu, kontribusi ke pos PNBP tercatat sebesar Rp38,65 triliun dan pajak sebesar Rp18,45 triliun.

Selain itu, Suahasil menyebut bahwa harga minyak mentah juga turut mendorong pendapatan sumber daya alam PNBP.

Berdasarkan komponennya, pendapatan sumber daya alam (SDA) terhadap PNBP mencapai Rp223,1 triliun, terdiri dari SDA migas sebesar Rp90,9 triliun dan SDA nonmigas sebesar Rp132,2 triliun.

Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) tercatat Rp58 triliun, PNBP lainnya Rp117,3 triliun, dan pendapatan badan layanan umum (BLU) Rp93,9 triliun.

Dalam pemaparannya, Kemenkeu menyebut bahwa kenaikan harga minyak mentah mendorong pertumbuhan penerimaan SDA migas sebesar 19,4% yoy.

Sementara itu, kenaikan harga batu bara dan mineral serta perubahan formula perhitungan Harga Patokan Mineral (HPM) meningkatkan penerimaan SDA nonmigas sebesar 30,1% yoy.

BPS: Mobilitas & Gaya Hidup Topang Daya Beli Masyarakat

Senin, 12 Oktober 2026 16:50 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124323/bps-mobilitas-gaya-hidup-topang-daya-beli-masyarakat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa indikasi pergeseran pola konsumsi masyarakat di Indonesia semakin menguat pada Semester I-2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tren ini terdorong oleh tingginya mobilitas masyarakat serta lonjakan aktivitas perjalanan (traveling) yang signifikan.

"Indikasi pergeseran pola konsumsi masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu, dan indikasinya semakin menguat pada Semester I-2026," ujar Amalia di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Amalia menambahkan bahwa peningkatan mobilitas dan gaya hidup (lifestyle) masyarakat saat ini tercermin langsung dari akselerasi pertumbuhan di sektor transportasi serta akomodasi makanan dan minuman (restoran dan hotel).

"Hal ini terlihat dari konsumsi sektor restoran dan hotel yang tumbuh di atas 6%, serta sektor transportasi yang tumbuh tinggi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat," katanya.

Sebelumnya, akselerasi pertumbuhan di sektor transportasi menjadi salah satu motor utama pemacu konsumsi rumah tangga sepanjang Semester I-2026.

BPS mencatat bahwa subsektor transportasi udara dan kereta api mengalami lonjakan penumpang masing-masing melebihi 8,5% dan 11,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Peningkatan kapasitas angkut serta bertambahnya frekuensi libur panjang (long weekend) sepanjang paruh pertama tahun ini dinilai menjadi pemicu utama masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan mereka pada aktivitas perjalanan jangka pendek maupun jarak jauh.

Dampak domino dari tingginya mobilitas tersebut langsung dirasakan oleh industri akomodasi dan penyediaan makanan-minuman. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di berbagai destinasi wisata unggulan—seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo—mencapai rata-rata di atas 64,5%, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 58,2%.

Pada saat yang sama, omzet bisnis kuliner dan restoran mencatatkan kenaikan agregat sebesar 6,8% (yoy), didorong oleh pergeseran preferensi masyarakat yang kini lebih memprioritaskan konsumsi berbasis pengalaman (experience-based consumption) dibanding barang tahan lama (durable goods).

Secara agregat, pergeseran pola konsumsi ini turut menopang daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi nasional yang relatif terjaga di level 2,4% (yoy) per pertengahan 2026.

Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang berkontribusi lebih dari 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbukti tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dengan membukukan pertumbuhan sebesar 4,98% (yoy) pada Semester I-2026.

Pertumbuhan konsumsi di luar sektor makanan pokok ini mencerminkan optimisme konsumen yang tetap stabil di zona ekspansif.

BPS memproyeksikan tren konsumsi gaya hidup dan mobilitas tinggi ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2026. Penguatan ini diperkirakan bakal mendapat dorongan tambahan dari agenda kegiatan nasional, momentum libur akhir tahun, serta efektivitas penyaluran stimulus belanja pemerintah.

Catatan BPS menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih terjaga dengan kuat. Hal itu terbukti dari konsumsi rumah tangga selama Semester I-2026 yang masih konsisten tumbuh di atas level 5%.

Selain ditopang konsumsi, BPS juga mencatat bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan baik. Sebanyak 99 kabupaten/kota di Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% sepanjang Semester I-2026.

Kawasan berbasis industri pengolahan (manufaktur) seperti Kendal dan Batang bahkan mencatatkan pertumbuhan di atas 8%. Di samping itu, wilayah berbasis non-tambang seperti Kabupaten Sidrap juga tumbuh mendekati 7% berkat produktivitas pertanian, pengolahan padi, dan masuknya investasi industri porang.

Pemerintah optimistis model pertumbuhan berbasis produktivitas dan pengelolaan daerah ini dapat direplikasi. Langkah koordinasi lintas kementerian dan perbaikan pencatatan data BPS terus diperkuat untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Rupiah Terlemah di Asia 2026, Ini Dampaknya Buat Rakyat

Senin, 12 Oktober 2026 16:29 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124324/rupiah-terlemah-di-asia-2026-ini-dampaknya-buat-rakyat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah bertahan di level Rp17.900/US\$ pada perdagangan Senin (12/10/2026). Pergerakan rupiah hari ini relatif terbatas, dan belum sepenuhnya mencerminkan bahwa tekanan eksternal telah mereda.

Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) menjelang rilis data inflasi dan kenaikan minyak mentah lantaran ketidakpastian di Timur Tengah masih membayangi prospek mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Jika ditarik ke belakang, maka pelemahan rupiah telah berlangsung sepanjang tahun. Rupiah menjadi mata uang terlemah di Asia dengan depresiasi hampir 7%.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berdampak pada inflasi domestik. Kala nilai tukar melemah, biaya impor dalam rupiah berpotensi meningkat, terutama bahan baku industri, barang modal dan sejumlah komoditas yang seringkali harganya mengacu pada perubahan harga di pasar global.

Risiko ini kian diperparah dengan harga minyak yang kembali menembus US\$104/barel akibat ketidakpastian geopolitik. Kenaikan biaya energi ini sudah merambah ke kenaikan ongkos transportasi, logistik, dan distribusi dan menambah tekanan terhadap harga barang dan jasa.

Daya Beli Tertekan

Data September sudah mengirim sinyal itu, dengan inflasi tercatat naik menjadi 3,28% yoy. Di tengah kondisi tersebut, tantangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter bukan sekadar menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Sinyal adanya pelemahan daya beli sebenarnya sudah berdering, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru yang turun ke posisi 118,1 pada September dari 118,5 bulan sebelumnya. Posisi ini memang masih berada di zona optimistis, dengan indeks di atas 100.

Namun jika dibedah lebih jauh berdasarkan kelompok pengeluaran, maka terlihat ada jurang persepsi yang kian lebar antara konsumen berpengeluaran rendah dan kelompok berpengeluaran tinggi.

Kelompok berpenghasilan rendah justru terlihat kian pesimistis. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) September kelompok pengeluaran Rp1-2 juta berada di bawah 100, alias masuk ke zona pesimistis.

Sementara itu, kelompok Rp2,1-Rp3 juta mencatat indeks 102,1 dan kelompok Rp3,1-Rp4 juta sebesar 103,9. Angka tersebut mengindikasikan bahwa persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini paling lemah pada kelompok pengeluaran terbawah.

Perlu dicatat bahwa indeks ini mengukur persepsi kondisi ekonomi, bukan secara langsung jumlah pendapatan riil atau besarnya konsumsi. Namun, jika disandingkan dengan inflasi yang meningkat serta data Penjualan Ritel terbaru, kondisi tersebut memperkuat alasan untuk mencermati bahwa kerentanan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah itu nyata adanya.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan menciptakan tekanan yang berlapis.

Kelompok ini umumnya punya porsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok sehingga lebih sulit mengurangi konsumsi tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Di saat harga pangan dan transportasi naik, ruang belanja mereka untuk kebutuhan lainnya kian menyempit.

Bahkan, data penjualan ritel merekam hal tersebut. Sebagian besar kelompok barang masih mencatat kontraksi.

Seperti Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terkontraksi 5,7%, diikuti Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya kontraksi 5,7%. Bahkan, kelompok Sandang terkontraksi paling dalam, sebesar 12,4% secara tahunan, dan merosot 15,2 poin secara bulanan.

Sikap BI

Dalam kondisi ini, BI menghadapi dilema antara menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nilai tukar memang diperlukan untuk membatasi tekanan inflasi impor dan menjaga kepercayaan investor.

Namun, pengetatan moneter yang terlalu agresif berpotensi meningkatnya biaya pinjaman dan menahan konsumsi maupun investasi.

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa langkah intervensi akan lebih diarahkan menggunakan insentif hedging dan membatasi penggunaan devisa dengan intervensi di pasar derivatif, seperti Non-Deliverable Forwards (NDF) dan Domestic-NDF.

Namun, intervensi tersebut belum mampu membawa rupiah kembali ke kisaran tahun lalu di level Rp16.500/US\$. Sebab dari sisi domestik, cadangan devisa saat ini berada dalam posisi lebih rendah ketimbang posisi di periode sama tahun lalu.

Sebagai catatan, posisi cadangan devisa saat ini berada di Rp146,32 miliar, lebih rendah ketimbang posisi bulan yang sama di tahun lalu sebesar US\$148,73 miliar.

Di sisi lain, neraca perdagangan belum sepenuhnya menopang pertumbuhan devisa secara lebih sehat. Posisi devisa terakhir lebih banyak ditopang oleh arus modal.

Penarikan pinjaman luar negeri itu memang dapat memperkuat posisi cadangan devisa dalam jangka pendek, dan menyediakan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Namun, sumber tersebut pada akhirnya akan menciptakan kewajiban yang harus dibayar kembali oleh Indonesia berserta biaya bunga utangnya.

Ke depan, ruang gerak rupiah sepertinya akan kian menyempit dengan bias pelemahan yang lebih dominan jika tekanan eksternal terus terjadi.

Awali Pekan, Rupiah Finis Sedikit di Atas Rp17.900/US\$

Senin, 12 Oktober 2026 15:33 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124317/awali-pekan-rupiah-finis-sedikit-di-atas-rp17-900-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan pelemahan 0,11% ke Rp17.903/US\$ pada Senin (12/10/2026). Mata uang Tanah Air bergerak terbatas, seiring sentimen domestik yang membayangi.

Di pasar obligasi sebagian tenor pendek mencatat aksi beli dengan penurunan yield dari tenor 1 tahun hingga 6 tahun menjadi 6,69% hingga 7,08%. Namun untuk tenor acuan 10 tahun masih mencatat aksi jual dan yield naik 2,5 bps jadi 7,2%.

Tekanan terhadap rupiah datang dari sentimen domestik salah satunya penjualan ritel yang pada Agustus mengalami pemulihan konsumsi rumah tangga secara agregat, setelah mengalami kontraksi pada kuartal II-2026.

Namun, pemulihan pada penjualan ritel belum sepenuhnya didukung oleh daya beli dengan data keyakinan konsumen yang melemah. Indeks Keyakinan Konsumen turun ke 118,1, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) ikut turun dari 109,4 menjadi 107,5.

Tekanan inflasi juga masih tinggi, dengan inflasi umum September meningkat ke level tertinggi dalam tiga bulan, 3,28% naik dari 3,19% pada posisi Agustus. Sementara, harga pangan diperkirakan masih akan terus memberi tekanan kenaikan hingga akhir tahun.

Selain itu, tekanan rupiah juga terjadi lantaran pelaku pasar mencermati posisi cadangan devisa yang menurun. Posisi devisa memang masih berada di level tinggi dan cukup untuk membiayai impor dan utang luar negeri, setidaknya 5,5 bulan, US\$146,32 miliar. Namun, posisi cadangan devisa ini jauh lebih rendah ketimbang posisi di bulan yang sama tahun lalu, di US\$148,73 miliar.

Defisit transaksi berjalan yang terus berlanjut, ditambah kondisi pembiayaan global yang kian ketat, membuat rupiah semakin rentan terhadap perubahan arus modal asing.

Di sisi lain tekanan eksternal belum sepenuhnya hilang. Indeks dolar AS meningkat ke 102,24, disertai adanya kekhawatiran akan inflasi global akibat minyak Brent kembali naik ke US\$104/barel.

Ketegangan di Timur Tengah masih terus berlanjut, dan semakin diperparah dengan adanya serangan kelompok Houthi di Bandara Riyadh kemarin, yang menewaskan 12 orang.

Mata Uang Asia

Pergerakan dolar AS dan minyak membatasi ruang gerak sebagian mata uang Asia. Indeks dolar AS bertahan kuat menjelang rilis data inflasi konsumen AS, yang akan menjadi petunjuk penting bagi arah kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Dari kawasan, rupee India menguat 1,06%, disusul won Korea Selatan yang lebih terbatas, peso Filipina, ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong. Sebaliknya, baht Thailand, rupiah, yen Jepang, dan dolar Taiwan justru melemah bersama yuan offshore.

Jika inflasi AS kembali menunjukkan tekanan yang persisten, maka ekspektasi penurunan suku bunga dapat semakin tertahan. Kondisi tersebut berpotensi menjaga yield US Treasury pemerintah AS tetap tinggi dan memperkuat daya tarik aset berbasis dolar, sehingga terus membatasi aliran modal menuju pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pemerintah Sebut Rantai Pasok jadi Biang Kerok Tingginya Inflasi

Senin, 12 Oktober 2026 16:10 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124320/pemerintah-sebut-rantai-pasok-jadi-biang-kerok-tingginya-inflasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa dinamika inflasi di Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh gangguan pada rantai pasokan dan biaya produksi (cost-push inflation).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa data statistik resmi menunjukkan tekanan harga yang terjadi di lapangan merupakan dampak langsung dari keterbatasan barang di pasar.

Menurutnya, meskipun daya beli masyarakat berada dalam kondisi yang terjaga, kelangkaan komoditas tertentu akan tetap memicu lonjakan harga.

“Kita perlu memperhatikan inflasi secara serius. Berdasarkan data BPS, karakteristik inflasi di Indonesia lebih bersifat cost-push inflation—yaitu inflasi yang didorong oleh faktor biaya dan pasokan (supply), bukan karena melemahnya demand (permintaan),” ungkap Dradjad di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia menambahkan intervensi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi harus berfokus pada pemenuhan stok dan ketersediaan barang.

Dradjad menerangkan, ketika daya beli masyarakat tergolong baik namun ketersediaan komoditas lokal seperti cabai maupun pasokan produk elektronik impor terbatas, kondisi ketidakseimbangan itulah yang serta-merta mendorong kenaikan inflasi.

“Kuncinya, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan mendorong kecukupan supply. Ketika daya beli masyarakat bagus tetapi pasokan komoditas, seperti cabai atau produk elektronik impor kurang, hal tersebut yang mendorong terjadinya kenaikan inflasi,” ujarnya.

Untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, Dradjad menilai sektor ekspor bersih (net export) juga perlu terus didorong secara optimal.

“Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor net export (ekspor bersih) perlu terus digenjot,” tambahnya.

Selain itu, guna memastikan seluruh kebijakan berbasis data yang akurat, pihak Kemenko Perekonomian berencana memperkuat sinergi dan perbaikan sistem pencatatan data ekonomi bersama kementerian serta lembaga terkait.

“Rencananya, saya bersama Ibu Kepala BPS [Amalia Adininggar Widyasanti] akan berkoordinasi ke kementerian/lembaga terkait untuk berbagi data dan memperbaiki sistem pencatatan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tertangkap sempurna oleh BPS,” tambahnya.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian menilai kondisi perekonomian nasional masih tergolong tangguh dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di level 3,28%, atau masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Laju inflasi ini juga tercatat melandai ke angka 2,84% secara tahunan (year-on-year), yang menandakan ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjangkau dan stabilitas harga terjaga di tengah fluktuasi global.

Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Prices) mereda hingga 3,25% (yoy) seiring normalisasi mobilitas pasca-libur sekolah dan terbatasnya dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Tekanan inflasi terbesar justru datang dari kelompok gejolak harga pangan (Volatile Food) yang mencapai 5,03% (yoy), dipicu oleh penurunan produksi hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, capaian indikator makro saat ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik berada dalam posisi yang kokoh.

"Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya inflasi, kembali ekspansinya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," tegas Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10/2026).

Ia menambahkan bahwa fokus kebijakan pemerintah ke depan adalah memperkuat sinergi untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat arus investasi dan aktivitas industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia di pasar global.

Pemerintah Sebut Daya Beli RI Kuat: Hanya Geser Pola Belanja

Senin, 12 Oktober 2026 15:10 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124309/pemerintah-sebut-daya-beli-ri-kuat-hanya-geser-pola-belanja/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami pelemahan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kondisi daya beli masyarakat justru tetap kuat dan stabil, melainkan hanya mengalami pergeseran pola belanja yang sangat signifikan.

Penegasan tersebut disampaikan Dradjad usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (12/10/2026). Menurutnya, narasi mengenai daya beli lesu yang beredar di masyarakat dan media massa tidak sejalan dengan fakta data yang dicatat oleh BPS.

"Tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah. Salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak," ujar Dradjad di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dradjad meluruskan bahwa perubahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah shifting consumption pattern atau pergeseran pola konsumsi.

Menurutnya, masyarakat kini lebih banyak mengalihkan alokasi belanja mereka ke sektor hiburan, gaya hidup, serta transaksi secara digital.

"Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online," tambahnya.

Ia mencontohkan, bukti nyata tetap kuatnya konsumsi masyarakat dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan di sektor transportasi, pariwisata, hotel, hingga restoran akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian.

Selain itu, lonjakan volume transaksi digital melalui QRIS yang tumbuh drastis hingga di atas 100% turut mengindikasikan tingginya aktivitas belanja publik.

Adanya penurunan penjualan pada produk ritel tertentu, seperti alas kaki atau sepatu, dinilai Dradjad bukan karena masyarakat kehilangan kemampuan beli, melainkan karena prioritas belanja yang telah bergeser ke sektor lain.

"Kami tidak membantah, tapi kami meluruskan narasi yang salah yang muncul di berbagai media. Orang selalu mengumbar-ngumbarkan daya beli melemah, data menunjukkan narasi itu salah. Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli tetap kuat, tetap robust, tetap solid," tegasnya.

Lebih lanjut, kunjungan ke BPS tersebut dilakukan untuk memastikan kombinasi kebijakan ekonomi pemerintah ke depan benar-benar berbasis data (data-driven), khususnya dalam mengeksekusi langkah strategis pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini.

Pemerintah juga berkomitmen membantu koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh aktivitas ekonomi daerah maupun BUMN dapat terekam secara optimal oleh BPS.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia mengungkapkan rapat koordinasi ini membahas data statistik secara lebih detail.

"Kami melakukan rapat koordinasi untuk membahas data statistik secara lebih detail, karena ke depan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang berbasis pada data-data statistik yang akan dihasilkan," kata Amalia.

Amalia menjelaskan, pembahasan rapat tersebut termasuk membahas pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, termasuk diantaranya 99 kabupaten/kota yang ekonominya sudah tumbuh di atas rata-rata nasional.

"Jadi tadi banyak hal yang kami bahas, pertama tentang sisi dari pertumbuhan atau PDB dan PDRB, kedua inflasi, kemudian ketiga tentang neraca perdagangan, dan banyak hal lagi, serta yang keempat mengenai bagaimana daya beli masyarakat di Indonesia ini," terang Amalia.

Pangan Hari Ini: Cabai Masih di Atas Rp100 Ribu, Beras Belum Reda

Senin, 12 Oktober 2026 11:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124277/pangan-hari-ini-cabai-masih-di-atas-rp100-ribu-beras-belum-reda/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah harga komoditas pangan nasional masih mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (12/10/2026) meski mayoritas mengalami penurunan. Harga cabai tercatat masih menyentuh di atas Rp100.000/kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per pukul 10.15 WIB, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar 13,83% atau Rp11.100 menjadi Rp91.350/kg.

Kemudian, harga cabai rawit hijau mengalami kenaikan sebesar 0,41% atau Rp300 menjadi Rp73.300/kg. Begitu juga cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 1,47% atau Rp1.500 menjadi Rp103.200/kg.

Harga beras kualitas bawah I juga naik sebesar 2,68% atau Rp400 menjadi Rp15.300/kg, serta beras kualitas bawah II mengalami kenaikan sebesar 1,02% atau Rp150 menjadi Rp14.850 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas medium II mengalami penurunan sebesar 0,61% atau Rp100 menjadi Rp16.300/kg. Begitu juga beras kualitas super II yang turun sebesar 2,31% atau Rp400 menjadi Rp16.950/kg

Harga beras kualitas medium II turun 0,61% atau Rp100 menjadi Rp17.500/kg. Sementara, beras medium I tidak berubah atau tetap di Rp16.600/kg.

Lalu, harga bawang merah ukuran sedang mengalami kenaikan sebesar 1,21% atau Rp450 menjadi Rp37.650/kg. Sementara bawang putih turun 2,96% menjadi Rp37.750/kg.

Harga daging sapi kualitas 1 mengalami penurunan sebesar 4,98% atau Rp7.600 menjadi Rp144.950/kg. Begitu juga daging sapi kualitas 2 yang turun sebesar 3,59% atau Rp5.150 menjadi Rp138.300/kg.

Seluruh jenis minyak goreng turun. Harga minyak goreng curah turun sebesar 0,49% atau Rp100 menjadi Rp20.300/kg lalu minyak goreng kemasan bermerk I dan II masing-masing turun 0,41% dan 1,49% menjadi Rp24.250 dan Rp23.200/kg.

Harga daging ayam ras segar beserta telurnya juga turun masing-masing sebesar 2,52% dan 4,53% menjadi Rp40.650 dan Rp28.450/kg.

Harga gula pasir lokal mengalami kenaikan sebesar 0,52% atau Rp100 menjadi Rp19.300/kg. Sementara, gula pasir kualitas premium mengalami penurunan sebesar 2,21% atau Rp450 menjadi Rp19.950/kg.

INDEF Desak Pemerintah Segera Beri Insentif Fiskal bagi Kelas Menengah

Senin, 12 Oktober 2026 18:47 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/indef-desak-pemerintah-segera-beri-insentif-fiskal-bagi-kelas-menengah>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dukungan fiskal bagi masyarakat kelas menengah dinilai semakin mendesak untuk menjaga daya beli di tengah tekanan biaya hidup. Pemerintah pun didorong segera merealisasikan insentif yang lebih terarah agar kelompok ini tidak semakin rentan mengalami penurunan kesejahteraan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman menilai, pelemahan daya beli kelas menengah tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga berpotensi menekan penjualan dunia usaha hingga menghambat penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, menurut Rizal, pemerintah perlu segera beralih dari tahap pengkajian menuju intervensi fiskal yang terukur untuk menjaga pendapatan riil masyarakat kelas menengah.

“Dukungan fiskal bagi kelas menengah sudah mendesak karena pelemahan daya belinya langsung menekan konsumsi, penjualan usaha, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Rizal kepada Kontan, Senin (12/10/2026).

Desakan tersebut muncul di tengah kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp 549,9 triliun, dari outlook 2026 sebesar Rp 500 triliun. Anggaran tersebut juga lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran perlinsos pada 2022 yang mencapai Rp 460,6 triliun.

Meski demikian, kenaikan anggaran perlinsos dinilai belum tentu menjawab persoalan daya beli kelas menengah. Pasalnya, efektivitas belanja pemerintah juga ditentukan oleh ketepatan sasaran dan sejauh mana manfaatnya menjangkau kelompok masyarakat yang rentan turun kelas.

“Kenaikan anggaran perlinsos belum otomatis menjawab persoalan ini apabila manfaatnya belum menjangkau kelompok yang rentan turun kelas,” jelasnya.

Adapun anggaran perlinsos 2027 direncanakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 163,31 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 386,35 triliun.

Melalui belanja K/L, pemerintah antara lain mengalokasikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako bagi 17,8 juta KPM, serta bantuan iuran jaminan kesehatan bagi puluhan juta peserta.

Sementara itu, belanja non-K/L antara lain mencakup subsidi jenis BBM tertentu sebanyak 20,0975 juta kiloliter dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 5,1 juta debitur.

Di tengah besarnya alokasi tersebut, Rizal menilai pemerintah perlu memastikan instrumen fiskal yang dirancang juga mampu menopang kelompok menengah, terutama rumah tangga yang pendapatannya tertekan oleh kenaikan biaya hidup.

Dalam jangka pendek, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) secara terarah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih pekerja sehingga tersedia ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan iuran jaminan sosial serta subsidi transportasi publik untuk mengurangi beban pengeluaran rutin masyarakat.

Menurut Rizal, insentif pajak tersebut juga perlu dilengkapi dengan dukungan bagi pekerja informal dan kelompok berpenghasilan di bawah ambang batas pajak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya menysasar pekerja formal yang memiliki kewajiban pajak.

Ia menambahkan, penentuan penerima insentif sebaiknya tidak semata-mata berdasarkan besaran gaji. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga dan biaya hidup yang dihadapi setiap rumah tangga agar bantuan lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa insentif fiskal bagi kelas menengah tidak cukup hanya berupa bantuan jangka pendek. Untuk menjaga daya beli secara berkelanjutan, pemerintah perlu menekan beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.

Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja produktif dengan peningkatan upah riil juga perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah. Dengan begitu, penguatan daya beli tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat menghasilkan pendapatan.

Rizal juga mendorong agar insentif kepada dunia usaha dikaitkan dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Skema tersebut diharapkan dapat memastikan manfaat dukungan fiskal mengalir kepada pekerja, bukan hanya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah dapat mencari ruang fiskal melalui perbaikan ketepatan sasaran subsidi dan efisiensi belanja. Namun, upaya tersebut tetap harus menjaga perlindungan bagi kelompok miskin agar kebijakan untuk kelas menengah tidak mengurangi hak kelompok yang lebih rentan.

Terkait besarnya dampak insentif terhadap daya beli, Rizal mengatakan hasilnya akan bergantung pada nilai bantuan, cakupan penerima, serta porsi tambahan pendapatan yang benar-benar digunakan untuk konsumsi.

Sebagai ilustrasi, penghematan pengeluaran sebesar Rp 300.000 per bulan bagi rumah tangga berpendapatan Rp 6 juta setara dengan tambahan ruang belanja sebesar 5% dari pendapatan bulanan.

Meski demikian, tambahan ruang belanja tersebut belum tentu seluruhnya digunakan untuk konsumsi karena sebagian rumah tangga dapat memilih untuk menambah tabungan atau membayar kewajiban lainnya.

Karena itu, Rizal menilai keberhasilan kebijakan insentif bagi kelas menengah perlu diukur dari pemulihan konsumsi riil dan ketahanan keuangan rumah tangga, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang disalurkan.

Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan, Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga Belum Merata

Senin, 12 Oktober 2026 18:13 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/daya-beli-masyarakat-masih-tertekan-pemulihan-konsumsi-rumah-tangga-belum-merata>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah data indikator menunjukkan konsumsi dan daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan pada kuartal III-2026 di tengah melemahnya persepsi terhadap pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja.

Meski demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh dan berpotensi sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,16% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III-2026. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal II-2026 sebesar 5,06% yoy.

Menurut Josua, pelemahan sejumlah indikator konsumsi sepanjang kuartal III-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan tajam.

"Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen September masih berada pada wilayah optimis sebesar 118,1, meskipun turun tipis dari 118,5 pada Agustus," ujar Josua kepada Kontan, Senin (12/10/2026).

Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) melemah dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September 2026. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya persepsi masyarakat terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

Josua menambahkan, tekanan daya beli juga tercermin dari perubahan alokasi pendapatan rumah tangga. Proporsi pendapatan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sedangkan porsi tabungan turun dari 15,8% menjadi 15,4%.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga harus mengalokasikan pendapatan lebih besar untuk mempertahankan pengeluaran sehari-hari. Sehingga peningkatan porsi konsumsi belum tentu mencerminkan perbaikan kemampuan belanja masyarakat.

Pelemahan daya beli juga membuat pemulihan konsumsi belum merata, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

Meski demikian, Josua menilai koreksi sejumlah indikator pada September perlu dibedakan dari kinerja konsumsi rumah tangga secara keseluruhan sepanjang kuartal III-2026.

Penjualan eceran pada September memang diperkirakan turun 2,3% secara bulanan atau month to month (mtm). Namun, secara tahunan, penjualan eceran masih tumbuh 1,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus sebesar 1,3%.

Secara kuartalan, pertumbuhan penjualan eceran juga diperkirakan membaik menjadi 1,3% yoy pada kuartal III-2026, setelah mengalami kontraksi 3,5% yoy pada kuartal II-2026.

"Artinya, koreksi bulanan September belum menunjukkan pelemahan permintaan yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang triwulan," jelas Josua.

Meski konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh di atas 5%, Josua menilai peningkatan tersebut relatif terbatas dan belum mencerminkan pemulihan daya beli yang kuat.

Pasalnya, pertumbuhan konsumsi masih lebih banyak ditopang oleh kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pembelian barang bernilai besar masih menghadapi tekanan akibat kondisi pendapatan masyarakat dan biaya pembiayaan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Josua memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,14% yoy pada kuartal III-2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29% yoy.

Perlambatan ekonomi tersebut tidak hanya disebabkan oleh konsumsi rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi normalisasi pertumbuhan belanja pemerintah dan investasi.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 6,24% yoy pada kuartal III-2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 15,97% yoy pada kuartal sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan investasi diperkirakan turun dari 6,87% yoy menjadi 5,53% yoy.

Kinerja ekspor juga masih menghadapi tekanan akibat permintaan global. Meski demikian, perlambatan ekonomi diperkirakan tetap terbatas karena realisasi belanja negara hingga September 2026 telah mencapai Rp 2.660,5 triliun, tumbuh 19% yoy.

Selain itu, aktivitas manufaktur menunjukkan perbaikan. Indeks aktivitas manufaktur meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September 2026.

Josua menilai, perbaikan aktivitas produksi dan investasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan serta daya beli rumah tangga. Karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Proyeksi Konsumsi Kuartal IV-2026

Memasuki kuartal IV-2026, Josua melihat konsumsi rumah tangga masih memiliki ruang untuk tumbuh. Namun, risiko perlambatan dinilai semakin besar seiring tekanan harga kebutuhan pokok dan belum kuatnya pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Sejumlah faktor berpotensi menopang konsumsi pada akhir tahun, antara lain peningkatan aktivitas belanja menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), percepatan realisasi belanja pemerintah, serta tambahan permintaan dari program perlindungan sosial dan kegiatan ekonomi produktif.

Optimisme pelaku usaha juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan November yang meningkat menjadi 148,2 dari sebelumnya 143,9. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ekspektasi peningkatan permintaan menjelang akhir tahun.

Namun, Josua mengingatkan bahwa optimisme tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan pendapatan masyarakat.

Inflasi September 2026 yang meningkat menjadi 3,28% yoy berpotensi mempersempit ruang belanja rumah tangga, terutama untuk kebutuhan di luar pangan.

Selain itu, risiko El Niño yang dapat mengganggu produksi pangan, harga minyak yang masih tinggi, serta pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi.

Apabila harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak tumbuh sebanding, rumah tangga cenderung mempertahankan konsumsi makanan dan kebutuhan rutin dengan mengurangi belanja pakaian, elektronik, kendaraan, rekreasi, serta barang tahan lama lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi meskipun aktivitas ekonomi biasanya meningkat menjelang akhir tahun.

Dalam skenario dasar, Josua memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,13% yoy pada kuartal IV-2026, sedikit melambat dibandingkan perkiraan kuartal III-2026 sebesar 5,16% yoy.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,03% yoy pada kuartal IV-2026. Dengan proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,26%.

Menurut Josua, perlambatan ini masih tergolong moderat. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin membutuhkan dukungan investasi produktif, belanja pemerintah yang efektif, dan aktivitas industri karena konsumsi rumah tangga belum mampu mengalami percepatan secara berkelanjutan.

Untuk menjaga daya beli, ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengendalian harga pangan melalui kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, mempercepat penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan belanja pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Percepatan belanja negara juga perlu memperhatikan kualitas pelaksanaan agar menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penyerapan anggaran.

Dalam jangka menengah, penguatan industri padat karya, peningkatan produktivitas, dan perbaikan iklim investasi dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan kelompok menengah dan bawah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi.

"Secara keseluruhan, saya melihat konsumsi rumah tangga Indonesia masih cukup tangguh, tetapi ketahanan tersebut mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja rutin, melemahnya persepsi pendapatan dan lapangan kerja, serta berkurangnya kemampuan menabung," kata Josua.

Ia menegaskan, tantangan utama hingga akhir 2026 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang belanja pemerintah dan investasi berskala besar, tetapi juga diikuti peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan kemampuan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

Mendagri Dorong Pemda Gunakan APBD untuk Dukung Swasembada Pangan

Senin, 12 Oktober 2026 18:23 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/mendagri-dorong-pemda-gunakan-apbd-untuk-dukung-swasembada-pangan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasional penyuluh pertanian.

Langkah ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Pemda dapat menggunakan APBD, anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya untuk mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Balai tersebut menjadi wadah bagi penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas di tingkat kecamatan.

Hal tersebut disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Tito menjelaskan, dukungan Pemda tetap dibutuhkan meskipun penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Penempatan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

Selain mendorong dukungan anggaran daerah, pemerintah pusat juga menyiapkan perbaikan BPP yang mengalami kerusakan.

Kementan akan menangani perbaikan fasilitas tersebut, sementara Pemda diharapkan mendukung operasionalnya agar kegiatan penyuluhan tetap berjalan.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan, berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Mereka menjalankan tugas dengan dukungan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.

Amran memastikan Kementan akan melakukan refocusing anggaran tahun ini untuk mempercepat perbaikan BPP yang rusak.

Kementan menargetkan perbaikan fasilitas dengan kerusakan berat dapat diselesaikan dalam dua bulan, sedangkan seluruh perbaikan diharapkan rampung pada tahun depan.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengapresiasi upaya Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.

Ia menyebut Tito berperan dalam pengendalian inflasi selama menjabat sebagai Mendagri.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," ujar Amran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Konsumsi Kelas Menengah Tertekan, Efektivitas Insentif Pemerintah Jadi Penentu

Senin, 12 Oktober 2026 18:19 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/konsumsi-kelas-menengah-tertekan-efektivitas-insentif-pemerintah-jadi-penentu>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji tambahan insentif bagi masyarakat kelas menengah di tengah tekanan daya beli yang berpotensi membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga akhir 2026.

Meski konsumsi diperkirakan tetap tumbuh di atas 5%, pemulihannya dinilai belum cukup kuat dan merata.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas insentif yang telah berjalan sekaligus mengkaji peluang memperkuat dukungan bagi kelas menengah.

"Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah," ujar Ferry dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai dukungan yang juga dinikmati kelompok kelas menengah.

Di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Program Perumahan.

Pemerintah juga memberikan stimulus berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan, serta diskon transportasi.

Dukungan lainnya mencakup insentif bea masuk 0% untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat, plastik, serta LPG, program magang, dan bantuan pangan.

Selain itu, kelas menengah masih menikmati subsidi LPG 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menurut Wahyu, efektivitas berbagai program tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan terjaganya daya beli masyarakat.

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah perlu memastikan insentif benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani sebelumnya mendorong dukungan fiskal maupun nonfiskal yang lebih tepat sasaran, terutama melalui perpajakan, transportasi, dan perumahan.

Shinta menilai, kendala administrasi dan pelaksanaan membuat sejumlah insentif belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, persoalannya bukan hanya menambah insentif baru, melainkan juga memperbaiki implementasi program yang sudah tersedia.

Dorongan tersebut sejalan dengan kondisi konsumsi rumah tangga yang masih menghadapi tekanan.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,16% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III-2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal II-2026 sebesar 5,06% yoy.

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan kemampuan belanja masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September 2026, terutama akibat melemahnya persepsi terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

Pada saat yang sama, porsi pendapatan rumah tangga untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sedangkan porsi tabungan turun dari 15,8% menjadi 15,4%.

Kondisi ini mengindikasikan sebagian rumah tangga harus menggunakan lebih banyak pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ruang untuk menabung semakin terbatas.

Josua memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,13% yoy pada kuartal IV-2026, sedikit melambat dibandingkan proyeksi kuartal III-2026.

Tekanan harga kebutuhan pokok, belum kuatnya pertumbuhan pendapatan, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi berpotensi membatasi belanja masyarakat.

Aktivitas konsumsi menjelang Natal dan Tahun Baru, percepatan belanja pemerintah, serta program perlindungan sosial diperkirakan menopang permintaan pada akhir tahun.

Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat membuat rumah tangga memprioritaskan pangan dan kebutuhan rutin, sembari menunda pembelian barang bernilai besar seperti elektronik dan kendaraan.

“Ketahanan tersebut mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja rutin, melemahnya persepsi pendapatan dan lapangan kerja, serta berkurangnya kemampuan menabung,” kata Josua.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan stimulus tidak hanya tersedia, tetapi juga efektif menjaga daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perbaikan pelaksanaan insentif, pengendalian harga pangan, serta penciptaan lapangan kerja menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat diikuti pemulihan konsumsi yang lebih merata.

Tekan Inflasi, Pemprov Jateng Perkuat Intervensi dari Hulu hingga Hilir

Senin, 12 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/tekan-inflasi-pemprov-jateng-perkuat-intervensi-dari-hulu-hingga-hilir/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia (BI) setempat, menggelar aksi peduli melalui gerakan pangan murah dan berbagai pemberian bantuan. Hal itu sebagai upaya intervensi menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus mengendalikan inflasi.

Aksi peduli tersebut diselenggarakan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026). Sasarannya adalah pedagang warung, katering, petani, dan masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng berbagai pihak mulai dari BI, Bulog, petani, dan lainnya, untuk sama-sama menjaga stabilitas harga, menjaga inflasi, serta menjaga keterjangkauan bahan pokok. Intervensi tersebut dilakukan mengingat beberapa bahan pokok penting, seperti cabai merah dan beras, yang terpantau mengalami kenaikan harga. Harga cabai merah saat ini sudah mencapai Rp80ribu-Rp90 ribu.

“Kerja kolaboratif ini yang dijadikan sebagai role model, sehingga Jawa Tengah tetap menjadi provinsi yang inflasinya terkendali. Tidak hanya di Semarang tetapi juga daerah lain agar inflasi kita terjaga,” kata Luthfi, di sela membuka dan meninjau pelaksanaan aksi peduli tersebut.

Ditambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya untuk pengendalian inflasi, tetapi juga mengantisipasi dampak el nino atau kekeringan. Maka, juga ada bantuan beras, serta bantuan sarana perpipaan dan rumah burung hantu bagi petani.

Bantuan itu diberikan untuk menjaga produktivitas pangan di wilayah Jawa Tengah. Di mana periode Januari-Oktober 2026 tercatat produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,9 juta ton beras. Kemudian produksi cabai sekitar 404,91 ribu ton, dan bawang merah 408,76 ribu ton.

“Pola tanam petani juga disesuaikan dengan program dari Distannak. Karena El Nino inilah maka kita harus mempunyai ide kreatif, dalam rangka pengendalian bahan pokok penting di wilayah kita dari hulu-hilir,” ungkap Luthfi.

Seorang pedagang nasi goreng, Joko, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan aksi peduli dan gerakan pangan murah tersebut, karena harga produk terjangkau. Diungkapkan, adanya kenaikan harga beberapa bahan pokok sangat berpengaruh dengan omzet jualan nasi goreng. Misalnya, dua minggu terakhir kesulitan karena harga cabai cukup tinggi

“Ini baru beli cabai 3 kg. Harga cabai di pasaran terakhir beli Rp65 ribu, di sini dapat Rp45 ribu. Biasanya untuk buat sambal saya butuh 5 kg untuk satu minggu. Sangat membantu sekali,” ujarnya.

Sementara itu seorang pengusaha katering, Dari, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah. Misalnya, harga beras yang biasanya di luar sudah sampai Rp14 ribu-Rp15 ribu, bisa didapatkan hanya dengan harga Rp11 ribu. Harga cabai juga diturunkan jauh, sehingga sangat membantu terhadap biaya produksi kateringnya.

“Kenaikan harga bahan pokok sangat berpengaruh untuk usaha katering kami. Kalau kita naikkan harga pelanggan tidak mungkin, karena pelanggan bisa lari. Jadi program ini sangat membantu. Yang berpengaruh bagi kami itu harga ayam dan beras,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Gubernur Cup Jateng Hard Enduro dongkrak ekonomi

Senin, 12 Oktober 2026 08:31 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/648070/gubernur-cup-jateng-hard-enduro-dongkrak-ekonomi>

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa pergelaran Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro #1 turut menggerakkan roda ekonomi warga dan daerah setempat.

"(Ajang, red) Ini tidak hanya menjadi tempat uji nyali bagi para rider," katanya, saat membuka Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro #1, di Kabupaten Kendal, Minggu.

Ajang yang berlangsung di Argon Enduro Park, Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal itu tidak hanya menjadi tempat uji nyali bagi para rider, tetapi ikut mendongkrak ekonomi daerah.

Sebab, sektor pariwisata, penginapan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di Kabupaten Kendal ikut merasakan berkah dari ramainya kunjungan wisatawan dan penonton.

Menurut dia, ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk berkumpul dan berinteraksi langsung dengan warga.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilaksanakan santunan kepada anak yatim dan penanaman pohon yang menjadi bagian dari kepedulian sosial dan lingkungan yang menyertai penyelenggaraan kompetisi otomotif tersebut.

Ketua Pelaksana Arif Yulianto mengatakan, kegiatan tersebut dirancang tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mendukung pengembangan "sport tourism" atau pariwisata berbasis olahraga di Jateng.

Menurut dia, karakter alam Kendal dengan lintasan yang menantang memiliki daya tarik bagi komunitas otomotif.

Kehadiran peserta beserta keluarga dan penonton juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata, penginapan, kuliner, hingga perdagangan masyarakat.

"Alhamdulillah, homestay-homestay di sini pada laris semuanya," katanya, seraya menyebut sejumlah pedagang makanan di sekitar lokasi juga ikut merasakan ramainya kegiatan.

Panitia secara khusus melibatkan pelaku UMKM lokal dengan menyediakan ruang berjualan selama kompetisi berlangsung.

"Kami ingin memastikan bahwa keberadaan event ini juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal," katanya.

Ia berharap kompetisi tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda olahraga berkelanjutan.

Selain menjadi wadah pembinaan atlet enduro, kegiatan itu diharapkan semakin memperkenalkan potensi wisata Jateng kepada masyarakat luas.

Tercatat sebanyak 135 peserta sementara mengikuti kompetisi Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro #1.

Lantik Wakil Bupati Klaten, Gubernur Tekankan Penuntasan Kemiskinan dan Perkuat Sinergi Kepemimpinan

Senin, 12 Oktober 2026 10:30 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11783

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, memberikan perhatian khusus terhadap upaya penuntasan kemiskinan, serta memperkuat sinergi kepemimpinan bersama Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat mengambil sumpah jabatan dan melantik Wakil Bupati Klaten untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 12 Oktober 2026.

Gubernur menyampaikan, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, wakil bupati diharapkan berperan aktif dalam mengendalikan program penuntasan kemiskinan melalui koordinasi dengan bupati dan seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten sebesar 11% atau lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan Jateng (9,39%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Klaten sebesar 4,62%, persentasenya masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 5,37%.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya soliditas antara bupati dan wakil bupati dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya diminta bekerja dalam satu arah, saling mendukung, serta mengedepankan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan daerah.

Terlebih, Kabupaten Klaten memiliki posisi strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, potensi wilayah tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kompak dan mampu mengoptimalkan berbagai peluang pembangunan yang ada.

“Ya, pokoknya harus satu paket dalam rangka mengembangkan (daerah). Saya yakin beliau berdua akan setuju,” katanya.

Gubernur menegaskan, kolaborasi antara bupati dan wakil bupati menjadi kunci agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, collaborative government antara wakil dan bupati menjadi kunci yang utama,” tegasnya.

Harapannya, pelantikan Wakil Bupati Klaten dapat memperkuat jalannya pemerintahan di Kabupaten Klaten, sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mahanni dilantik menggantikan Wakil Bupati Klaten sebelumnya, Benny Indra Ardhiyanto, yang merupakan suaminya sendiri. Benny meninggal dunia pada 7 Februari 2026 saat masih menjabat. Kemudian, Mahanni terpilih melalui pemungutan suara dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada 26 Agustus 2026, dengan memperoleh 49 suara anggota dewan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo; Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko; Bupati Klaten Periode 2005–2015, Sunarna; Bupati Klaten Periode 2017–

2025, Sri Mulyani; serta Pj Sekda Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto. Hadir pula jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten.

Inflasi Grosir Jepang Capai 6,8% September, Peluang Kenaikan Suku Bunga BOJ Terbuka

Selasa, 13 Oktober 2026 08:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-grosir-jepang-capai-68-september-peluang-kenaikan-suku-bunga-boj-terbuka>

KONTAN.CO.ID - Inflasi harga grosir Jepang mencapai 6,8% secara tahunan pada September 2026.

Meski melambat dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikan harga di tingkat produsen masih menunjukkan tekanan inflasi yang tinggi dan menjaga ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) dalam waktu dekat.

Data yang dirilis BOJ pada Selasa (13/10/2026) menunjukkan, kenaikan indeks harga barang korporasi atau corporate goods price index (CGPI) tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 7,6%. Angka September juga berada di bawah median perkiraan pasar sebesar 7,6%.

Indeks CGPI mengukur harga barang dan jasa yang diperdagangkan antarperusahaan. Pergerakan indeks ini menjadi salah satu indikator tekanan biaya yang berpotensi diteruskan ke konsumen.

Sementara itu, indeks harga impor berbasis yen melonjak 24,5% pada September dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut menunjukkan pelemahan yen masih mendorong biaya impor bahan baku bagi perusahaan Jepang.

Ekonom senior Sompo Institute Plus Masato Koike memperkirakan, inflasi grosir berpotensi kembali meningkat di tengah ketidakpastian konflik di Timur Tengah yang menjaga harga minyak mentah tetap tinggi.

“Inflasi grosir kemungkinan kembali meningkat mengingat ketidakpastian yang tinggi akibat konflik Timur Tengah, yang membuat harga minyak mentah tetap tinggi,” kata Koike.

Namun, ia menilai belum ada tanda-tanda tekanan inflasi meningkat tajam untuk saat ini. Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan BOJ mempertahankan suku bunga pada Oktober dan menunggu hingga Desember untuk kembali menaikkannya.

Lonjakan inflasi grosir sebelumnya menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan BOJ dalam keputusan menaikkan suku bunga pada Juni dan September.

Bank sentral Jepang menilai tekanan harga yang meningkat menjadi salah satu alasan untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter.

Data terbaru juga menunjukkan kenaikan harga terjadi pada berbagai kelompok barang. Harga produk pertanian turun 13,3% secara tahunan pada September, terutama akibat anjloknya harga beras. Sebaliknya, harga makanan olahan, mesin listrik, serta peralatan telekomunikasi mencatat kenaikan.

Harga barang kimia meningkat 13,3%, produk plastik naik 12,8%, sedangkan barang logam nonbesi melonjak 40,2%.

Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya biaya yang dihadapi perusahaan akibat pelemahan yen, perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta kuatnya permintaan terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan, kecepatan dan waktu kenaikan suku bunga berikutnya akan bergantung pada sejauh mana tekanan kenaikan harga di tingkat grosir merambat ke inflasi konsumen serta dampaknya terhadap konsumsi masyarakat.

Data terbaru menunjukkan inflasi inti konsumen di Tokyo, yang kerap menjadi indikator awal tren harga nasional, meningkat pada September dengan laju tercepat dalam 10 bulan.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa BOJ berpotensi memberi sinyal pada pertemuan bulan ini bahwa inflasi yang mendasari tren harga telah mendekati target 2%.

Sinyal tersebut dapat memperkuat indikasi bahwa bank sentral siap kembali menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

BOJ menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 31 tahun pada bulan lalu. Bank sentral juga mengisyaratkan memasuki fase kebijakan yang berfokus pada pencegahan inflasi mendasar melampaui targetnya, sehingga membuka peluang pengetatan moneter lebih lanjut.

Pada pertemuan 29-30 Oktober 2026, BOJ akan merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi terbaru untuk kuartalannya.

Proyeksi tersebut akan dicermati pelaku pasar untuk memperoleh petunjuk mengenai waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

Banyak analis memperkirakan BOJ kembali menaikkan suku bunga sebelum akhir 2026.

IMF Ramal Ekonomi Global Tumbuh 3,1% pada 2026, Investasi AI Jadi Penopang

Selasa, 13 Oktober 2026 10:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-ramal-ekonomi-global-tumbuh-31-pada-2026-investasi-ai-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perekonomian global diperkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan di atas 3% pada 2026 meskipun dibayangi lonjakan harga energi akibat perang di Timur Tengah. Investasi besar-besaran pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi dunia.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil global tumbuh 3,1% pada 2026. Proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan pada Juli lalu sebesar 3%.

Dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis pada Selasa (13/10/2026), IMF menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi global mulai menghadapi tekanan yang semakin besar. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang mendorong harga minyak bertahan di atas US\$ 100 per barel menjadi salah satu risiko utama terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Proyeksi pertumbuhan global tersebut kurang lebih sejalan dengan skenario paling optimistis yang disampaikan IMF pada April lalu, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 yang mencapai 3,5%.

Untuk 2027, IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4%. Angka tersebut tidak berubah dari perkiraan pada Juli lalu dan meningkat 0,2 poin persentase dibandingkan proyeksi April.

Kepala Ekonom IMF yang baru, Silvana Tenreyro, mengatakan perekonomian dunia masih menunjukkan ketahanan, tetapi berbagai risiko mulai mengancam prospek pertumbuhan.

“Perekonomian global telah menunjukkan ketahanan, tetapi ketahanan tersebut kini berada di bawah tekanan, dengan risiko terhadap pertumbuhan yang cenderung mengarah ke sisi negatif,” ujar Tenreyro kepada wartawan.

Ia menambahkan, konflik yang berlangsung lebih lama di Timur Tengah dapat meningkatkan tekanan inflasi sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menambah tekanan terhadap inflasi dan memperlambat pertumbuhan. Memburuknya prospek fiskal, penilaian ulang terhadap profitabilitas AI, serta peristiwa cuaca ekstrem juga dapat semakin memperburuk prospek ekonomi,” katanya.

Investasi AI Topang Pertumbuhan, tetapi Manfaatnya Tidak Merata

IMF menjelaskan, perbaikan tipis proyeksi pertumbuhan global terutama didorong oleh berlanjutnya investasi besar pada infrastruktur AI. Tren ini mendorong peningkatan proyeksi pertumbuhan sejumlah negara maju yang mengembangkan platform AI serta negara-negara yang memasok perangkat keras untuk teknologi tersebut.

Beberapa negara yang memperoleh manfaat dari rantai pasok perangkat keras AI antara lain Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, dan Thailand. Thailand menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada pekan ini.

Namun, manfaat dari perkembangan AI belum dirasakan secara merata oleh seluruh negara.

IMF mencatat, hanya 32 negara yang kini menyumbang 95% pertumbuhan ekonomi global. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan April lalu, ketika 54 negara tercatat menyumbang porsi yang sama terhadap pertumbuhan dunia.

Revisi penurunan proyeksi pertumbuhan juga semakin meluas. Sejak proyeksi April diterbitkan, IMF telah menurunkan perkiraan pertumbuhan bagi 47% negara dalam cakupan analisisnya, termasuk sejumlah negara pengimpor energi yang tidak terhubung langsung dengan rantai nilai AI.

Wakil Direktur Riset IMF Petya Koeva Brooks mengatakan, pemerintah dan perusahaan telah bergerak cepat untuk meredam dampak lonjakan harga minyak.

Langkah yang dilakukan mencakup penggunaan cadangan energi, pengalihan pasokan dari pemasok lain, pemanfaatan sumber energi alternatif, serta pengurangan konsumsi minyak.

Menurut Brooks, pertumbuhan ekonomi global berpotensi hanya mencapai 2,5% pada 2026 jika langkah-langkah mitigasi tersebut tidak dilakukan. Namun, dampak positif dari berbagai upaya itu mulai berkurang seiring berlarutnya perang.

Negara Teluk Hadapi Tekanan Ekonomi Terbesar

Negara-negara Teluk yang terdampak langsung perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran menghadapi penurunan prospek ekonomi paling tajam.

IMF memperkirakan ekonomi Arab Saudi akan mengalami kontraksi 3,3% pada 2026. Proyeksi tersebut berbalik dari perkiraan pertumbuhan 1,7% yang disampaikan pada Juli lalu.

Sejumlah negara lain di kawasan tersebut juga diperkirakan mengalami resesi yang dalam. Ekonomi Iran diproyeksikan menyusut 7,6%, Irak 16%, Kuwait 16,7%, Qatar 15,6%, dan Uni Emirat Arab 3,9% pada 2026.

Tekanan tersebut mencerminkan besarnya dampak konflik terhadap negara-negara yang perekonomiannya berkaitan erat dengan sektor energi dan perdagangan di kawasan Timur Tengah.

Proyeksi Ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Membaik

Di antara negara-negara dengan perekonomian terbesar, IMF memperkirakan ekonomi AS tumbuh 2,3% pada 2026 dan 2027.

Proyeksi pertumbuhan AS pada 2026 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya, sedangkan proyeksi untuk 2027 meningkat 0,1 poin persentase dibandingkan Juli.

Perekonomian AS diperkirakan tetap ditopang oleh konsumsi swasta yang kuat, pemotongan pajak, dan investasi AI. Meski demikian, dampak positif investasi AI terhadap pertumbuhan akan sebagian terimbangi oleh tingginya kandungan impor dalam investasi tersebut.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi zona euro pada 2026 dinaikkan menjadi 1,1% dari sebelumnya 0,9%.

Peningkatan tersebut didorong oleh investasi AI yang lebih kuat, keterlibatan dalam rantai nilai AI melalui sektor seperti industri kimia Jerman, serta kenaikan belanja pertahanan di negara-negara Uni Eropa.

IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2026 sebesar 0,3 poin persentase dari perkiraan Juli menjadi 1,3%. Peningkatan investasi AI menjadi salah satu faktor pendorong revisi tersebut.

Untuk China, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5% pada 2026 dan 4% pada 2027. Kedua proyeksi itu turun 0,1 poin persentase dibandingkan perkiraan Juli.

Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan semakin menekan permintaan domestik China yang masih lemah, meskipun kinerja eksportnya tetap kuat.

Sebaliknya, India diperkirakan mempertahankan posisinya sebagai negara dengan perekonomian utama yang tumbuh paling cepat di dunia.

IMF memproyeksikan ekonomi India tumbuh 7% pada 2026 dan 2027. Proyeksi tersebut masing-masing naik 0,6 poin persentase untuk 2026 dan 0,3 poin persentase untuk 2027 dibandingkan perkiraan Juli.

Permintaan domestik yang kuat, aktivitas sektor jasa, dan investasi AI menjadi faktor yang menopang prospek pertumbuhan India.

Inflasi Global Diperkirakan Masih Tinggi

Di tengah peningkatan investasi teknologi dan tekanan harga energi, IMF memperkirakan inflasi konsumen global secara keseluruhan mencapai 4,7% pada 2026.

Untuk 2027, inflasi global diproyeksikan melambat menjadi 4,1%.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih dibayangi ketidakpastian mengenai perkembangan konflik Timur Tengah dan pergerakan harga minyak dunia.

Dalam skenario dasar IMF, Selat Hormuz diasumsikan kembali dibuka pada Maret 2027. Kondisi pelayaran secara luas diperkirakan kembali seperti sebelum perang pada Oktober 2027.

IMF juga menggunakan asumsi harga minyak rata-rata sebesar US\$ 96 per barel pada 2026 dan US\$ 87 per barel pada 2027.

Namun, jika konflik memburuk dan mendorong harga minyak mencapai US\$ 130 per barel hingga kuartal I-2027, dampaknya terhadap perekonomian global dapat menjadi jauh lebih besar.

Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berkurang 0,2 poin persentase pada 2026 dan 0,5 poin persentase pada 2027.

Inflasi global pada 2027 juga berpotensi meningkat 1,1 poin persentase menjadi 5,2%.

Risiko Investasi AI dan Utang Pemerintah Membayangi Ekonomi Global

Selain harga energi, perkembangan investasi AI menjadi sumber ketidakpastian besar bagi prospek ekonomi global. IMF menilai teknologi tersebut memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko apabila hasil investasi tidak sesuai harapan.

Dalam skenario adopsi AI yang lebih cepat disertai percepatan investasi, PDB global berpotensi meningkat tambahan 0,6% hingga 2029. Sebagian besar manfaat diperkirakan dinikmati oleh AS dan China.

Sebaliknya, apabila peningkatan produktivitas yang diharapkan dari AI tidak terwujud dan memicu penurunan tajam investasi, PDB AS dapat turun 0,8% secara langsung.

Dampaknya juga dapat merambat ke negara-negara pengekspor teknologi di Asia. IMF memperkirakan penurunan PDB secara langsung akibat efek tersebut dapat mencapai 0,4% pada 2028.

Penurunan investasi juga berpotensi memicu koreksi tajam harga aset dan memperketat kondisi keuangan. Kondisi tersebut dapat menekan konsumsi, terutama di AS.

Kenaikan imbal hasil obligasi global turut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, IMF memperkirakan kombinasi berbagai dampak tersebut dapat mengurangi output ekonomi global sebesar 1,1% pada 2028, termasuk penurunan output AS sebesar 1,8%.

IMF juga memperingatkan bahwa tingginya utang publik, terutama di negara-negara maju, meningkatkan risiko kenaikan tajam biaya pinjaman yang dapat membebani prospek pertumbuhan.

Karena itu, IMF mendesak pemerintah untuk tidak lagi menunda langkah-langkah memperkuat cadangan fiskal dan menyusun rencana jangka menengah yang kredibel guna mengembalikan utang ke tingkat yang berkelanjutan.

Peringatan tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, ketika para pemimpin ekonomi dan keuangan dunia membahas langkah untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan perekonomian global.

IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Mulai Capai Batasnya

Selasa, 13 Oktober 2026 14:20 WIB

Jorgelina do Rosario

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124428/imf-ingatkan-ketahanan-ekonomi-global-mulai-capai-batasnya/2>

Bloomberg, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat tahun depan, didorong oleh investasi di bidang kecerdasan buatan (AI). Namun, IMF memperingatkan bahwa ketahanan ekonomi dunia mulai mendekati batasnya di tengah berlanjutnya tekanan pasokan energi dan meningkatnya risiko keuangan.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,4% pada 2027, menurut laporan World Economic Outlook yang dirilis IMF pada Selasa (13/10). Proyeksi tersebut tidak berubah dari pembaruan terakhir pada Juli, sementara perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini sedikit dinaikkan menjadi 3,1%.

Dunia usaha “terus menyesuaikan diri dengan berbagai guncangan yang berulang”, sementara pasar keuangan—yang didorong oleh optimisme berlebihan di industri teknologi—menyikapi tantangan yang ada dengan pandangan yang “secara umum cukup positif”, kata IMF.

Namun, IMF juga menguraikan sejumlah faktor yang dapat mengubah kondisi tersebut.

Persediaan energi global terus terkuras untuk menyerap dampak kekurangan pasokan sejak AS menyerang Iran. Cadangan penyangga tersebut berisiko semakin menipis jika konflik terus berlanjut. Di sisi lain, lonjakan industri AI telah mendorong permintaan perangkat keras dan berpotensi meningkatkan produktivitas secara luas, tetapi juga membawa risiko keuangan. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi baru-baru ini membuat pengurangan defisit anggaran dan utang publik semakin mendesak.

“Perekonomian global telah menunjukkan ketahanan, tetapi ketahanan itu mulai mencapai batasnya,” kata Kepala Ekonom IMF Silvana Tenreyro. Ia menambahkan bahwa risiko terhadap pertumbuhan lebih condong ke arah penurunan.

“Kita perlu memulihkan ruang fiskal,” kata Tenreyro dalam konferensi pers di Bangkok pada Selasa. “Itulah pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kita tetap tangguh.”

Prospek Pertumbuhan yang Lesu

Meski pertumbuhan diperkirakan kembali menguat tahun depan, laju pertumbuhan ekonomi global masih akan berada di bawah rata-rata 3,5% selama dua tahun sebelumnya. IMF juga menggambarkan prospek ekonomi jangka menengah sebagai “lesu”.

Salah satu penyebabnya adalah manfaat AI yang tidak merata. Laporan tersebut menyoroti kesenjangan yang semakin lebar seiring perkembangan teknologi ini. Menurut IMF, hampir dua pertiga tambahan perdagangan perangkat keras komputasi berasal dari hanya dua negara, yakni Taiwan dan Korea Selatan. Sementara itu, AS dan China menyumbang lebih dari 75% impor bersih terkait AI pada tahun lalu.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global semakin bergantung pada basis yang lebih sempit. IMF menyebutkan bahwa saat ini hanya 32 perekonomian yang menyumbang 95% dari total ekspansi ekonomi global, dibandingkan dengan 54 negara enam bulan sebelumnya.

“Apakah lonjakan permintaan terkait AI akan berubah menjadi guncangan positif dari sisi penawaran dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas yang lebih cepat, masih harus dilihat,” kata

IMF. Sementara itu, lonjakan tersebut “berkontribusi terhadap tekanan inflasi dan kerentanan keuangan”.

Meski demikian, IMF memperkirakan inflasi akan melambat tahun depan. Lembaga tersebut memproyeksikan inflasi umum global turun menjadi 4,1%, kembali ke level 2025, setelah meningkat tajam menjadi 4,7% tahun ini.

Terkait tantangan anggaran yang disoroti di tengah gejolak pasar obligasi, IMF mengatakan diperlukan “rencana penyesuaian yang kredibel” untuk memulihkan penyangga fiskal.

“Tugas ke depan adalah beralih dari sekadar mengatasi masalah menuju membangun kembali ketahanan,” kata Tenreiro.

Prancis Mengalami Penurunan Proyeksi

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi global tahun depan bergantung pada percepatan pertumbuhan di negara-negara berkembang maupun negara maju. Untuk kelompok negara maju, IMF memperkirakan pertumbuhan melambat menjadi 1,8% pada 2027, dari 2,1% tahun ini.

IMF memproyeksikan ekonomi AS, yang merupakan perekonomian terbesar di dunia, tumbuh 2,3% pada 2027. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2,2% pada Juli. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan China pada 2027 tetap sebesar 4%.

Di antara negara-negara ekonomi utama, Prancis mencatat penurunan proyeksi yang menonjol. Perekonomiannya diperkirakan hanya tumbuh 0,4% tahun ini dan 0,7% pada 2027. Kedua angka tersebut masing-masing 0,2 poin persentase lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF pada Juli.

Jerman diperkirakan tumbuh 1,1% pada 2027. Sementara itu, pertumbuhan Inggris diproyeksikan sedikit melambat menjadi 1,2% karena harga energi dan suku bunga tinggi menekan konsumsi.

Tenreiro mengatakan Asia menunjukkan ketahanan yang “luar biasa”, dengan lonjakan industri AI mengimbangi tekanan dari pasar komoditas. “AI telah menjadi pendorong utama kinerja yang kuat ini sekaligus menjadi faktor besar di balik revisi naik proyeksi pertumbuhan,” katanya.

Rupiah dan Won Korea Melemah Selasa (13/10), Dolar Taiwan Catat Penurunan Terbesar

Selasa, 13 Oktober 2026 09:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-dan-won-korea-melemah-selasa-1310-dolar-taiwan-catat-penurunan-terbesar>

KONTAN.CO.ID - Sejumlah mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (13/10/2026).

Dolar Taiwan dan won Korea Selatan mencatatkan pelemahan terbesar di antara mata uang regional yang dipantau, sementara rupiah juga bergerak di zona merah.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.08 GMT, dolar Taiwan melemah 0,51% menjadi 32,058 per dolar AS, dari posisi sebelumnya 31,895.

Won Korea Selatan turun 0,25% ke level 1.337,87 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya 1.334,58.

Rupiah turut melemah 0,22% ke level Rp 17.935 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp 17.895 per dolar AS.

Pelemahan juga dialami peso Filipina yang turun 0,10% menjadi 62,768 per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,05% ke level 4,083 per dolar AS, serta baht Thailand yang turun tipis 0,03% menjadi 33,60 per dolar AS.

Sementara itu, dolar Singapura menguat tipis 0,01% menjadi 1,281 per dolar AS. Yen Jepang juga naik 0,18% ke level 158,32 per dolar AS.

Yuan China melemah tipis 0,01% menjadi 6,694 per dolar AS, sedangkan rupee India tidak berubah di level 95,77 per dolar AS.

Secara kumulatif sepanjang 2026, rupiah telah melemah 7,05% dibandingkan posisi akhir 2025.

Pelemahan rupiah tersebut lebih besar dibandingkan dolar Taiwan yang terkoreksi 1,93% dan ringgit Malaysia yang turun 0,66%.

Baht Thailand juga mencatatkan pelemahan 6,40% sepanjang tahun berjalan, disusul peso Filipina yang turun 6,32% dan rupee India yang melemah 6,16%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 7,67% sepanjang 2026, menjadi mata uang dengan penguatan terbesar dalam daftar tersebut.

Yuan China juga menguat 4,38%, sementara dolar Singapura naik 0,39%. Yen Jepang tercatat melemah 1,05% dibandingkan akhir tahun lalu.

Skema Pembayaran Utang Pajak Baru Berlaku 2 Oktober, Prioritas Lunasi Pokok Utang

Selasa, 13 Oktober 2026 05:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/skema-pembayaran-utang-pajak-baru-berlaku-2-oktober-prioritas-lunasi-pokok-utang>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya dengan mengubah skema penyelesaian kewajiban utang pajak.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026, pembayaran utang pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang sebelum sanksi administratif.

PMK 71/2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, sebelumnya pembayaran yang dilakukan wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.

Dengan mekanisme baru ini, pembayaran akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak.

Perubahan ini diharapkan memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya sekaligus memberikan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bimo dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Selain mengubah mekanisme pembayaran, PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Meski memberikan kemudahan dalam penyelesaian kewajiban perpajakan, Bimo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pemutihan pajak, dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak.

Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang pajak, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetap diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib, sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban dengan patuh.

Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Dari sisi fiskal, pemerintah berharap perubahan mekanisme ini dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.

Bimo menambahkan, penyempurnaan ketentuan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan arus kas wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

"Kami berharap penyempurnaan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang semakin adil dan efektif," ujar Bimo.

Ia juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus menyampaikan informasi dan memberikan pendampingan kepada wajib pajak agar ketentuan baru tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai PMK 71/2026, termasuk tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan dapat diakses melalui laman resmi DJP, yakni melalui [laman pajak.go.id](https://pajak.go.id)

Kelas Menengah Makin Susut, Pemerintah Didesak Perluas Insentif Pajak

Selasa, 13 Oktober 2026 09:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kelas-menengah-makin-susut-pemerintah-didesak-perluas-insentif-pajak>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah didesak memperluas insentif fiskal bagi kelas menengah untuk menjaga daya beli dan menopang konsumsi rumah tangga.

Pasalnya, jumlah kelas menengah terus menyusut, sementara bantuan sosial yang digulirkan pemerintah belum secara langsung menyasar kelompok tersebut.

Pada 2025, jumlah kelas menengah tercatat sebanyak 46,7 juta orang, turun 1,2 juta orang dibandingkan dengan 2024 yang mencapai 47,9 juta orang. Porsi kelas menengah terhadap total penduduk juga menyusut dari 17,1% menjadi 16,6%.

Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2027 mencapai Rp 549,9 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Namun, besarnya anggaran tersebut belum diikuti dukungan fiskal yang secara khusus menyasar kelas menengah.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dukungan yang selama ini diterima kelas menengah lebih banyak berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Itu pun dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Pemerintah memang menyalurkan stimulus pada kuartal IV-2026 berupa bantuan beras bagi masyarakat desil satu hingga empat serta bantuan subsidi upah sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja.

Namun, stimulus tersebut dinilai belum cukup untuk menjaga daya beli dalam jangka panjang. "Bantuan tersebut belum cukup untuk memulihkan daya beli secara berkelanjutan," kata Yusuf.

Karena itu, Yusuf mendorong pemerintah mengalihkan fokus kebijakan fiskal ke insentif yang berkelanjutan dan dapat diprediksi, bukan sekadar bantuan tunai jangka pendek.

Salah satu opsi yang dapat ditempuh ialah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat meningkat.

Selain itu, pemerintah dapat memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan.

Rencana pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP kepada sekitar 7,5 juta pekerja pada 2027 dinilai relevan untuk membantu kelas menengah bawah. Pelaksanaannya pun relatif mudah karena dapat disalurkan melalui pemberi kerja.

Pemerintah juga perlu menekan beban pengeluaran utama rumah tangga kelas menengah, terutama untuk perumahan, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Upaya yang dapat dipertimbangkan antara lain memperluas akses pembiayaan rumah bagi kelompok menengah dan memperpanjang insentif pajak di sektor properti.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai, penguatan daya beli kelas menengah tidak cukup mengandalkan bantuan jangka pendek.

Pemerintah perlu memastikan biaya kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi, tidak semakin membebani pendapatan masyarakat.

Di samping insentif fiskal, penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan upah riil juga perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah.

Dengan begitu, daya beli dapat diperkuat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, bukan semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah.

Rizal juga mendorong agar insentif bagi dunia usaha dikaitkan dengan komitmen menambah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

Dengan skema tersebut, dukungan fiskal diharapkan tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pekerja melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Temui Bos Bank Dunia, Suahasil Tegaskan Komitmen Defisit APBN 3%

Selasa, 13 Oktober 2026 20:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124483/temui-bos-bank-dunia-suahasil-tegaskan-komitmen-defisit-apbn-3/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal sebagai fondasi pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat kemitraan strategis dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group, Ajay Banga, di Bangkok, Thailand (13/10/2026).

"Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3% serta rasio utang 60% terhadap produk domestik bruto (PDB)," tegasnya.

Sejumlah program prioritas yang dimaksud meliputi ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan, penguatan usaha kecil dan menengah, serta hilirisasi sumber daya alam.

Suahasil juga menekankan pentingnya pendalaman sektor keuangan dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah yang lebih baik.

Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan pengembangan yang terpadu agar pendalaman dan inklusi keuangan berjalan seiring dengan stabilitas ekonomi.

Pada kesempatan ini, World Bank Group disebut menyambut baik agenda tersebut termasuk dukungan teknis bagi pendalaman pasar modal domestik, di samping turut menyatakannya dukungannya terhadap agenda hilirisasi sumber daya alam Indonesia agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri.

ASEAN Sebagai Bright Spot Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara juga meyakini kawasan ASEAN menjadi titik terang (bright spot) bagi perekonomian dunia di tengah berbagai tantangan global.

Menurut dia, kondisi tersebut ditopang oleh kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel.

"Sebagai kawasan, kami tahu bahwa kawasan kami dalam kondisi baik. Saya yakin ini karena kami memiliki kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel," kata Suahasil dalam pertemuannya.

Sementara dalam kasus Indonesia, ia meyakini bahwa RI selalu menempatkan anggaran sebagai bagian untuk "menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan terus kredibel."

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan Indonesia memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang didukung agenda hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta. Kedua hal tersebut menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, struktur penduduk yang relatif muda dan tingkat pendapatan yang terus tumbuh dinilai menjadi modal penting bagi masa depan kawasan Asean.

"Belajar dari dunia adalah satu hal, tetapi menceritakan kisah Asean, kisah Indonesia, kepada dunia adalah hal lain. Kita memiliki banyak cerita untuk disampaikan. Saya yakin, jika kita satukan kisah ASEAN selama 50 hingga 60 tahun terakhir, itu adalah kisah sukses yang layak didengar dunia," jelasnya.

Wamenkeu Juda Beber Alasan RI Butuh Kejar Ekonomi 8%

Selasa, 13 Oktober 2026 19:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124475/wamenkeu-juda-beber-alasan-ri-butuh-kejar-ekonomi-8/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan momentum demografi yang terjadi saat ini.

Sebab menurutnya, Indonesia hanya memiliki waktu 10-15 tahun ke depan untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut.

Menurut Juda, Indonesia saat ini masih berada dalam periode emas demografi (golden period), ketika jumlah penduduk usia produktif relatif besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing perusahaan Indonesia di pasar global.

"Tapi tentu saja bonus demografi ini tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Penduduk usia produktif yang besar hanya akan menjadi keunggulan jika mereka memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai," kata Juda dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Juda lantas menjelaskan rasio ketergantungan (dependency ratio) dalam konteks demografi Indonesia. Rasio diperkirakan meningkat dari 46,5 pada 2025 menjadi 46,8 pada 2030 dan terus naik ke 59,7 pada 2045.

Rasio ketergantungan menggambarkan perbandingan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk menopang penduduk nonproduktif.

Sehingga setelah 2040, Indonesia diperkirakan menghadapi peningkatan rasio ketergantungan seiring bertambahnya populasi penduduk lanjut usia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi bagi kelompok usia produktif.

"Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya," jelas Juda.

Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pembangunan perusahaan yang mampu bersaing di pasar internasional sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi tadi kalau angka 8%, tadi disebutkan ini ambisius, mungkin ambisius, Tapi ini adalah visi untuk membangun sense of urgency dikala kita berada di periode terbaik dari bangsa ini dalam konteks demografinya," tegasnya.

DPR Minta Kemenkeu Evaluasi Strategi Perpajakan

Selasa, 13 Oktober 2026 11:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124393/dpr-minta-kemenkeu-evaluasi-strategi-perpajakan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi strategi perpajakan dan mengidentifikasi sumber penerimaan pajak yang masih belum tergarap optimal, menyusul rendahnya realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat yang baru mencapai 63% dari target hingga akhir September 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah perlu menelusuri penyebab pertumbuhan penerimaan pajak yang belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB).

"Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya," kata Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, pekan lalu dikutip, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan data per 30 September 2026, penerimaan pajak Jawa Barat baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp45 triliun yang harus dikejar dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Menurut Misbakhun, evaluasi tidak cukup dilakukan dengan meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan penerimaan menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi akar persoalan dan mengevaluasi pendekatan perpajakan yang selama ini diterapkan.

Ia juga menyinggung pemanfaatan akses data perbankan, pertukaran informasi lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), serta implementasi Coretax yang diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak.

"Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hingga akhir tahun, DJP akan berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan yang lebih akurat.

"Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera," tutur Bimo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah mengatakan, perluasan basis pajak telah menghasilkan tambahan penerimaan Rp1,8 triliun dari wajib pajak yang sebelumnya belum membayar pajak.

Penegakan Hukum Impor Ilegal Dinilai Lemah, PHK Tekstil Meningkat

Selasa, 13 Oktober 2026 19:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124482/penegakan-hukum-impor-ilegal-dinilai-lemah-phk-tekstil-meningkat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan praktik dumping dan impor ilegal, yang juga diklaim menjadi penyebab penutupan lebih dari 100 perusahaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan ribu pekerja dalam empat tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal Farhan Aqil Syaudi menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan daya saing dan efisiensi produksi, tetapi juga praktik persaingan usaha yang dinilai tidak sehat.

Dugaan masuknya produk impor dengan harga tidak wajar di sektor hulu serta pakaian jadi ilegal di sektor hilir disebut semakin menekan produsen domestik.

“Pemakluman pada praktik-praktik dumping dan importasi ilegal telah menyebabkan kerusakan yang parah pada kekuatan integrasi dalam ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional,” kata Farhan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Menurut Farhan, pemerintah tidak bisa terus memberikan kemudahan impor bahan baku, khususnya benang dan kain, sementara dugaan praktik impor ilegal pakaian jadi dalam jumlah besar masih berlangsung. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan data Trade Map yang dihimpun APSyFI, rasio impor sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari 55% menjadi 83% dalam 10 tahun terakhir. Sebaliknya, negara tetangga seperti Vietnam mencatat penurunan rasio tersebut dari 70% menjadi 28% pada periode yang sama.

Ia juga menyoroti penurunan kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dari 3,5% menjadi 0,97% dalam satu dekade terakhir, semakin menyusut ketimbang Vietnam yang disebut memiliki kontribusi sektor tekstil sebesar 6% terhadap PDB.

“Selama rezim pro impor masih bercokol, sektor TPT kita tidak akan pernah bisa pulih, karena ini jadi masalah krusial yang menghambat investasi,” tutur dia.

Selain persoalan impor ilegal, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdianan mengatakan, produk impor yang masuk melalui jalur resmi saat ini juga mulai mengganggu penjualan pakaian jadi industri kecil dan menengah (IKM).

Nandi mengingatkan potensi lonjakan impor pakaian jadi berlangsung setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025, yang mengatur persyaratan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan dan pertimbangan teknis terkait kuota impor dari Kementerian Perindustrian.

Dia merujuk pada kenaikan impor benang sebesar 84,19% dan kain sebesar 20,28% sepanjang 2017–2025 sebagai gambaran risiko tekanan impor terhadap industri domestik.

Para pelaku industri lantas meminta pemerintah tidak hanya mengubah kebijakan impor atau memberikan insentif, tetapi juga memastikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan dan konsisten.

“Kami mohon Menteri Perindustrian yang baru memperhatikan hal ini,” ujar Nandi. “Importasi ilegal pakaian jadi borongan hingga saat ini masih berlangsung dengan bebas tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah.”

Harga Cabai Makin Pedas, Tembus Rp100.000/kg

Selasa, 13 Oktober 2026 11:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124396/harga-cabai-makin-pedas-tembus-rp100-000-kg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah harga komoditas pangan nasional pada hari ini, Selasa (13/10/2026) masih terus mengalami kenaikan. Salah satunya seluruh jenis cabai-cabaian, yang masih menyentuh di atas Rp100.000/kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 8.30 WIB, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan harga sebesar 3,54% atau Rp3.600 menjadi Rp105.300/kg.

Kemudian, harga cabai merah besar juga naik sebesar 9,9% atau Rp6.650 menjadi Rp73.800/kg. Begitu juga cabai merah keriting yang naik 10,09% atau Rp8.100 menjadi Rp88.350/kg. Cabai rawit hijau juga naik 8,01% atau Rp5.850 menjadi Rp78.850/kg.

Sementara itu, mayoritas harga beras tidak berubah. Beras kualitas bawah I harga tetap pada nominal Rp14.900/kg. Beras kualitas bawah II juga tetap di Rp14.700/kg. Begitu juga beras kualitas medium I yang tetap di Rp16.600/kg.

Lalu, harga beras kualitas super I atau premium juga tidak berubah atau tetap pada nominal Rp17.950/kg. Beras kualitas super II juga tetap di Rp17.350/kg. Hanya beras kualitas medium yang turun 0,3% menjadi Rp16.450/kg.

Harga bawang merah ukuran mengalami penurunan harga sebesar 0,54% atau Rp200 menjadi Rp37.000/kg, diikuti bawang putih ukuran sedang yang juga turun 0,64% sebesar Rp250 menjadi Rp38.650/kg.

Harga daging ayam ras segar juga turun 1,08% atau Rp450 menjadi Rp41.250/kg. Harga telurnya juga turun 0,34% atau Rp100 menjadi Rp29.700/kg.

Kemudian, harga daging kualitas 1 tidak berubah atau tetap di Rp152.550/kg. Begitu juga daging sapi kualitas 2 harga tetap pada nominal Rp143.450/kg.

Harga minyak goreng curah tetap pada nominal Rp20.400/kg. Minyak goreng kemasan bermerk 1 juga tidak berubah atau tetap di Rp24.350/kg. Hanya minyak goreng kemasan bermerk 2 yang naik 0,21% menjadi Rp23.600/kg.

Terakhir, harga gula pasir lokal dan premium masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,26% dan 0,25% menjadi Rp19.250 dan Rp20.450/kg.

Kue APBN Makin Kecil Bagi Kelompok Miskin

Selasa, 13 Oktober 2026 14:11 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124423/kue-apbn-makin-kecil-bagi-kelompok-miskin/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kelompok berpenghasilan rendah sepertinya kian terbatas mencicipi kue fiskal. Hal ini terindikasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menerima bantuan pangan pada 2026 turun menjadi 15,08%, terendah dalam lima tahun terakhir.

Padahal, pada 2022, persentasenya mencapai 20,33%. Lalu turun menjadi 17,88% pada 2023. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 20,44% pada 2024, sebelum menurun lagi menjadi 18,07% pada 2025 dan 15,08% pada 2026. Jika dibandingkan dengan 2022, penyusutan rumah tangga penerima bantuan pangan pada 2026 menciut 5,25 poin persentase atau sekitar 25,8%.

Indikasi tersebut juga sejalan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus yang mencatat pertumbuhan belanja bantuan sosial (bansos) hanya 3,4% jadi Rp104,1 triliun dari sebelumnya Rp101,1 triliun.

Dalam paparan APBN KiTa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kenaikan ini terdiri dari realisasi penyaluran bansos senilai Rp21 triliun untuk 10 juta KPM, kartu sembako Rp27,6 triliun untuk Rp17,6 juta KPM, PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta, PIP Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa, KIPK Rp9,7 triliun untuk 954 ribu mahasiswa, serta asistensi dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana sebesar Rp4,6 triliun.

Terbatasnya kenaikan belanja bansos kontras dengan kenaikan belanja barang yang melesat sebesar 67,5% dari Agustus 2025 senilai Rp232,2 triliun menjadi Rp389 triliun per Agustus 2026. Belanja ini terdiri dari penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp131,3 triliun, penyaluran Dana BOS Swasta Rp10,1 triliun, insentif biodiesel Rp21,4 triliun, pelayanan kesehatan UPT 11,3 triliun, dan stabilisasi harga pangan Rp3,3 triliun.

Di sisi lain, belanja pegawai dan belanja modal juga tak kalah tinggi dengan kenaikan masing-masing 21,7% dan 14,3% secara tahunan. Belanja pegawai naik jadi Rp259 triliun dari Rp212,8 triliun. Sedangkan belanja modal bertambah juga dari Rp139,9 triliun menjadi Rp159,8 triliun.

Belanja pegawai, barang, dan modal memang tetap penting, terlebih ada pengangkatan 355.000 anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS hingga Agustus. Belanja tersebut juga dapat menopang kegiatan pemerintahan, pengadaan, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan permintaan dan lapangan kerja.

Akan tetapi, dampak belanja tersebut tidak terlalu terasa bagi peningkatan konsumsi kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, bantuan tunai atau pangan bisa menjadi andalan kelompok berpenghasilan rendah untuk membeli kebutuhan dasar. Bagi rumah tangga dengan pendapatan

terbatas, bansos kerap berfungsi sebagai bantalan ketika penghasilan tidak cukup untuk menutup pengeluaran.

Tambahan bantuan itu sebenarnya dapat membantu mempertahankan konsumsi pangan, membayar transportasi, atau memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Dengan begitu, persoalannya bukan mempertentangkan bansos dengan belanja produktif yang terdiri dari belanja modal, barang dan pegawai. Melainkan, bagaimana memastikan komposisi anggaran itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus melindungi konsumsi dalam jangka pendek.

Kondisi Daya Beli Masyarakat

Pertumbuhan bansos yang hanya 3,4% tetap perlu menjadi bahan evaluasi. Sebab, angka perkembangan bansos cukup tertinggal dan jauh lebih rendah daripada pertumbuhan belanja K/L secara keseluruhan. Terlebih, di saat yang sama tekanan biaya hidup kian menguat pada kelompok berpenghasilan rendah, terlebih dengan adanya peningkatan inflasi dan tekanan harga akibat harga minyak.

Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah mengirim sinyal sangat gamblang terkait kondisi daya beli konsumen. Keyakinan konsumen menurun ke 118,1. Sedangkan, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) melemah, keyakinan konsumen dengan pengeluaran Rp1–2 juta per bulan berada di zona pesimis, dan inflasi pangan meningkat lebih cepat daripada inflasi umum.

Berbeda dengan kelompok kelas menengah yang kini kian ramai mendeklarasikan adanya penurunan standar alias 'downgrade' gaya hidup, yang mengarah pada fungsi ketimbang gengsi. Kelas menengah-bawah (aspiring middle class) atau bahkan kelompok rentan dengan pendapatan rendah, tak punya ruang dan pilihan cukup untuk mengubah gaya hidup. Sebab, sekitar 70% pendapatan mereka sudah terkuras untuk kebutuhan dasar.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, berpendapat kondisi ini terjadi lantaran pemerintah terlalu fokus pada pelaksanaan program-program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Sehingga, ruang fiskal untuk merespons tekanan ekonomi jadi semakin terbatas.

Kondisi ini, menurut Wijayanto, berpotensi menyulitkan penerapan kebijakan fiskal kontrasiklikal, yang seharusnya dapat memperkuat daya beli dan menjaga konsumsi rumah tangga ketika perekonomian melemah.

Di sisi lain, ia menilai, ruang gerak pemerintah juga dibatasi oleh batas defisit APBN 3%, dan kapasitas penambahan utang. Akibatnya, ketika tekanan daya beli meningkat, pemerintah menghadapi dilema antara mempertahankan pembiayaan program prioritas dan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memperkuat perlindungan sosial serta menopang permintaan domestik.

Di tengah tekanan eksternal saat ini dengan adanya kenaikan harga minyak dan ekspektasi inflasi global meninggi akibat gangguan pasokan dan dampak fenomena El Nino, kenaikan harga menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.

“Harga bahan pangan dan energi perlu dikelola dengan baik, bukan berarti tidak boleh naik, tetapi naik secara terkendali dan terprediksi,” kata Wijayanto.

Ia menilai, pemerintah perlu melakukan kebijakan subsidi yang adaptif. “BBM subsidi perlu naik, paralel dgn BBM non subsidi untuk menghindari konversi yang masif dari BBM non subsidi ke BBM subsidi menekan beban subsidi yang berpotensi meledak tahun ini dan tahun depan,” katanya.

Belanja Subsidi Naik, Tapi Berbeda Peran

Sebagai gambaran, belanja subsidi hingga Agustus 2026 mencapai Rp177,1 triliun, dibandingkan Rp149,4 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Artinya, belanja subsidi memang masih tumbuh sebesar 18,5% yoy, lebih cepat daripada belanja bansos, tapi masih berada di bawah pertumbuhan belanja K/L.

Apalagi, jika subsidi digabungkan dengan kompensasi energi, nilainya meningkat jauh lebih tajam. Realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp331,4 triliun, hingga Agustus 2026, dibandingkan Rp218 triliun pada periode sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi lonjakan kompensasi, dari Rp68,6 triliun menjadi Rp154,4 triliun. Belanja subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi BBM, gas LPG serta penggunaan listrik bersubsidi.

Data realisasi hingga Agustus menunjukkan volume BBM bersubsidi mencapai 11.578,7 ribu kiloliter, naik 8,8% yoy. Adapun penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 5.044,9 juta kilogram, meningkat 2,6%, sedangkan jumlah pelanggan listrik bersubsidi naik 2,1% menjadi 43,3 juta. Di samping itu, volume pupuk juga meningkat lebih tinggi, yakni 23,4%, menjadi 6,1 juta ton.

Dalam konteks subsidi, pemerintah sebenarnya terlihat sudah mengeluarkan dukungan fiskal yang besar untuk menjaga keterjangkauan energi dan mendukung sektor produksi. Akan tetapi, subsidi harga dan bansos bekerja melalui mekanisme yang berbeda.

Subsidi membantu menekan harga, sementara bansos memberi bantuan langsung kepada kelompok yang menjadi sasaran program, dalam hal ini kelompok berpendapatan rendah. Memang, subsidi dapat menguntungkan masyarakat secara luas, tapi besar manfaat yang diterima setiap rumah tangga akan berbeda, tergantung pada jenis barang yang disubsidi dan pola konsumsi masing-masing.

Dengan adanya fenomena downgrade oleh kelas menengah, tak dimungkiri juga jika subsidi justru dinikmati oleh kelompok ini ketimbang kelompok rentan berpendapatan rendah.

Pendapatan Meningkat, Bantuan Justru Mengetat

Kenaikan belanja pada sejumlah pos ditopang oleh meningkatnya pendapatan negara yang hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun, setara 65,2% dari target APBN. Pertumbuhan 25,4% itu lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja negara yang sebesar 17,1%. Dengan realisasi belanja Rp2.295,7 triliun, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kenaikan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun, tumbuh 21,7% yoy. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun, meningkat 24,1%, sedangkan kepabeanan dan cukup sebesar Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8%. Begitu juga dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp435,1 triliun, naik 41,7%.

Walaupun pendapatan negara terlihat naik, angka tersebut tidak otomatis membuat semua kelompok masyarakat menikmati 'kue' tersebut secara proporsional. Padahal, kinerja APBN tak cuma bisa dinilai dari besarnya pendapatan, pertumbuhan belanja, atau rendahnya defisit.

Lebih dari itu, yang tak kalah penting adalah seberapa efektif anggaran itu bisa menjaga daya beli, melindungi rumah tangga yang rentan, dan mempertahankan permintaan domestik ketika ekonomi sedang menghadapi tekanan.

Dari data pendapatan yang sebenarnya tumbuh, terlihat adanya perbedaan bentuk dukungan (political will) yang disalurkan melalui APBN. Padahal, APBN bukan sekadar instrumen untuk membiayai

pembangunan dan menjalankan program pemerintah. APBN juga merupakan bantalan di saat kemampuan masyarakat untuk menopang konsumsi melemah.

Gubernur Jateng sebut 64 persen Koperasi Merah Putih telah beroperasi

Selasa, 13 Oktober 2026 16:05 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/648253/gubernur-jateng-sebut-64-persen-koperasi-merah-putih-telah-beroperasi>

Sukoharjo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebutkan setidaknya 64 persen Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi dari total 8.523 Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan," katanya, di Sukoharjo, Selasa, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo.

Kunjungan itu menyasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran Kecamatan Baki, Sukoharjo, untuk melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.

Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk, dan dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen yang menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Ia menyebutkan sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi, dan hingga 30 September 2026 progresnya telah mencapai 61,67 persen.

Selain verifikasi, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat potensi usaha berupa budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola PKK, hingga kerajinan wayang.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan, dengan agenda, meliputi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, peninjauan gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta Gerakan Pangan Murah dan produk UMKM.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kegiatan usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun, dan setelah itu koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

8.523 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Jateng, 64 Persen Sudah Beroperasi

Selasa, 13 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/8-523-koperasi-merah-putih-terbentuk-di-jateng-64-persen-sudah-beroperasi/>

SUKOHARJO — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, dalam rangka pemantauan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10/2026).

Kunjungan tersebut menyasar KDKMP di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran Kecamatan Baki. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan. Agenda di lokasi tersebut meliputi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, peninjauan gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta Gerakan Pangan Murah dan produk UMKM.

Menko Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah, dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” kata Zulhas, sapaannya.

Menurutnya, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kegiatan usaha, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujar Zulhas.

Dia menjelaskan, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan LPG bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

Ditambahkan, pengembangan layanan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi, yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen. Capaian itu menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum sebelumnya mengatakan, Pemprov terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.

Dia menjelaskan, sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi. Hingga 30 September 2026, progresnya telah mencapai 61,67 persen.

“Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan,” kata Linda dalam keterangannya, 2 Oktober 2026.

Selain verifikasi, imbuh Linda, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap, mulai Oktober hingga akhir November 2026. Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat potensi usaha berupa budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola PKK, hingga kerajinan wayang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya juga menekankan pentingnya pengembangan KDKMP yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Hal tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga mampu menggerakkan usaha masyarakat setempat.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” kata Luthfi beberapa waktu yang lalu. (Humas Jateng)*ul

BI Purwokerto: Perkuat pasokan cabai untuk meredam tekanan harga

Selasa, 13 Oktober 2026 10:19 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/648212/bi-purwokerto-perkuat-pasokan-cabai-untuk-meredam-tekanan-harga>

Purwokerto (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Purwokerto mendorong penguatan pasokan dan kelancaran distribusi cabai secara terintegrasi untuk meredam tekanan harga komoditas tersebut, khususnya cabai rawit merah, yang dipengaruhi keterbatasan pasokan dari sentra produksi akibat gangguan cuaca.

“Tekanan harga cabai perlu diantisipasi karena gangguan produksi berpotensi berlanjut pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Aswin Gantina di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan kondisi tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan kerusakan hasil panen yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar.

Menurut dia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat pemantauan harga, pasokan, dan proyeksi panen secara berkala, termasuk mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta potensi gangguan produksi di daerah pemasok untuk meredam tekanan harga.

Selain itu, optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) perlu diarahkan pada realisasi transaksi dan kepastian volume pasokan cabai dari daerah surplus, baik di dalam maupun luar Jawa Tengah, dengan melibatkan BUMD pangan, kelompok tani, distributor, dan pelaku usaha.

“Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga perlu dilakukan secara terarah, khususnya di wilayah dengan tekanan harga tertinggi, disertai fasilitasi distribusi pangan untuk menekan biaya angkut dari sentra produksi,” katanya.

Menurut dia, koordinasi dengan pelaku distribusi dan pengelola pasar turut perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran arus pasokan sekaligus mengidentifikasi hambatan distribusi dan tata niaga yang berpotensi memperbesar tekanan harga.

Sebagai bagian dari TPID, kata dia, KPwBI Purwokerto terus bersinergi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi, kelancaran distribusi, serta peningkatan produktivitas klaster pangan.

Ia mengatakan sepanjang Januari-September 2026, KPwBI Purwokerto mendukung pelaksanaan lebih dari 70 titik kegiatan GPM, operasi pasar, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta 18 kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

“Kami juga memfasilitasi penguatan KAD melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antarkabupaten di Banyumas Raya (Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara) pada 10 Juni 2026, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan kerja sama antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B),” katanya.

Dari sisi produksi, kata dia, pendampingan klaster pangan berbasis Good Agricultural Practices (GAP) di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, meningkatkan produktivitas cabai dari 8,9 ton per hektare menjadi 10 ton per hektare hingga Agustus 2026.

Sementara itu, produktivitas demplot klaster cabai yang dikembangkan di pesantren meningkat dari 0,5 ton per hektare menjadi 3 ton per hektare hingga Juni 2026.

“Pemantauan berkala dilakukan di tiga pondok pesantren di Banyumas Raya, yakni Pondok Pesantren Nuururrohman, Al Ijtihad, dan Darul Ulum,” katanya.

Guna mendukung efisiensi budi daya dan mitigasi risiko El Nino, kata dia, BI Purwokerto turut memberikan bantuan sarana pertanian berupa mesin cultivator, handsprayer, traktor tangan, dan sensor tanah.

Selain itu, lanjut dia, bantuan pipanisasi irigasi diberikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi budidaya cabai dalam menghadapi risiko kekeringan.

“Kami juga mendukung penyediaan kendaraan angkut hasil panen guna meningkatkan efisiensi pengangkutan cabai dari sentra produksi ke pasar,” kata Aswin.

Inflasi IHP China Melonjak Imbas Harga Minyak & Sektor AI

Rabu, 14 Oktober 2026 12:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124549/inflasi-ihp-china-melonjak-imbasi-harga-minyak-sektor-ai/2>

Bloomberg, Inflasi indeks harga produsen (IHP) China melonjak pada bulan lalu, seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak melampaui US\$100 per barel. Harga barang-barang terkait kecerdasan buatan (AI) juga mengalami kenaikan.

Harga di tingkat produsen melampaui sebagian besar perkiraan dan melonjak 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencatat kenaikan tercepat sejak 2022. Demikian menurut data yang dirilis Biro Statistik Nasional China pada Rabu (14/10).

Indeks harga konsumen (IHK) naik 0,9% setelah meningkat 0,8% pada Agustus. Angka tersebut sedikit di bawah perkiraan ekonom yang disurvei Bloomberg. Sementara itu, inflasi inti IHK naik 1% untuk bulan kedua berturut-turut.

“Data inflasi China pada September menunjukkan bahwa perekonomian secara bertahap mulai menjauh dari tekanan deflasi, meskipun pemulihannya masih belum merata,” kata Zhou Hao, kepala ekonom di Guotai Junan. “Inflasi konsumen masih relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa permintaan domestik pulih lebih lambat dibandingkan sektor industri.”

Meski angka terbaru indeks harga produsen (PPI) lebih tinggi dari perkiraan, tingkat inflasi China yang relatif terkendali telah melindungi obligasi domestiknya dari aksi jual di pasar obligasi global. Imbal hasil obligasi pemerintah China bertenor 10 tahun bertahan di 1,65% setelah data tersebut dirilis, menyusul penutupan perdagangan Selasa pada level terendah sejak Juli 2025.

Dong Lijuan, ahli statistik Biro Statistik Nasional China, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kenaikan harga minyak mentah dan logam nonbesi di pasar internasional mendorong peningkatan biaya bulanan di sejumlah industri terkait di dalam negeri. Kenaikan harga bensin menyumbang sekitar setengah poin persentase terhadap kenaikan IHK tahunan pada September.

Risiko deflasi sempat kembali meningkat pada musim panas, tetapi tekanan harga kini mulai menguat seiring kembali berlanjutnya serangan di Timur Tengah dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap pasokan produk minyak global. Selain menambah beban konsumen, kenaikan biaya juga akan semakin menekan margin perusahaan-perusahaan di China. Mereka kesulitan meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada pembeli, sementara pertumbuhan laba industri sudah berada pada laju terlemah tahun ini.

Harga minyak mentah Brent telah melonjak lebih dari 70% sepanjang tahun ini karena perang AS-Iran mengguncang pasar energi. Lonjakan permintaan yang dipicu perkembangan AI juga mulai mendorong kenaikan harga. Kelangkaan semikonduktor dan komponen elektronik lainnya menyebabkan biaya cip meningkat.

Setelah bertahun-tahun mengeksport tekanan disinflasi ke negara-negara lain, kenaikan biaya input kini mendorong lonjakan tajam harga ekspor China. Pada Agustus, kenaikan harga ekspor tersebut mencapai 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi yang tertinggi sejak 2022.

Namun, harga impor melonjak lebih cepat, yakni hampir 30%. Angka tersebut merupakan kenaikan tertinggi dalam rangkaian data yang tersedia sejak dua dekade terakhir.

Singapura Tahan Kebijakan Moneter, Turunkan Proyeksi Inflasi

Rabu, 14 Oktober 2026 09:30 WIB

Claire Jiao dan Srinidhi Ragavendran

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124523/singapura-tahan-kebijakan-moneter-turunkan-proyeksi-inflasi/2>

Bloomberg, Bank sentral Singapura secara tak terduga mempertahankan kebijakan moneternya, seiring perkiraan bahwa krisis pasokan energi global dan lonjakan industri kecerdasan buatan (AI) akan mereda tahun depan.

Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen utama kebijakan moneter alih-alih suku bunga, mempertahankan kemiringan, lebar, dan titik tengah koridor kebijakannya. Demikian disampaikan dalam pernyataan pada Rabu (14/10). Keputusan ini menjadi yang pertama kalinya MAS menahan kebijakan setelah melakukan pengetatan berturut-turut dalam rapat April dan Juli.

Hanya tiga dari 20 ekonom yang disurvei Bloomberg News memperkirakan keputusan tersebut. Mayoritas ekonom memprediksi MAS akan meningkatkan kemiringan koridor kebijakannya. Sebagian besar responden juga memperkirakan bank sentral akan mempertahankan kecenderungan kebijakan yang hawkish atau ketat.

Dolar Singapura melemah 0,1% menjadi 1,28 per dolar AS setelah keputusan tak terduga tersebut diumumkan.

“Pengetatan berturut-turut pada April dan Juli masih berdampak pada perekonomian. Karena itu, bank sentral menilai belum perlu menambah pengetatan saat ini,” kata Khoo Goh, kepala riset Asia di Australia & New Zealand Banking Group. “Namun, ini bukan berarti siklus pengetatan telah berakhir. Jika risiko inflasi yang lebih tinggi benar-benar terjadi tahun depan, MAS mungkin akan kembali memperketat kebijakan.”

MAS mempersempit proyeksi inflasi inti tahun ini menjadi 1,5%-2%, dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 2,5% dalam rapat Juli. Bank sentral memperkirakan inflasi umum berada di sekitar 2%.

Kedua indikator inflasi tersebut diperkirakan rata-rata berada di kisaran 1,5%-2,5% tahun depan, seiring meredanya biaya impor serta gangguan pasokan energi dan pangan. Tekanan harga domestik diperkirakan tetap terkendali, antara lain berkat subsidi pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Inflasi inti diperkirakan “tetap sedikit tinggi dalam beberapa kuartal ke depan”, sebelum “turun secara nyata” mulai pertengahan 2027, kata bank sentral. Pada Juli, MAS menyatakan inflasi diperkirakan akan “melandai secara nyata” tahun depan.

MAS, yang menjadi bank sentral pertama di Asia yang memperketat kebijakan moneter setelah pecahnya perang Iran pada awal tahun ini, tampaknya memilih untuk mencermati lebih lanjut seberapa persisten tekanan harga yang terjadi. Langkah ini diambil setelah inflasi inti naik ke level tertinggi dalam dua tahun, yakni 2,2% pada Agustus.

Tarif transportasi umum akan naik pada Desember, menyusul kenaikan biaya listrik dan gas pada kuartal sebelumnya. Kembali meningkatnya pertempuran di Iran serta gangguan cuaca akibat El Niño juga berisiko mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar.

Sikap kebijakan saat ini dapat “meredam perkiraan kenaikan inflasi impor dalam waktu dekat, sekaligus memastikan tekanan inflasi berangsur mereda pada 2027,” kata bank sentral. “MAS berada dalam posisi

yang baik untuk merespons secara efektif setiap risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah dan akan terus memantau perkembangan ekonomi dengan saksama.”

Pertumbuhan PDB

Keputusan tersebut diambil di tengah aktivitas ekonomi dan permintaan yang kuat di Singapura. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,4% pada kuartal III, menurut data awal yang dirilis Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri pada Rabu.

Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 6,2% pada kuartal II setelah revisi, angka tersebut melampaui perkiraan median 5,1% dalam survei Bloomberg. Pertumbuhan itu juga berada di batas atas proyeksi MAS untuk tahun ini, yakni 4,5%-5,5%.

Lonjakan industri AI global terus mendorong aktivitas pabrik, sektor jasa, dan ekspor Singapura. Sejumlah sektor dengan kinerja terbaik antara lain konstruksi, yang pertumbuhannya meningkat menjadi 8,8%, serta perdagangan grosir dan eceran, transportasi, dan perdagangan.

“Perekonomian Singapura diperkirakan terus tumbuh dengan laju yang kuat dalam beberapa kuartal ke depan, sebelum melambat seiring meredanya siklus AI dari laju luar biasanya dan menegatnya kondisi keuangan global,” kata MAS.

Inflasi AS Naik ke 3,7%, Peluang The Fed Naikkan Bunga Oktober Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 21:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-as-naik-ke-37-peluang-the-fed-naikkan-bunga-oktober-menguat>

KONTAN.CO.ID - Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali meningkat pada September 2026, dipicu lonjakan harga bensin dan meluasnya tekanan harga di berbagai sektor.

Kondisi ini membuka kembali peluang Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga pada akhir bulan ini, sekaligus menambah tekanan bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026.

Melansir Reuters, laporan indeks harga konsumen (CPI) yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu (14/10/2026) menunjukkan, inflasi bulanan mencapai 0,6%, meningkat dari 0,4% pada Agustus. Secara tahunan, CPI naik 3,7%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,4% pada bulan sebelumnya.

Meski kenaikan CPI bulanan sesuai dengan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters, tekanan harga yang meluas di luar sektor energi memicu kekhawatiran bahwa inflasi inti akan sulit kembali terkendali.

Jeffrey Roach, kepala ekonom LPL Financial mengatakan, proses penurunan inflasi menuju target bank sentral berpotensi berlangsung lebih sulit dari perkiraan.

"Perjalanan tahap terakhir untuk kembali ke target inflasi bisa tetap bergejolak dan membuat suku bunga bertahan tinggi," ujar Roach.

Menurut dia, data terbaru memperumit keputusan The Fed pada pertemuan kebijakan moneter bulan ini karena upaya mengembalikan stabilitas harga semakin menantang.

Lonjakan harga bensin menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Harga bensin melonjak 9,1% pada September dan menyumbang lebih dari separuh kenaikan CPI bulanan.

Konflik antara AS, Israel, dan Iran mendorong kenaikan harga energi, sementara harga solar juga melonjak hingga mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan biaya energi memunculkan kekhawatiran bahwa tekanan harga akan merambat ke sektor lain, termasuk bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Meski demikian, harga pangan secara keseluruhan tidak berubah pada September setelah naik masing-masing 0,1% pada Juli dan Agustus.

Harga bahan pangan di toko ritel bahkan turun 0,1% secara bulanan, tetapi masih meningkat 1,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Harga daging sapi turun 1%, sementara produk susu dan turunannya melemah 0,9%. Sebaliknya, harga minuman nonalkohol naik 0,9%, sedangkan buah dan sayuran meningkat 0,5%.

Tekanan juga terlihat pada inflasi inti, yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi yang cenderung bergejolak. CPI inti naik 0,3% secara bulanan pada September, sama seperti Agustus dan lebih tinggi daripada perkiraan ekonom sebesar 0,2%.

Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 2,6% dari 2,4% pada Agustus. Kenaikan harga tempat tinggal, termasuk tarif hotel dan motel, menjadi salah satu pendorong utama. Komponen tersebut naik 0,4%, sedangkan biaya sewa ekuivalen pemilik rumah meningkat 0,3%.

Harga mobil dan truk bekas naik 0,7%, tarif penerbangan meningkat 1,2% seiring mahalannya bahan bakar pesawat, sementara harga pakaian naik 0,3%. Biaya rekreasi dan pendidikan juga mengalami kenaikan.

The Fed menggunakan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) sebagai acuan utama target inflasi sebesar 2%. Inflasi PCE inti tercatat 3% secara tahunan pada Agustus, lebih tinggi daripada inflasi CPI inti, antara lain karena perbedaan bobot komponen dalam kedua indeks.

Data inflasi terbaru mendorong pasar keuangan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed tanggal 27-28 Oktober 2026.

Berdasarkan CME Group FedWatch Tool, peluang kenaikan suku bunga naik menjadi sekitar 52% dari sekitar 22% sebelum laporan CPI dirilis.

Sebelumnya, ekspektasi kenaikan suku bunga pada Oktober sempat mereda setelah pertumbuhan lapangan kerja AS pada September lebih lemah dari perkiraan dan inflasi PCE pada Juli serta Agustus menunjukkan tekanan yang lebih rendah dari ekspektasi.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury sebagian besar bergerak naik setelah data inflasi dirilis. Dolar AS juga menguat terhadap sekeranjang mata uang, sementara bursa saham AS dibuka melemah.

Pada September, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%. Kenaikan tersebut menjadi yang pertama dalam tiga tahun terakhir.

Bank sentral juga mengisyaratkan kemungkinan kenaikan biaya pinjaman lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang, meski sebelumnya ekonom memperkirakan kenaikan berikutnya baru terjadi pada Desember.

Lonjakan inflasi juga menjadi perhatian masyarakat AS menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November.

Survei Reuters/Ipsos menunjukkan sekitar 78% warga AS menyalahkan kebijakan Trump, termasuk tarif impor dan konflik di Timur Tengah, atas kenaikan harga yang melampaui pertumbuhan upah.

Tekanan biaya hidup turut tercermin dalam survei yang menunjukkan penurunan sentimen konsumen dan merosotnya tingkat persetujuan terhadap Trump.

Sementara itu, laporan CPI September juga menjadi acuan bagi jutaan penerima manfaat jaminan sosial dalam memperkirakan kenaikan tunjangan tahun depan.

Administrasi Jaminan Sosial AS mengumumkan penyesuaian biaya hidup sebesar 3,6% untuk tunjangan Social Security dan Supplemental Security Income pada 2027.

IMF Mendesak Negara Anggota untuk Menambah Dana Bagi Negara Berpenghasilan Rendah

Rabu, 14 Oktober 2026 13:34 WIB

Sumber: Reuters Edit,or: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-mendesak-negara-anggota-untuk-menambah-dana-bagi-negara-berpenghasilan-rendah>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa perkembangan ekonomi dan kemajuan kecerdasan buatan (AI) yang pesat mengancam akan memperlebar kesenjangan antara ekonomi maju dan berkembang, terutama mengingat penurunan tajam dalam bantuan pembangunan.

Kepala IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) mengakui tanggung jawabnya untuk membantu membiayai negara-negara saat dibutuhkan, dan mendesak negara-negara anggota IMF untuk memenuhi janji mereka dalam meningkatkan pendanaan bagi Poverty Reduction and Growth Trust (Dana Perwalian Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan), yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga bagi negara berpenghasilan rendah.

IMF juga meminta negara anggota untuk mengisi kembali Catastrophe Containment and Relief Trust (Dana Perwalian Penanggulangan dan Pemulihan Bencana), sebuah dana khusus yang memberikan hibah untuk keringanan dan penghapusan pembayaran utang bagi negara-negara anggota termiskin dan paling rentan.

Georgieva mengatakan bahwa imbal hasil (yield) acuan yang lebih tinggi di negara-negara maju berdampak pada pasar negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

Rata-rata biaya pembayaran utang telah meningkat menjadi 14% dari pendapatan, naik dari 6% pada satu dekade lalu, meskipun beban utang secara keseluruhan telah berkurang, katanya.

"Risiko divergensi ini paling berbahaya bagi mereka yang sudah tertinggal jauh," ujarnya dalam konferensi pers selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.

Menurutnya, biaya bahan bakar dan pangan yang lebih tinggi, penurunan bantuan pembangunan, serta minat yang rendah terhadap investasi berisiko tinggi memberikan tekanan pada banyak negara tersebut, terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Minggu ini, IMF menyoroti risiko signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas keuangan yang timbul dari potensi berakhirnya lonjakan investasi AI, meningkatnya tingkat utang, dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,1% pada tahun 2026. Disebutkan pula bahwa hampir seluruh negara berkembang diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun tersebut.

Para pejabat dari negara-negara berkembang memperingatkan bahwa meningkatnya biaya pembayaran utang menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan yang inklusif.

Menteri Keuangan Nigeria, Taiwo Oyeadele, yang memimpin kelompok negara berkembang Group of 24 (G-24), pada hari Selasa menyatakan bahwa negara-negara berkembang membayar biaya utang US\$ 500 miliar lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju, meskipun mereka menghadapi defisit anggaran yang kian melebar.

Georgieva mengatakan bahwa negara-negara maju seperti AS merupakan pihak yang "paling lalai" dalam memulihkan bantalan fiskal sejak pandemi Covid, sementara banyak negara berkembang telah berupaya meningkatkan ketahanan mereka dengan memperkuat institusi masing-masing.

Ia menyebutkan bahwa IMF telah merestrukturisasi PRGT—fasilitas pendanaan bagi negara-negara berpenghasilan rendah—guna melipatgandakan penyaluran pinjaman ke negara-negara tersebut, namun para anggota perlu memenuhi komitmen pendanaan mereka; ia tidak merinci lebih lanjut mengenai janji bantuan yang belum terealisasi atau tertunda.

IMF juga mendorong pemberian kontribusi bagi CCRT, fasilitas yang menurutnya sangat mendesak untuk segera diisi kembali mengingat seringnya fasilitas tersebut digunakan dalam beberapa tahun terakhir.

Georgieva menyatakan optimismenya bahwa Senegal—negara terbaru yang mengajukan keringanan utang melalui kerangka kerja bersama G-20 (Common Framework for Debt Treatments)—akan dapat menyelesaikan proses restrukturisasi dengan cepat, seraya mencatat bahwa IMF telah mencapai kesepakatan tingkat staf mengenai program pinjaman senilai 2,2 miliar dolar AS untuk negara di Afrika Barat tersebut.

Negara Asia Harus Waspadai Munculnya Krisis Keuangan Lagi

Rabu, 14 Oktober 2026 12:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/negara-asia-harus-waspadai-munculnya-krisis-keuangan-lagi>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Negara-negara Asia harus mengingat kembali peristiwa selama krisis keuangan kawasan pada akhir tahun 1990-an dan mewaspadai terulangnya guncangan serupa.

Peringatan ini disampaikan Gubernur Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas) Eli Remolona pada Rabu (14/10/2026).

Remolona mengatakan, sebelum krisis keuangan Asia bermula pada tahun 1997, perekonomian kawasan mengalami arus masuk modal besar-besaran yang mendorong Bank Dunia menyebutnya sebagai keajaiban Asia Timur.

"Investasi mengalir deras ke Asia, dan kemudian terjadilah krisis karena hal itu sebenarnya bukanlah sebuah keajaiban. Saya rasa kita harus mengingat hal itu. Kita harus mewaspadai krisis semacam itu.

Kita belum benar-benar melakukan banyak upaya untuk mencermati krisis semacam itu," ujar Remolona dalam sebuah panel IMF mengenai prospek Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand, yang merupakan pusat episentrum krisis keuangan Asia.

Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, menanggapi pandangan tersebut dengan berargumen dalam diskusi panel bahwa IMF telah membuat kemajuan dalam menilai kerentanan keuangan dan potensi dampak penularan antar-perekonomian.

"Kami menanggapi (krisis) ini dengan serius dan telah menyusun kerangka kerja untuk membahas bagaimana negara-negara sebaiknya menangani arus modal yang fluktuatif—misalnya, kapan mereka perlu melakukan intervensi di pasar valuta asing, dan sebagainya," ujar Srinivasan.

Srinivasan juga mengatakan, meskipun perekonomian ASEAN mampu bertahan cukup baik di tengah ketegangan perdagangan akibat kebijakan tarif AS, intensitas energi dapat menjadi salah satu risiko bagi prospek ekonomi kawasan, mengingat beberapa negara sangat bergantung pada impor minyak dan gas.

Atsushi Mimura, Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasional, juga menyebutkan guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah serta kenaikan inflasi sebagai risiko jangka pendek bagi prospek kawasan tersebut.

"Tentu saja, kita semua tahu bahwa (dukungan fiskal) harus memenuhi prinsip 'Triple T'—yaitu tepat sasaran (targeted), disesuaikan dengan kebutuhan (tailored), dan bersifat sementara (temporary)," kata Mimura saat membahas perlunya disiplin dalam penyaluran anggaran untuk meredam dampak guncangan energi terhadap rumah tangga dan dunia usaha.

Mengingat banyaknya negara yang menghadapi tekanan persaingan dari Tiongkok, negara-negara ASEAN perlu fokus memperkuat investasi guna mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis dan energi, kata Mimura, seraya menambahkan bahwa Jepang siap mendukung upaya tersebut.

"Seluruh negara ASEAN harus terus meningkatkan investasi agar mampu mengimbangi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan inovasi. Pada saat yang sama, menurut saya negara-negara ASEAN memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok digitalisasi karena mereka merupakan penghasil mineral kritis," ujar Mimura.

Dolar AS Melemah, Pasar Menanti Data Inflasi dan Sinyal Suku Bunga The Fed

Rabu, 14 Oktober 2026 12:28 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-melemah-pasar-menanti-data-inflasi-dan-sinyal-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID – TOKYO. Pergerakan dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan Rabu (14/10/2026) seiring pelaku pasar menantikan data inflasi terbaru AS dan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Di tengah ketidakpastian tersebut, para pejabat keuangan global juga mendesak pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal dan mengendalikan peningkatan utang.

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama turun 0,09% menjadi 102,09. Pelemahan ini melanjutkan penurunan sebesar 0,35% pada perdagangan Selasa (13/10/2026).

Sementara itu, euro menguat 0,09% menjadi US\$ 1,1208. Yen Jepang naik 0,08% ke level 158,19 per dolar AS, sedangkan pound sterling menguat 0,15% menjadi US\$ 1,3272.

Perhatian investor kini tertuju pada rilis data indeks harga konsumen (CPI) AS untuk September serta sejumlah pidato pejabat bank sentral AS. Kedua agenda tersebut dinilai dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemungkinan perubahan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Carol Kong, ahli strategi mata uang Commonwealth Bank of Australia, mengatakan terdapat risiko inflasi inti AS melampaui perkiraan pasar.

"Risikonya adalah inflasi CPI inti secara mengejutkan lebih tinggi dari perkiraan karena kuatnya permintaan konsumen dan meningkatnya biaya, sehingga mendorong ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober serta menguatkan dolar AS," kata Kong dalam sebuah catatan.

Departemen Tenaga Kerja AS dijadwalkan merilis data CPI September. Inflasi bulanan diperkirakan meningkat 0,6%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,4% pada Agustus. Sementara itu, inflasi tahunan diproyeksikan naik menjadi 3,6% dari 3,4%.

The Fed juga akan menerbitkan Beige Book, laporan yang merangkum kondisi ekonomi berdasarkan informasi dari berbagai wilayah di AS.

Bansi Madhavani, ekonom senior ANZ, menilai tekanan terhadap inflasi utama masih cenderung mengarah ke atas.

"Risiko terhadap inflasi utama lebih condong ke arah kenaikan," ujar Madhavani dalam sebuah podcast.

"Karena itu, kami tetap berpandangan bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dalam beberapa bulan mendatang," tambahnya.

Pasar Menanti Keputusan The Fed

Sebelumnya, dolar AS melemah setelah pernyataan Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams dan Gubernur The Fed Christopher Waller ditafsirkan pasar sebagai sinyal kebijakan moneter yang lebih lunak.

Pejabat The Fed Thomas Barkin dan Michelle Bowman dijadwalkan menyampaikan pidato pada Rabu. Pernyataan mereka akan dicermati investor untuk mengetahui arah kebijakan suku bunga selanjutnya.

Berdasarkan CME Group FedWatch Tool, pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 77% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan pada 27–28 Oktober 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan probabilitas 51% sebulan sebelumnya.

Meski demikian, pasar masih memperhitungkan pengetatan kebijakan moneter kumulatif sekitar 75 basis poin hingga akhir 2027.

IMF Desak Pemerintah Kendalikan Utang

Di Bangkok, Thailand, para pejabat keuangan dunia berkumpul dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Agenda tersebut turut menyoroti meningkatnya risiko fiskal dan perlunya langkah untuk menjaga keberlanjutan utang pemerintah.

Kepala Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes mengatakan lembaganya semakin menekankan urgensi bagi pemerintah untuk menahan pertumbuhan utang.

Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan Amerika Serikat perlu melakukan penyesuaian fiskal agar posisi utangnya berada pada jalur yang lebih berkelanjutan.

Tekanan fiskal juga menjadi perhatian di Eropa, terutama Prancis. Obligasi pemerintah Prancis menjadi salah satu instrumen yang paling terdampak aksi jual global baru-baru ini. Investor khawatir persaingan politik menjelang pemilihan presiden tahun depan dapat menghambat upaya pemerintah mengurangi defisit anggaran yang tinggi.

Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan Prancis harus menyelesaikan persoalan utangnya melalui konsolidasi fiskal. Pernyataan tersebut meredam spekulasi bahwa ECB akan mulai membeli obligasi pemerintah Prancis untuk menopang pasar surat utang negara tersebut.

Dalam perkembangan lain, Financial Times melaporkan Menteri Keuangan Inggris John Healey diperkirakan akan membiayai seluruh kebijakan pemberian manfaat baru dalam anggaran bulan ini melalui kenaikan pajak atau pemangkasan belanja, bukan dengan menambah pinjaman.

Meski demikian, seorang pejabat senior IMF mengatakan lembaga tersebut tidak merekomendasikan Inggris mempercepat konsolidasi fiskal.

Dolar Australia Menguat, Ekspor China Melonjak

Pergerakan mata uang di kawasan Asia Pasifik turut dipengaruhi data perdagangan China yang lebih kuat dari perkiraan.

Data yang dirilis pada Rabu menunjukkan ekspor China melonjak 36,3% secara tahunan pada September 2026. Kenaikan tersebut jauh melampaui ekspektasi pasar. Pada periode yang sama, impor China tumbuh 31%.

Data perdagangan tersebut turut mendukung penguatan dolar Australia. Mata uang Negeri Kanguru itu naik 0,3% terhadap dolar AS menjadi US\$ 0,7001. Dolar Selandia Baru atau kiwi juga menguat 0,29% ke level US\$ 0,5625.

Di pasar aset kripto, Bitcoin naik 0,41% menjadi US\$ 83.690,94. Sementara itu, Ether menguat 0,18% menjadi US\$ 2.513,69.

Filipina Ingatkan Asia untuk Waspadai Krisis Keuangan Susulan, Ini Alasannya

Rabu, 14 Oktober 2026 11:24 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/filipina-ingatkan-asia-untuk-waspadai-krisis-keuangan-susulan-ini-alasannya>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Negara-negara Asia harus mengingat kembali peristiwa selama krisis keuangan kawasan pada akhir tahun 1990-an dan mewaspadai terulangnya guncangan serupa.

Eli Remolona, Gubernur Banko Sentral ng Pilipinas, mengungkapkan, sebelum krisis keuangan Asia bermula pada tahun 1997, perekonomian kawasan mengalami arus masuk modal besar-besaran.

"Ini yang membuat Bank Dunia menjulukinya sebagai keajaiban Asia Timur," kata Eli Remolona, Gubernur Banko Sentral ng Pilipinas, dalam sebuah diskusi panel IMF mengenai prospek Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"Investasi mengalir deras ke Asia, dan kemudian krisis pun terjadi karena hal itu sebenarnya bukanlah sebuah keajaiban. Saya rasa kita perlu mengingat hal itu. Kita harus mewaspadai krisis semacam itu," ujarnya.

"Kita belum benar-benar melakukan banyak upaya untuk mencermati krisis semacam itu."

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand.

Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, menanggapi pandangan tersebut dengan menyatakan dalam diskusi panel bahwa IMF telah membuat kemajuan dalam menilai kerentanan keuangan serta potensi dampak penularan (spillover) antar-perekonomian. "Kami menanggapi (krisis) ini dengan serius dan telah menyusun kerangka kerja untuk membahas bagaimana negara-negara sebaiknya menangani arus modal yang fluktuatif—misalnya, kapan mereka perlu melakukan intervensi di pasar valuta asing, dan sebagainya," ujar Srinivasan.

Srinivasan juga mengatakan bahwa meskipun perekonomian ASEAN mampu bertahan cukup baik di tengah ketegangan perdagangan akibat kebijakan tarif AS, intensitas energi dapat menjadi salah satu risiko bagi prospek ekonomi kawasan, mengingat beberapa negara sangat bergantung pada impor minyak dan gas.

Atsushi Mimura, Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasional, juga menyebutkan guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah serta kenaikan inflasi sebagai risiko jangka pendek bagi prospek kawasan tersebut.

"Tentu saja, kita semua tahu bahwa (dukungan fiskal) harus memenuhi prinsip 'Triple T'—yaitu tepat sasaran (targeted), disesuaikan dengan kebutuhan (tailored), dan bersifat sementara (temporary)," kata Mimura saat membahas perlunya disiplin dalam penyaluran anggaran untuk meredam dampak guncangan energi terhadap rumah tangga dan dunia usaha.

Mengingat banyaknya negara yang menghadapi tekanan persaingan dari China, negara-negara ASEAN perlu fokus memperkuat investasi guna mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis dan energi, kata Mimura, seraya menambahkan bahwa Jepang siap mendukung upaya tersebut.

"Seluruh negara ASEAN harus terus meningkatkan investasi agar mampu mengimbangi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan inovasi," ujar Mimura di hadapan panel.

"Pada saat yang sama, menurut saya negara-negara ASEAN memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok digitalisasi karena mereka merupakan penghasil mineral kritis."

ASEAN yang beranggotakan 11 negara ini mencakup Brunei, Kamboja, Timor Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Ekspor China Melonjak 36,3% pada September 2026, Surplus Dagang Dekati US\$ 1 Triliun

Rabu, 14 Oktober 2026 10:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-melonjak-363-pada-september-2026-surplus-dagang-dekati-us-1-triliun>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Kinerja perdagangan China menunjukkan penguatan pada September 2026. Pertumbuhan ekspor negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu melampaui ekspektasi pasar, ditopang permintaan luar negeri yang kuat di tengah lemahnya konsumsi domestik.

Data kepabeanan China yang dirilis pada Rabu (14/10/2026) menunjukkan, ekspor China melonjak 36,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan 25% pada Agustus 2026 dan jauh melampaui perkiraan ekonom sebesar 25,5%.

Pertumbuhan ekspor pada September tersebut menjadi yang tercepat sejak Februari 2026, ketika pengiriman barang ke luar negeri meningkat 39,6%.

Sementara itu, impor China tumbuh 31% secara tahunan pada September 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 28,2% pada Agustus 2026 dan melampaui perkiraan ekonom sebesar 24,5%.

Kuatnya kinerja perdagangan luar negeri membantu China mengimbangi lemahnya belanja konsumen dan meredakan tekanan terhadap pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Ketahanan ekspor barang China juga bertahan selama dua tahun berturut-turut, meskipun negara-negara Barat terus menekan Beijing agar menyeimbangkan hubungan perdagangan. Permintaan dari pasar global membuat aktivitas manufaktur tetap bergairah dan menopang pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya permintaan domestik serta investasi.

Surplus dagang China mendekati US\$ 1 triliun

Penguatan ekspor turut memperbesar surplus perdagangan China. Sepanjang Januari-September 2026, surplus perdagangan negara tersebut mencapai US\$ 938,11 miliar.

Dengan capaian tersebut, China berpeluang mencatat surplus perdagangan lebih dari US\$ 1 triliun lebih cepat dibandingkan tahun lalu, kecuali terjadi perlambatan ekspor yang tajam pada kuartal IV-2026.

Namun, hingga saat ini, kemungkinan perlambatan ekspor secara signifikan dinilai masih terbatas.

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan berasal dari kesepakatan China dan Uni Eropa (UE) untuk membatasi ekspor kendaraan hibrida China ke kawasan tersebut. Kesepakatan yang diumumkan pada awal Oktober 2026 itu berpotensi menekan perdagangan otomotif China yang tengah berkembang pesat.

Meski demikian, penerapan langkah-langkah perdagangan tersebut diperkirakan baru akan dirinci pada Desember 2026. Kondisi ini membuka peluang bagi eksportir China untuk mempercepat pengiriman kendaraan sebelum tenggat waktu berlaku.

Di sisi lain, hubungan perdagangan China dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan perkembangan yang dapat membantu menjaga arus perdagangan.

Pertemuan tingkat tinggi Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada September 2026 menghasilkan perpanjangan gencatan tarif kedua negara. Keduanya juga menyepakati pemangkasan tarif atas barang senilai US\$ 30 miliar dari masing-masing negara.

Kesepakatan tersebut memberikan ruang bagi perdagangan bilateral untuk tetap berjalan di tengah ketegangan ekonomi antara kedua kekuatan besar dunia tersebut.

Permintaan teknologi dan semikonduktor menopang ekspor

Selain faktor hubungan dagang, permintaan global terhadap produk teknologi China juga diperkirakan tetap kuat.

Pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di berbagai negara terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Kondisi ini menopang prospek permintaan produk teknologi buatan China, termasuk semikonduktor.

Permintaan tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi menjaga kinerja ekspor China di tengah meningkatnya tekanan perdagangan internasional.

Data ekonomi lainnya menunjukkan pemulihan China masih berlangsung tidak merata. Harga di tingkat produsen atau factory-gate prices pada September 2026 meningkat dengan laju tercepat dalam lebih dari empat tahun.

Sementara itu, inflasi konsumen turut naik, tetapi masih berada di bawah perkiraan pasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbaikan di sisi industri belum sepenuhnya diikuti penguatan permintaan masyarakat.

Meski demikian, kinerja ekspor yang solid memberikan ruang bagi pemerintah China untuk mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 4,5%-5% dengan dukungan kebijakan yang moderat.

China menghadapi risiko pembatasan perdagangan

China juga bersiap menghadapi potensi pembatasan ekspor dari negara-negara mitra dagang. Risiko tersebut muncul seiring kritik dari Washington dan Brussels terhadap kebijakan industri serta moneter Beijing yang dinilai turut berkontribusi terhadap besarnya surplus perdagangan China.

Pada pekan lalu, bank sentral China menanggapi kritik terhadap kebijakan nilai tukar yuan melalui pernyataan kebijakan yang panjang.

Bank sentral menegaskan bahwa China tidak pernah mengejar pelemahan yuan secara kompetitif untuk memperoleh keuntungan perdagangan. Pernyataan tersebut sekaligus membantah tuduhan bahwa Beijing sengaja mempertahankan nilai tukar yuan pada level yang terlalu lemah demi meningkatkan daya saing ekspor.

Di tengah dinamika tersebut, China juga akan menggelar Canton Fair, pameran perdagangan terbesar di negara itu, mulai Kamis (15/10/2026). Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi produsen China untuk memamerkan beragam produk kepada pembeli asing.

Ke depan, ketergantungan terhadap ekspor menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian China. Apabila sektor tersebut mengalami tekanan besar akibat pembatasan perdagangan atau melemahnya permintaan global, pemerintah berpotensi meningkatkan stimulus untuk menopang pertumbuhan.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi lemahnya permintaan domestik dan penurunan berkepanjangan di pasar properti yang masih membebani pemulihan ekonomi China.

IMF Desak Negara Pangkas Belanja, Beban Utang Kian Berat

Rabu, 14 Oktober 2026 09:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-desak-negara-pangkas-belanja-beban-utang-kian-berat>

KONTAN.CO.ID - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mendesak negara-negara maju dan berkembang segera memperkuat disiplin fiskal dengan menekan belanja pemerintah, mengurangi defisit anggaran, dan menurunkan tingkat utang.

Langkah ini dinilai mendesak di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah yang semakin memperberat biaya pembayaran utang.

Melansir Reuters, Kepala Departemen Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes mengatakan, penundaan konsolidasi fiskal hanya akan membuat penyesuaian anggaran semakin sulit dan mahal pada tahun-tahun mendatang.

Apalagi, rata-rata utang publik global diperkirakan segera mencapai 100% dari produk domestik bruto (PDB), level tertinggi sejak Perang Dunia II.

“Realisasi fiskal tahun ini lebih buruk daripada perkiraan enam bulan lalu, dan lebih buruk dibandingkan setahun lalu,” kata Valdes kepada Reuters, menjelang pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Rabu (14/10/2026).

Menurut Valdes, sebagian besar negara justru menghadapi kecenderungan peningkatan belanja, bukan memperketat pengeluaran untuk memperbaiki kondisi fiskal.

Dalam publikasi blog yang dirilis pada Rabu, IMF menegaskan bahwa semakin lama pemerintah menunda penyesuaian fiskal, semakin berat pula beban yang harus ditanggung.

Penundaan berpotensi meningkatkan beban bunga utang, memperbesar kerentanan fiskal, dan mempersempit ruang pemerintah untuk merespons gejolak ekonomi.

IMF menilai, negara-negara maju dengan tingkat utang tinggi perlu membangun dukungan politik untuk menjalankan rencana konkret dalam mengendalikan biaya pinjaman dalam jangka menengah. Langkah tersebut juga penting untuk membatasi dampak rambatan tekanan fiskal ke negara lain.

Sementara itu, kondisi pembiayaan di sejumlah negara berkembang dan pasar negara berkembang masih relatif mendukung.

Namun, IMF mengingatkan kondisi tersebut belum tentu bertahan lama sehingga pemerintah perlu mengurangi kerentanan fiskal dan memperkuat pengelolaan utang.

Bagi negara berpendapatan rendah yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan eksternal, IMF menyarankan penguatan sistem perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah.

Imbal hasil obligasi naik, beban bunga meningkat

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang dalam beberapa bulan terakhir dipicu sejumlah faktor, antara lain harga minyak yang tinggi, inflasi yang persisten, meningkatnya kebutuhan investasi, serta pertumbuhan investasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih tinggi dari perkiraan.

IMF mencatat, rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun kelompok negara G7 meningkat lebih dari 110 basis poin antara Februari dan September. Angka tersebut mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade.

Sejalan dengan kenaikan imbal hasil, rata-rata efektif biaya pembiayaan pemerintah diproyeksikan meningkat menjadi 3,7% pada 2031, dibandingkan 2,3% pada 2021.

Di Amerika Serikat (AS), pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,3% dari PDB, meningkat dari 2,8% sebelum pandemi Covid-19.

Besaran tersebut diproyeksikan setara dengan pengeluaran pemerintah AS untuk program jaminan sosial atau Social Security.

Tekanan bahkan lebih besar di negara-negara berpendapatan rendah. Pembayaran bunga utang saat ini menyerap lebih dari 15% penerimaan pajak mereka, dibandingkan rata-rata sekitar 9% pada periode 2011–2019.

IMF juga menyoroti kecenderungan pemerintah negara maju membiayai kembali utang dengan tenor lebih pendek.

Strategi ini membuat kenaikan suku bunga pasar lebih cepat tercermin dalam biaya utang pemerintah ketika surat utang jatuh tempo dan harus diterbitkan kembali.

Untuk kelompok G7 dan Spanyol, porsi utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun kini mendekati 30%.

Ruang fiskal semakin terbatas

Tekanan fiskal berpotensi meningkat karena inflasi yang masih di atas target dan harga energi yang lebih tinggi dapat membuat bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Kondisi tersebut terjadi ketika kebutuhan belanja pemerintah juga meningkat, terutama untuk pertahanan, keamanan energi, serta pembiayaan populasi yang menua.

IMF turut memperingatkan bahwa di sejumlah negara, suku bunga utang kini melampaui tingkat pertumbuhan nominal ekonomi yang diperkirakan. Situasi ini dapat mempersulit upaya menstabilkan rasio utang terhadap PDB.

Valdes menegaskan, pemerintah perlu segera memulai konsolidasi fiskal untuk menghindari tekanan yang lebih besar pada masa mendatang.

“Sekaranglah waktunya,” ujar Valdes, seraya menekankan bahwa negara-negara perlu mulai memperbaiki kondisi fiskalnya.

Ia menggambarkan tekanan dinamika utang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila pemerintah terus menunda penyesuaian.

Inflasi Produsen China Melampaui Ekspektasi, CPI Masih Tertahan

Rabu, 14 Oktober 2026 09:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-china-melampaui-ekspektasi-cpi-masih-tertahan>

KONTAN.CO.ID - Inflasi harga produsen China melonjak pada September 2026, mencapai laju tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir.

Kenaikan harga minyak dan komoditas mendorong biaya produksi pabrik, sementara lemahnya permintaan domestik masih menahan laju inflasi konsumen.

Melansir Reuters, berdasarkan data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Rabu (14/10/2026), indeks harga produsen atau producer price index (PPI) naik 5% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September.

Angka tersebut meningkat dibandingkan kenaikan 3,8% pada Agustus sekaligus melampaui perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 4,5%.

Kenaikan ini menjadi yang tercepat sejak Juni 2022, menandakan tekanan biaya di tingkat produsen semakin kuat.

Harga minyak dan komoditas yang meningkat akibat gangguan transportasi, cuaca buruk, serta ketegangan geopolitik turut mendorong biaya produksi manufaktur.

Namun, lemahnya permintaan membuat kenaikan biaya tersebut belum sepenuhnya diteruskan ke harga barang yang dibayar konsumen.

Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi China masih belum merata. Aktivitas produsen menghadapi kenaikan biaya, sedangkan konsumsi rumah tangga tetap lemah. Pemulihan ekonomi pun masih lebih banyak ditopang ekspor dibandingkan belanja domestik.

Di sisi konsumen, indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) China naik 0,9% secara tahunan pada September. Angka tersebut sedikit meningkat dari 0,8% pada Agustus, tetapi masih di bawah perkiraan ekonom sebesar 1%.

Secara bulanan (month-on-month/mom), CPI hanya meningkat 0,2%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan kenaikan 0,3% dan kenaikan 0,4% pada Agustus.

Inflasi inti, yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi yang bergejolak, tercatat sebesar 1% secara tahunan. Angka tersebut tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya.

Data ini mengindikasikan rumah tangga China masih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Meski harga di tingkat produsen meningkat tajam, tekanan harga di tingkat konsumen tetap terbatas karena permintaan domestik belum pulih kuat.

Untuk menopang perekonomian, pemerintah China telah meningkatkan dukungan fiskal. Beijing menyetujui tambahan kuota obligasi pemerintah daerah yang belum digunakan sebesar 550 miliar yuan atau sekitar US\$ 82,15 miliar untuk membiayai infrastruktur dan belanja lainnya.

Langkah tersebut melengkapi sejumlah kebijakan stimulus sebelumnya, termasuk subsidi kredit pemilikan rumah atau hipotek.

Meski berbagai stimulus telah digulirkan, lemahnya keyakinan sektor swasta dan konsumsi rumah tangga masih menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi China.

Kenaikan inflasi produsen yang tidak diikuti penguatan inflasi konsumen juga mencerminkan ketidakseimbangan antara tekanan biaya produksi dan permintaan akhir.

Bank Sentral Singapura Tahan Kebijakan Moneter, Kejutkan Analisis

Rabu, 14 Oktober 2026 08:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-singapura-tahan-kebijakan-moneter-kejutkan-analisis>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS), mempertahankan kebijakan moneternya pada Rabu (14/10/2026).

Keputusan ini mengejutkan pasar karena seluruh 10 analis yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan MAS akan kembali memperketat kebijakan moneter di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat dan risiko inflasi.

Dalam pernyataannya, MAS memperkirakan ekonomi Singapura masih akan tumbuh kuat dalam beberapa kuartal mendatang.

Namun, pertumbuhan diperkirakan melambat setelah siklus investasi kecerdasan buatan (AI) mereda dari laju yang luar biasa dan kondisi keuangan global semakin ketat.

MAS juga memperkirakan inflasi inti akan melandai lebih nyata mulai pertengahan 2027. Perlambatan inflasi diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan inflasi impor yang dipicu kendala pasokan, sementara biaya domestik tetap terkendali.

Ekonom OCBC Selen Ling mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Menurut dia, keputusan mempertahankan kebijakan moneter kemungkinan diambil setelah pertimbangan yang ketat.

Ling menilai proyeksi inflasi inti menjadi faktor penting dalam keputusan MAS. Meski inflasi diperkirakan masih sedikit tinggi dalam beberapa kuartal mendatang, tekanan harga diproyeksikan mereda lebih jelas mulai pertengahan 2027.

MAS mempertahankan laju apresiasi dolar Singapura dalam kerangka kebijakan nilai tukar yang dikenal sebagai Singapore dollar nominal effective exchange rate (S\$NEER). Bank sentral juga tidak mengubah lebar pita kebijakan maupun titik tengahnya.

Melalui kebijakan tersebut, MAS memungkinkan dolar Singapura terus menguat untuk meredam kenaikan inflasi impor dalam jangka pendek. Langkah ini diharapkan membantu menurunkan tekanan inflasi secara bertahap pada 2027.

Setelah pengumuman tersebut, dolar Singapura relatif stabil di level 1,2802 per dollar AS.

Inflasi Diproyeksikan Melandai

Keputusan mempertahankan kebijakan moneter ini berbeda dari langkah MAS pada Juli lalu, ketika bank sentral memperketat kebijakan dalam skala yang disebut sangat tipis. Pengetatan serupa sebelumnya juga dilakukan pada April 2026.

Data awal pemerintah yang dirilis pada Rabu menunjukkan ekonomi Singapura tumbuh 5,4% pada kuartal III-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi inti pada Agustus tercatat sebesar 2,2%.

MAS mempersempit proyeksi inflasi inti menjadi 1,5%-2% dari sebelumnya 1,5%-2,5%. Proyeksi inflasi utama juga ditetapkan sebesar 2%, lebih rendah dibandingkan rentang sebelumnya yang mencapai 1,5%-2,5%.

Ekonom Maybank Chua Hak Bin menilai kenaikan suku bunga dan kondisi pasar tenaga kerja yang menunjukkan perbedaan perkembangan antarkelompok pekerja akan membantu menahan tekanan biaya upah.

Meski demikian, arah kebijakan MAS selanjutnya masih terbuka. Chua mengatakan keputusan pengetatan lebih lanjut akan bergantung pada perkembangan harga energi dan keberlanjutan lonjakan investasi yang didorong AI.

Pada Agustus, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5%-5,5%, dari sebelumnya 2%-4%.

Pemerintah menilai dampak perang di Timur Tengah terhadap ekonomi lebih terbatas daripada perkiraan awal, sementara lonjakan investasi AI global lebih kuat dari yang diperkirakan.

Berbeda dengan banyak bank sentral yang menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama, Singapura mengelola kebijakan moneter melalui nilai tukar dolar Singapura terhadap mata uang mitra dagang utamanya dalam pita perdagangan S\$NEER.

MAS memiliki tiga instrumen utama untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, yakni kemiringan pita apresiasi, titik tengah, dan lebar pita kebijakan.

Risiko Global Belum Reda, Rupiah Bertahan di Rp17.900/US\$

Rabu, 14 Oktober 2026 15:34 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124598/risiko-global-belum-reda-rupiah-bertahan-di-rp17-900-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu (14/10/2026) ke Rp17.900/US\$, dipicu sejumlah tekanan domestik dan tingginya harga minyak mentah yang bertahan di US\$105,72/barel.

Dari Asia, pergerakan mata uang sebenarnya relatif beragam. Won Korea Selatan bahkan bisa melesat 0,46%, diikuti rupee India, dolar Taiwan, baht Thailand, ringgit Malaysia dan dolar Hong Kong. Tapi, rupiah tidak melemah sendirian sore ini. Sejalan dengan rupiah, dolar Singapura juga terpankaskan bersama peso Filipina dan yen Jepang.

Penguatan sebagian mata uang kawasan ditopang oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di tahun 2027. Pelaku pasar memperkirakan The Fed hanya akan menaikkan Fed Fund Rate (FFR) hanya sekitar satu kali lagi di tahun ini, sementara di tahun depan The Fed memperkirakan tidak ada kenaikan, setidaknya di semester awal.

Dari pasar obligasi global ekspektasi ini membawa yield US Treasury terpankaskan 1,5 bps jadi 5,19%, diikuti penurunan yield di obligasi Jepang ke 2,98% (10,8 bps), Inggris ke 5,38% (-5,8 bps), Prancis 4,8% (-2,6 bps), China 1,64% (-0,8 bps). Meredanya tekanan obligasi global merembet pada aset rupiah.

Yield surat utang negara (SUN) siang ini terpangkas, khususnya di tenor pendek. Yield tenor 2 tahun paling banyak terpangkas 8,4 basis poin (bps) jadi 6,7%, tenor 3 tahun menyusul dengan penurunan yield 5,7 bps ke 6,86%. Sedangkan tenor 1 tahun turun 3,2 bps menjadi 6,65%.

Sebaliknya, yield tenor acuan 10 tahun justru naik tipis 0,4 bps jadi 7,19%. Di tenor 40 tahun, bahkan yield melonjak 4,9 bps menjadi 7,26%.

Penguatan di pasar SUN ini menahan pelemahan rupiah menjadi lebih terbatas, kala tekanan eksternal dari tingginya harga minyak serta sentimen pasar keuangan domestik dengan data ekonomi yang belum sepenuhnya jadi katalis.

Selanjutnya, pelaku pasar akan mencermati arah inflasi AS yang tergambar dalam data Consumer Price Index (CPI) nanti malam waktu Indonesia. Data ini akan memengaruhi ekspektasi arah kebijakan moneter The Fed dan menentukan keberlanjutan reli di pasar obligasi global.

Aset Syariah Tembus Rp3.131 T, RI Klaim Jadi Modal Ekonomi 8%

Rabu, 14 Oktober 2026 13:37 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124579/aset-syariah-tembus-rp3-131-t-ri-klaim-jadi-modal-ekonomi-8/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mendorong ekonomi syariah menjadi salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027, bahkan bisa menyentuh 8% dalam jangka menengah.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menanggapi data terkait total aset keuangan syariah Indonesia yang diklaim telah mencapai Rp3.131 triliun. Dia menyebut capaian tersebut diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dengan pangsa pasar sebesar 11,36% terhadap total aset keuangan nasional.

"Indonesia juga peringkat ketiga dunia untuk sukuk berdasarkan nilai aset," kata Dradjad dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dradjad menilai peluang pengembangan ekonomi syariah masih sangat besar seiring meningkatnya permintaan pasar global. Belanja konsumsi muslim global pada tahun 2029 diprediksi akan mencapai hampir US\$3,6 triliun, dengan aset keuangan syariah global mencapai US\$9,72 triliun.

Sejalan dengan berbagai capaian dan melihat peluang yang ada, pemerintah kata Dradjad mendorong ekonomi syariah menjadi salah satu sektor andalan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan investasi, produktivitas, ekspor bernilai tambah, serta penguatan daya saing melalui efisiensi logistik dan pengembangan ekonomi syariah.

Dradjad menjelaskan, investasi harus tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB) dan diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Jadi pemerintah dan swasta harus kerja bersama. Nah, salah satu yang akan kita garap lebih intensif lagi, itu adalah debottlenecking. Kita untuk mengurangi regulasi, deregulasi, mengurangi birokrasi, debirokratisasi, sehingga sektor swasta akan bisa bergerak lebih cepat lagi," tegasnya.

Potensi Dana Syariah

Pada kesempatan yang sama, Dradjad turut mengungkapkan potensi dana sosial syariah di Indonesia mencapai Rp343 triliun per tahun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp41 triliun atau sekitar 12% dari potensi yang tersedia.

Dradjad menilai kesenjangan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Menurutnya, pengembangan keuangan syariah perlu didukung oleh sinergi berbagai otoritas, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penguatan dana sosial syariah juga diperlukan untuk memperbesar kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, industri halal ditegaskannya telah menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Dradjad menyebut rantai nilai halal berkontribusi hampir 25% terhadap PDB, atau sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV-2025.

Kinerja ekspor produk halal juga menunjukkan pertumbuhan. Sepanjang 2025, ekspor produk halal tumbuh 23% menjadi US\$63,4 miliar.

Menurut Dradjad, ekosistem industri halal Indonesia turut diperkuat oleh keberadaan 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk. Indonesia juga memiliki 39 negara mitra yang telah melakukan pengakuan bersama atau mutual recognition atas sertifikasi halal, serta empat kawasan industri halal.

"Jadi sebenarnya banyak potensi yang sudah kita mulai wujudkan," pungkasnya.

Survei Bloomberg: Ekonomi RI Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Rabu, 14 Oktober 2026 11:54 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/124546/survei-bloomberg-ekonomi-ri-tumbuh-5-2-tahun-ini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Jelang kuartal terakhir tahun ini, kondisi ekonomi Indonesia masih diliputi pelemahan daya beli yang berpotensi memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi. Namun, belanja yang cukup masif dari pemerintah masih menjadi salah satu penopang ekonomi domestik.

Berdasarkan survei Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 4,9% pada kuartal IV-2026. Angka ini naik dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,86%.

Alhasil, sepanjang 2026, pertumbuhan ekonomi Nusantara diperkirakan mencapai 5,2%. Lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, 5,11%.

Dari sisi produksi, indikator itu sudah tergambar dari capaian aktivitas manufaktur yang kembali masuk ke zona ekspansi, serta adanya surplus perdagangan. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September.

Sementara itu, surplus perdagangan Agustus mencapai US\$3,55 miliar, meningkat dari US\$1,22 miliar pada periode sebelumnya. Ekspor juga tercatat tumbuh 6,72% secara tahunan, sedangkan pertumbuhan impor melambat dari 27,02% menjadi hanya 19,09%.

Pertumbuhan ekspor itu masih ditopang oleh sektor non-migas yang meningkat 7,23% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor migas justru berkontraksi 5,1% yoy. Secara bulanan, ekspor naik 1,51%, terutama didorong lonjakan ekspor CPO alias minyak sawit, sebesar 15,51% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Begitu juga dengan ekspor nikel dan logam mulia yang ikut melonjak masing-masing 93,87% mom dan 56,69% mtm. Akan tetapi, kontribusi ini sebenarnya tidak ditopang oleh meningkatnya volume ekspor, melainkan dari adanya kenaikan harga komoditas global.

Permintaan Lesu

Namun, dari sisi permintaan, indikator konsumen mengirim sinyal sebaliknya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September berada di level 118,1, turun dari 118,5 pada bulan sebelumnya.

Penurunannya memang tipis, tapi jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat bahwa kelompok berpengeluaran rendah (Rp1-2 juta per bulan) sedang tertekan, dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di level pesimis 93,2, setelah turun 1,8 poin. Bagi kelompok ini, tak cuma pesimis terhadap kondisi ekonomi, tapi juga kian pesimis terkait kondisi penghasilan saat ini, yakni 99,9 turun dari 102,6.

Pada bulan yang sama, penjualan mobil domestik turun dari 81,756 unit menjadi 79.538 unit, atau sekitar 2,7% mtm. Penurunan penjualan kendaraan ini juga sejalan dengan adanya penurunan keyakinan terhadap penghasilan saat ini dari kelompok pengeluaran menengah Rp3,1-Rp4 juta. Ditambah, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) merosot di hampir semua kelompok pengeluaran.

Indeks pembelian barang tahan lama (IPDG) merosot di semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok di atas Rp5 juta. (Bank Indonesia)

Memang, data Penjualan Riil mengalami kenaikan. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 1,3% yoy pada Agustus. Naik dari pertumbuhan Juli sebesar 1,1%. Sedangkan, secara bulanan indeks total juga naik 1,7 poin dari 224,9 jadi 226,5.

Tapi perolehan ini datang dari membaiknya penjualan di kelompok barang yang sebelumnya mengalami kontraksi. Seperti, Peralatan Informasi dan Komunikasi yang cukup signifikan.

Sementara, sebagian besar kelompok barang masih mencatat kontraksi. Seperti Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkontraksi 5,7%, diikuti Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya berkontraksi 5,7%. Bahkan, kelompok Sandang berkontraksi paling dalam, sebesar 12,4% secara tahunan, dan merosot 15,2 poin secara bulanan.

Kondisi Keuangan Konsumen

Dompet konsumen juga terlihat kembang kempis. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik menjadi 74,9%, dari 74,2%. Sementara itu, rasio tabungan pada setiap kelompok pengeluaran tercatat turun, bahkan pada kelompok pengeluaran tinggi yang di atas Rp5 juta per bulan.

Selain itu, keyakinan konsumen terkait penghasilan juga memburuk, kompak di semua kelompok tingkat pendidikan. Keyakinan kelompok dengan pendidikan sarjana anjlok paling dalam yakni -8,1 poin, disusul pascasarjana turun -7,5 poin, lalu akademi/diploma turun -6,8 poin, dan SMA turun -2,7 poin.

Sehingga, meskipun indikator ekonomi secara agregat masih mencatat pertumbuhan, tapi kondisi rumah tangga berkata sebaliknya. Daya beli tergerus, keyakinan memudar. Kondisi ini diperburuk dengan inflasi yang menghangat naik jadi 3,28%, dari sebelumnya 3,19%.

Survei Bloomberg memperkirakan inflasi akan kembali naik pada kuartal IV-2026 jadi 3,4% yoy, naik dari proyeksi sebelumnya 3,2%. Di tengah kondisi ini, pelemahan daya beli berpotensi terus berlanjut dan menahan pertumbuhan ekonomi RI.

Belanja Pemerintah

Di tengah perlambatan ini, pemerintah menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi. Mengacu data BPS, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan di kuartal II-2026, di saat konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 5,06%. Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah jadi salah satu sumber dorongan yang kuat

Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026, belanja pemerintah sudah tumbuh 29% menjadi Rp1.791,5 triliun. Konsumsi itu terdiri dari Rp912,4 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp879,1 triliun non-K/L.

Belanja K/L tercatat bahwa, sebesar Rp259 triliun untuk belanja pegawai (+21,7% yoy), Rp389 triliun (+67,5% yoy) untuk belanja barang, dan sebesar Rp159,8 triliun (+14,3%) untuk belanja modal.

Namun, untuk belanja bantuan sosial kenaikannya tidak sebesar itu. Belanja bansos sepanjang tahun ini hanya naik 3,4%, menjadi Rp104,5 triliun dari periode sama tahun lalu Rp101,1 triliun.

Sementara, untuk belanja non-K/L ikut naik 25,08% dari Rp702,8 triliun di periode sama tahun lalu jadi Rp879,1 triliun. Sedangkan, belanja subsidi ikut naik dari Rp149,4 triliun jadi Rp177,1 triliun.

Belanja pemerintah memang instrumen penting dalam menjaga momentum. Tapi, pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan tidak bisa selamanya bergantung pada percepatan belanja pemerintah.

Peran APBN seharusnya melampaui dari sekarang yang dominan sebagai penopang permintaan atau konsumsi jangka pendek menjadi katalis investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Suahasil Waspadai Risiko Fiskal Akibat Penuaan Penduduk

Rabu, 14 Oktober 2026 10:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124537/suahasil-waspadai-risiko-fiskal-akibat-penuaan-penduduk/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyoroti pentingnya investasi jangka panjang pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi tantangan penuaan penduduk (aging population) di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan dalam World Bank Group Closed-Door Ministerial Roundtable dengan tema "Transforming Demographic Transition into Human Capital Gains and Job Creation" di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).

Jelasnya Bendahara Negara RI tersebut mengatakan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 284 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 325 juta jiwa dalam 20 tahun mendatang.

Namun, menurutnya, tantangan utama bukan sekadar pertumbuhan jumlah penduduk, melainkan peningkatan kualitas SDM dan perubahan struktur usia penduduk.

"Persoalannya bukan pada jumlah penduduk, melainkan kualitas penduduk. Kita tidak bisa hanya berharap kualitas tersebut akan meningkat dengan sendirinya. Kita harus berinvestasi untuk meningkatkannya," kata Suahasil mengutip dalam keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).

Lebih lanjut, ia menuturkan, sekitar 12% penduduk Indonesia saat ini berusia 60 tahun ke atas, sedangkan hampir 8% berusia 65 tahun ke atas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya persiapan menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

Menurut Suahasil, investasi SDM perlu dilakukan sejak sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan, hingga seseorang memasuki dunia kerja.

"Untuk memperoleh manfaat bonus demografi kedua (silver dividend), kita harus berinvestasi pada kualitas SDM jauh sebelum seseorang memasuki usia lanjut, bahkan sejak sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan, hingga memasuki dunia kerja," jelasnya.

Dia juga mengingatkan risiko fiskal apabila penuaan penduduk tidak diimbangi peningkatan produktivitas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja negara sekaligus menekan penerimaan negara.

Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah perlu menetapkan prioritas belanja secara cermat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan investasi jangka panjang.

Dengan investasi SDM yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan peluang dari transisi demografi untuk meningkatkan produktivitas penduduk, sekaligus memitigasi risiko fiskal akibat penuaan penduduk.

Mayoritas Pangan Kembali Beterbangan, Beras-Cabai Susah Turun

Rabu, 14 Oktober 2026 12:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124545/mayoritas-pangan-kembali-beterbangan-beras-cabai-susah-turun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas rata-rata harga komoditas pangan nasional pada hari ini, Rabu (14/10/2026) kembali mengalami kenaikan, seperti beras, cabai-cabaian, bawang, hingga daging sapi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 10.00 WIB, harga beras kualitas bawah I naik Rp600 atau 4,03% menjadi Rp15.500/kg. Begitu juga beras kualitas bawah II naik Rp500 atau 3,4% menjadi Rp15.200/kg.

Kemudian, harga beras kualitas medium I naik Rp200 atau 1,2% menjadi Rp16.800/kg. Beras kualitas medium II juga naik Rp350 atau 2,13% menjadi Rp16.750/kg. Hanya beras kualitas super I turun Rp200 atau 1,11% menjadi Rp17.750/kg.

Sementara itu, beras kualitas super II tidak berubah dan tetap Rp17.350/kg.

Lalu, harga cabai merah besar naik Rp6.400 atau 9,14% menjadi Rp76.400/kg. Harga cabai merah keriting juga naik Rp3.400 atau 4,08% menjadi Rp86.800/kg, diikuti harga cabai rawit merah naik Rp2.750 atau 2,7% menjadi Rp104.750/kg.

Hanya harga cabai rawit hijau turun Rp1.350 atau 1,79% menjadi Rp74.200/kg. Telur ayam ras segar juga turun Rp700 atau 2,35% menjadi Rp29.050/kg.

Harga daging sapi kualitas 1 naik Rp50 atau 0,03% menjadi Rp152.550/kg. Daging sapi kualitas 2 juga naik Rp1.200 atau 0,84% menjadi Rp144.650/kg. Tetapi, daging ayam ras segar turun Rp1.050 atau 2,53% menjadi Rp40.400/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang naik Rp2.400 atau 6,5% menjadi Rp39.350/kg. Begitu juga bawang putih ukuran sedang yang naik Rp1.150 atau 2,96% menjadi Rp39.950/kg.

Seluruh jenis minyak mengalami kenaikan. Minyak goreng curah naik Rp550 atau 2,7% menjadi Rp20.950/kg. Minyak goreng kemasan bermerek 1 juga naik Rp600 atau 2,46% menjadi Rp24.950/kg. Sementara, minyak goreng kemasan bermerek 2 naik Rp400 atau 1,69% menjadi Rp24.000/kg.

Terakhir, harga gula pasir kualitas premium mengalami kenaikan Rp250 atau 1,22% menjadi Rp20.700/kg. Gula pasir lokal juga naik Rp300 atau 1,56% menjadi Rp19.500/kg.

BI Dorong BPS Terbitkan PDB Syariah, Kontribusi Halal Value Chain 24,9%

Rabu, 14 Oktober 2026 15:47 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-dorong-bps-terbitkan-pdb-syariah-kontribusi-halal-value-chain-249>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun dan menerbitkan data produk domestik bruto (PDB) syariah.

Menurutnya, ketersediaan data tersebut dinilai penting untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional sekaligus menjadi dasar pengembangan sektor tersebut.

Pasalnya, rantai nilai halal atau halal value chain disebut telah menyumbang sekitar 24,9% terhadap PDB nasional. Namun, angka tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui data statistik yang terukur.

"Kayaknya memang BPS harus segera menerbitkan PDB syariah, karena tadi juga ada kata-kata bahwa rantai ekonomi syariah 24,9% dari PDB. Nah ini kan kita perlu konfirmasi, karena di Indonesia lembaga yang mengeluarkan data itu BPS," ujar Destry dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Destry mengatakan, BI siap mendukung penyusunan data tersebut bersama BPS dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, ketersediaan data PDB syariah akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

"Mari kami bikin bersama-sama, BPS sebagai lead-nya, dari kami (Bank Indonesia), kami siap untuk men-support dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lain yang terkait," katanya.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga dinilai berpotensi menarik minat investor internasional karena memiliki keterkaitan dengan aset dasar serta dapat mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, Destry menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan komunitas.

Penguatan data statistik, perluasan akses pasar, serta inovasi produk keuangan syariah diharapkan dapat memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut menurutnya, pengukuran kontribusi ekonomi syariah secara lebih terstruktur diperlukan agar pengembangan sektor tersebut dapat berjalan lebih terfokus, termasuk dalam memperkuat rantai nilai halal di Indonesia.

Destry menilai, pengembangan ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berlandaskan prinsip inklusivitas dan keadilan, ekonomi syariah

juga mengedepankan keberlanjutan sehingga potensinya tidak terbatas pada negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah kini menjadi perhatian sejumlah negara di kawasan ASEAN, termasuk Filipina dan Thailand. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa peluang ekonomi dan keuangan syariah semakin terbuka di pasar global.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025–2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi Islam. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat pertama dunia untuk sektor fesyen Muslim.

Di sisi lain, dalam pengembangan rantai nilai halal, Destry menyebut, sektor halal value chain tumbuh 5,5% pada kuartal II-2026. Untuk itu BI mendorong penguatan ekosistem halal melalui berbagai kegiatan, termasuk ISEF yang mempertemukan pelaku UMKM, pembeli, investor, serta pemangku kepentingan industri halal.

Di sisi lain, BI juga mendorong pengembangan keuangan syariah melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan. Destry menyebut Pemerintah telah menerbitkan green sukuk Indonesia sejak 2018 dengan nilai mencapai US\$ 7,7 miliar di pasar global. Sementara itu, penerbitan green sukuk di pasar domestik mencapai Rp 108,9 triliun.

Di Hadapan Investor Asing di Thailand, Suahasil Tegaskan Kredibilitas Fiskal RI

Rabu, 14 Oktober 2026 14:06 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/di-hadapan-investor-asing-di-thailand-suahasil-tegaskan-kredibilitas-fiskal-ri>

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas makroekonomi Indonesia di hadapan investor asing dalam agenda Investor Meeting yang digelar Deutsche Bank di Thailand, Selasa (13/10/2026).

Dalam Investor Meeting Kemenkeu with Bank Indonesia & Danantara tersebut, Suahasil menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap mendukung kepercayaan investor. Hal ini ditopang oleh kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas makroekonomi, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

"Kebijakan fiskal harus mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik, perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan," jelas Suahasil dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2026).

Pemerintah juga berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Suahasil menyebut pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif.

Dari sisi makroekonomi, Suahasil menjelaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih terjaga. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,3% pada akhir September 2026,

sedangkan indeks manufaktur atau Purchasing Managers' Index (PMI) kembali berada di zona ekspansi pada level 52,4 pada September 2026.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus, yang mencerminkan perkembangan positif pada sektor eksternal Indonesia.

Capaian tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap perubahan kondisi global.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati risiko, antara lain fragmentasi perdagangan dunia, volatilitas harga komoditas, dan tingginya suku bunga global, yang dapat memengaruhi perekonomian domestik.

Suhasil menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin, terukur, dan adaptif terhadap berbagai risiko.

Lebih lanjut, pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dengan investasi diharapkan tumbuh setidaknya 7%.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong sinergi kebijakan fiskal, peran Danantara dalam investasi strategis, serta partisipasi sektor swasta.

Bangun Kepercayaan Investor Jangka Panjang

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah tidak sekadar berupaya menarik investasi masuk ke Indonesia.

Pemerintah juga ingin membangun kepercayaan investor yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Suminto, terdapat sejumlah langkah yang terus dilakukan pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor.

Pertama, memperkuat kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Pemerintah juga secara berkala mengomunikasikan kredibilitas dan kinerja perekonomian serta arah kebijakan secara terpadu kepada pelaku pasar dan investor.

Kedua, pemerintah menjaga disiplin dan integritas pasar untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid.

Ketiga, pemerintah terus mendorong pendalaman pasar keuangan, terutama melalui penguatan peran investor institusional dan ritel domestik.

Langkah ini diharapkan membuat pasar keuangan Indonesia tidak hanya lebih aktif dan likuid, tetapi juga lebih tangguh menghadapi dinamika pasar keuangan global.

Melalui pengelolaan APBN yang kredibel, fundamental makroekonomi yang terjaga, serta penguatan ekosistem investasi, pemerintah berharap dapat memperluas partisipasi investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan dan keberlanjutan fiskal sekaligus menciptakan peluang investasi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Tarik Investor Global, Gubernur BI Dorong Penciptaan Variasi Produk Keuangan Syariah

Rabu, 14 Oktober 2026 16:31 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/tarik-investor-global-gubernur-bi-dorong-penciptaan-variasi-produk-keuangan-syariah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang lebih bervariasi untuk menangkap besarnya permintaan investor asing dari pasar global.

Menurut Destry, instrumen keuangan syariah seperti sukuk memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena diminati investor dari berbagai negara, termasuk negara-negara non muslim seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.

Hal ini tercermin dari penerbitan Green Sukuk Indonesia yang telah dilakukan pemerintah sejak 2018. Hingga saat ini, nilai penerbitan Green Sukuk Indonesia telah mencapai US\$ 7,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga secara rutin menerbitkan sukuk global untuk memperluas akses ke pasar keuangan internasional.

"Bahwa yang beli itu (Sukuk) adalah banyak negara-negara di luar negara Muslim. Jadi Amerika, Eropa. Kenapa? Karena mereka melihat produk ini produk yang sustainable," ujar Destry dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JCC Senayan Jakarta, Rabu (14/10/2026)

Ia menilai, minat investor global terhadap sukuk menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengembangan instrumen keuangan syariah. Terlebih, produk keuangan syariah relatif stabil karena memiliki aset dasar atau underlying asset.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu daya tarik keuangan syariah di tengah pergeseran minat investor terhadap instrumen investasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Destry mengajak para pemangku kepentingan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), untuk bersama-sama merumuskan dan menciptakan produk keuangan syariah yang lebih beragam.

"Saya mengajak kepada para tokoh-tokoh di sini, ada Bapak-Bapak semua, MUI, DSN, mari kita bersama-sama merumuskan agar kita bisa menciptakan produk-produk keuangan syariah yang lebih bervariasi, karena sebenarnya demand-nya itu strong sekali, permintaannya sangat banyak sekali," katanya.

Lebih lanjut, Destry menyampaikan, potensi pengembangan keuangan syariah juga terlihat di pasar domestik. Nilai penerbitan Green Sukuk Indonesia di pasar domestik telah mencapai Rp 108,9 triliun, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total obligasi yang diterbitkan pemerintah.

Menurutnya peluang untuk memperbesar pasar sukuk domestik masih terbuka lebar. Untuk itu Destry mendorong pengembangan variasi produk keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensi permintaan tersebut.

Dengan semakin beragamnya instrumen yang tersedia, pasar keuangan syariah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak investor, baik di dalam maupun luar negeri.

IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1% hingga 2027

Rabu, 14 Oktober 2026 09:59 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/imf-proyeksikan-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-hingga-2027>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada 2026 dan 2027. Proyeksi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan stabil dalam dua tahun tersebut.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 5,1%. Angka tersebut sama dengan proyeksi pertumbuhan pada 2027.

Di sisi lain, IMF memperkirakan tekanan harga konsumen meningkat pada 2026. Inflasi Indonesia diproyeksikan mencapai 3,3% pada 2026, naik dibandingkan 1,9% pada 2025. Namun, inflasi diperkirakan kembali melandai menjadi 2,8% pada 2027.

Dari sisi eksternal, IMF memperkirakan neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,6% dari PDB pada 2026. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan defisit 0,1% dari PDB pada 2025.

Pada 2027, defisit transaksi berjalan diproyeksikan menyempit menjadi 1,0% dari PDB.

Sementara itu, tingkat pengangguran Indonesia diperkirakan turun dari 4,9% pada 2025 menjadi 4,7% pada 2026 dan bertahan pada level tersebut pada 2027.

Di tingkat global, IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,1% pada 2026 dan meningkat menjadi 3,4% pada 2027. Proyeksi pertumbuhan global pada 2026 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya, sedangkan proyeksi 2027 mengalami revisi naik moderat dibandingkan laporan April 2026.

Meski demikian, IMF mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi global menghadapi tekanan yang semakin besar. Perang di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan masih membayangi aktivitas ekonomi, sementara peningkatan investasi pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu penopang permintaan global.

Menurut IMF, dampak berbagai tekanan tersebut tidak merata antarnegara. Negara yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok teknologi dan relatif terlindungi dari guncangan energi cenderung memiliki penyangga pertumbuhan yang lebih baik.

Sebaliknya, negara pengimpor energi yang memiliki keterlibatan terbatas dalam rantai nilai teknologi menghadapi risiko kenaikan biaya impor, tekanan nilai tukar, dan pelemahan pendapatan riil.

"Pemerintah perlu menerapkan rencana penyesuaian fiskal yang kredibel dengan mengombinasikan peningkatan penerimaan negara dan rasionalisasi belanja, yang didukung oleh perbaikan kelembagaan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (14/10/2026).

IMF juga memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat pada 2026 dan stabil pada 2027. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh tekanan tarif, penyesuaian rantai produksi, serta kuatnya perdagangan yang berkaitan dengan teknologi.

Perangkat Desa/ Kelurahan Kunci Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran

Rabu, 14 Oktober 2026

Penulis : Henik/Yuli_DiskominfoSragen, Editor : Ul, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/perangkat-desa-kelurahan-kunci-penanggulangan-kemiskinan-tepat-sasaran/>

SRAGEN – Perangkat desa dan kelurahan menjadi salah satu kunci agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Karenanya, mereka diminta untuk lebih mengenali warganya, serta kriteria bantuan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sragen Suroto, saat dialog langsung dengan perangkat wilayah di Kelurahan Plumbungan, Puro, Kroyo, dan Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Senin (12/10/2026).

Suroto mengatakan, dialog tersebut menjadi sarana memperdalam pemahaman perangkat wilayah mengenai sasaran, persyaratan, dan mekanisme program pemerintah daerah sekaligus menggali kendala pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu program yang dibahas, ialah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelompok yang memenuhi kriteria, termasuk masyarakat kurang mampu, veteran, guru berpenghasilan rendah, dan penyandang disabilitas. Dia menekankan pentingnya pemahaman mengenai kriteria penerima, agar informasi yang disampaikan kepada warga tidak keliru.

“Khusus masyarakat kurang mampu, sasaran pembebasan PBB adalah warga yang masuk desil 1 sampai 3,” jelas Suroto.

Selain itu, Suroto menjelaskan kemudahan persyaratan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Dandan Omah. Persyaratan sertifikat tanah kini tidak lagi diwajibkan, melainkan dapat diganti dengan surat pernyataan pemilik tanah, yang menyatakan kesediaan lahannya ditempati calon penerima bantuan.

“Kami ingin memastikan tidak ada hambatan administrasi, yang menghalangi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” tegasnya.

Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kegiatan tersebut, dengan memperkuat sosialisasi dan pemahaman program pemerintah daerah kepada desa-desa lainnya. Pengarahan rutin kepada kepala desa, termasuk melalui apel pagi, akan dimanfaatkan untuk memastikan informasi dapat diteruskan hingga tingkat RT.

“Harapannya, perangkat desa semakin memahami program pemerintah daerah, sehingga informasi dan manfaatnya bisa tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Salatiga Tuan Rumah Porprov pada 12 Cabor, Bidik Prestasi dan Dongkrak Ekonomi Lokal

Rabu, 14 Oktober 2026

Penulis : Kontributor Salatiga, Editor : UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/salatiga-tuan-rumah-porprov-pada-12-cabor-bidik-prestasi-dan-dongkrak-ekonomi-lokal/>

SALATIGA — Dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 pada 12 cabang olahraga (cabor), Salatiga berupaya menjadikan ajang olahraga ini sebagai momentum untuk memperkenalkan potensi daerah, sekaligus membuka peluang usaha bagi UMKM.

Hal itu disampaikan Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, saat mengukuhkan dan melepas kontingen Porprov Kota Salatiga, di Halaman Pemkot, Senin (12/10/2026). Robby berpesan agar atlet, pelatih, dan ofisial terus menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, serta tampil optimal, demi mengharumkan nama Kota Salatiga.

“Jagalah kesehatan, fokus pada pertandingan, dan yang paling penting bertandinglelah secara optimal dengan jiwa sportif, untuk membawa nama Kota Salatiga yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Lebih dari sekadar kompetisi, Robby mendorong penyelenggaraan Porprov turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dia meminta pelaksanaan pertandingan di Salatiga, dikolaborasikan dengan pelaku UMKM agar kehadiran atlet, ofisial, dan pengunjung dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pertandingan.

“Saya menyarankan agar pusat-pusat pelaksanaan cabang olahraga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, untuk mengoordinasikan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, kualitas makanan dan layanan dapat terjaga. Tentunya, event ini akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah karena ada multiplier effect-nya,” ujarnya.

Ketua Umum KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto, melaporkan, Salatiga menyiapkan kontingen untuk mengikuti 35 cabang olahraga dengan kekuatan 315 atlet, 75 ofisial kampus, 21 ofisial nonkampus, serta dukungan lebih dari 200 sukarelawan. Sementara itu, kontingen Peparprov terdiri atas 26 atlet dan 13 ofisial, yang dijadwalkan bertanding di Kota Surakarta pada November mendatang.

Adapun 12 cabang olahraga yang digelar di Salatiga meliputi anggar, binaraga, catur, gateball, judo dan sambo, kempo, kick boxing, menembak, muaythai, taekwondo, serta wushu.

Porprov Jawa Tengah XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19–31 Oktober 2026. Melalui momentum ini, Salatiga diharapkan tidak hanya mencetak prestasi olahraga, tetapi juga menghadirkan perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku UMKM lokal.

“Saya dari Cabor Catur. Ini mumpung di Salatiga, saya akan lebih giat dalam mempersiapkan dan semoga medali bisa saya dapatkan,” harap atlet Catur dari Salatiga, Blazing.

Bupati Kendal Dorong Ekonomi Kreatif untuk Bangkitkan Pariwisata Daerah

Rabu, 14 Oktober 2026

Penulis: Diskominfo Kendal/Heri, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-kendal-dorong-ekonomi-kreatif-untuk-bangkitkan-pariwisata-daerah/>

KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, pada Sosialisasi Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, di Aula Kecamatan Kendal, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, Kabupaten Kendal memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari kekayaan seni dan budaya, destinasi wisata alam, kuliner khas, hingga kreativitas masyarakat dalam menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah.

“Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendukung kebangkitan pariwisata. Melalui kreativitas dan inovasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi produk maupun jasa yang memiliki daya tarik dan nilai ekonomi, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas bupati.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Mardi Edi Susilo menyampaikan, hingga tahun 2026, terdapat 380 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal, yang melibatkan 196 tenaga kerja laki-laki dan 184 tenaga kerja perempuan.

Namun, lanjutnya, dari total 380 pelaku ekonomi kreatif tersebut, baru 26 usaha yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya, sedangkan 354 usaha lainnya belum terdaftar.

“Kondisi ini menjadi perhatian, agar para pelaku ekonomi kreatif semakin memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk dan karya yang dihasilkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pembina Forum Wirausaha Pemuda Jawa Tengah, Setia Teguh Yuana menyampaikan, kunci utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif adalah bagaimana bisa mengubah pola pikir (mindset), serta mengutamakan kerja sama secara kolektif.

“Kesuksesan sebuah usaha tidak dapat dicapai secara individu, melainkan harus melalui kolaborasi bersama. Maka, pelaku ekonomi kreatif di Kendal harus bisa membangun kolaborasi dan melakukan aksi nyata,” ujar Setia.

Dia mencontohkan, aksi nyata tersebut dapat diwujudkan dengan berkolaborasi membuat penyelenggaraan event Pasar Kreatif Kendal (Pasar Kerakal), yang di dalamnya terdapat berbagai hasil kreativitas, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat untuk melihat dan membelinya.

Inflasi Panas, The Fed Diprediksi Naikkan Bunga 50 Bps Desember

Kamis, 15 Oktober 2026 10:40 WIB

Victor Swezey

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124678/inflasi-panas-the-fed-diprediksi-naikkan-bunga-50-bps-desember/2>

Bloomberg, Seorang analis ekonomi yang sejak awal memprediksi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) terbaru kini memperkirakan kenaikan yang lebih besar, yakni sebesar 50 basis poin (bps), dapat menjadi pilihan pada Desember.

Jason Schenker, Presiden Prestige Economics, menyatakan tidak melihat kemungkinan bank sentral AS tersebut menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan bulan ini. Sebaliknya, ia menilai The Fed mungkin akan memberi waktu agar dampak kenaikan suku bunga pada September dapat terlihat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kenaikan yang lebih besar pada Desember.

“Ketika memasuki Desember, jika kenaikan suku bunga pada September belum berhasil menekan inflasi secara lebih signifikan, mereka mungkin memilih kenaikan sebesar 50 basis poin, bukan 25 basis poin, agar dampaknya lebih besar,” kata Schenker.

Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh mengarahkan The Fed kembali ke jalur kenaikan suku bunga pada bulan lalu, untuk pertama kalinya sejak 2023, dalam upaya meredam inflasi yang terus meningkat.

Meski banyak ekonom telah memperkirakan langkah tersebut pada pekan-pekan menjelang pertemuan September, Schenker menjadi ekonom pertama yang disurvei Bloomberg dan memprediksi kenaikan suku bunga itu pada Juni. Prestige Economics, tempat Schenker menyusun proyeksi ekonomi, secara konsisten masuk dalam jajaran teratas analisis mata uang asing dalam pemeringkatan Bloomberg.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan di kalangan trader dan ekonom berpusat pada kemungkinan apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada bulan ini atau menundanya hingga pertemuan Desember. Pasar swap kini sepenuhnya memperhitungkan kenaikan sebesar 25 bps pada Desember.

Peluang kenaikan suku bunga pada Oktober sempat melonjak di atas 50% di pasar kontrak berjangka sebelum kembali turun pada Rabu. Pergerakan itu terjadi setelah data inflasi indeks harga konsumen (IHK) menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan ekonom, terutama akibat lonjakan biaya bahan bakar.

Namun, Schenker menilai The Fed belum memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan pada pertemuan Oktober. Pasalnya, sebagian besar data yang dirilis pada Rabu dikumpulkan sebelum bank sentral menaikkan suku bunga pada September.

“Menurut saya, belum cukup banyak data yang tersedia untuk memberi mereka keyakinan yang dibutuhkan,” kata Schenker.

Sementara itu, di antara pertemuan Oktober dan Desember, para pejabat The Fed akan menerima dua laporan ketenagakerjaan tambahan serta satu laporan IHK yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan berikutnya.

“Waktunya hanya enam pekan, tetapi mereka akan memperoleh jauh lebih banyak data,” kata Schenker. “Jika mereka melihat bahwa kenaikan 25 basis poin tidak memberikan dampak apa pun, saya pikir mereka mungkin akan menerapkan kenaikan sebesar 50 basis poin.”

Schenker memperkirakan kenaikan yang lebih besar tersebut kemungkinan akan diikuti jeda kenaikan suku bunga pada awal tahun depan. Sebaliknya, jika The Fed hanya menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember, kenaikan lanjutan pada kuartal pertama tahun depan akan menjadi kemungkinan besar.

Inflasi AS Melonjak ke Level Tertinggi dalam 5 Bulan

Kamis, 15 Oktober 2026 06:20 WIB

Jeffrey Sparshott

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124648/inflasi-as-melonjak-ke-level-tertinggi-dalam-5-bulan/2>

Bloomberg, Harga konsumen di Amerika Serikat (AS) pada September naik dengan laju tercepat dalam lima bulan terakhir. Sementara itu, indikator tekanan harga yang mendasari inflasi meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sehingga semakin membebani anggaran rumah tangga menjelang pemilihan paruh waktu pada November.

Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya, didorong oleh lonjakan biaya bahan bakar, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Rabu (14/10). Sementara itu, indikator utama tekanan harga yang mendasari inflasi, yang tidak mencakup harga pangan dan energi, naik 0,3%.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi—terutama kenaikan harga yang menggerus pendapatan pekerja—akan tetap menjadi perhatian utama pemilih menjelang akhir masa kampanye pemilihan paruh waktu. Kenaikan harga yang meluas juga memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan kembali menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, meskipun bank sentral tersebut memutuskan untuk menahan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya.

“Inflasi benar-benar menggerus seluruh pendapatan yang diterima warga Amerika,” kata Heather Long, kepala ekonom Navy Federal Credit Union, dalam sebuah catatan. “Sementara itu, Federal Reserve belum melihat kemajuan dalam menekan inflasi,” dan kenaikan harga bahan bakar “mulai merembet ke sektor-sektor lain.”

Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik, sementara indeks S&P 500 melemah setelah laporan tersebut dirilis. Investor meningkatkan perkiraan peluang kenaikan suku bunga pada Oktober menjadi sekitar 45%.

Pada September, The Fed merespons kembali meningkatnya tekanan harga dengan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023. Sejak saat itu, sejumlah pejabat tinggi bank sentral mengisyaratkan bahwa mereka memiliki waktu untuk mengevaluasi data ekonomi terbaru sebelum mengambil tindakan lanjutan. Meski demikian, berdasarkan proyeksi terbaru, median perkiraan para pejabat masih menunjukkan adanya satu kali kenaikan suku bunga lagi tahun ini.

Laporan yang dirilis pada Rabu tersebut menunjukkan IHK naik 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan IHK inti meningkat 2,6%. Data ini menjadi laporan terakhir mengenai harga konsumen sebelum pertemuan kebijakan The Fed pada 27–28 Oktober. Gubernur The Fed Kevin Warsh dijadwalkan berbicara pada Kamis malam waktu New York dalam rangkaian pertemuan IMF di Bangkok.

Sejumlah survei menunjukkan rumah tangga AS semakin frustrasi akibat memburuknya keterjangkauan biaya hidup, seiring kenaikan harga yang melampaui pertumbuhan upah. Laporan terpisah yang dirilis pada Rabu menunjukkan rata-rata upah per jam setelah disesuaikan dengan inflasi turun pada

September dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi yang keenam secara berturut-turut.

Kekhawatiran Utama

Data IHK menunjukkan harga bensin, yang menjadi indikator harga harian bagi banyak warga, melonjak 9,1% pada September dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak pecahnya perang Iran pada Maret yang memicu lonjakan harga bahan bakar. Sementara itu, harga jasa perawatan medis naik 0,3%. Berdasarkan jajak pendapat KFF yang dirilis bulan ini, biaya layanan kesehatan dan harga bensin sama-sama menjadi kekhawatiran ekonomi utama pemilih menjelang pemilihan paruh waktu.

Sewa ekuivalen pemilik rumah (owners' equivalent rent), indikator biaya perumahan yang merupakan komponen terbesar dalam IHK, terus meningkat sebesar 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, harga bahan pangan sedikit turun, begitu pula harga obat-obatan resep.

Harga jasa secara luas, tidak termasuk energi dan sewa, mencatat kenaikan tajam selama dua bulan berturut-turut. Sementara itu, harga barang inti meningkat paling tinggi sejak Januari 2025, mencerminkan kenaikan yang cukup besar pada harga mobil bekas dan pakaian, serta lonjakan harga mainan yang mencapai rekor.

“Kami tentu sudah mengetahui bahwa harga energi dan bahan bakar akan melonjak. Namun, angka IHK inti yang tetap tinggi—menyusul kenaikan yang lebih kuat pada Agustus—menimbulkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga bahan bakar mungkin mulai diteruskan ke harga barang dan jasa lainnya,” kata Ben Ayers, ekonom senior di Nationwide.

Laporan tersebut juga menyoroti tekanan harga yang masih berlangsung akibat pembangunan pusat data. Harga perangkat lunak komputer dan aksesoris naik 28,4% dibandingkan setahun sebelumnya, mencatat rekor tertinggi. Sementara itu, harga komputer, perangkat periferal, dan asisten rumah pintar meningkat 9,7%, juga mencetak rekor.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu topik utama perdebatan para kandidat dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Tingkat pengangguran masih rendah, belanja konsumen tetap kuat, dan investasi bisnis turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak pemilih menyalahkan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump dan konflik Iran atas meningkatnya biaya hidup.

“Banyak kebijakan Trump membantu menekan inflasi, tetapi guncangan energi benar-benar menjadi cerita utama hari ini,” kata Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, kepada Fox Business. “Angka ini mengecewakan.”

Pada awal tahun ini, inflasi telah kembali mendekati level terendah sejak awal 2021. Namun, perang memicu lonjakan harga bensin, solar, dan berbagai komoditas lainnya, sehingga mendorong inflasi naik dan pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman.

Dampak kenaikan harga solar sulit dipisahkan secara khusus dalam perhitungan IHK. Kenaikan biaya bahan bakar biasanya pertama-tama memengaruhi jasa transportasi, kemudian merambat ke harga pangan, barang tahan lama seperti furnitur, serta produk lain yang membutuhkan biaya pengiriman lebih tinggi. Namun, dampak tersebut dapat muncul dengan jeda waktu.

Secara terpisah, Badan Jaminan Sosial AS pada Rabu mengumumkan bahwa penerima manfaat akan memperoleh penyesuaian biaya hidup sebesar 3,6% pada 2027, kenaikan terbesar dalam empat tahun. Besaran penyesuaian tersebut dihitung berdasarkan data IHK pada kuartal ketiga.

Simpanan Bank di India Cetak Rekor, Kenaikan Bunga dan Kredit Membayangi

Kamis, 15 Oktober 2026 19:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/simpanan-bank-di-india-cetak-rekor-kenaikan-bunga-dan-kredit-membayangi>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Simpanan sistem perbankan India mencapai rekor tertinggi sekitar 284 triliun rupee atau setara US\$ 2,99 triliun pada paruh kedua September 2026. Data bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI) yang dirilis pada Kamis (15/10/2026) menunjukkan kenaikan simpanan tersebut terjadi di tengah upaya perbankan memperkuat sumber pendanaan.

Simpanan perbankan India meningkat sebesar 21,67 triliun rupee dalam enam bulan pertama tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Sebagian besar kenaikan tersebut terjadi pada Juni hingga Agustus, ketika bank sentral menyediakan fasilitas swap dengan tingkat diskonto untuk menarik aliran dana dalam dolar AS.

Berdasarkan data RBI, simpanan sistem perbankan melonjak secara kumulatif sebesar 20 triliun rupee pada periode 16 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada Juni, RBI mengumumkan fasilitas swap dengan tingkat diskonto untuk menarik simpanan valuta asing. Bank sentral juga mendorong perbankan menghimpun dana simpanan dengan biaya yang lebih murah.

Skema tersebut menghasilkan arus dana masuk sekitar US\$ 133 miliar. Fasilitas penghimpunan dana itu kemudian ditutup pada 31 Agustus, atau satu bulan lebih cepat dari jadwal semula.

Selain kebijakan bank sentral, peningkatan simpanan juga didorong oleh upaya perbankan membangun penyangga pendanaan menjelang akhir kuartal. Dalam periode dua mingguan yang berakhir pada 30 September, simpanan perbankan bertambah sebesar 7,73 triliun rupee.

Secara keseluruhan, simpanan sistem perbankan pada akhir September meningkat 8,4% dibandingkan posisi akhir Maret 2026.

CareEdge Ratings menyatakan persaingan dalam menghimpun simpanan masih terkendali, sementara sistem perbankan berada dalam kondisi likuiditas berlebih.

Namun, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan kenaikan suku bunga pada Oktober akan membatasi ruang penurunan bunga deposito berjangka untuk sementara waktu. Bahkan, bunga deposito berpotensi meningkat karena pertumbuhan kredit lebih cepat dibandingkan pertumbuhan simpanan, sementara surplus likuiditas perbankan menyusut.

“Dengan kenaikan suku bunga pada Oktober, penurunan lebih lanjut pada bunga deposito berjangka untuk saat ini tidak lagi dimungkinkan dan bunga tersebut kemungkinan akan naik. Pasalnya, bank perlu mendanai pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan simpanan, sementara surplus likuiditas menyusut,” tulis CareEdge Ratings dalam catatannya.

Norwegia Bakal Rombak Aturan Investasi Dana Jumbo US\$ 2,3 Triliun

Kamis, 15 Oktober 2026 16:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/norwegia-bakal-rombak-aturan-investasi-dana-jumbo-us-23-triliun>

KONTAN.CO.ID - OSLO. Norwegia bersiap merombak aturan etika investasi dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) senilai US\$ 2,3 triliun. Langkah ini menyusul polemik divestasi saham perusahaan Amerika Serikat (AS) yang sempat memicu protes pemerintahan Presiden Donald Trump.

Mengutip Reuters (15/10), perubahan aturan tersebut akan mengacu pada hasil kajian komisi bentukan pemerintah yang dijadwalkan diumumkan pada hari ini. Evaluasi dilakukan setelah parlemen Norwegia menangguhkan kebijakan divestasi berbasis etika sekitar setahun lalu.

Polemik bermula ketika dana investasi negara terbesar di dunia itu memutuskan melepas saham Caterpillar, produsen alat berat asal AS. Keputusan tersebut berkaitan dengan penggunaan bulldoser Caterpillar di Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Langkah itu menuai keberatan dari pemerintahan Trump. Beberapa pekan kemudian, parlemen Norwegia memutuskan menghentikan sementara divestasi berbasis pertimbangan etika hingga proses evaluasi rampung.

Meski demikian, pemerintah Norwegia membantah bahwa penangguhan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap tekanan Washington. Padahal, lebih dari separuh aset dana kekayaan negara Norwegia ditempatkan di pasar AS.

Sebelumnya, keputusan divestasi mengacu pada rekomendasi Council on Ethics atau Dewan Etika, lembaga independen yang mengawasi kepatuhan investasi terhadap prinsip etika. Rekomendasi tersebut kemudian diputuskan oleh dewan bank sentral Norwegia, yang umumnya mengikuti pandangan Dewan Etika.

Namun, sejak kebijakan ditangguhkan, seluruh rekomendasi dialihkan kepada Norges Bank Investment Management (NBIM) selaku pengelola dana. Selama periode tersebut, tidak ada divestasi berbasis etika yang dilakukan.

Menteri Keuangan Norwegia Jens Stoltenberg menegaskan, menjaga keberlangsungan dana investasi negara menjadi prioritas pemerintah. Maklum, hasil pengelolaan dana tersebut menopang sekitar seperempat belanja publik Norwegia.

"Dunia terus berubah dan rantai nilai semakin terintegrasi. Kini semakin sulit membedakan antara produk sipil dan produk militer," ujar Stoltenberg kepada Reuters, Rabu (14/10/2026).

Selain persoalan etika, pemerintah juga mencermati meningkatnya konsentrasi investasi pada sejumlah perusahaan teknologi raksasa AS, seperti Nvidia, Apple, dan Amazon.

Saat ini, hanya 10 perusahaan yang menguasai lebih dari 20% nilai portofolio saham dana tersebut. Kondisi ini membuat setiap keputusan investasi berpotensi membawa dampak yang semakin besar.

"Konsentrasi semacam ini berarti keputusan terhadap satu perusahaan dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya," kata Stoltenberg.

Mantan Sekretaris Jenderal NATO itu menekankan pentingnya menjaga diversifikasi investasi agar dana kekayaan negara Norwegia tetap tersebar luas.

Dengan demikian, perubahan aturan etika investasi menjadi persoalan sensitif bagi Norwegia. Pemerintah harus menyeimbangkan komitmen terhadap prinsip etika dengan kebutuhan menjaga stabilitas portofolio jumbo yang menjadi salah satu penopang utama keuangan negara.

IMF Proyeksikan Ekonomi Asia Melambat pada 2027, Waspada Dampak Perang Iran

Kamis, 15 Oktober 2026 12:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-proyeksikan-ekonomi-asia-melambat-pada-2027-waspada-dampak-perang-iran>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia akan melambat pada 2027.

Konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, potensi koreksi pada industri kecerdasan buatan (AI), serta kenaikan imbal hasil obligasi global menjadi sejumlah risiko yang membayangi prospek perekonomian kawasan tersebut.

Dalam laporan prospek ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang dirilis pada Kamis (15/10/2026), IMF juga memperingatkan bahwa ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) berpotensi membuat pasar keuangan Asia tetap bergejolak.

IMF mencatat, gejolak pasar keuangan meningkat seiring perubahan nilai tukar dan arus modal setelah terjadinya guncangan energi tahun ini.

“Nilai tukar dan arus modal menjadi lebih bergejolak sejak guncangan energi tahun ini,” tulis IMF dalam laporan yang diterbitkan di sela-sela pertemuan tahunan IMF di Bangkok, Thailand.

Lembaga tersebut menyebutkan, sejumlah negara berkembang di Asia mengalami tekanan depresiasi mata uang. Meskipun arus investasi asing yang masuk ke kawasan ini secara umum masih cukup kuat, tekanan terhadap pasar keuangan juga terlihat dari keluarnya sebagian investasi portofolio, termasuk dari saham teknologi Korea Selatan.

IMF memperkirakan kebijakan moneter AS akan kembali mengetat pada akhir tahun ini. Kondisi tersebut, ditambah tekanan fiskal di sebagian besar negara maju, berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di kawasan Asia dan Pasifik.

“Kebijakan moneter AS diperkirakan akan terus mengetat pada akhir tahun ini. Kombinasi pengetatan kebijakan moneter dan tekanan fiskal di sebagian besar negara maju kemungkinan akan terus memberikan tekanan kenaikan terhadap imbal hasil obligasi di seluruh kawasan Asia dan Pasifik,” tulis IMF.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia 2026 dan 2027

IMF memperkirakan ekonomi Asia tumbuh 4,8% pada 2026 dan 4,4% pada 2027. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan yang diterbitkan pada April lalu, tetapi tetap menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebesar 5% pada 2025.

Revisi proyeksi tersebut terutama mencerminkan dampak positif dari pesatnya perkembangan industri AI terhadap negara-negara maju di Asia. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara tersebut diperkirakan meningkat menjadi 3,2% pada 2026, dari 2,5% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, negara-negara berkembang di Asia masih menjadi motor utama pertumbuhan kawasan. Namun, pertumbuhan kelompok negara tersebut diperkirakan melambat menjadi 5,1% pada 2026, dibandingkan 5,6% pada 2025.

IMF menilai kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor yang menekan prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan tersebut.

“Risiko terhadap prospek ekonomi masih cenderung mengarah ke sisi negatif,” tulis IMF.

Menurut IMF, kebuntuan berkepanjangan dalam konflik di Timur Tengah dapat mempertahankan harga komoditas pada level tinggi sekaligus menguras cadangan minyak. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi.

Industri AI dan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi Jadi Risiko

Selain konflik geopolitik dan kenaikan harga energi, IMF menyoroti potensi koreksi permintaan terhadap teknologi AI sebagai risiko lain bagi pertumbuhan ekonomi global.

Penurunan permintaan AI dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Dampaknya diperkirakan lebih besar di Asia karena kawasan ini memiliki keterkaitan yang luas dengan rantai produksi AI global, termasuk sektor semikonduktor dan teknologi.

Kekhawatiran terhadap prospek keuntungan industri AI juga mulai memengaruhi pasar saham. Pada Kamis (15/10/2026), indeks saham Nikkei Jepang anjlok hampir 5% seiring tekanan terhadap saham-saham teknologi akibat kekhawatiran mengenai profitabilitas sektor AI.

Pada saat yang sama, data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran bahwa suku bunga akan bertahan pada level tinggi atau kembali meningkat.

IMF juga memperingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi global dapat merembet ke pasar obligasi Asia. Tekanan di pasar surat utang negara-negara besar, seperti AS, Inggris, kawasan euro, dan Jepang, berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di Asia.

Situasi tersebut dapat memperburuk kerentanan fiskal yang sudah tinggi di sejumlah negara kawasan.

“Dengan utang publik dan kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi di sebagian besar kawasan, pengetatan kondisi keuangan secara mendadak dapat semakin membebani keuangan publik melalui kenaikan biaya pembayaran utang,” tulis IMF.

IMF Minta Bank Sentral Fokus Menjaga Stabilitas Harga

Di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi, IMF meminta bank sentral di kawasan Asia tetap memprioritaskan stabilitas harga.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan, ekspektasi inflasi jangka panjang di Asia secara umum masih terkendali. Meski demikian, bank sentral perlu tetap waspada terhadap risiko kenaikan inflasi yang lebih persisten.

“Bank sentral harus berkomunikasi secara jelas dan siap mengetatkan kebijakan ketika ekspektasi inflasi kurang terkendali, kerangka kebijakan kurang kredibel, atau inflasi lebih persisten. Untuk mendukung hal ini, independensi bank sentral harus tetap dipertahankan,” kata Srinivasan dalam konferensi pers.

Pertemuan IMF pekan ini juga diwarnai kekhawatiran terhadap peningkatan utang, kenaikan imbal hasil obligasi, serta risiko yang muncul dari pesatnya perkembangan industri AI. Berbagai tantangan tersebut menambah tekanan terhadap pembuat kebijakan yang juga harus menghadapi dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi.

Srinivasan menambahkan, ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja fiskal semakin terbatas karena tingkat utang publik masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, IMF mendorong pemerintah di kawasan Asia menerapkan kebijakan fiskal yang terarah dan bersifat sementara.

Srinivasan juga mengingatkan negara-negara di kawasan agar menghindari pemberian subsidi bahan bakar secara menyeluruh maupun penerapan pengendalian harga secara luas. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi anggaran pemerintah.

IMF menilai koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika negara-negara Asia menghadapi tekanan harga energi, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global.

Rupiah Tertekan, Beban Utang RI Jadi Sorotan

Kamis, 15 Oktober 2026 15:26 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124722/rupiah-tertekan-beban-utang-ri-jadi-sorotan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Kamis (15/10/2026) dengan pelemahan 0,2% ke Rp17.936/US\$, sejurus dengan aksi jual yang cukup masif di pasar saham dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersungkur ke 5.826,75.

Pelemahan di pasar saham sore ini diikuti oleh aksi jual di pasar obligasi dengan adanya kenaikan yield di sebagian besar tenor. Tenor 5 tahun mencatat kenaikan yield paling tajam 5,4 basis poin (bps) jadi 7,07%. Diikuti tenor 8 tahun naik 4,7 bps jadi 7,23% dan tenor acuan 10 tahun terkerek 3,2 bps jadi 7,24%.

Kondisi di pasar surat utang berbalik arah, setelah tadi siang masih defensif pada sebagian tenor pendek-menengah. Aksi jual ini berlawanan dengan penurunan yield yang terjadi pada US Treasury 9,6 bps jadi 5,08%.

Adapun, pasar surat utang global sejalan dengan pergerakan yield US Treasury. Seperti yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun terpangkas 10,3 bps jadi 2,88% dan Korea Selatan terpangkas 5,5 bps jadi 4,19%. Bahkan Prancis turun 12,1 bps jadi 4,75%.

Agaknya pasar surat utang domestik tersengat oleh aksi jual yang cukup luas di pasar saham yang diperberat dengan sentimen domestik usai rilis data utang luar negeri. Utang luar negeri tercatat meningkat jadi US\$459,3 miliar pada Agustus 2026. Angka itu naik US\$24,44 miliar atau sekitar 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan utang luar negeri tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Kenaikan utang luar negeri ini didorong sektor publik, dengan bertambahnya utang luar negeri pemerintah sebesar US\$7,01 miliar, menjadi US\$220,86 miliar.

Sementara, utang luar negeri Bank Indonesia melonjak US\$18,96 miliar menjadi US\$42,85 miliar. Sebaliknya utang luar negeri swasta justru turun US\$1,53 miliar menjadi US\$195,56 miliar.

Di sisi pemerintah, kenaikan utang ini ditopang oleh naiknya kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Posisi SBN internasional tercatat meningkat US\$11,58 miliar atau 13,5% secara tahunan, jadi US\$97,32 miliar. Sebaliknya, SBN domestik yang dimiliki asing justru terpangkas US\$6,79 miliar atau 11,7% menjadi US\$51,16 miliar.

Pelaku pasar mencermati arah fiskal dengan membesarnya utang tersebut. Meskipun defisit masih di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran 40% PDB, tetapi rasio penerimaan negara terhadap pembayaran utang (baik bunga maupun pokok) sudah sebesar 47%.

Bahkan, Kemenkeu mencatat hingga Agustus 2026, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp394,1 triliun. Pada saat yang sama, cadangan devisa terpangkas menjadi US\$146,5 miliar, turun 2,8% dari periode sama tahun lalu US\$150,7 miliar.

Di sisi lain, rasio utang jangka pendek berdasarkan sisa jatuh tempo terhadap cadangan devisa naik dari 55,82% kuartal I-2026 jadi 72,77% di kuartal II-2026. Konsekuensinya, semakin besar penerimaan yang dialokasikan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, semakin terbatas pula fleksibilitas pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi.

Ruang untuk memperbesar belanja produktif, memperkuat perlindungan sosial, atau bahkan memberikan stimulus di saat daya beli melemah pun berpotensi kian menyempit.

Mata Uang Asia

Sentimen domestik memperberat laju penguatan rupiah. Berbanding terbalik dengan sebagian mata uang kawasan yang berhasil defensif.

Yen Jepang, misalnya, berhasil menguat dengan penopang dari pasar surat utang domestiknya. Disusul dolar Singapura, rupee India, baht Thailand, yuan offshore dan ringgit. Sebaliknya, rupiah melemah bersama dolar Taiwan, won Korea Selatan, dan peso Filipina.

Pasar valuta Asia juga terbebani oleh ketidakpastian geopolitik yang mengerek harga minyak ke atas US\$105/barel. Di samping itu, data inflasi AS yang meninggi juga turut menambah sentimen risk-off investor.

Data inflasi AS yang 3,7% secara tahunan pada September membuat ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) naik. Probabilitas kenaikan FFR jadi 4-4,25% dalam rpaat Oktober yang dihimpun Fedwatch meningkat jadi 27,1% hari ini, dari sebelumnya 22,5%.

Utang Luar Negeri RI Sudah Rp8.220 Triliun, Rekor Tertinggi

Kamis, 15 Oktober 2026 13:04 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124703/utang-luar-negeri-ri-sudah-rp8-220-triliun-rekor-tertinggi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) per akhir Agustus. ULN Indonesia naik dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Pada Kamis (15/10/2026), BI mengumumkan ULN Indonesia pada Agustus mencapai US\$ 459,3 miliar. Dengan asumsi kurs US\$ 1 sama dengan Rp 17.898 sebagaimana Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) 14 Oktober, maka ULN Indonesia setara Rp 8.220,55 triliun.

ULN Indonesia pada Agustus naik 5,6% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta," sebut laporan BI.

Posisi ULN pemerintah pada Agustus tercatat US\$ 220,9 miliar atau tumbuh 3,3% yoy. Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). "Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," imbuh laporan BI.

ULN pemerintah dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,4%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," lanjut laporan BI.

Posisi ULN swasta pada Agustus tercatat sebesar US\$ 195,6 miliar atau berkontraksi 0,8% yoy. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,8% yoy dan 0,6% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalan dengan pangsa mencapai 80,5% dari total ULN swasta.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9% pada Agustus dan didominasi oleh ULN jangka panjang. Sejalan dengan itu, hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang.

"Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," demikian laporan BI.

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Kerentanan Fiskal yang Mengintai

Kamis, 15 Oktober 2026 12:24 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124692/di-balik-pelemahan-rupiah-ada-kerentanan-fiskal-yang-mengintai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah kembali melemah hingga nyaris sentuh Rp17.950/US\$ pada sesi perdagangan spot Kamis (15/10/2026).

Pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan aksi jual di pasar saham. Sementara pasar obligasi cenderung lebih tenang dengan perubahan yield yang terbatas.

Tekanan eksternal menjadi salah satu penyebab pelemahan mata uang Garuda siang ini.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin G.Hutapea mengatakan rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dari perkiraan dan meningkat dari periode sebelumnya mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang lebih agresif oleh bank sentral Federal Reserve.

"Selain itu, ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak tetap tinggi di atas US\$105 per barel dan meningkatkan risiko fiskal ke depan," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Akan tetapi, tekanan eksternal itu bukan satu-satunya penyebab lemahnya mata uang Garuda. Guncangan global jadi kian berat kala harus berhadapan dengan kerentanan domestik, mulai dari ketergantungan terhadap aliran modal asing, sensitivitas neraca perdagangan terhadap harga energi, dan terbatasnya fleksibilitas fiskal.

Bahkan, data terbaru juga mengungkap adanya tantangan Indonesia dalam menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bisa dikatakan, tekanan eksternal kali ini tidak dibarengi dengan tersedianya ruang yang cukup bagi Indonesia untuk menyerap guncangan eksternal.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif nilai perdagangan sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai US\$7,25 miliar, menyusut tajam daripada periode sama tahun lalu yang sebesar US\$29,35 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja neraca dagang secara keseluruhan sebenarnya sedang mengalami penurunan.

Nilai perdagangan itu diperoleh dari surplus nonmigas yang sebesar US\$28,54 miliar, namun terpankas oleh defisit migas yang sebesar US\$21,29 miliar.

Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Faisal Rachman memperkirakan kinerja neraca perdagangan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan pada 2026. "Agenda pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan impor yang lebih kuat, sementara permintaan global yang lebih lemah serta ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan terus membebani ekspor," kata Faisal.

Ia menambahkan kondisi itu dapat berkontribusi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) dan dapat memberikan tekanan pada posisi cadangan devisa.

Bank Permata memperhitungkan CAD dapat melebar menjadi 2,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026, dari 0,09% di tahun lalu. Cadangan devisa juga diperkirakan turun menjadi US\$143 hingga 147 miliar pada akhir 2026, jauh dari posisi cadangan devisa tahun lalu yang sebesar US\$156,47 miliar.

Terjegal di Ruang Fiskal

Harga minyak di atas US\$105/barel menjadi risiko utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengeluaran pemerintah untuk subsidi meningkat sebesar Rp27,7 triliun (18,54%) dari Rp149,4 triliun menjadi Rp177,1 triliun hingga 31 Agustus 2026.

Sehingga, kenaikan harga minyak yang tetap tinggi sementara kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menopang daya beli dapat semakin menggerus ruang fiskal pemerintah.

Tak hanya itu, investor juga akan terus membaca kemampuan Indonesia dalam membayar utang. Meskipun defisit masih di bawah 3%, dan rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran 40%, tetapi rasio penerimaan terhadap pembayaran beban, baik bunga maupun cicilan, sudah sebesar 47%.

Bahkan, Kemenkeu mencatat hingga Agustus 2026, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp394,1 triliun. Besarnya pembayaran itu menunjukkan bahwa biaya untuk mempertahankan kewajiban utang jadi komponen penting dalam struktur belanja negara.

Bisa dikatakan hampir separuh penerimaan negara ini digunakan untuk membayar utang. Konsekuensinya, semakin besar penerimaan yang dialokasikan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, semakin terbatas pula fleksibilitas pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi.

Ruang untuk memperbesar belanja produktif, memperkuat perlindungan sosial, atau bahkan memberikan stimulus kala daya beli melemah berpotensi kian menyempit.

Keretanan itu terlihat juga pada data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) terakhir, utang luar negeri Indonesia tercatat naik 4,9% jadi US\$454,76 miliar, setara dengan Rp8.139,2 triliun, menggunakan kurs Rp17.900/US\$.

Memang, nilai tersebut merupakan konversi kurs, bukan berarti utang luar negeri yang harus dibayar dalam satu waktu sebesar Rp8.139,2 triliun. Utang ini juga mencakup kewajiban sektor swasta dan bank sentral.

Akan tetapi, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan nilai kewajiban yang harus dibayar nantinya. Pelaku pasar akan mencermati data SULNI yang seyogianya sudah rilis pukul 10:00 WIB. Namun hingga 12:00 WIB, data itu belum keluar.

Rupiah Nyaris Rp18.000/US\$, BI Ungkap Biang Keladinya

Kamis, 15 Oktober 2026 10:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124676/rupiah-nyaris-rp18-000-us-bi-ungkap-biang-keladinya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah nyaris ke level Rp18.000/US\$ pada hari ini, Kamis (15/10/2026). Melansir data Bloomberg, rupiah spot dibuka terdepresiasi 0,3% ke Rp17.956/US\$.

Menanggapi fluktuasi rupiah, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin G.Hutapea menjelaskan rilis data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan dan meningkat dari periode sebelumnya mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang lebih agresif oleh bank sentral Federal Reserve.

"Selain itu, ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak tetap tinggi di atas US\$105 per barel dan meningkatkan risiko fiskal ke depan," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Indeks dolar AS (DXY) sempat meningkat tajam ke level tertinggi sejak Mei 2025, dan imbal hasil obligasi AS atau yield US Treasury tenor 2 tahun sempat naik 12 basis poin (bps) ke level 4,90%.

"Memburuknya sentimen risk off tersebut mendorong penguatan dolar AS serta tekanan arus keluar dana dari portofolio aset pasar negara berkembang di tengah kenaikan yield obligasi," tuturnya.

Secara umum, Erwin mengklaim pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang kawasan atau regional, dengan pelemahan terbatas secara kuartal berjalan atau quarter-to-date (QTD) sebesar 0,17%. Cadangan devisa tercatat terjaga di level US\$146,3 miliar pada akhir September 2026.

Dia menegaskan Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya.

Intervensi terus dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, bank sentral juga mengelola struktur suku bunga di pasar uang dengan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang. Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif.

Melansir data Bloomberg, rupiah spot dibuka terdepresiasi 0,3% ke Rp17.956/US\$. Bersamaan dengan rupiah, won Korea Selatan, dolar Taiwan, dan peso Filipina melemah. Sementara, pelemahan ringgit Malaysia lebih terbatas. Sebaliknya, yen Jepang berhasil menguat. Diikuti dolar Singapura, yuan China, dan yuan offshore.

Bertemu Investor Global, Suahasil Janji Jaga Disiplin Fiskal RI

Kamis, 15 Oktober 2026 08:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124661/bertemu-investor-global-suahasil-janji-jaga-disiplin-fiskal-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal secara disiplin sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang produktif, di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam Investor Meeting Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dan Danantara yang diselenggarakan Deutsche Bank di Thailand, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia terjaga baik dengan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) sembari tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan melindungi masyarakat.

Selain itu, ia mencatat bahwa indikator aktivitas ekonomi domestik juga tetap terjaga. Seperti inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,3% pada akhir September 2026. Sementara itu, indeks manufaktur Indonesia (PMI) kembali berada pada zona ekspansi, yaitu sebesar 52,4 pada September 2026, dan neraca perdagangan juga kembali mencatatkan surplus.

"Kebijakan fiskal harus mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik, perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan," kata Suahasil mengutip dari keterangan resminya, Kamis (15/10/2026).

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, dengan investasi diproyeksikan tumbuh setidaknya 7%. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mengandalkan sinergi kebijakan fiskal, investasi strategis Danantara, serta partisipasi sektor swasta.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menambahkan pemerintah tidak hanya berupaya menarik investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui tiga hal. Pertama, terus membangun kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Kredibilitas dan kinerja perekonomian serta arah kebijakan juga secara reguler dikomunikasikan kepada market/investor secara terpadu.

"Kedua disiplin dan integritas pasar yang terus kita jaga. Hal ini penting untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid."

Ketiga terus melakukan pendalaman pasar keuangan, terutama dalam hal memperkuat investor institusional maupun ritel domestik, sehingga pasar keuangan tidak saja lebih aktif dan likuid, namun juga lebih resilien dalam menghadapi dinamika keuangan global.

Dorong Pembiayaan Pembangunan Multilateral

Dalam kesempatan terpisah, Bendahara Negara menegaskan pentingnya mobilisasi modal swasta dan percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral.

Hal tersebut disampaikan dalam The 57th Joint Governors Meeting di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026).

Dalam forum tersebut, Suhasil memaparkan tiga prioritas kerja sama pembangunan internasional. Pertama, meningkatkan mobilisasi modal swasta melalui pembiayaan yang terjangkau dan investasi produktif.

Kedua, mempercepat persetujuan dan pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan kerja sama dengan World Bank Group.

Ketiga, menerapkan kebijakan graduation dengan tetap mempertimbangkan kepemilikan negara atas program pembangunan dan kesinambungan dukungan.

"Bagi Indonesia, prioritasnya sudah jelas, pembiayaan yang menarik investasi produktif, implementasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta kemitraan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan negara," jelasnya.

Suhasil juga menekankan di tengah dampak perubahan iklim dan bencana alam, aksi iklim serta kesiapsiagaan menghadapi krisis perlu dirancang secara praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Indonesia sendiri menurutnya turut mendukung implementasi Paris Agreement serta upaya adaptasi yang sejalan dengan ketahanan energi, keterjangkauan, daya saing, dan kesinambungan fiskal.

Hampir 19% Penerimaan Negara untuk Bunga Utang, Ini Risiko bagi Fiskal RI

Kamis, 15 Oktober 2026 19:33 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/hampir-19-penerimaan-negara-untuk-bunga-utang-ini-risiko-bagi-fiskal-ri>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban bunga utang pemerintah yang terus meningkat menjadi tantangan bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. Pada 2027, beban bunga utang dalam APBN mencapai Rp 650,31 triliun atau setara 18,93% dari penerimaan negara.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz menilai, besarnya beban bunga tersebut membuat kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara menjadi semakin penting. Sebab, tekanan fiskal yang berlanjut berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan, terutama jika mempengaruhi persepsi investor terhadap risiko kredit Indonesia.

"Secara umum, penurunan peringkat kredit berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah karena investor akan meminta tambahan imbal hasil untuk mengkompensasi risiko fiskal yang lebih tinggi," ujar Faiz kepada KONTAN, Kamis (15/10/2026).

Meski demikian, Faiz mengingatkan bahwa dampak penurunan peringkat kredit tidak selalu sama besar. Besarnya dampak bergantung pada apakah risiko tersebut sudah diperhitungkan pasar dan apakah perubahan peringkat memengaruhi mandat investasi investor global.

Lembaga pemeringkat S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil pada Juli 2026. Namun, S&P mengidentifikasi pembayaran bunga yang secara konsisten melampaui 15% dari penerimaan pemerintah umum (general government) sebagai salah satu faktor risiko penurunan peringkat.

Faiz menjelaskan, indikator tersebut berbeda dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan APBN. Cakupan general government turut memperhitungkan pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan lembaga terkait pemerintah. Selain itu, batas 15% tersebut bukan ambang otomatis terjadinya penurunan peringkat.

Faiz menjelaskan, penurunan peringkat kredit dapat mendorong kenaikan premi risiko utang pemerintah atau sovereign risk premium. Kondisi ini berpotensi meningkatkan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN), terutama jika terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, kebutuhan penerbitan utang yang besar, dan kondisi likuiditas global yang ketat.

Sebagai ilustrasi, dengan estimasi kebutuhan penerbitan bruto SBN pada 2027 sekitar Rp 1.800 triliun, kenaikan rata-rata biaya penerbitan sebesar 50 basis poin berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp 9 triliun per tahun. Sementara itu, kenaikan sebesar 100 basis poin dapat menambah beban bunga hingga Rp 18 triliun per tahun, setelah seluruh penerbitan beredar selama satu tahun penuh.

Namun, kenaikan yield pasar tidak serta-merta meningkatkan bunga seluruh utang pemerintah yang telah diterbitkan, terutama utang berbunga tetap. Dampaknya berlangsung secara bertahap melalui penerbitan utang baru dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo.

Pada pinjaman luar negeri, dampak kenaikan premi risiko kredit terutama berpotensi dirasakan melalui penerbitan obligasi global (global bond) dan pinjaman komersial. Kenaikan premi risiko dapat memperbesar selisih biaya pinjaman terhadap suku bunga acuan global.

Adapun pinjaman multilateral dan bilateral dengan skema konsesional relatif lebih terlindungi dari tekanan tersebut. Meski begitu, risiko nilai tukar dan suku bunga mengambang tetap perlu diperhatikan.

Di sisi lain, Faiz melihat perbaikan pada sejumlah indikator kemampuan pembayaran utang Indonesia selama 2026, seiring meningkatnya penerimaan negara.

Hingga September 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 25,5% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp 2.341,5 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 24,1% YoY.

Namun, perbaikan rasio beban bunga terhadap penerimaan perlu dicermati karena sebagian pertumbuhan pendapatan dipengaruhi faktor yang belum tentu berulang, termasuk penerimaan negara bukan pajak dari surplus Bank Indonesia serta dinamika restitusi pajak yang memengaruhi penerimaan bersih antarperiode.

Dengan demikian, penurunan rasio beban bunga terhadap penerimaan belum tentu sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural kemampuan fiskal. Jika faktor-faktor sementara tersebut kembali normal, sementara kewajiban pembayaran bunga terus meningkat, rasio tersebut berpotensi kembali memburuk.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Faiz menilai pemerintah tidak cukup hanya menjaga defisit APBN di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga perlu memperkuat penerimaan yang bersifat berulang dan memastikan belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang produktif.

"Belanja berkualitas, terutama yang meningkatkan produktivitas, memperkuat investasi swasta, dan menciptakan aktivitas ekonomi formal, dapat memperluas basis pajak secara berkelanjutan," jelas Faiz.

Menurut dia, pemerintah perlu menilai belanja bukan hanya dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah perlu mengelola komposisi tenor utang, memperluas basis investor domestik, serta menjaga kredibilitas kebijakan fiskal untuk menekan premi risiko.

Faiz mengingatkan risiko terbentuknya lingkaran tekanan fiskal (negative feedback loop), ketika kenaikan biaya bunga mempersempit ruang belanja produktif, pertumbuhan penerimaan tertahan, kebutuhan pembiayaan kembali meningkat, dan investor kembali meminta premi risiko lebih tinggi.

Karena itu, indikator yang semakin penting bagi investor bukan hanya rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio), tetapi juga rasio beban bunga terhadap penerimaan (interest-to-revenue ratio) dan kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan, termasuk melalui perbaikan rasio pajak (tax ratio).

"Kualitas belanja dan kredibilitas fiskal akan menjadi penentu utama apakah biaya utang Indonesia dapat tetap terkendali dalam jangka menengah," tandasnya.

Rasio Bunga Utang RI Tembus 18,93%, Risiko Biaya Utang Makin Mahal

Kamis, 15 Oktober 2026 18:18 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-bunga-utang-ri-tembus-1893-risiko-biaya-utang-makin-mahal>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban bunga utang pemerintah yang terus meningkat menjadi salah satu risiko bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. Jika tren tersebut berlanjut dan memicu penurunan peringkat kredit, maka pemerintah berpotensi menghadapi biaya utang yang lebih mahal, baik melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman luar negeri.

Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi menilai, kenaikan beban bunga utang perlu menjadi alarm serius bagi keberlanjutan fiskal. Pasalnya, dalam APBN 2027, pembayaran bunga utang naik 11,69%, atau mencapai Rp 650,31 triliun atau sekitar 18,93% dari penerimaan negara, atau naik dari 2025 yang mencapai 18,7%.

Sementara itu, beban bunga utang 2026 mencapai 22,4% dari pendapatan negara, atau naik dari 2025 yang mencapai 20,7%.

Besarnya porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara juga berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Menurut saya, kenaikan beban bunga utang perlu menjadi alarm serius bagi keberlanjutan fiskal," ujar Badiul kepada Kontan, Kamis (15/10/2026).

Badiul menambahkan, apabila peringkat kredit Indonesia diturunkan, pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan biaya pembiayaan. Hal ini lantaran investor dapat meminta premi risiko lebih tinggi sebagai kompensasi atas meningkatnya persepsi risiko fiskal Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah harus menawarkan imbal hasil atau yield yang lebih tinggi untuk menarik minat investor dalam pembiayaan utang.

Dampak tersebut terutama dapat dirasakan pada penerbitan SBN. Apabila investor meminta yield lebih tinggi, pemerintah perlu menanggung biaya bunga yang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan baru.

Selain itu, biaya pinjaman luar negeri juga berpotensi meningkat. Namun, besarnya dampak akan bergantung pada mata uang, tenor, serta ketentuan dalam kontrak pembiayaan yang digunakan pemerintah.

Meski demikian, Badiul menegaskan bahwa penurunan peringkat kredit tidak serta-merta membuat seluruh bunga utang pemerintah meningkat secara bersamaan.

Utang berbunga tetap yang telah diterbitkan umumnya tidak langsung mengalami perubahan tingkat bunga. Tekanan biaya pembiayaan lebih berpotensi muncul pada penerbitan utang baru, pembiayaan kembali atau refinancing, serta instrumen utang dengan bunga mengambang.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat S&P Global Ratings pada Juli 2026 masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB/A-2 dengan outlook stabil.

Namun, pembayaran bunga yang secara berkelanjutan melampaui 15% dari penerimaan pemerintah menjadi salah satu risiko penurunan peringkat kredit menurut S&P. Dengan porsi pembayaran bunga utang yang mencapai sekitar 19% dari penerimaan negara pada 2027, tekanan terhadap kapasitas fiskal perlu diwaspadai.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Badiul menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan kualitas belanja negara, mengendalikan kebutuhan utang baru, serta menjaga transparansi dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBN tidak cukup hanya diukur dari kemampuan pemerintah menjaga defisit tetap terkendali.

“Ukuran keberhasilan bukan sekadar defisit terkendali, melainkan kemampuan APBN membiayai layanan publik tanpa terus tertekan biaya utang,” tandasnya.

Inflasi Pangan Tembus 5,03%, Ekspektasi Harga Peritel Naik hingga 2027

Kamis, 15 Oktober 2026 17:37 WIB

Penulis: Muhammad Alief Andri, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-pangan-tembus-503-ekspektasi-harga-peritel-naik-hingga-2027>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inflasi pangan bergejolak atau volatile food di Indonesia meningkat menjadi 5,03% secara tahunan atau year-on-year (YoY) pada September 2026. Angka tersebut melampaui inflasi umum yang tercatat sebesar 3,28% YoY, di tengah risiko gangguan pasokan akibat cuaca dan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga April 2027.

EBC Financial Group menilai, kenaikan harga pangan perlu dicermati apabila mulai mendorong ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Kondisi tersebut berpotensi membuat tekanan inflasi bertahan lebih lama, meskipun kenaikan awalnya dipicu gangguan pasokan.

Analisis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman mengatakan, inflasi umum Indonesia masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI), yakni 1,5% hingga 3,5%. Namun, inflasi pangan yang lebih tinggi menunjukkan tekanan harga masih terkonsentrasi pada kelompok kebutuhan pokok.

“BI sudah menegaskan kebijakannya tidak merespons lonjakan harga yang bersifat sementara. Namun, jika pelaku usaha dan rumah tangga mulai berekspektasi harga akan terus naik, guncangan pangan yang sifatnya sementara bisa berubah menjadi tekanan yang menetap,” ujar Rehman dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026).

Di tengah kenaikan inflasi pangan, inflasi inti justru melandai menjadi 2,84% pada September 2026, dari 2,92% pada bulan sebelumnya. Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung lebih persisten dan tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga komoditas tertentu.

Menurut EBC, perbedaan antara inflasi pangan dan inflasi inti menunjukkan tekanan harga belum meluas ke seluruh perekonomian. Karena itu, perkembangan ekspektasi harga dan kondisi pasokan pangan menjadi faktor penting untuk dicermati ke depan.

Salah satu indikator yang disoroti EBC adalah Indeks Ekspektasi Harga dalam Survei Penjualan Eceran BI. Pada September 2026, indeks untuk Februari 2027 meningkat menjadi 177,9, dari 166,0 pada periode sebelumnya.

Kenaikan indeks tersebut menunjukkan peritel memperkirakan tekanan harga akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Jika perkiraan tersebut berujung pada penyesuaian harga jual, kenaikan harga pangan berpotensi merembet ke kelompok barang lainnya.

Risiko tersebut juga muncul di tengah prakiraan El Nino yang berkepanjangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena tersebut berada pada level sangat kuat dan memperkirakan 66,09% wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah pada dasarian II Oktober 2026.

El Nino diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027. Periode tersebut melampaui horizon Februari 2027 yang tercermin dalam ekspektasi harga peritel. Meski demikian, kesamaan periode tersebut belum membuktikan El Nino sebagai penyebab langsung kenaikan ekspektasi harga. BI sendiri mengaitkan kenaikan harga pangan dengan gangguan cuaca dan peningkatan biaya input.

EBC juga menyoroti hasil kajian Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai krisis biaya hidup. Kajian tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi dapat bertahan di atas tingkat sebelum krisis selama bertahun-tahun setelah kenaikan harga kebutuhan pokok. Rumah tangga berpendapatan rendah juga cenderung menghadapi tekanan lebih besar karena porsi belanja pangan dan energi mereka relatif tinggi.

Namun, EBC menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini belum menunjukkan krisis biaya hidup serupa. Inflasi umum masih berada dalam rentang sasaran BI, inflasi inti melandai, dan ekspektasi inflasi disebut masih terjangkau.

Dari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75% pada 23 September 2026. BI juga menegaskan bahwa lonjakan harga yang bersifat sementara tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengubah arah kebijakan suku bunga.

Meski begitu, EBC menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter dapat menyempit apabila ekspektasi kenaikan harga semakin meluas dan tekanan inflasi bertahan lebih lama.

Perubahan ekspektasi suku bunga dapat memengaruhi pergerakan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah. Karena itu, perkembangan inflasi bulanan, Survei Penjualan Eceran BI, serta data curah hujan dari BMKG menjadi sejumlah indikator yang perlu dicermati.

“Untuk saat ini, kenaikan harga masih terpusat di pangan, dan BI mengaitkannya dengan faktor cuaca serta biaya input yang lebih tinggi. Inflasi inti justru melandai,” kata Rehman.

Ia menambahkan, perkembangan ekspektasi harga peritel selama periode El Nino akan menjadi salah satu penentu apakah kenaikan harga pangan hanya berlangsung sementara atau berkembang menjadi tekanan harga yang lebih panjang.

Utang Luar Negeri Swasta Kembali Kontraksi pada Agustus 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 17:10 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-swasta-kembali-kontraksi-pada-agustus-2026>

KONTAN.CO.ID – JAAKRTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) swasta kembali mengalami kontraksi.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar US\$ 195,6 miliar, atau berkontraksi sebesar 0,8% secara tahunan (yoy).

“Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations),” tutur Denny dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,8% yoy dan 0,6% yoy.

Adapun Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Pengalihan dengan pangsa mencapai 80,5% dari total ULN swasta.

BI Dorong Integrasi Pembiayaan Sosial dan Komersial Syariah Demi Membantu UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 15:36 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-dorong-integrasi-pembiayaan-sosial-dan-komersial-syariah-demi-membantu-umkm>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) membeberkan, integrasi pembiayaan sosial dan komersial syariah berpeluang memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menyampaikan, pemanfaatan instrumen syariah, seperti zakat dan wakaf, bersama pembiayaan komersial dapat mendukung pengembangan usaha, memperluas kesempatan ekonomi, dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Solikin menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah di daerah perlu didukung tiga strategi utama, yaitu penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam menyelaraskan program lintas pemangku kepentingan, pengembangan rantai nilai halal dari hulu hingga hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah.

Untuk memperluas akses pembiayaan, kebutuhan pelaku usaha perlu dipertemukan dengan sumber pembiayaan yang sesuai, baik dari perbankan syariah dan lembaga keuangan komersial maupun lembaga zakat dan wakaf.

Integrasi pembiayaan komersial dan sosial syariah (blended finance) dapat membuka peluang bagi usaha yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan untuk berkembang secara bertahap.

“Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali. Kita memerlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten,” ujar Solikin dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam langkah konkret, Bank Indonesia mendorong pendekatan 3SP, yaitu Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi.

Pendekatan ini dilakukan melalui pengembangan sektor produktif sesuai potensi daerah dan menghubungkan antara kebutuhan usaha dengan sumber pembiayaan yang tepat. Bank Indonesia juga terus meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan dan peluang usaha syariah.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US\$ 220,9 Miliar, Ini Pemicunya

Kamis, 15 Oktober 2026 13:33 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-pemerintah-naik-jadi-us-2209-miliar-ini-pemicunya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada Agustus 2026 tercatat sebesar US\$ 220,9 miliar atau tumbuh sebesar 3,3% secara tahunan (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso membeberkan, perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Denny dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Denny menambahkan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

ULN pemerintah dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (16,2%), untuk Konstruksi (11,4%) serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pemerintah Andalkan Ekonomi Syariah untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Kamis, 15 Oktober 2026 12:17 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-andalkan-ekonomi-syariah-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-6-pada-2027>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkuat pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan industri halal, peningkatan ekspor, pengembangan keuangan syariah, serta perluasan akses pasar internasional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, ekonomi syariah juga diharapkan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam jangka menengah sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

"Jadi ekonomi syariah itu menjadi salah satu andalan bagi kita untuk mencapai pertumbuhan 6% tahun 2027, dan 8% di jangka menengah sebagai bagian dari peningkatan daya saing," ujar Dradjad dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dradjad menyebutkan, rantai nilai halal berkontribusi hampir 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau sekitar Rp 1.524 triliun pada kuartal IV-2025. Sementara itu, ekspor produk halal Indonesia tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US\$ 63,4 miliar.

Potensi pengembangan ekonomi syariah juga didukung oleh besarnya pasar muslim global. Belanja konsumen muslim dunia pada 2029 diproyeksikan mencapai hampir US\$ 3,6 triliun. Adapun aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai US\$ 9,72 triliun.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pemerintah menyiapkan lima strategi pengembangan ekonomi syariah. Strategi itu meliputi penguatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah.

Selain itu, pemerintah berupaya mendorong investasi pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, serta mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi agar kegiatan usaha dapat berkembang lebih cepat.

Peningkatan produktivitas dan ekspor produk bernilai tambah juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Dalam hal ini, industri halal dinilai memiliki ruang untuk memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Jadi Pekerjaan Rumah

Di sektor keuangan, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43%. Namun, tingkat inklusinya baru sebesar 13,24%.

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 748 triliun pada Agustus 2026. Meski menunjukkan besarnya aktivitas pembiayaan, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di level 7,44%.

Dradjad mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama oleh pemangku kepentingan.

"Namun demikian kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI, inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah," kata Dradjad.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan syariah adalah pembukaan rekening syariah dengan saldo awal Rp 50.000 bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4.

Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah Perluas Akses Pasar Ekspor Produk Halal

Selain memperkuat sektor keuangan, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM halal dan memperluas akses pasar internasional melalui kerja sama perdagangan serta pengakuan bersama sertifikasi halal dengan negara mitra.

Dradjad menyebutkan, sebanyak 12 perjanjian perdagangan sedang dalam proses ratifikasi, sedangkan 11 perjanjian lainnya masih dalam tahap perundingan.

Dari jumlah tersebut, enam perjanjian melibatkan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Uni Emirat Arab (UEA) yang perjanjian dagangnya telah berlaku.

Pemerintah juga akan mempercepat perundingan perdagangan internasional dan memperkuat kesepakatan saling pengakuan sertifikasi halal atau mutual recognition agreement (MRA).

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah UMKM dan eksportir produk halal Indonesia memasuki pasar global sekaligus memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Insyallah pemerintah akan mempercepat perundingan dan memperkuat pengakuan sertifikasi, mutual recognition agreement yang halal, agar UMKM dan eksportir bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada di pasar global," ujarnya.

Dradjad menilai, penguatan ekosistem ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor produksi melalui industri halal, pembiayaan dan layanan keuangan syariah, hingga perluasan akses pasar global.

Dengan pengembangan yang terintegrasi, ekonomi syariah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas peluang usaha, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027.

Beri Harga Murah, Kopdes Merah Putih di Boyolali Diserbu Warga

Kamis, 15 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/beri-harga-murah-kopdes-merah-putih-di-boyolali-diserbu-warga/>

BOYOLALI – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, diserbu warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan toko lain. Antusiasme warga terlihat saat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, mengunjungi koperasi tersebut, Kamis (15/10/2026).

Manajer Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan, Dea Hagania Laia mengatakan, koperasi tersebut mulai beroperasi pada 14 September 2026. Dalam waktu sekitar satu bulan, koperasi itu telah melayani kebutuhan masyarakat mulai dari sembako, beras, minyak goreng, gula, hingga gas LPG dan pupuk bersubsidi.

“Berdasarkan pengalaman dan berdialog dengan warga yang sudah membeli di sini, harganya cukup terjangkau, bahkan lebih murah daripada di luar,” kata Dea.

Dia mencontohkan, minyak goreng Minyakita dijual Rp15.700 per liter, sedangkan di luar koperasi harganya bisa mencapai sekitar Rp18.000 hingga Rp20.000. Sementara itu, gas LPG yang di tempat lain dapat dibeli dengan harga sekitar Rp20.000, di Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan dijual Rp16.000.

Selain menyediakan kebutuhan rumah tangga, imbuh Dea, koperasi tersebut juga melayani pembelian pupuk bersubsidi bagi petani. Produk yang tersedia meliputi pupuk Urea, NPK Phonska, dan pupuk organik. Kehadiran layanan itu diharapkan memudahkan petani mendapatkan pupuk, tanpa harus pergi jauh dari desa.

Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan juga mulai memberikan ruang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Saat ini, terdapat lima produk UMKM yang dipasarkan, setelah melalui proses seleksi kualitas.

“Ke depan, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan pelaku UMKM lainnya di Desa Pandeyan,” ungkapnya.

Dari sisi usaha, Dea menyebut omzet koperasi saat ini diperkirakan mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Pengelola berharap kegiatan yang diselenggarakan koperasi dapat semakin mengenalkan keberadaan Kopdes Merah Putih kepada masyarakat, sehingga lebih banyak warga berbelanja di sana.

Antusiasme warga dirasakan Lastri, salah seorang pembeli. Ia mengaku senang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah. Barang yang dibelinya antara lain minyak goreng, beras, mi instan, kecap, sampo, dan sabun.

“Semua ada di sini, lebih murah. Ibu-ibu kalau murah lebih senang,” tutur Lastri.

Hal senada disampaikan Pipit, warga asli Desa Pandeyan, yang datang setelah mendapat informasi jika harga kebutuhan pokok di koperasi lebih terjangkau. Dia mengaku menemukan selisih harga sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000, bergantung pada jenis barang yang dibeli.

Menurut Pipit, harga yang lebih terjangkau membantu masyarakat mengatur pengeluaran rumah tangga, karena beras, minyak goreng, gula, dan gas merupakan kebutuhan sehari-hari.

“Saya berharap ke depan produk yang tersedia semakin lengkap, dan jam operasional koperasi diperpanjang,” harapnya.

Sementara itu, Pemprov Jateng terus memacu percepatan verifikasi dan validasi gerai. Dari 4.230 Kopdes yang diprioritaskan, progres validasi hingga akhir September 2026 telah mencapai 61,67 persen, melampaui target nasional. Selain itu, Pemprov Jateng menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara Kopdes yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan, pengembangan unit bisnis KDKMP wajib mengusung prinsip kearifan lokal, sesuai potensi komoditas unggulan masing-masing daerah.

“Tidak semua KDKMP (Kopdes) harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” tandas Luthfi. (Wk/UI, Diskomdigi Jateng)

Pemprov Jateng Libatkan 123 Perguruan Tinggi Bareng-Bareng Entaskan Kemiskinan

Kamis, 15 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-libatkan-123-perguruan-tinggi-bareng-bareng-entaskan-kemiskinan/>

SALATIGA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi di wilayahnya, untuk bareng-bareng mengentaskan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat, di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Gubernur Luthfi menyatakan telah mengajak perguruan tinggi terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan, melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dari 9,48 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan, salah satunya melalui pelibatan perguruan tinggi. Sedikitnya 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025, dan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi tersebut mencakup KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.

Luthfi menilai, keterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program. Sebab, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah terus menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan, agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin, seusai kegiatan.

Menurutnya, strategi pemberdayaan difokuskan pada pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi. Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027, yang melibatkan UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.

Dalam laporan pelaksanaan Rakornas disebutkan, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa, untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Fauzan mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi, untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.

“Kampus tidak sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Pemkot Pekalongan Perpanjang Perjanjian Kerja 2.314 PPPK Paruh Waktu

Kamis, 15 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-pekalongan-perpanjang-perjanjian-kerja-2-314-pppk-paruh-waktu/>

PEKALONGAN – Status 2.314 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan resmi diperpanjang hingga akhir 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, mengatakan, perpanjangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ribuan orang tersebut mendapat perpanjangan surat keputusan (SK) dan perjanjian kerja. Proses administrasinya telah diselesaikan sebelum masa berlaku dokumen kontrak awal berakhir pada 30 September 2026.

“Seluruh PPPK Paruh Waktu yang memenuhi syarat untuk diperpanjang SK dan perjanjian kerjanya sudah kami selesaikan pada 25 September 2026,” kata Rusmani, Jumat (9/10/2026).

Dijelaskan, dari 2.362 orang PPPK Paruh Waktu yang diangkat pada awal periode, sebanyak 2.314 orang memenuhi persyaratan perpanjangan. Sementara itu, 48 orang lainnya tidak memperoleh perpanjangan karena sejumlah faktor, antara lain memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, serta pertimbangan kepegawaian lainnya.

Rusmani menjelaskan, terdapat tiga pegawai yang tidak diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja, dengan pertimbangan kinerja, kondisi kesehatan, dan ketidakhadiran. Selain itu, terdapat pegawai yang menjalani proses kepegawaian atau hukum, serta pegawai yang memilih mengundurkan diri, termasuk tiga orang yang diterima di Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, penyelesaian administrasi sebelum pergantian masa berlaku dokumen dilakukan untuk mendukung kelancaran penggajian pada Oktober 2026. BKPSDM Kota Pekalongan juga telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, terkait pelaporan jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diperpanjang, serta ketersediaan anggaran penggajian hingga Desember 2026.

“Insyaallah, untuk penggajian masih aman. Kami juga menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan melaporkan data pegawai yang diperpanjang dan ketersediaannya,” pungkasnya.